

MASTER PLAN LUMBUNG PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



KERJASAMA ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Master Plan

Lumbung Pangan

Sumatera Selatan

Tim Penyusun

Robiyanto H Susanto, Andy Mulyana, M. Umar Harun, Chandra Irsan, Zaidan, Rujito Agus Suwignyo, Cecilia Nancy, Sabarudin, Ari Siswanto, Husnah, Dwi Putro Priadi, Munandar, Warsito, Nura Malahayati, Subowo, Affandi, Solichin, Sri Murhartati, Mustopa Marli Batubara, Erfi Raudati, Gigih Tripambudi, Suci Pramudyati, Farid Wajdi, Ibrahim, Zulkifli Dahlan, Nur Ahmadi, Siti Masreah, Bambang Prayitno, Zulfikhar, Aprianus Arief, Hasbi, Bakri, Kiki Yuliati, Tutur Lussetyowati, Aris Munandar, M. Yazid, M. Yamin Alfitri, M. Zulfan

**Fakultas Pertanian
Universitas Sriwijaya**

Kerjasama Dengan

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

2005

KATA PENGANTAR DEKAN FP UNSRI

Buku Master Plan Sumatera Selatan Lumbung Pangan ini menyajikan deskripsi rencana induk pengembangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan yang merupakan hasil dari analisis ilmiah akademis terhadap potensi, situasi dan kondisi aktual sektor pertanian dalam arti luas di Sumatera Selatan, serta ekspektasi dan prediksinya pada masa mendatang. Namun demikian, dalam penyampaiannya digunakan bahasa yang ringkas dan lugas yang mengungkapkan rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah daerah dan para pihak terkait sehingga buku ini dapat dijadikan acuan penyusunan rencana aksi program Sumsel sebagai lumbung pangan tersebut.

Mengingat lumbung pangan yang dimaksud tidak hanya mengenai pangan dalam artian harfiah, melainkan juga pertanian non pangan, maka beberapa rencana program yang disajikan juga meliputi sektor perkebunan dan kehutanan yang hasil produksinya untuk dijual dan bukan untuk dikonsumsi petani dan keluarganya. Rencana-rencana tersebut juga mempertimbangkan kondisi tata ruang kondisi aktual dan prediksi pemanfaatan lahan dan sumberdaya airnya. Hal ini tentu dalam rangka untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan menjalankan prinsip kelestarian lingkungan hidup sehingga petani dan masyarakat secara umum tidak hanya akan memperoleh pendapatan yang layak dan hidup sejahtera, namun juga mewariskan aset hidup tersebut secara berkelanjutan bagi generasi berikutnya.

Dalam penyusunan Master Plan ini Tim Fakultas Pertanian didukung oleh beberapa unsur tenaga ahli dari perguruan tinggi swasta, lembaga penelitian dan staf instansi pemerintah yang relevan dibidangnya. Dengan demikian informasi dan masukan yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan lebih tepat sasaran. Untuk kolaborasi yang baik itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kepercayaannya kepada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya untuk menyusun Master Plan Sumsel Lumbung Pangan. Semoga kerjasama yang baik seperti ini dapat dilanjutkan pada masa mendatang. Akhirnya, kami berharap buku ini dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rancangan rinci dan rencana aksi program Sumsel Lumbung Pangan.

Palembang, Desember 2005
Dekan FP Unsri

H. IMRON ZAHRI

SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Sebagai langkah awal untuk mengekspresikan keseriusan Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Selatan dalam upaya melaksanakan salah satu program unggulan daerah yaitu Sumsel Lumbung Pangan, maka disusunlah Master Plan ini. Terkait dengan itu, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya Buku Master Plan Sumsel Lumbung Pangan dapat diselesaikan atas kerjasama Pemerintah Provinsi dan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

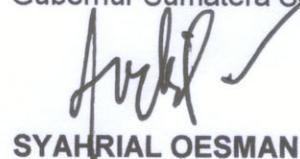
Dengan seluruh kekayaan potensi sumberdaya alam yang ada serta tingkat kemajuan yang sudah dicapai sejauh ini, kita optimis bahwa cita-cita mewujudkan Sumsel sebagai Lumbung Pangan akan terealisasi. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor unggulan daerah dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah Sumatera Selatan. Bahkan komoditi pangan seperti padi dan sumber karbohidrat lainnya, ternak ayam, dan ikan terjadi surplus produksi. Provinsi ini juga merupakan salah satu daerah penghasil utama komoditi perkebunan yang sebagian besar produknya dieksport seperti karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa.

Dalam hal ini perlu saya nyatakan secara eksplisit bahwa yang kami maksud dengan Lumbung Pangan bukan dalam artian harfiah hanya berkaitan dengan ketersediaan atau simpanan pangan bagi masyarakat daerah Sumatera Selatan dan nasional, melainkan juga mencakup hasil produksi pertanian non pangan yang menjadi sumber pendapatan yang memadai masyarakat agar mereka juga dapat mengakses pangan secara berkecukupan. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan petani dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Master Plan ini akan menjadi acuan bagi instansi sektoral dalam penyusunan rencana aksi program Sumsel Lumbung Pangan pada masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan perhargaan dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah dibangun dengan baik dalam kegiatan penyusunan Master Plan Sumsel Lumbung Pangan ini. Semoga di masa mendatang kerjasama seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan demi kemajuan pembangunan daerah.

Palembang, Desember 2005

Gubernur Sumatera Selatan



SYAHRIAL OESMAN

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA SUMSEL

Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan yang telah dicanangkan pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan secara cepat perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara komprehensif. Karena berdasarkan pengertiannya mencakup lebih dari satu subsektor yang berarti pula lebih dari dari satu instansi sektoral pemerintah daerah yang akan menanganiinya, maka penyusunan Master Plan Sumatera Selatan Lumbung Pangan dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunan Master Plan ini dilakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang memang kompeten dan memiliki tenaga ahli dan pihak Fakultas Pertanian sendiri mendapat dukungan dari unsur perguruan tinggi swasta, lembaga penelitian dan staf instansi sektoral yang relevan sehingga diperoleh hasil analisis dan rencana program dan kegiatan yang tepat. Informasi awal sebagai rujukannya juga diberikan dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan yang memuat agenda Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan. Dengan demikian, akan terdapat konsistensi dalam sistem perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yang didukung oleh sektor-sektor lainnya secara serius dalam program-programnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian Unsri dan unsur-unsur pendukungnya yang secara serius telah berhasil menyelesaikan buku Master Lumbung Pangan ini. Selanjutnya diharapkan kepada instansi sektoral terkait agar dapat menjadikan buku ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi dan kegiatan untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan seperti yang kita cita-citakan.

Palembang, Desember 2005
Kepala Bappeda Sumatera Selatan

H. NOVIARMAN KAILANI

I. PENDAHULUAN

1.1. Revitalisasi Pembangunan Pertanian

Secara nasional pemerintah telah menetapkan suatu agenda pembangunan yang penting yaitu Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Agenda tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di pedesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Revitalisasi pertanian dalam arti luas menjadi perhatian utama pembangunan nasional ke depan yang didasarkan pada kinerjanya yang cepat pulih dan membaik melewati masa krisis dalam hal pertumbuhan, produksi, ekspor, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Hal ini semakin membuat kita sadar bahwa pengabaian atau ketidakseriusan terhadap pembangunan sektor pertanian akan berdampak negatif bagi kemajuan perekonomian nasional maupun daerah. Ketersediaan sumberdaya alam dan manusia yang berlimpah sebagai basis pembangunan sektor pertanian perlu terus dioptimalkan pemanfaatannya karena merupakan modal utama untuk menunjukkan keunggulan komparatif perekonomian kita.

Lebih dari itu pada era globalisasi ini, peningkatan keunggulan kompetitif berupa kemampuan yang tinggi dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan jasa dan jaminan pelayanan oleh manajemen yang terpercaya, serta penguasaan sistem dan akses informasi yang akurat menjadi semakin penting. Meskipun diakui masih memerlukan waktu untuk mencapai tingkat keunggulan kompetitif yang mantap, upaya-upaya yang serius harus selalu diprogramkan dan dilaksanakan karena tantangan dan persaingan yang dihadapi akan semakin berat.

Dalam hubungan dengan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan nasional, Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah produsen utama produk pertanian jelas memiliki peran strategis yang mesti terus dijalankan. Hal itu tidak lain untuk memajukan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan kesejahteraan petani dan pelaku ekonomi terkait lainnya. Peran Sumatera Selatan sebagaimana daerah luar Pulau Jawa lainnya semakin penting dalam menghasilkan produk-produk pertanian pangan, selain komoditi perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini menjadi andalan utamanya. Semakin berkurang atau menyempitnya lahan pertanian pangan terutama untuk padi di Pulau Jawa, sementara permintaan beras terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka pemenuhannya harus mengandalkan pada produksi dari luar Pulau Jawa selain dari impor yang semakin mahal harganya. Oleh karena itu dengan potensi lahan dan SDM yang ada, surplus produksi padi yang selama ini dialami Sumatera Selatan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi lebih nyata

terhadap kebutuhan pangan nasional. Termasuk pula di dalamnya peningkatan produksi produk pangan lainnya dari subsektor perikanan, peternakan dan perkebunan akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan pangan tersebut. Selain untuk kepentingan masyarakat konsumen, program dan kegiatan peningkatan produksi mestinya atau harus memberikan dampak kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan pelaku ekonomi lainnya secara adil.

Dengan demikian upaya pemerintah menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja atau pembukaan lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan dan/atau meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih mudah untuk terwujud dengan lebih serius memperhatikan pembangunan pertanian dalam arti luas. Inilah hakekat utama dari program revitalisasi pertanian di mana Sumatera Selatan mempunyai peran penting untuk mensukseskannya melalui pencanangan Program Sumsel Lumbung Pangan.

Penting pula untuk dikemukakan bahwa secara umum masalah yang perlu diatasi dalam upaya pembangunan pertanian untuk menyukseskan program lumbung pangan adalah (1) ketersediaan dan kondisi prasarana transportasi (jalan produksi/desa, kereta api, pelabuhan laut) (2) makin sulitnya petani dan pengusaha pertanian memperoleh kredit pertanian, baik dari skim kredit dan *grace period*-nya, (3) kurang berjalannya kegiatan penyuluhan pertanian, (4) terbatasnya jumlah dan/atau ketersediaan saprodi di lapangan baik yang bersubsidi (pupuk SP36) maupun yang tidak, (5) sudah relatif banyaknya tanaman tahunan yang tua (karet, kelapa sawit), (6) ketidakpastian hak lahan (masalah sertifikasi), (7) mulai banyaknya jaringan irigasi dan rawa yang rusak dan tidak terpelihara, dan (8) masih kurangnya pengembangan industri pengolahan (*rice milling plant, crumb rubber factory, pabrik crude palm oil*) sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai tambah produk yang dapat dinikmati petani dan pengusaha pertanian.

1.2. Definisi Sumsel Lumbung Pangan

Sumatera Selatan Lumbung Pangan mempunyai arti yang luas yaitu Sumatera Selatan sebagai wilayah produsen/pemasok dan penyedia cadangan pangan serta hasil-hasil pertanian lainnya dalam bentuk segar maupun hasil agroindustri, dimana masyarakatnya tidak hanya berkecukupan pangan, melainkan juga mempunyai daya beli dan kemudahan untuk mengakses pangan sehingga mempunyai ketahanan pangan yang mantap dan memperoleh tingkat pendapatan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya. Jelaslah bahwa di dalam pengertian itu tercakup upaya-upaya pengembangan usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat pertanian dalam artian luas agar dapat menyediakan pasokan atau cadangan pangan dan hasil-hasil pertanian

lainnya tersebut, mempunyai daya beli yang cukup dari penghasilan usahanya sehingga mampu mengakses pangan, sekaligus memperoleh tingkat pendapatan yang memadai untuk menunjang kehidupan ekonomi mereka di masa mendatang.

Sehubungan dengan itu, **Program Sumsel Lumbung Pangan** dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/atau mengentaskan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat Sumatera Selatan.

Keberhasilan berbagai usaha di sektor pertanian melewati masa krisis ekonomi dan moneter tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada periode sebelumnya yang memfokuskan pada upaya mengatasi dampak krisis melalui penerapan strategi utama pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Sistem agribisnis merupakan kesatuan atau totalitas kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem hulu berupa kegiatan ekonomi *input* (masukan) produksi, informasi dan teknologi; subsitem usahatani berupa kegiatan produksi pertanian primer tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan; subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang berupa dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis. Namun demikian sistem agribisnis tidak akan berkembang lancar apabila usaha-usaha agribisnis tidak bekerja aktif, karena hakekatnya para pengusaha yang merancang, merekayasa, dan melakukan proses agribisnis itu sendiri mulai dari proses produksi hingga proses pemasaran.

Oleh sebab itu pada masa mendatang sistem dan usaha agribisnis yang telah diimplementasikan dengan baik perlu lebih dimantapkan dan dikembangkan dengan tetap dalam koridor empat karakteristiknya yaitu (1) berdaya saing, (2) berkerakyatan, (3) berkelanjutan, dan (4) desentralistik. Pemantapan sistem agribisnis mengandung arti pemantapan keterkaitan atau sinergisme, kerjasama, dan koordinasi antar subsistem agribisnis untuk lebih meningkatkan kinerja sistem. Pemantapan usaha agribisnis mengandung arti lebih dikembangkannya usaha rumah tangga bidang pertanian yang berupa usahatani keluarga, industri rumah tangga, koperasi, usaha kelompok, usaha kecil dan menengah serta usaha besar yang bergerak pada subsistem agribisnis hulu hingga hilir. Pemantapan dan pengembangan usaha agribisnis juga bermakna sebagai peningkatan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha

secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar hingga dapat memainkan peran yang dominan dalam perekonomian daerah dan nasional.

Perlu juga dikemukakan bahwa upaya untuk menaikkan daya saing komoditi atau produk pertanian yang secara ekspresif akan diperoleh dari kenaikan produksi dan harga per unit produk dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut.

- a. Peningkatan efisiensi melalui penurunan biaya-biaya
- b. Peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi
- c. Peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi yang terintegrasi.
- d. Peningkatan harga melalui peningkatan mutu, pemberdayaan organisasi dan restrukturisasi sistem pemasaran.

Agenda mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan kalau dikaitkan dengan agenda revitalisasi pertanian dan pedesaan secara nasional akan sangat relevan apabila diaplikasikan dengan pendekatan pengembangan *Agropolitan* atau kota pertanian dan *Kawasan Agropolitan*. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan daerah-daerah sentra produksi pertanian menjadi suatu kawasan kota pertanian yang berisikan pusat kota pertanian dengan fasilitas sarana prasanan perkotaan termasuk pusat agribisnis hulu, hilir dan penunjang untuk melayani kawasan sentra produksi yang menjadi *hinterland*-nya. Dengan demikian akan tumbuh kota-kota baru dengan kegiatan ekonomi pertanian yang diharapkan akan dapat membuka lapangan dan meyerap tenaga kerja baru sehingga dapat mencegah terjadinya arus urbanisasi. Selain itu juga pemerataan pembangunan wilayah juga akan terjadi dengan penumbuhan kota-kota berbasis pertanian yang berkembang maju dari waktu ke waktu.

Adanya perubahan dari sisi permintaan dari *permintaan terhadap komoditi* menjadi *permintaan terhadap produk* menuntut produk dengan karakteristik kualitas yang tinggi, terjamin kontinyuitasnya, seragam ukurannya, ramah lingkungan, dan tepat penyampaiannya secara tepat waktu. Kemampuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang sesuai dengan keinginan konsumen merupakan salah satu sumber kekuatan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini sektor pertanian masih relatif lemah mengingat usahanya yang umumnya kecil dan lokasinya terpencar-pencar sehingga merupakan tantangan yang harus diatasi. Agroindustri sebagai paradigma dalam strategi industrialisasi kita ke depan adalah kegiatan industri yang mengolah komoditas pertanian, baik pangan maupun non-pangan menjadi produk olahan hingga perdagangan dan distribusinya. Implementasinya memerlukan teknologi pertanian terkait, baik yang bersifat padat karya, semi padat karya atau semi padat modal dan padat modal.

Potensi Sumatera Selatan dibidang pertanian dalam arti luas masih sangat terbuka untuk ditingkatkan baik melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan peningkatan efisiensi dan kualitas hasil panen, karena didukung oleh sumberdaya lahan dan air yang memadai. Upaya perwujudan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan perlu disusun dalam suatu strategi jangka panjang. Berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha lainnya yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan tanaman industri perlu mendapat prioritas untuk diperhatikan dalam setiap aktivitas pembangunan kabupaten dan kota dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam jangka menengah Pemerintah Sumatera Selatan dalam agenda Lumbung Pangan telah menetapkan upaya mencapai target produksi beberapa komoditas penting diantaranya beras, jagung, kopi, karet dan lain-lain seperti terter pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jenis komoditi yang diunggulkan dengan target produksi per tahun yang akan dicapai pada tahun 2009.

No	Komoditi	Target yang akan dicapai
1	Beras	> 2 Juta Ton
2	Jagung	200 Ribu Ton
3	Karet	800 Ribu Ton
4	CPO	1,8 Juta Ton
5	Kopi	150 Ribu Ton
6	Kopra	70 Ribu Ton
7	Sapi	623.740 Ekor
8	Udang	35 Ribu Ton
9	Ikan Budidaya	28 Ribu Ton
10	Kayu Pulp	10,3 Juta M ³

Sumber: Oesman, 2005. Bahan Paparan Gubernur Dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia (11 Juli 2005)

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan citat-citanya menjadi lumbung pangan tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak. Hal itu dapat diwujudkan dengan menyusun master plan yang melibatkan tenaga ahli dan *stakeholder* yang terkait dengan aktivitas pembangunan secara terpadu.

1.3. Kondisi dan Proyeksi Ketersediaan dan Konsumsi Pangan di Sumatera Selatan

Meskipun lumbung pangan mempunyai arti yang luas seperti telah dikemukakan di atas, tetap saja aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu sasarannya akan berkaitan dengan kecukupan pangan mereka. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menguraikan bagaimana kondisi ketersediaan dan konsumsi pangan, serta proyeksinya ke depan sehingga dapat ditentukan strategi, kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Ketersediaan dan konsumsi pangan merupakan sub-sistem ketahanan pangan pada suatu wilayah. Ketersediaan pangan memfasilitasi pasokan pangan yang stabil dan merata ke seluruh wilayah; sedangkan sub-sistem konsumsi pangan memungkinkan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga.

Ketersediaan pangan terkait dengan usaha produksi pangan, distribusi dan perdagangan termasuk penyelenggaraan cadangan, ekspor dan impor. Akses penduduk terhadap pangan terkait dengan kemampuan produksi pangan di tingkat rumah tangga, kesempatan kerja dan pendapatan keluarga. Dalam kaitan ini, pangan bukan hanya beras atau komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan, baik produk primer maupun turunannya. Dengan demikian pangan tidak hanya dihasilkan oleh pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, tetapi juga oleh industri pengolahan pangan. Selanjutnya, pangan yang cukup tidak hanya dalam jumlah tetapi juga keragamannya, sebagai sumber asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral); untuk pertumbuhan, kesehatan, daya tahan fisik, kecerdasan dan produktivitas manusia.

1.3.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan wilayah Sumatera Selatan disamping berasal dari produksi yang dihasilkan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, juga berasal dari impor. Ketersediaan pangan Sumatera Selatan pada tahun 2004 sebagai hasil dari komoditas yang diproduksi dalam volume yang cukup besar adalah dari kelompok pangan padi-padian (beras), pangan hewani (daging, ayam, dan ikan) dan buah (pisang, jeruk, nenas, rambutan, cempedak, duku, mangga dan durian).

Ketersediaan pangan Sumatera Selatan yang dinyatakan dalam energi dan protein per orang per hari tahun 2004 (Tabel 1.2) menunjukkan bahwa ketersediaan tersebut berada di atas standar ketersediaan yang dianjurkan untuk energi sebesar 2.200 kkal dan 57 gram untuk protein. Energi yang tersedia untuk dikonsumsi sebesar 100,55 persen dari standar ketersediaan dimana komposisi penyediaan energi pangan terbesar berasal dari kelompok padi-padian yaitu 59,45 persen, diikuti minyak dan lemak 10,71 persen.

Ketersediaan protein dari kelompok padi-padian masih menunjukkan proporsi yang tinggi, yaitu 53,09 persen dimana komoditas beras memberi kontribusi sebesar 49,83 persen. Sedangkan protein hewani merupakan penyumbang terbesar kedua setelah beras, yaitu 26,01 persen. Penyediaan pangan hewani yaitu 15,85 gram/kapita/hari belum memenuhi anjuran ketersediaan protein pangan hewani sebesar 18 gram/kapita/hari yang

komposisinya terdiri dari 11 gram protein ikan dan 7 gram protein ternak. Pada tahun 2004 ketersediaan protein ternak Sumatera Selatan baru tercapai 58,57 persen (4,10 gram) dan protein ikan tercapai 106,82 persen (11,75 gram) dari angka yang dianjurkan.

Tabel 1.2. Ketersediaan Pangan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Kelompok Pangan	Kg/kap/Tahun	g/kap/hari	Energi		Protein	
				kkal/kap/hari	%	g/kap/hari	%
1.	Padi-padian	133,23	364,98	1.315	59,45	32,35	53,09
2.	Umbi-umbian	35,66	97,69	131	5,92	0,86	1,41
3.	Pangan Hewani	40,34	110,55	123	5,56	15,85	26,01
4.	Minyak & Lemak	9,68	26,54	237	10,71	0,08	0,13
5.	Buah/Biji berminyak	7,24	19,85	40	1,81	1,68	2,76
6.	Kacang-kacangan	2,08	5,72	23	1,04	0,43	0,71
7.	Gula	9,79	26,81	98	4,43	0,00	0,00
8.	Sayur & Buah	82,26	225,38	82	3,71	1,57	2,58
9.	Minuman & Bumbu	17,09	47,03	163	7,37	8,11	13,31
Total				2.212	100,00	60,93	100,00

Sumber : NBM Sumsel Tahun 2004

Tabel 1.3. Ketersediaan Pangan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2004 dan Pencapaiannya terhadap PPH

No.	Kelompok Pangan	Aktual			Standar			Bobot
		Energi	% AKG	Skor PPH	Energi	% AKG	Skor PPH	
1.	Padi-padian	1.315	59,8	25,0	1.100	50,0	25,0	0,5
2.	Umbi-umbian	131	6,0	2,5	132	6,0	2,5	0,5
3.	Pangan Hewani	123	5,6	11,2	264	12,0	24,0	2,0
4.	Minyak & Lemak	237	10,8	5,0	220	10,0	5,0	0,5
5.	Buah/Biji berminyak	40	1,8	0,9	66	3,0	1,0	0,5
6.	Kacang-kacangan	23	1,0	2,1	110	5,0	10,0	2,0
7.	Gula	98	4,5	2,2	110	5,0	2,5	0,5
8.	Sayur & Buah	82	3,7	18,6	132	6,0	30,0	5,0
9.	Minuman & Bumbu	163	7,4	0,0	66	3,0	0,0	0,0
Total		2.212	100,6	67,5	2.200		100,0	

Sumber : Diolah dari NBM Sumsel Tahun 2004

Penilaian ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, keragaman, dan keseimbangannya antar kelompok pangan dapat diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH untuk ketersediaan pangan penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 adalah 67,5 (Tabel 1.3). Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi ketersediaan pangan di Sumatera Selatan belum seimbang dimana keadaan ini ditunjukkan dengan kontribusi kelompok pangan padi-padian dan kelompok pangan minuman dan bumbu terhadap energi telah melampaui norma PPH, energi dari kelompok pangan minyak dan lemak dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH, dan energi dari kelompok pangan lainnya berada di bawah norma PPH.

1.3.2. Konsumsi Pangan

Gambaran konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 (Tabel 1.4) menunjukkan bahwa konsumsi energi sebesar 1.978 kkal/kapita/hari (98,90 persen dari tingkat kecukupan energi 2.000 kkal/kapita/hari) dan konsumsi protein sebesar 43,27 gram/kapita/hari (83,21 persen dari tingkat kecukupan protein 52 gram/kapita/hari).

Tabel 1.4. Konsumsi Pangan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Kelompok Pangan	Kg/kap/Tahun	g/kap/hari	Energi		Protein	
				kkal/kap/hari	%	g/kap/hari	%
1.	Padi-padian	121,75	333,55	1.226	61,98	23,20	53,62
2.	Umbi-umbian	21,40	58,64	80	4,04	0,72	1,66
3.	Pangan Hewani	31,91	87,41	125	6,32	11,26	26,02
4.	Minyak & Lemak	8,71	23,85	211	10,67	0,11	0,25
5.	Buah/Biji berminyak	2,49	6,82	36	1,82	0,29	0,67
6.	Kacang-kacangan	7,16	19,62	54	2,73	5,57	12,87
7.	Gula	12,40	33,97	124	6,27	0,00	0,00
8.	Sayur & Buah	81,63	223,63	83	4,20	2,12	4,90
9.	Minuman & Bumbu	12,61	34,54	39	1,97	0,00	0,00
Total				1.978	100,00	43,27	100,00

Sumber : Susenas Sumsel Tahun 2004

Sumber energi yang terbesar dalam konsumsi penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 adalah dari kelompok pangan padi-padian (61,98 persen) dimana 55,36 persen berasal dari komoditas beras, selanjutnya dari minyak dan lemak (10,67 persen). Demikian pula, beras juga masih merupakan sumber protein terbesar dalam pola konsumsi penduduk

Sumatera Selatan (49,81 persen), selanjutnya pangan hewani (26,02 persen) dan kacang-kacangan (12,87 persen). Khusus untuk protein hewani, kontribusi protein dari komoditi ikan sebesar 60,83 persen dimana nilai ini berada di bawah komposisi yang ideal yaitu 65 persen.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa komposisi konsumsi protein di wilayah ini masih didominasi oleh protein nabati yaitu sebesar 73,98 persen, sedangkan komposisi yang ideal adalah 64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata konsumsi pangan per kapita masih belum mencapai tingkat yang memadai untuk tumbuh, sehat dan produktif, oleh karenanya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masih lemah.

Tabel 1.5. Skor PPH Konsumsi Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2004

No	Kelompok Pangan	Aktual			Standar			Bobot
		Energi	% AKG	Skor PPH	Energi	% AKG	Skor PPH	
1.	Padi-padian	1.226	61,3	25,0	1.000	50,0	25,0	0,5
2.	Umbi-umbian	80	4,0	2,0	120	6,0	2,5	0,5
3.	Pangan Hewani	125	6,2	12,4	240	12,0	24,0	2,0
4.	Minyak & Lemak	211	10,5	5,0	200	10,0	5,0	0,5
5.	Buah/Biji berminyak	36	1,8	0,9	60	3,0	1,0	0,5
6.	Kacang-kacangan	54	2,7	5,4	100	5,0	10,0	2,0
7.	Gula	124	6,2	2,5	100	5,0	2,5	0,5
8.	Sayur & Buah	83	4,2	20,8	120	6,0	30,0	5,0
9.	Minuman & Bumbu	39	2,0	0,0	60	3,0	0,0	0,0
Total		1.978	98,9	74,0	2.000		100,0	1.978

Sumber : Diolah dari Susenas Sumsel 2004

Pencapaian upaya diversifikasi konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 dari segi kualitas baru mencapai skor mutu PPH sebesar 74,0 (Tabel1.5). Dari segi komposisi kelompok komoditas yang dikonsumsi, terlihat sumbangannya energi masing-masing kelompok pangan belum seimbang dibandingkan dengan norma PPH. Dari segi komposisi kelompok komoditas yang dikonsumsi, terlihat sumbangannya energi dari padi-padian telah melampaui norma PPH yaitu mencapai 122,6 persen. Sementara itu kelompok komoditas gula mencapai 124,0 persen dan kelompok minyak dan lemak mencapai 105,0 persen terhadap norma PPH. Dilain pihak kelompok pangan lainnya tingkat pencapaianannya masih jauh di bawah angka PPH.

Dari data di atas jelas terlihat bahwa upaya perbaikan konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan perlu ditekankan pada peningkatan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Disisi lain konsumsi minyak dan lemak serta gula perlu dipertahankan dan diwaspadai jangan sampai meningkat.

1.3.3. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Menurut PPH

Hasil analisa terhadap data Neraca Bahan Makanan Sumatera Selatan tahun 2004 (Tabel 1.3) yang berisi informasi tentang ketersediaan pangan secara makro menunjukkan bahwa kuantitas ketersediaan pangan penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 sudah berada di atas total ketersediaan energi menurut norma PPH sebesar 2.200 kkal per kapita per hari. Dengan menggunakan skor mutu norma PPH sebesar 100 sebagai acuan untuk menilai kualitas pangan yang tersedia, dapat disebutkan bahwa pangan yang tersedia di Sumatera Selatan tahun 2004 memiliki kualitas yang rendah. Rendahnya kualitas pangan yang tersedia karena relatif rendahnya tingkat keanekaragaman pangan yang tersedia.

Tabel 1.6. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2003 Menurut Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Pangan*		Konsumsi Pangan**	
		g/kap/hr	kkal/kap/hr	g/kap/hr	kkal/kap/hr
1.	Padi-padian	364,98	1.315	333,50	1.226
2.	Umbi-umbian	97,69	131	58,64	80
3.	Pangan Hewani	110,55	123	87,41	125
4.	Minyak & Lemak	26,54	237	23,85	211
5.	Buah/Biji berminyak	19,85	40	6,82	36
6.	Kacang-kacangan	5,72	23	19,62	54
7.	Gula	26,81	98	33,97	124
8.	Sayur & Buah	225,38	82	223,63	83
9.	Minuman & Bumbu	47,03	163	34,54	39
Total		2.212		1.978	
Skor PPH		67,5		74,0	

Keterangan: * NBM Sumsel Tahun 2004

**Susenas Sumsel Tahun 2004

Untuk memperbaiki kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan ketersediaan energi antar berbagai kelompok pangan melalui

penambahan tingkat ketersediaan untuk seluruh kelompok pangan karena sebagian besar komposisi ketersediaan pangan di Sumatera Selatan masih di bawah norma PPH terutama untuk kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah (Tabel 1.6). Lebih lanjut, peningkatan kuantitas pangan yang tersedia di wilayah Sumatera Selatan juga harus dilakukan melalui peningkatan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk terutama untuk kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah.

Hasil analisis Susenas Sumatera Selatan tahun 2004 yang berisi informasi tentang konsumsi pangan di tingkat rumah tangga (Tabel 1.6) menunjukkan bahwa kuantitas pangan yang dikonsumsi, yang diukur berdasarkan indikator total konsumsi energi, masih di bawah total konsumsi energi menurut norma PPH sebesar 2.000 kkal per kapita per hari. Demikian pula, dalam periode waktu yang sama kualitas pangan yang dikonsumsi, yang diukur berdasarkan indikator mutu PPH sebesar 100, mempunyai kualitas yang rendah. Rendahnya kualitas pangan yang dikonsumsi karena relatif rendahnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi.

Dari fenomena ini yang menarik dikemukakan bahwa ada indikasi tingkat keanekaragaman pangan yang dikonsumsi berkorelasi dengan tingkat keanekaragaman pangan yang tersedia. Akibatnya, tingkat keanekaragaman pangan yang tersedia relatif rendah, maka tingkat keanekaragaman pangan yang dikonsumsi juga relatif rendah.

Walaupun telah diketahui bahwa arah perubahan kuantitas maupun kualitas pangan yang dikonsumsi sejalan dengan perubahan kuantitas maupun kualitas pangan yang tersedia, namun menyandingkan kuantitas pangan yang dikonsumsi berdasarkan data Susenas dengan kuantitas pangan yang tersedia berdasarkan data NBM dapat dikemukakan bahwa kuantitas pangan yang dikonsumsi penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 (1.978 kkal/kapita/hari) masih jauh lebih rendah dari pada kuantitas pangan yang tersedia (2.212 kkal/kapita/hari). Terjadinya fenomena tersebut kemungkinan besar karena distribusi pangan yang belum merata, kurangnya pengetahuan gizi dan pangan, serta faktor sosial ekonomi dan budaya.

1.3.4. Proyeksi Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Berdasarkan keadaan ketersediaan dan konsumsi penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 di atas, maka pembangunan pangan dan perbaikan gizi perlu dilakukan melalui kegiatan : Pertama, perbaikan kuantitas dan kualitas pangan yang tersedia dengan meningkatkan dan menyeimbangkan ketersediaan energi pada kelompok pangan khususnya kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah. Kedua, perbaikan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan melalui perbaikan komposisi pangan yang dikonsumsi.

Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan di atas dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Pada Tabel 1.7 disajikan proyeksi ketersediaan (khusus untuk konsumsi) dimana skor mutu pangan norma PPH untuk ketersediaan sebesar 100 akan tercapai pada tahun 2020. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan perlu diketahui kemampuan produksi pangan Sumatera Selatan.

Tabel 1.7. Proyeksi Ketersediaan Pangan Penduduk Sumatera Selatan (kg/kapita/tahun)
Tahun 2005-2010 hingga 2020

No	Kelompok Pangan	Tahun						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015
1.	Padi-padian	361,25	357,52	353,79	350,06	346,34	342,60	323,95
2.	Umbi-umbian	97,79	97,83	97,88	97,93	97,97	98,02	98,25
3.	Pangan Hewani	121,26	129,36	137,47	145,58	153,68	161,79	202,32
4.	Minyak & Lemak	26,76	26,64	26,52	26,40	26,28	26,16	25,55
5.	Buah/Biji berminyak	20,66	21,46	22,27	23,08	23,88	24,69	28,72
6.	Kacang-kacangan	7,07	8,42	9,78	11,13	12,48	13,83	20,60
7.	Gula	27,02	27,22	27,43	27,63	27,84	28,04	29,07
8.	Sayur & Buah	226,49	227,54	235,60	243,66	251,71	259,77	300,06
9.	Minuman & Bumbu	44,70	42,98	41,25	39,52	37,80	36,07	27,43
Skor PPH		69,5	71,6	73,6	75,6	77,7	79,7	89,8
		100,0						

Tabel 1.8. Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Sumatera Selatan (g/kapita/hari)
Tahun 2005-2010, 2015 dan 2020

No .	Kelompok Pangan	Tahun						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015
1.	Padi-padian	331,40	329,26	327,11	324,97	322,81	320,67	309,95
2.	Umbi-umbian	59,92	62,29	64,66	67,03	69,40	71,77	83,63
3.	Pangan Hewani	98,54	99,66	105,79	111,91	118,04	124,17	154,80
4.	Minyak & Lemak	23,92	23,98	24,05	24,11	24,18	24,24	24,57
5.	Buah/Biji berminyak	7,17	7,52	7,87	8,22	8,57	8,92	10,67
6.	Kacang-kacangan	20,72	21,98	23,24	24,51	25,77	27,03	33,33
7.	Gula	33,73	33,48	33,24	33,00	32,75	32,51	31,30
8.	Sayur & Buah	231,85	240,07	248,30	256,52	264,74	272,96	314,07
9.	Minuman & Bumbu	36,00	37,47	38,93	40,40	41,86	43,32	50,64
Skor PPH		75,60	77,30	78,90	80,50	82,10	83,80	87,00
		100,00						

Dalam upaya memperbaiki kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan perlu ada acuan berupa target skor mutu pangan yang hendak dicapai.

Dengan menggunakan skor mutu pangan tahun 2004 sebesar 74,0 sebagai tahun dasar maka skor mutu pangan norma PPH sebesar 100 akan tercapai pada tahun 2020 dimana peningkatan skor mutu pangan berjalan linier (Tabel 1.8).

Berdasarkan sasaran skor mutu pangan norma PPH untuk ketersediaan dan konsumsi penduduk Sumatera Selatan tahun 2005-2010, 2015 dan 2020 maka target dari ketersediaan dan konsumsi pangan dapat dilihat pada Tabel 1.9 dan 1.10.

Tabel 1.9. Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Sumatera Selatan (kg/kapita/tahun)
Tahun 2005-2010 hingga 2020

No .	Kelompok Pangan	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020
1.	Padi-padian	131,9	130,5	129,1	127,8	126,4	125,0	118,2	111,4
2.	Umbi-umbian	35,7	35,7	35,7	35,7	35,8	35,8	35,9	35,9
3.	Pangan Hewani	44,3	47,2	50,2	53,1	56,1	59,1	73,8	88,6
4.	Minyak & Lemak	9,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,4	9,2	9,0
5.	Buah/Biji berminyak	7,4	7,7	7,9	8,2	8,5	8,8	10,3	11,7
6.	Kacang-kacangan	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,0	7,5	10,0
7.	Gula	9,9	9,9	10,0	10,1	10,2	10,2	10,6	11,0
8.	Sayur & Buah	80,1	83,1	86,0	88,9	91,9	94,8	109,5	124,2
9.	Minuman & Bumbu	16,0	16,0	15,0	14,0	14,0	13,0	10,0	7,0

Tabel 1.10. Target Konsumsi Pangan Penduduk Sumatera Selatan (kg/kapita/tahun)
Tahun 2005-2010, 2015 dan 2020

No .	Kelompok Pangan	Tahun							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020
1.	Padi-padian	121,0	120,2	119,4	118,6	117,8	117,0	113,1	109,2
2.	Umbi-umbian	21,9	22,7	23,6	24,5	25,3	26,2	30,5	34,9
3.	Pangan Hewani	34,1	36,4	38,6	40,8	43,1	45,3	56,5	67,7
4.	Minyak & Lemak	8,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7	8,9	9,0
5.	Buah/Biji berminyak	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,9	4,5
6.	Kacang-kacangan	7,6	8,0	8,5	8,9	9,4	9,9	12,2	14,5
7.	Gula	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	11,4	11,0
8.	Sayur & Buah	84,6	87,6	90,6	93,6	96,6	99,6	114,6	129,6
9.	Minuman & Bumbu	13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,0	18,0	21,0

Mengingat potensi Sumatera Selatan dibidang pertanian sangat baik maka peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi beberapa komoditas pangan yang diunggulkan seperti padi-padian (padi dan jagung),

pangan hewani (perikanan dan peternakan), kacang-kacangan (kedelai dan kacang tanah), buah-buahan unggulan (pisang, nenas, jeruk, duku, durian), dan sayur (cabe, kubis, sawi, kacang panjang) dapat mempercepat waktu pencapaian skor mutu pangan norma PPH sebesar 100 sebelum tahun 2020.

Terkait dengan ini, Program Sumsel Lumbung Pangan dimana salah satu tujuannya adalah memantapkan ketahanan pangan penduduk Sumatera Selatan melalui peningkatan produksi komoditi unggulan dan pencapaian skor mutu pangan norma PPH untuk ketersediaan sebesar 85 pada tahun 2009 sangat realistik untuk dilaksanakan.

Kemampuan produksi pangan unggulan pada Program Sumsel Lumbung Pangan akan mampu mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2009.

1.3.5. Implikasi terhadap Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan

- a. Arah pengembangan atau peningkatan produksi komoditas pangan unggulan dalam program Sumatera Selatan Lumbung Pangan khusus untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, sayur dan buah), peternakan (sapi dan ayam) dan perikanan (udang, ikan mas dan nila) adalah untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan dan konsumsi domestik pada lokalita yang lebih kecil. Untuk komoditas perkebunan (karet, sawit, kopi, kelapa) dan kehutanan (kayu pulp) sebagai andalan ekspor wilayah, surplus yang dicapai selama ini perlu terus ditingkatkan untuk perolehan devisa yang lebih besar.
- b. Berdasarkan pada kinerja ketersediaan dan konsumsi normatif, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian segera adalah perbaikan kualitas ketersediaan pangan maupun kualitas konsumsi pangan penduduk. Bertitik tolak dari indikasi bahwa keanekaragaman pangan yang dikonsumsi berkorelasi dengan keanekaragaman pangan yang tersedia, maka untuk memperbaiki kualitas konsumsi penduduk yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki kualitas ketersediaan pangan. Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan agribisnis dalam artian upaya tersebut secara garis besar harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 1) penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi (seperti yang diutarakan pada poin a) dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen; 2) pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan mencakup wilayah pedesaan dan daerah terpencil; dan 3) penciptaan mekanisme pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau

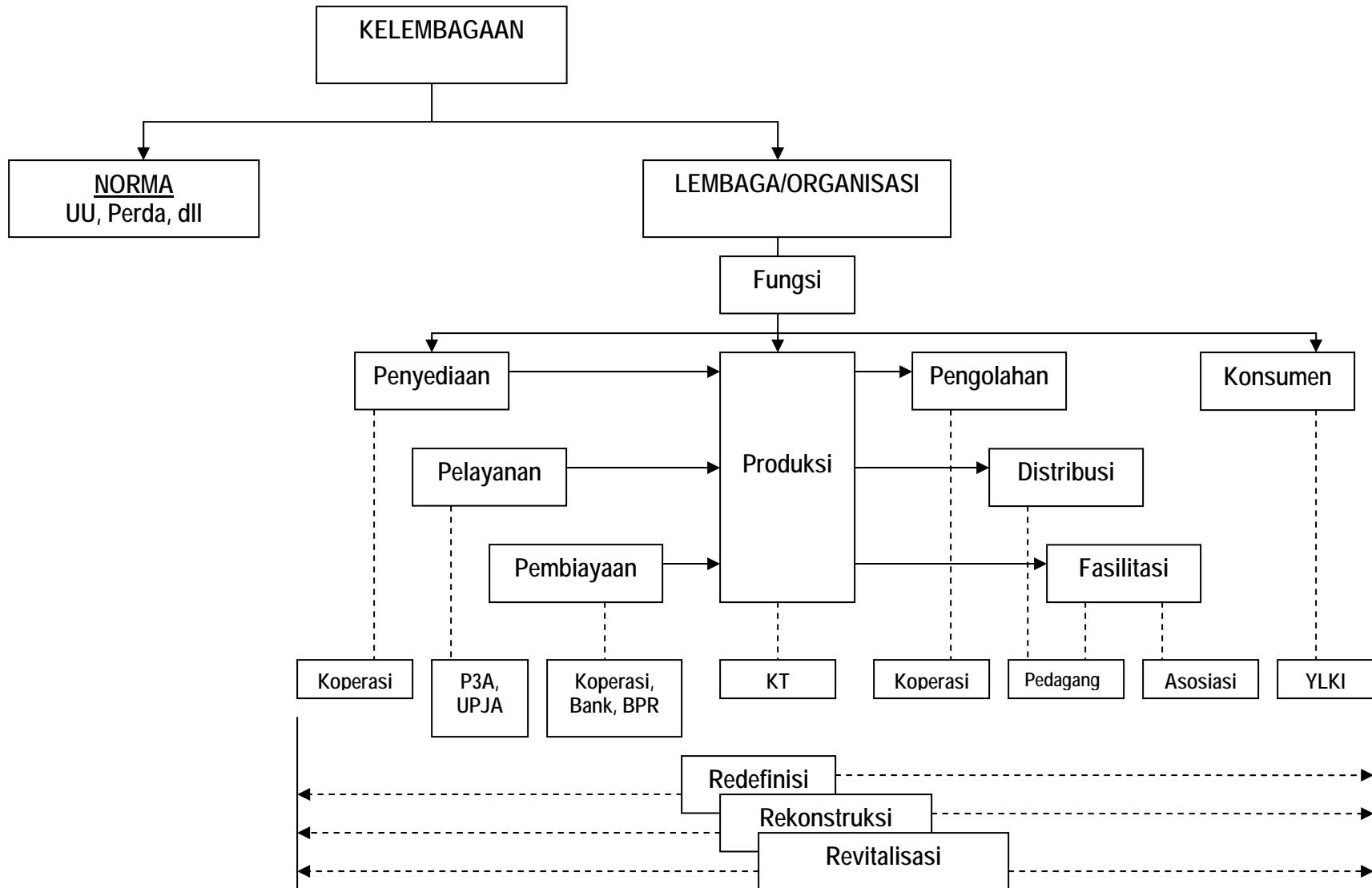
daya beli konsumen dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.

- c. Karena secara teoritis konsumsi pangan dipengaruhi paling tidak oleh empat faktor utama yaitu : 1) penyediaan pangan (termasuk produksi); 2) daya beli (pendapatan); 3) pengetahuan dan kesadaran gizi; dan 4) faktor-faktor sosial dan budaya, maka keempat peubah tersebut secara simultan haruslah digunakan sebagai instrumen kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan sekaligus memperbaiki status gizi penduduk. Oleh karena itu, perbaikan kualitas ketersediaan pangan melalui upaya sebagaimana disebutkan di atas harus diikuti pula dengan upaya-upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat.
- d. Pengembangan teknologi pengolahan pangan unggulan merupakan rentetan upaya yang akan dilakukan untuk mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan. Melalui pengembangan pengolahan pangan unggulan dimaksudkan dapat dikembangkan berbagai produk pangan olahan yang aman, sehat, *environmentally friendly*, lebih bermutu, memenuhi kaidah keagamaan (halal), menarik, disukai dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga menjadi alternatif bagi konsumen untuk memilihnya dan diharapkan konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih beragam.

1.4. Pentingnya Pemahaman dan Pembenahan Kelembagaan

Usaha untuk menyukseskan Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membenahi dan meningkatkan peranan kelembagaan yang ada, yang meliputi kelembagaan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain. Lembaga selain dapat menjadi wadah dalam melaksanakan berbagai fungsi dan peran berbagai komponen lumbung pangan, lembaga juga merupakan arahan bagi berbagai komponen tersebut untuk bersinergi guna mencapai tujuan yang telah digariskan bersama.

Penjabaran aspek kelembagaan dalam Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan dapat mencakup beragam aspek. Tetapi, agar penjabarannya tidak meluas dan mendalam serta tanpa mengurangi makna kelembagaan dalam program, maka uraian mengenai aspek kelembagaan dalam Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan akan dibatasi ruang lingkupnya sebagaimana skema pada Gambar 1. Sistematikanya juga disesuaikan dengan skema tersebut.



Gambar 1. Skema pembahasan peranan kelembagaan dalam Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan

1.4.1. Pengertian Kelembagaan

Secara umum suatu kelembagaan dapat dibagi atas dua aspek, yaitu aspek kelembagaan (*institution*) dan aspek keorganisasian (*organization*). Aspek kelembagaan (*institution*) dipahami meliputi unsur-unsur nilai, norma, aturan, etika, dll. Sedangkan aspek keorganisasian terdiri dari unsur-unsur struktur, peran, wewenang, otoritas, keanggotaan, dll. Sehingga, untuk memahami kelembagaan kedua aspek tersebut harus dingerti secara seimbang bahwa suatu kelembagaan tidak hanya berbentuk fisik (ada nama, pengurus, anggota, dll), tetapi juga memiliki jiwa yang berupa nilai, norma, aturan, dan sebagainya.

1.4.2. *Misconception* dalam Pengembangan Kelembagaan

Dari dulu hingga sekarang, hampir setiap program pembangunan mengintroduksikan suatu kelembagaan baru ke masyarakat. Kelembagaan dijadikan *agent of change* (pembawa perubahan). Namun, tidak semua kelembagaan yang diintroduksikan tersebut diperlukan untuk menukseskan suatu program, kecuali hanya menimbulkan kebingungan, birokrasi yang bertele-tele, dan menyebabkan berbagai hambatan struktural dalam pelaksanaan program pembangunan. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kesalahan memandang kelembagaan sebagaimana disarikan oleh Syahyuti (2004), sebagai berikut:

- (1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama.
- (2) Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol dari pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat.
- (3) Struktur yang dibuat relatif seragam, yang bias kepada bentuk kelembagaan usahatani padi sawah irigasi teknis di Pantura Jawa. Ini karena pengaruh keberhasilan *pilot project* Bimas tahun 1964 di Subang, dan iklim pemerintahan yang sentralistik yang tidak memberi ruang pada kenyataan pluralisme yang ada dalam masyarakat.
- (4) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual. Hal ini dipengaruhi oleh konsep *trickle down effect* yang umum dipakai dalam dunia penyuluhan.
- (5) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, untuk kemudian berharap agar perilaku orang-orang didalamnyanya bisa mengikuti. Karena

proyek yang selalu *mepet*, maka pemenuhan administrasi proyek lebih menjadi prioritas.

- (6) Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding non-material, atau merupakan perubahan yang materialistik.
- (7) Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang ada sebelumnya, termasuk merusakkan hubungan-hubungan horizontal yang telah ada.
- (8) Jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya, pengembangan kelembagaan masih lebih merupakan jargon politik daripada kenyataan yang riel di lapangan. Dengan membungkus suatu kebijakan dengan “pengembangan kelembagaan” seolah-olah pelaksana program telah bersifat menghargai kearifan lokal, lebih sosial, dan lebih partisipatif. Padahal mungkin teknologilah *entry point*-nya, bukan kelembagaan.
- (9) Kelembagaan pendukung untuk usaha pertanian di lapangan tidak dikembangkan secara terpadu karena struktur pembangunan yang sektoral. Untuk itu kelembagaan penunjang perlu direkayasa sehingga peran pihak luar (pemerintah dan swasta) dalam pembangunan pertanian di pedesaan dapat diwujudkan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa perilaku yang keliru tersebut muncul dari pola pikir berikut:

- (1) Kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki “jiwa” ekonomi yang memadai, karena itu harus diganti. Paham ini berasal dari ideologi modernisasi.
- (2) Menganggap bahwa pertanian gurem adalah permasalahan individual, bukan permasalahan kelembagaan. Maka, pendekatannya juga individual. Istilah yang sering dipakai adalah “pengembangan SDM”.
- (3) Menganggap bahwa permasalahan kelembagaan ada di tingkat petani belaka, bukan pada superstrukturnya. Dengan alasan itu, dalam pelaksanaan proyek yang diperbaiki hanyalah kelembagaan pada level bawah, padahal mungkin permasalahan (dan sumber permasalahan) ada pada pelaksana, misalnya pemahaman yang lemah tentang strategi kelembagaan, bekerja dengan tidak cukup waktu, dukungan tenaga yang tidak memadai, dan lain-lain.
- (4) Kesatuan administrasi pemerintahan dipandang sebagai satu unit interaksi sosial ekonomi pula. Desa misalnya dipandang sebagai satu unit yang padu, karena itu kelembagaan yang dibangun sebatas dalam lingkup satu desa saja.
- (5) Pedagang masih dipersepsikan “buruk” dalam pengembangan usaha pertanian karena warisan masa lalu yang memandang pedagang sebagai salah satu dari enam “setan desa”.

- (6) Lebih berorientasi kepada produksi, sehingga yang dibangun adalah kelembagaan-kelembagaan yang ada pada kegiatan produksi saja dan kurang memperhatikan pengembangan kelembagaan pra dan pasca produksi.

Kekeliruan dalam memandang kelembagaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi program. Karena itu, upaya untuk membenahi dan meningkatkan peran kelembagaan dalam mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan perlu dimulai dari upaya untuk meredefinisi, merekontruksi, dan selanjutnya merevitalisasi kelembagaan yang ada dan terkait dengan program lumbung pangan.

1.4.3. Dimensi Kelembagaan

Perkembangan masyarakat (komunitas) saat ini menjurus kepada dua bentuk, yaitu “masyarakat komunitas” yang dicirikan oleh kelembagaan komunitasnya yang kuat dengan “masyarakat pasar” yang manifestasinya didominasi oleh kelembagaan pasar. Ciri masing-masing bentuk masyarakat tersebut secara diametral ditampilkan pada Tabel 1.11.

Berdasarkan Tabel 1.11, maka kita dapat memetakan di manakah posisi kelembagaan-kelembagaan yang ada, kelembagaan apa saja yang masih berciri komunitas, dan mana yang sudah berciri pasar, ciri apa yang harus disesuaikan agar suatu kelembagaan dapat menjalankan fungsi yang diberikan, ciri apa yang harus dipertahankan agar suatu lembaga dapat diserahi peran tertentu, dan lain-lain.

1.4.4. Kelembagaan yang Wujud di Sektor Pertanian dan Kondisinya Saat ini

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi saat ini menuntut lembaga-lembaga di sektor pertanian untuk mengarahkan fungsi dan perannya kepada kelembagaan pasar, walaupun tidak perlu dihindari ciri-ciri kelembagaan komunitas yang melekat padanya.

a. Kelembagaan Produksi

Kelembagaan produksi adalah kelompok tani (dalam arti luas meliputi petani pangan, nelayan, peternak, petani hortikultura, pekebun baik sendiri maupun anggota plasma, petani HTI, dan lain-lain). Kelompok tani adalah kumpulan sejumlah petani yang memiliki sejumlah kepentingan dan tujuan yang sama dan terikat secara informal, jumlah anggotanya berkisar antara 10 sampai 25 orang anggota. Berdasarkan pengertian ini, maka suatu kelompok tani akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok kecil yang beranggotakan para petani yang memiliki kesamaan dalam tradisi, kebiasaan, status sosial ekonomi, domisili/lokasi usaha, bahasa, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 1. 11. Perbandingan ciri masyarakat komunitas dan masyarakat pasar

No.	Ciri	Masyarakat komunitas	Masyarakat pasar
1.	Sifat hubungan	Personal: lebih melihat manusia dengan hubungan sosialnya daripada barang, jasa, atau uangnya (<i>=gemeinschaft</i>).	Universal: penerapan prinsip-prinsip ekonomi tanpa membedakan orang yang berhubungan (<i>=gesellschaft</i>).
2.	Norma	Resiproitas	Hubungan kontrak
3.	Kelembagaan	Multi fungsi (<i>multi stranded</i>)	Spesialisasi (<i>mono stranded</i>)
4.	Hubungan sosial	Berdasarkan status	Berdasarkan kontrak
5.	Posisi dan peran	Otomatis (melalui mekanisme yang baku)	<i>Positioning</i> (didudukkan)
6.	Fungsi pasar	Fungsi pasar melekat dalam sistem kekerabatan	Pasar berada di luar sistem kekerabatan
7.	Kaitan dengan agama	Selalu terkait dengan nilai dan norma agama (transendental)	Agama dilakukan oleh lembaga tersendiri
8.	Struktur	Paternalistik (pemimpin-pengikut)	Menuju struktur multi (elit-tengah-pengikut)
9.	Konsep desa	Unit otonom swadaya mandiri yang tertutup	Desa sebagai pelaku pasar, individu sebagai pelaku ekonomi

2. Hubungan antar anggota bersifat saling mempercayai dan mengutamakan solidaritas.
3. Terbentuk atas dasar kesamaan kegiatan dalam berusahatani
4. Mempunyai minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usahatani.
5. Bekerja secara bersama-sama.
6. Bersifat informal, terbentuk atas keinginan dan kemufakatan bersama.
7. Memiliki peraturan, sanksi, dan tanggung jawab (tertulis atau tidak tertulis), pembagian kerja, dan kepengurusan.

Dalam kaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen, Dinas Pertanian) dalam pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, kelompok tani memiliki peran sebagai berikut:

1. Sebagai wahana belajar-mengajar, kelompok tani merupakan wadah bagi anggotanya berinteraksi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (KAP) dalam berusahatani yang lebih baik (*better farming*), berbisnis yang lebih maju (*better business*), dan hidup yang lebih sejahtera (*better living*).
2. Sebagai unit produksi usahatani, kelompok tani merupakan suatu kesatuan unit usahatani untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan (*economic of scale*).
3. Sebagai wahana kerjasama antar anggota dalam kelompok dan antara kelompok tani dengan pihak lain (pedagang, konsumen, pengusaha industri hulu dan hilir, lembaga keuangan, dan lain-lain.)

b. Kelembagaan Penyedia Input dan Pelayanan Jasa

1. Koperasi (Penyalur Saprodi)

Koperasi pertanian adalah kelembagaan ekonomi masyarakat yang paling banyak bergerak dalam penyediaan input pertanian. Nama KUD (koperasi unit desa) seakan identik dengan koperasi itu sendiri sehingga di masa lalu yang dimaksud dengan koperasi adalah KUD, KUD berarti koperasi. KUD kemudian berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang profesional dengan masuknya manajemen modern dalam tubuh KUD sehingga peran KUD dalam penyediaan input pertanian di berbagai sub sektor pertanian menjadi semakin membesar dan meluas. Tetapi KUD bukanlah lembaga yang sempurna selagi masih di bawah kendali birokrasi (desa) sehingga di samping berbagai keberhasilan, KUD juga banyak mencatat kegagalan sehingga istilah KUD sering diplesetkan menjadi "ketua untung duluan" bagi KUD yang manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh elit pengurus yang dekat dengan birokrasi ketimbang anggotanya.

2. Perkumpulan petani pemakai air (P3A)

Pada banyak wilayah sentra produksi pangan yang didukung oleh prasarana pengairan, kelembagaan petani pengguna air irigasi sudah lama berkembang. Bahkan, di banyak tempat kelembagaan ini sangat erat terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat seperti Subak di Bali dan Mitra Cai di Tanah Sunda. Pada zaman dimana pemimpin lebih menyukai keseragaman, maka berbagai istilah lokal untuk lembaga ini kemudian diganti istilah umum yang lebih menasional yang dikenal dengan P3A. Apapun nama atau istilahnya, P3A adalah lembaga yang pada intinya memberikan layanan pengaturan air bagi

petani sawah yang dikelola oleh petani sendiri yang kepengurusannya berasal dari masyarakat sendiri.

3. Kelompok usaha penyedia jasa alsintan/alat mesin pertanian (UPJA)

Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan pada daerah-daerah dimana ketersediaan tenaga kerja sangat terbatas, sedangkan potensi lahan cukup luas. Di Sumatera Selatan, kebutuhan lembaga penyedia jasa alsintan terutama sangat diperlukan di daerah pertanian pasang surut dimana kemampuan petani baik secara mandiri maupun berkelompok untuk menyediakan jasa alsintan sangat terbatas. Selain itu, kebutuhan yang tinggi terhadap jasa alsintan juga didesak oleh kendala alam. Saat panen rendengan di wilayah pasang surut jatuh pada puncak hingga akhir musim hujan (Februari – April) sehingga kebutuhan jasa pengeringan gabah sangat mendesak. Jika tidak terpenuhi, maka akan ada dua kerugian yang diterima petani, yaitu kualitas gabah (beras) yang buruk dan karena itu harga jualnya rendah.

c. Lembaga Pembiayaan (permodalan, kredit pertanian)

Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi bank milik pemerintah (BUMN), bank swasta nasional, bank asing, bank pembangunan daerah (BPD), bank perkreditan rakyat (BPR), dan lembaga keuangan non bank. Namun, dari banyaknya lembaga keuangan tersebut, yang “serius” dan konsisten dalam membiayai sektor pertanian masih sangat terbatas. Data berikut menunjukkan kondisi dan perkembangan penyaluran kredit, termasuk kredit untuk sektor pertanian.

1. Jumlah kredit jauh lebih rendah daripada himpunan dana di bank. Secara nasional jumlah himpunan dana di perbankan terus naik, dari Rp 625,6 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp 1.018 triliun tahun 2005; namun jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 1999 sebesar Rp 225,1 triliun dan pada tahun 2005 sebesar Rp 635,9 triliun. Di Sumatera Selatan, pada tahun 2000 berhasil dihimpun dana di perbankan sebesar Rp 9,8 triliun, sedangkan yang disalurkan berupa kredit hanya sebesar Rp 4,0 triliun (40,8%). Pada tahun 2005, jumlah himpunan dana tersebut meningkat menjadi Rp 14,6 triliun, sedangkan yang tersalur berupa kredit sebesar Rp 9,5 triliun (65%). Ini menunjukkan masih ada kesenjangan yang besar antara potensi suplai dengan utilisasinya (kredit).
2. Proporsi kredit untuk sektor pertanian masih rendah. Kredit pertanian pada tahun 1999 sebesar Rp. 23,8 triliun (hanya 10,6% dari total kredit perbankan) dan pada tahun 2005 menjadi 33,4 triliun yang meningkat secara nominal, tetapi turun secara persentase (hanya 5,3%).

3. Peran BPD masih relatif kecil. Kredit pertanian 61% dilayani oleh bank pemerintah, 27% oleh bank swasta nasional, 7% oleh bank asing (campuran) dan 4% oleh bank pembangunan daerah. Di Sumatera Selatan, peran BPR dalam penyaluran kredit pada tahun 2005 cukup progresif dimana rasio kredit dengan himpunan dana pada bulan Desember 2004 tercatat sudah mencapai 101% dan terus meningkat pada bulan Maret 2005 yang mencapai 103%.

Selain permasalahan yang dihadapi di atas, berbagai tantangan dalam pembiayaan pembangunan pertanian berikut masih menanti di depan kita, diantaranya:

- a. Pelayanan kredit umum belum diikuti dengan instrumen untuk menekan resiko kredit (asuransi), apalagi di sektor pertanian yang mengandung lebih banyak resiko.
- b. Aturan belum membedakan kredit investasi dari kredit modal kerja atau kredit konsumsi, hal ini akan menjadi tantangan yang makin besar di sektor pertanian mengingat kebutuhan petani akan biaya di awal musim tanam dibarengi dengan masa paceklik yang membutuhkan tambahan dana untuk konsumsi.
- c. Kredit skala kecil khususnya kredit untuk pertanian kurang *cost effective*, meskipun tingkat pengembalian baik.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan di atas, maka pengembangan peran pembiayaan di sektor pertanian perlu mempertimbangkan pola berikut:

- a. Pola kemitraan petani-pemodal (bank, lembaga keuangan).
- b. Kemitraan petani-pengumpul/pengolah/pabrik-bank.
- c. Supply chain management.
- d. Peningkatan management usahatani.
- e. Peningkatan skala usaha melalui konsolidasi usaha/kelompok usaha/koperasi.
- f. Pengembangan sistem pendukung (asuransi, penjaminan, sistem agunan).
- g. Peningkatan peran BPD sebagai payung lembaga keuangan non bank.
- h. Pengembangan pola pembiayaan lain.

d. Kelembagaan Prosesing, Distribusi, dan Pemasaran

Mata rantai yang sama pentingnya dalam rangkaian proses di sektor pertanian adalah prosesing, distribusi dan pemasaran. Ketiganya tidaklah harus dirangkaikan dalam suatu lembaga, kecuali hanya untuk pengelompokan dalam pembahasan ini saja. Lembaga yang menangani prosesing dirasakan penting kehadirannya dikala kemampuan subsistem produksi untuk menangani menjadinya terbatas karena skala produksi, efisiensi sistem prosesing, peralatan yang terbatas atau pengolahan yang membutuhkan sentuhan

teknologi maju. Contoh yang baik adalah prosesing gabah di pedesaan yang dijalankan oleh penggilingan padi pada berbagai skala produksi mulai dari penggilingan padi kecil hingga pabrik beras yang besar. Permasalahan yang dihadapi dalam prosesing produk pertanian antara lain adalah terbatasnya jumlah fasilitas prosesing, distribusinya yang timpang sehingga banyak petani yang tidak memiliki akses yang mencukupi terhadap fasilitas prosesing, kemampuan alat prosesing yang terbatas, dan masih rendahnya jangkauan petani terhadap prosesing produk pertanian yang dihasilkan.

e. Kelembagaan Fasilitasi, Sertifikasi

Patut menjadi perhatian sejak dulu bahwa dengan makin terbukanya Provinsi Sumatera Selatan dengan pasar internasional, terutama untuk beberapa komoditi unggulan, maka sudah cukup mendesak untuk diperluas layanan fasilitasi dan sertifikasi produk untuk ekspor. Kelembagaan yang menjalankan fungsi fasilitasi dan sertifikasi masih terbatas, kecuali untuk beberapa komoditas unggulan ekspor. Beberapa asosiasi komoditi telah ada dan menjalankan fungsi tersebut. Tetapi permasalahannya adalah kemampuan untuk menembus pasar global dan berkompetisi dengan pesaing internasional masih terbatas. Persoalan ini diperburuk pula oleh belum adil (*fair*) dan transparannya politik perdagangan internasional. Namun demikian, patut dicatat kemajuan yang dirintis oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan direncanakannya suatu program *global halal hub* untuk menembus pasar berbagai produk pangan dan olahan pangan ke konsumen muslim mancanegara, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan dalam wilayah pelabuhan samudera Tanjung Api-api.

f. Kelembagaan Konsumen (YLKI dan lain-lain)

Keberadaan kelembagaan konsumen sesungguhnya bukan semata-mata untuk kebutuhan dan kebaikan konsumen, melainkan adanya lembaga konsumen akan memberikan input berupa keinginan dan selera konsumen yang dapat menjadi masukan bagi produsen (petani) dalam mengembangkan produknya. Ini adalah wujud dari *consumer/market driven strategy*. Dengan memperhatikan keinginan dan selera konsumen, maka produsen/petani dapat menciptakan, memproses dan mengemas produk yang sesuai dengan keinginan dan selera konsumen tersebut sehingga diharapkan produsen mampu memenangkan kompetisi dalam penjualan/pemasaran produk yang bersaing secara regional, nasional maupun global dengan produsen dari provinsi atau negara lain.

1.4.5. Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan untuk Mendukung Sumatera Selatan Lumbung Pangan

a. Redefinisi Kelembagaan

Apapun lembaganya, di sektor manapun perannya, serta apapun produk atau jasa layanannya, dalam rangka penguatan perannya dalam mendukung program lumbung pangan, maka perlu diredefinisi berbagai aspek kelembagaannya sebagai berikut:

- a. Istilah lembaga perlu diredefinisi menjadi *social capital* masyarakat, bukan perpanjangan tangan birokrasi, baik dalam rangka distribusi maupun untuk peran kontrol.
- b. Lembaga yang tumbuh dari masyarakat haruslah dipelihara keberagamannya.
- c. Pembinaan kepada lembaga-lembaga hendaknya dengan mengutamakan pendekatan kelompok, bukan dengan pendekatan individual kepada anggotanya sebagaimana yang dijalankan di masa lalu dengan konsep *trickle down effect*.
- d. Pengembangan kelembagaan hendaknya menumbuhsuburkan aspek kulturalnya, bukan semata-mata aspek strukturnya. Pengembangan budaya kelompok didahului, baru struktur organisasinya dibangun sesuai dengan kebutuhan.
- e. Kelembagaan baru dibangun hanya jika belum ada kelembagaan lokal yang dapat menjadi cikal-bakal kelembagaan baru yang diperlukan tersebut.
- f. Kelembagaan lokal hendaknya merupakan perwujudan kearifan lokal masyarakat yang muncul sebagai hasil interaksi yang lama antara masyarakat dan lingkungannya.
- g. Kelembagaan pendukung usaha di sektor pertanian juga perlu diredefinisi sejalan dengan redefinisi kelembagaan produksi.

b. Rekontruksi

Telah banyak kelembagaan yang terbentuk di lingkup pertanian dan perdesaan yang bertujuan untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengakselerasi pelaksanaannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang terikat *deadline* (tahun anggaran, periode pemerintahan kepala daerah, dan lain-lain). Tetapi pada akhirnya peran kelembagaan tersebut menjadi semu karena indikator-indikator keberhasilan pembangunan tidak mencerminkan keberhasilan pembangunan dari kacamata masyarakat. Kelembagaan yang ada di pedesaan tersebut seringkali pembentukannya bersifat dadakan sehingga mengurangi bahkan mengebiri ciri demokratis (musyawarah mufakat) masyarakat pedesaan.

Kelembagaan yang wujud di sektor pertanian dan perdesaan hendaklah dipandang sebagai *social capital* masyarakat, terlepas dari bagaimana proses pembentukannya

(apakah *bottom-up*, *top-down*, atau pemberdayaan kelembagaan tradisional). Kelembagaan yang ada di perdesaan yang mungkin amat beragam hendaklah dilihat sebagai potensi untuk menjadi wadah peran serta masyarakat. Karena itu, dalam kaitan dengan program lumbung pangan, maka bukanlah menumbuhkan kelembagaan baru yang diperlukan, tetapi adalah *merekonstruksi* kelembagaan yang ada sehingga mampu menjadi wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan program lumbung pangan. Sehingga, upaya ini dapat dipandang sejalan dengan program pemerintah pusat yang baru-baru ini dicanangkan yaitu desa *mandiri pangan* yang menekankan pendekatan yang sama, yaitu rekonstruksi kelembagaan lumbung pangan yang sudah sejak lama hadir di masyarakat.

c. Revitalisasi

Mungkin saja sebagai imbas dari pendekatan top-down yang dilakukan pada masa lalu banyak kelembagaan yang ada terutama di perdesaan yang kehilangan peran dan mengalami erosi nilai-nilai tradisional yang dianutnya, tetapi kelembagaannya sendiri sebagai norma-norma yang disepakati masyarakat masih wujud dalam interaksi keseharian masyarakat. Untuk itu, dalam kaitan dengan pengembangan lumbung pangan maka diperlukan upaya-upaya untuk *merrevitalisasi* kelembagaan yang telah ada tersebut dengan nilai-nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan tujuan program pemerintah.

Upaya-upaya dalam kerangka revitalisasi kelembagaan perdesaan untuk mendukung lumbung pangan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. **Pembinaan diiringi pendampingan.** Istilah pembinaan seringkali dipertentangkan dengan partisipasi. Tetapi pembinaan adalah kata yang tidak mudah dilepaskan dari birokrasi pembangunan yang merupakan wujud tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pembinaan hendaklah dibarengi (“diperhalus”) dengan **pendampingan**. Misalnya, dalam rangka memperkuat kelembagaan prosesing di tingkat desa, maka pembinaan terhadap penggilingan padi kecil harus diiringi dengan pendampingan dalam rangka peningkatan manajemen, permodalan, jaringan pemasaran, dan introduksi teknologi.
2. **Penguatan dan pemberdayaan (empowerment).** Kebanyakan kelembagaan yang ada di sektor pertanian, terutama yang bergerak di perdesaan telah teridentifikasi menghadapi berbagai kendala, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya modal, lemahnya manajemen, dan sebagainya yang dianggap sebagai “penyakit kronis” kelembagaan perdesaan. Karena itu, dalam upaya mengembangkan perannya dalam program lumbung pangan diperlukan upaya untuk menguatkan dan memberdayakan kelembagaan tersebut sehingga mampu

berperan setara dengan kelembagaan lainnya yang lebih maju (seperti perusahaan penyedia saprodi, pedagang dan perusahaan prosesing hasil) dalam mata rantai proses produksi dan distribusi hasil pertanian.

3. **Pemerataan akses dan penyetaraan peran.** Semua lembaga yang ada di perdesaan dalam mata rantai produksi dan distribusi hasil pertanian memiliki peran yang setara, artinya putus/tidak berperannya satu mata rantai akan memutuskan/mengganggu proses yang sedang berjalan. Karena itu perlu ditekankan bahwa dalam rangka mewujudkan lumbung pangan, maka peran semua kelembagaan yang ada adalah setara. Jika kesetaraan ini terwujud, maka upaya yang perlu dilakukan tinggallah bagaimana memfasilitasi keterkaitan usaha (linkage) di antara kelembagaan tersebut, baik keterkaitan secara horizontal (forward and backward linkage), maupun keterkaitan secara vertikal.

II. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan melalui pemantapan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di Sumatera Selatan adalah untuk:

- (1) Meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain yang defisit pangan dalam rangka menunjang tujuan pencapaian kebutuhan pangan nasional;
- (2) Meningkatkan diversifikasi pangan keluarga petani dan masyarakat pada umumnya guna memenuhi kebutuhan gizi yang ideal dan menghindarkan diri dari ketergantungan pada satu jenis pangan
- (3) Menjamin ketersediaan bahan pangan bernilai gizi memadai yang mudah diakses dan pada harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- (4) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan keluarganya melalui pengembangan usaha pertanian berwawasan agribisnis yang lebih terarah pada peranan usaha agroindustri,
- (5) Meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dan ekspor;
- (6) Mengembangkan kesempatan kerja dengan produktifitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan agribisnis; dan
- (7) Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan.

Terkait dengan itu, Master Plan Lumbung Pangan bertujuan merumuskan rencana dan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan potensi semua sumberdaya yang ada serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam upaya mewujudkan wilayah ini sebagai lumbung pangan yang tidak hanya menghasilkan produksi berbagai produk pertanian yang surplus, melainkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan pelaku usaha lainnya. Secara khusus tujuannya adalah menyediakan buku pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi dan pegangan bagi penyusunan rencana aksi yang aplikatif dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan, baik dalam jangka menengah tahun 2009 maupun jangka panjang hingga 2025. Diharapkan Master Plan ini selanjutnya dapat

dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan pertanian di Sumatera Selatan.

Sistematika penyusunan master plan lumbung pangan ini adalah:

1. Menganalisa potensi dan permasalahan aktual pembangunan pertanian di Sumatera Selatan
2. Memformulasikan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian yang terpadu dan realistik ke dalam satu sistem agribisnis yang handal
3. Menetapkan kawasan dan areal pusat produksi komoditas unggulan daerah yang spesifik, terfokus dan tidak tumpang tindih dan menyebar acak
4. Memformulasikan sistem kemitraan dan jaringan produksi, pengolahan, prosesing dan pemasaran dengan dukungan perbankan, infrastruktur dan sarana yang relevan
5. Menyusun matriks kegiatan dan sasaran pembangunan masing-masing komoditi unggulan di setiap kabupaten/kota untuk mendukung percepatan mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan.

2.2. Sasaran dan Strategi Pengembangan

Master Plan Sumsel Lumbung Pangan mencakup 14 kabupaten/kota dan perencanaan yang disusun bersifat jangka menengah (2005-2009) dan jangka panjang (2005 – 2025). Cakupan 14 kabupaten/kota tersebut tentu tidak berarti berlaku untuk semua komoditi pertanian dalam arti luas tersebut untuk setiap kabupaten, melainkan sesuai dengan potensi dan kesesuaian agroekosistem untuk masing-masing komoditi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah dikemukakan maka dirumuskan sasaran-sasaran pembangunan pertanian sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya produksi pangan sumber karbohidrat dan karbohidrat alternatif yang berakar dari sumberdaya dan budaya lokal, protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,
- (2) Terjadinya diversifikasi pola pangan masyarakat Sumatera Selatan yang dihasilkan dari sumberdaya lokal dengan kandungan gizi yang memadai,
- (3) Tersedianya pangan yang mudah diakses dan terjangkau harganya oleh rumah tangga dan masyarakat pada umumnya,
- (4) Meningkatnya produktivitas usaha pertanian pangan, industri pengolahan dan ekspor pertanian,
- (5) Berkembangnya usaha pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian,
- (6) Meningkatnya pendapatan rumah tangga petani dari usaha pertanian dan nilai tambah produk pertanian,

- (7) Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor,
- (8) Meningkatnya volume dan penerimaan ekspor serta berkurangnya pengeluaran volume dan impor hasil pertanian,
- (9) Meningkatnya kesempatan kerja produktif berbasis agribisnis, terutama dalam subsistem agroindustri di daerah pedesaan yang memberikan imbalan layak, dan usahanya memberikan keuntungan,
- (10) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis, khususnya agroindustri yang memajukan perekonomian di pedesaan; dan
- (11) Terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian konservasi dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Secara terfokus selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2005-2009) dan dalam jangka panjang, sasaran yang ingin dicapai dari Master Plan Lumbung Pangan ini adalah adanya *pengembangan areal produksi komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan* yang cukup signifikan, terjadinya *peremajaan tanaman tua* dan *pengembangan bibit unggul*. Mengingat pentingnya upaya perolehan nilai tambah produk bagi petani dan pelaku usaha lainnya, maka diinginkan pula terjadi *pengembangan agroindustri pengolahan hasil komoditi unggulan daerah* yang sejalan dengan *perkembangan teknologi* dan *sesuai dengan prinsip efisiensi ekonomi*. Sasaran lain adalah adalah *terciptanya lapangan kerja baru* termasuk *kesempatan kerja dari efek ganda* program pembangunan pertanian tersebut seperti jasa angkutan, pemasaran dan industri hilir. Untuk mendukung kegiatan peremajaan dan pengembangan komoditi pertanian maka salah satu faktor penting adalah *ketersediaan benih/bibit bermutu* yang akan dilaksanakan dengan Sistem Waralaba Benih, dan tersedianya *pupuk* di tingkat petani pada harga yang terjangkau.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian tersebut akan ditempuh strategi pelaksanaannya sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan dan memelihara prasarana publik untuk menunjang pemanfaatan prasarana petani dan pengusaha agar mereka mampu berkiprah di sektor pertanian secara efisien dan berdaya saing.
- (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian melalui penerapan teknologi yang tepat dan spesifik lokasi, pengembangan pelayanan sarana produksi dan permodalan pertanian, pelayanan perlindungan kesehatan tanaman, peternakan dan perikanan, pelayanan mekanisasi pertanian, pelayanan informasi dan penyuluhan teknis serta manajemen usaha pertanian dengan lebih melibatkan pihak swasta.

- (3) Memperluas spektrum bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, diversifikasi produk pertanian dan pemasaran dengan memperhatikan potensi dan keragaman keunggulan sumber daya dan kondisi sosial budaya lokal, serta kelestarian lingkungan
- (4) Mempercepat pengembangan dan penerapan Iptek pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian.
- (5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian, khususnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan berusaha agroindustri dengan wawasan agribisnis, selain berusahatani, antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian
- (6) Menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan ekonomi pertanian rakyat sesuai mekanisme pasar yang berkeadilan, melalui peraturan, layanan publik dan insentif usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah nampak lima tahun terakhir, pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat pelaku agribisnis. Pelaku adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam proses produksi. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis tersebut. Pengembangan usaha agribisnis diarahkan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan peluang pasar. Namun lima tahun kedepan dan dalam jangka panjang fokusnya diarahkan pada pengembangan agroindustri di daerah atau dekat daerah sentra produksi pertanian yang akan memberikan kenaikan nilai tambah bagi petani baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tujuan peningkatan pendapatan sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu pola diversifikasi usaha dari segi tanaman maupun cabang usaha tani, termasuk usaha agroindustri yang dapat dikelola petani lebih ditingkatkan.

2.3. Sasaran Kepemilikan dan Pengelolaan Pertanian

Program *sertifikasi lahan* diperlukan untuk menata kepemilikan lahan petani dan mengurangi konflik lahan, selain diperlukan ketika petani akan memanfaatkan modal dari bank, dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Faktor penting lainnya adalah

peningkatan mutu SDM dan penguatan kelembagaan petani. Pengelolaan kawasan pertanian dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai dalam meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Khusus untuk perikanan yang sumberdaya alamnya berupa barang publik seperti sungai dan laut tidak dapat diterapkan status kepemilikannya, melainkan lebih dengan hak pengelolaan yang dilegalisasi secara individu kalau tidak mengganggu aksesibilitas orang lain, atau diberikan hak komunal yang dilegalisasi secara formal oleh kepala pemerintahan yang relevan hirarkhinya atau secara informal oleh ketua adat setempat. Dalam kaitan itu akan dipertimbangkan pula skala pengelolaannya yang akan memberikan pendapatan yang memadai kepada petani untuk peningkatan kesejahteraannya.

2.4. Sasaran Pendapatan

Sudah saatnya dipertimbangkan bahwa rata-rata tingkat pendapatan petani (atau masyarakat umum) pada saat mendatang mesti sebanding dengan tingkat kebutuhan hidup keluarga yang layak. Tim Dari hasil survey dapat dibuat perkiraan tingkat pendapatan yang ideal bagi suatu keluarga petani dengan asumsi bahwa suatu keluarga petani terdiri atas 1 orang suami, 1 orang isteri, dan tiga orang anak. Kisaran usianya adalah suami berusia 40-59 tahun ; isteri berusia 40-59 tahun; anak pertama laki-laki berusia 15-18 tahun; anak kedua berusia 12-14 tahun; anak ketiga berusia 6-11 tahun, dan tingkat kebutuhan pangan sama untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dibutuhkan minimal jumlah pendapatan dengan pembulatan untuk setiap keluarga sekitar (a) Rp 10.500.000,- per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang mencukupi standar gizi, (b) Rp 2.500.000,- per tahun untuk memenuhi kebutuhan sandang yang estández, (c) Rp 2.600.000,- per tahun untuk dapat tinggal di tempat hunian yang layak, (d) minimal Rp 2.375.000,- per tahun untuk pendidikan anak-anak, (e) Rp 2.550.000,- per tahun untuk keperluan kesehatan, rekreasi, kemananan dan tabungan, dan (f) senilai Rp 2.950.000,- per tahun dalam bentuk aset berupa peralatan elektronik, sepeda motor, sepeda dan hewan ternak. Penjumlahan semua pengeluaran di atas menghasilkan jumlah pendapatan ideal bagi keluarga petani (masyarakat umum) di Sumatera Selatan saat ini sebesar Rp 23.475.000,-. Apabila dibuat kisarannya dengan tidak memperhitungkan beberapa aset dan keperluan rekreasi, masih dapat ditoleransi pendapatan keluarga minimal dengan pembulatan sebesar Rp 21.000.000,- per tahun.

Selanjutnya dengan asumsi nilai tukar uang US\$ 1 = Rp 9.500,- maka kisaran tingkat pendapatan tersebut dalam nilai dollar US adalah sebesar US\$ 2.211 - 2.471 per KK

per tahun atau anatar US\$ 442.2 - 494.2 per kapita per tahun. Apabila juga diasumsikan inflasi dollar US lima tahun ke depan 3% per tahun, maka berarti pendapatan ideal petani pada tahun 2010 adalah sekitar US \$ 2.563 - 2.865 per KK per tahun atau US\$ 513 - 573 per kapita per tahun. Dalam nilai rupiah apabila nilai tukar tidak berubah pendapatan tersebut akan sama dengan Rp 24.348.500 hingga Rp 27.217.500,- per KK per tahun, atau Rp 4.873.500,- hingga Rp 5.443.500,- per kapita per tahun. Sebenarnya dalam jumlah yang kecil telah ada petani yang mempunyai tingkat pendapatan sejumlah itu dari usaha yang berpola diversifikasi, atau monokultur perkebunan lebih dari empat ha. Hal ini membuka peluang bagi upaya peningkatan pendapatan petani di Sumatera Selatan dengan kondisi sumberdaya alam yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Jelas untuk dapat mengejar target pandapatan tersebut diperlukan kerja keras dan sinergisme semua pihak yaitu petani, pengusaha, peneliti dan pemerintah, karena tingkat pendapatan maksimum yang dicapai saat ini oleh kelompok petani kelapa sawit baru mencapai Rp 19.000.000,- atau \$US 2.000 per KK per tahun, sementara pendapatan ratanya baru mencapai sekitar Rp 12.000.000,- atau US\$1.263 per KK per tahun.

III. TATA RUANG DAN PERTANAHAN

3.1. Sebaran Kabupaten / Kota dan Kondisinya

Penataan ruang di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan telah menentukan penggunaan lahan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kawasan budidaya non pertanian dan kawasan budidaya pertanian. Yang dimaksud dengan kawasan lindung diantaranya adalah hutan lindung, taman nasional, taman suaka marga satwa, lereng dengan kemiringan 40 %, tanah yang memiliki ketinggian 1.000 m dpl, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan sumber air, serta rawa gambut.

Pemanfaatan kawasan budidaya non pertanian diantaranya adalah untuk permukiman, pariwisata, industri, transportasi, pertambangan dan kehutanan. Sedangkan pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian diantaranya adalah sawah irigasi teknis, sawah lebak, sawah pasang surut, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tabel 3.1. Penggunaan lahan di provinsi Sumatera Selatan.

Kab/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Kawasan Lindung/Non Budidaya (Ha)	Kawasan Budidaya Non Pertanian (Ha)	Kawasan Budidaya Pertanian (Ha)
Ogan Komering Ulu	291,760	138,310	80,890	72,560
Ogan Komering Ulu Timur	335,604	4,108	58,982	272,514
Ogan Komering Ulu Selatan	540,301	141,049	9,684	389,569
Ogan Komering Ilir	1,690,532	304,008	11,053	1,375,471
Ogan Ilir	266,609	8,216	9,684	248,709
Muara Enim	858,794	86,272	272,610	499,913
Lahat	663,250	294,422	43,919	324,909
Musi Rawas	1,213,457	276,620	202,770	734,067
Musi Banyuasin	1,447,700	115,030	604,006	728,664
Banyuasin	1,214,274	407,560	33,486	773,228
Palembang	37,403	2,739	22,008	12,656
Prabumulih	42,162	0	22,008	20,154
Pagaralam	57,916	2,739	5,575	49,602
Lubuk Linggau	41,980	10,955	8,314	22,711
JUMLAH	8,701,742	1,792,029	1,384,988	5,524,725

Sumber :

Pada umumnya, pemanfaatan lahan untuk pertanian adalah lebih besar bila dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya non pertanian. Walaupun demikian. Alokasi lahan untuk kawasan lindung tetap diperlukan bagi suatu kabupaten maupun kota. Dari data yang ada, kota Prabumulih tidak memiliki alokasi ruang untuk kawasan lindung, hal ini tidak tepat, karena kawasan lindung adalah suatu keharusan dan suatu kebutuhan.

Perubahan penggunaan lahan akibat alih fungsi lahan akan berakibat pada perubahan penggunaan lahan untuk fungsi lainnya. Oleh sebab itu, kontrol terhadap tata guna lahan dan alih fungsi lahan harus dilakukan dengan ketat dengan pedoman proporsi penggunaan lahan.

Tabel 3.2. Jumlah penduduk dan luas kawasan pertanian.

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk MPP	Kawasan Budidaya Pertanian (Ha)	Rasio KBP per Pddk	Rasio KBP per Pddk MPP
Ogan Komering Ulu	255,246	171,015	72,560	0.28	0.42
Ogan Komering Ulu Timur	556,010	372,527	272,514	0.49	0.73
Ogan Komering Ulu Selatan	317,277	212,576	389,569	1.23	1.83
Ogan Komering Ilir	656,828	440,075	1,375,471	2.09	3.13
Ogan Ilir	356,983	239,179	248,709	0.70	1.04
Muara Enim	632,222	423,589	499,913	0.79	1.18
Lahat	545,754	365,655	324,909	0.60	0.89
Musi Rawas	474,430	317,868	734,067	1.55	2.31
Musi Banyuasin	469,175	314,347	728,664	1.55	2.32
Banyuasin	733,828	491,665	773,228	1.05	1.57
Palembang	1,338,793	535,517	12,656	0.01	0.02
Prabumulih	130,340	87,328	20,154	0.15	0.23
Pagaralam	114,562	76,757	49,602	0.43	0.65
Lubuk Linggau	174,452	69,781	22,711	0.13	0.33
JUMLAH	6,755,900	4,117,877	5,524,725	0.79	1.19

Sumber :

3.2. Kondisi dan Kesesuaian Lahan, Air dan Agroklimat

Secara umum, penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya maupun kawasan lindung sesuai dengan kondisi lahan, ketersedian air dan agroklimat. Kegiatan pertanian untuk irigasi teknis baik terdapat di Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur , Ogan Komering Ilir serta Musi Rawas. Selanjutnya pertanian dengan irigasi yang lebih sederhana terdapat di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk pertanian lahan rawa pasang surut dan rawa lebak terdapat di Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.

Pemanfaatan lahan untuk tanaman jagung dan palawija, terdapat di beberapa kabupaten dan kota yang memiliki lahan kering misalnya Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Untuk jenis tanaman sayur mayur, terdapat pada beberapa wilayah yang sesuai diantaranya adalah Pagar Alam, Lahat, dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Tanaman karet yang merupakan salah satu andalan masyarakat Sumatera Selatan, dapat dijumpai di seluruh Kabupaten dan Kota. Walaupun demikian, untuk kota, sebaiknya penggunaan lahan untuk perkebunan karet mulai dikurangi dan dialih fungsikan untuk penggunaan lahan yang menunjang fungsi kota.

Tanaman Kelapa Sawit merupakan andalan lain dari Sumatera Selatan yang sangat menjanjikan. Pembukaan lahan perkebunan untuk kelapa sawit terus terjadi dan memiliki skala yang sangat besar. Beberapa kawasan yang sesuai untuk kelapa sawit adalah Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan , Musi Rawas serta Muara Enim.

Tanaman andalan lainnya dari Sumatera Selatan adalah Kopi dan Kelapa. Pemanfaatan lahan untuk Kopi yang terbaik adalah di Pagar Alam, Lahat dan Muara Enim. Sedangkan untuk kelapa yang terbaik adalah di dataran rendah seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Dilihat dari kondisi topografinya, Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada pada ketinggian sekitar ± 69 meter di atas permukaan laut. Di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk ke dalam wilayahnya semakin bergunung-gunung.

Dilihat dari jenis tanahnya, di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 11 jenis tanah, yaitu:

- 1) Organosol, terdapat di sepanjang pantai dan dataran rendah.
- 2) Litosol, yang tersebar di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dengan Patahan di sepanjang Bukit Barisan.
- 3) Alluvial, terdapat di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Punggung Bukit Barisan.
- 4) Hidromorf, terdapat di dataran rendah Musi Rawas dan Muara Enim.
- 5) Klei Humus, terdapat di sepanjang pantai dan dataran rendah.
- 6) Regosol, terdapat di sekitar Pantai Timur, di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dan Kerucut Vulkan.
- 7) Andosol, jenis tanah ini terdapat di semua kerucut Vulkan muda dan tua, umumnya jenis tanah ini ditemui di wilayah dengan ketinggian lebih dari 100 m dpl.
- 8) Rendzina, terdapat di sekitar Kota Baturaja.
- 9) Latosol, penyebaran tanah ini umumnya terdapat di wilayah tanah kering.
- 10) Lateritik, terdapat dataran rendah di sekitar Martapura.
- 11) Podzolik, terdapat di dataran rendah dan di pegunungan Bukit Barisan.

Dilihat dari kondisi hidrologi, sumber air di Provinsi Sumatera Selatan berasal dari air permukaan dan air tanah. Adapun jenis air permukaan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah sungai, danau/rawa, tada hujan. Sedangkan air tanah sangat jarang dijumpai sebagai sumber mata air dan kalau ada debitnya kecil. Namun secara setempat pemunculan air tanah dapat ditemukan walaupun debitnya relatif kecil umumnya kurang dari 1 lt/det, dan tidak cukup prospek untuk dikembangkan disebabkan bersifat rembesan dan dipengaruhi oleh keadaan musim.

Dilihat berdasarkan kondisi iklimnya, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 97 – 492/23 mm (curah hujan/hari) sepanjang tahun 2003, setiap bulannya curah hujan bervariasi dengan bulan Nopember merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 23,2°C hingga 33° C dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2003 berkisar 26,7° C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Juli, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni.

Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi lahan Sawah, permukiman, tegalan/ladang, padang rumput, rawa-rawa, tambak/kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan areal penggunaan lain. Areal penggunaan lain merupakan penggunaan lahan terluas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 yaitu

sebesar 3.595.317 Ha (37 %), sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah tambak/kolam sebesar 41.953 Ha (0,43 %). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 3.3. Penggunaan Lahan Eksisting di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003

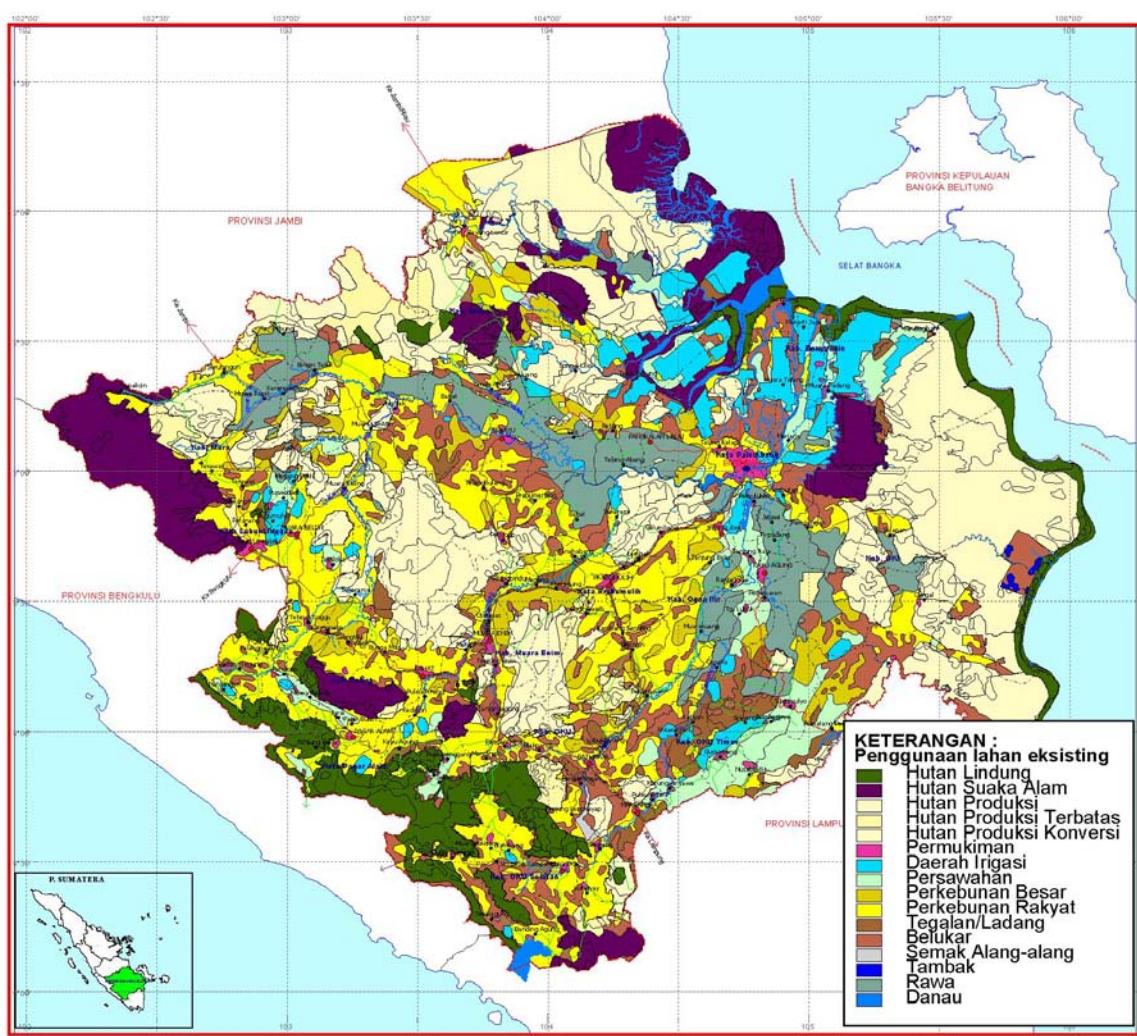
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Perkampungan	142.066	1,63
2	Persawahan	659.748	7,58
3	Tegalan / Ladang	252.338	2,90
4	Kebun Campuran	197.984	2,28
5	Perkebunan Rakyat	1.866.273	21,45
6	Perkebunan Besar	388.948	4,47
7	Tambak	5.846	0,07
8	Pertambangan	9.619	0,11
9	Semak / Alang-Alang	109.236	1,26
10	Hutan	4.630.717	53,21
11	Danau / Rawa	293.659	3,37
12	Lain-lain (sungai, jalan)	145.445	1,66
Jumlah		8.701.742	100,00

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

3.3.. Peruntukan Lahan dan Rencana Tataruang Pertanian

3.3.1. Peruntukan Lahan Pertanian

Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi lahan Sawah, permukiman, tegalan/ladang, padang rumput, rawa-rawa, tambak/kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan areal penggunaan lain. Areal penggunaan lain merupakan penggunaan lahan terluas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 yaitu sebesar 3.595.317 Ha (37 %), sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah tambak/kolam sebesar 41.953 Ha (0,43 %).



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2004-2019

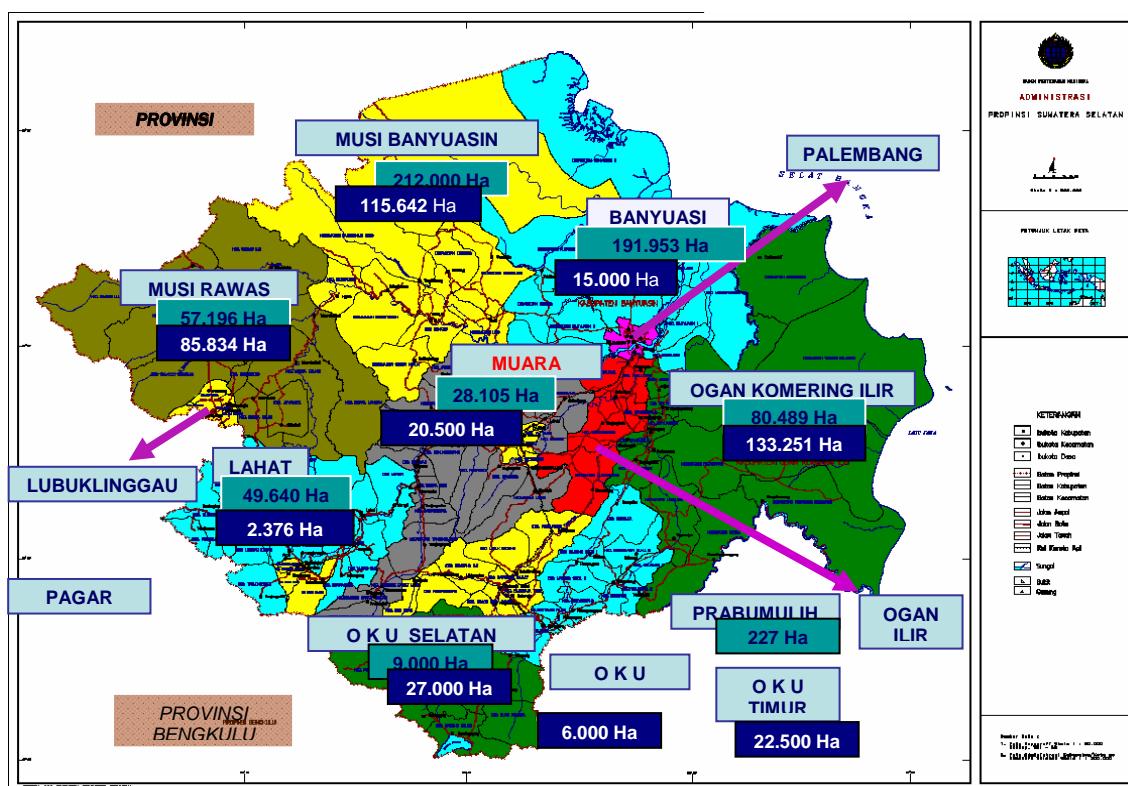
Gambar 3.1 Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Berbagai kegiatan pembangunan memerlukan lahan yang sesuai dengan daya dukung, kesesuaian lahan serta fungsi lahan. Berbagai kepentingan tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik kepentingan penggunaan lahan.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan penggunaan lahan, Pemerintah Kabupaten dan kota telah mengeluarkan izin penggunaan lahan atas dasar permintaan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang. Walaupun demikian, izin penggunaan lahan yang telah dikeluarkan tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pemohon.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga telah mengidentifikasi luas lahan yang dapat dimanfaatkan tetapi belum memiliki izin penggunaan lahan. Langkah ini sangat tepat karena dapat memberikan data lahan yang masih mungkin dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu dalam skala besar.

Peta 3.1. Ketersediaan lahan yang belum memiliki izin.



Terdapat 4 (empat) jenis tanaman pangan yang diandalkan dalam mewujudkan Sumatera Selatan Lumbung Pangan, yaitu Padi, Jagung, sayuran dan buah. Luas eksisting lahan untuk keempat komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Eksisting Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMODITI	TIPOLOGI LAHAN	LUAS AREAL (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	RERATA HASIL (ton/ha)	PRODUKSI (ton)
1.	PADI	Irigasi	83,637	155,839	4,30	670,389
		Pasang Surut	147,885	151,883	2,95	447,464
		Lebak	161,341	166,067	2,76	457,532
		Tadah Hujan	120,313	153,042	3,36	514,976
		Jumlah Padi Sawah	513,176	626,831	3,33	2,090,361
		Ladang	275,353	275,353	0,62	169,945
		Total Padi	788,529	902,184	2,51	2,260,306
2.	JAGUNG	Lahan Kering & Pasang Surut	23,859	23,859	2,73	65,234
3.	SAYURAN	Dataran Tinggi/Rendah	6,608	6,608	5,34	35,270
4.	BUAH	Dataran Tinggi/Rendah	28,934	28,934	15,07	436,050

Sumber :

Untuk keempat komoditas tersebut, luas penggunaan lahan berbeda dengan luas panen. Hal ini disebabkan pada suatu lahan tertentu, komoditas dapat dipanen lebih dari sekali dalam 1 (satu) tahun. Sebagai contoh, padi sawah irigasi teknis baik dapat dimanfaatkan untuk 2 atau 3 kali panen dalam setahun. Sebaliknya untuk tanaman sayur, terdapat kemungkinan ditanam secara tumpang sari dengan tanaman jenis komoditas yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat kemungkinan luas suatu lahan tertentu dihitung oleh penggunaan dua komoditas yang berbeda.

Untuk tanaman perkebunan,

Tabel 3.4. Eksisting Perkebunan

NO	KOMODITI	TIPOLOGI LAHAN	LUAS (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1.	KARET	Lahan Kering	928,182	641.232
2.	SAWIT (CPO)	Lahan Kering	488,691	1.459.722
3.	KOPI	Dataran Tinggi	272,543	144.163
4.	KELAPA	Pasang Surut	50,941	67.220
T O T A L				

Sumber :

Untuk kegiatan perikanan,

Tabel 3.5. Eksisting Perikanan

NO	KOMODITI	TIPOLOGI LAHAN	VOLUME (Ha/Unit)	PRODUKSI (Ton)
1.	UDANG	Air Payau	20.342	32.493
2.	IKAN MAS & NILA	Kolam air Deras	645	14.440
TOTAL			20.987	

Sumber :

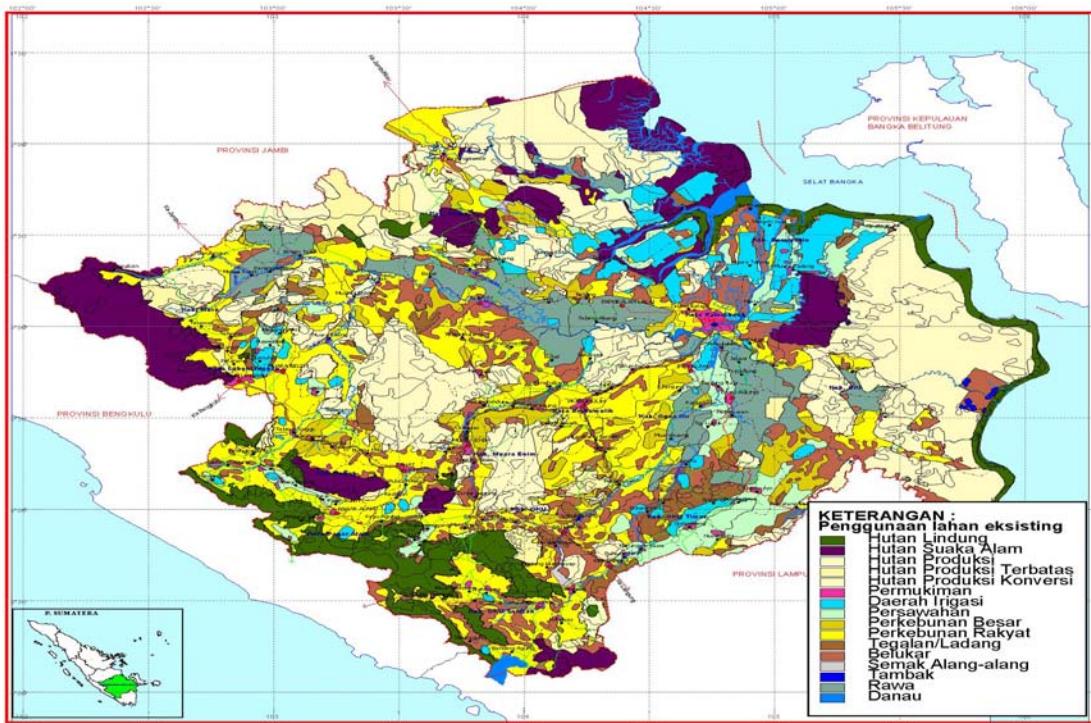
Untuk kegiatan aspek kehutanan,

Tabel 3.4 : Eksisting Kehutanan

NO	KOMODITI	TIPOLOGI LAHAN	VOLUME (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1.	Hutan Tanaman Industri	Lahan Kering	230.000	2,3 juta m ³
2.	Hutan Cadangan Pangan (HCP)	Lahan Kering	10.000	15.000
3.	Aneka Usaha Kehutanan (AUK)	Lahan Kering	6 Paket	8.340

Sumber :

Pola penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi lahan Sawah, permukiman, tegalan/ladang, padang rumput, rawa-rawa, tambak/kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan areal penggunaan lain. Areal penggunaan lain merupakan penggunaan lahan terluas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 yaitu sebesar 3.595.317 Ha (37 %), sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah tambak/kolam sebesar 41.953 Ha (0,43 %). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.



Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.1

Penggunaan Lahan Eksisting Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Perkampungan	142.066	1,63
2	Persawahan	659.748	7,58
3	Tegalan / Ladang	252.338	2,90
4	Kebun Campuran	197.984	2,28
5	Perkebunan Rakyat	1.866.273	21,45
6	Perkebunan Besar	388.948	4,47
7	Tambak	5.846	0,07
8	Pertambangan	9.619	0,11
9	Semak / Alang-Alang	109.236	1,26
10	Hutan	4.630.717	53,21
11	Danau / Rawa	293.659	3,37
12	Lain-lain (sungai, jalan)	145.445	1,66

J u m l a h	8.701.742	100,00
-------------	-----------	--------

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum, permasalahan pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian dalam arti luas adalah alih fungsi lahan yang kurang terkontrol. Lahan subur yang sebelumnya untuk lahan pertanian berubah diantaranya menjadi perkebunan, dan permukiman. Perubahan fungsi lahan tersebut karena nilai lahan dianggap lebih menguntungkan bila bukan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan.

Sebagai wilayah yang kaya dengan sumberdaya alam, kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan yang dapat menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan di wilayah tersebut. Kondisi ini bisa terlihat dari adanya konflik-konflik pemanfaatan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

- Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dengan kawasan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin seluas 562,27 ha, di Kabupaten Lahat seluas 2.025 ha, di Kabupaten Muara Enim seluas 12.457,59 ha, di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 22.743,90 ha, di Kabupaten Musi Rawas seluas 1.656,91 ha, di Kabupaten OKU seluas 2.458 ha, di Kabupaten OKU Timur seluas 2.004,84 ha, dan di Kota Prabumulih seluas 999,52 ha.

Secara keseluruhan konflik pemanfaatan lahan antara perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sekitar 44.909,19 ha atau sekitar 0,52 % (lihat Gambar 2.10).

- Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan kawasan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin seluas 1.636,02 ha, di Kabupaten Lahat seluas 5.206,10 ha, di Kota Lubuk Linggau seluas 732,13 ha, di Kabupaten Muara Enim seluas 9.750,36 ha, di Kabupaten Ogan Ilir seluas 294,93 ha, di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 11.093,95 ha, di Kabupaten Musi Rawas seluas 4.298,71 ha, di Kabupaten OKI seluas 7.027,79 ha, di Kabupaten OKU seluas 2.459,42 ha, di Kabupaten OKU Selatan seluas 1.436,29 ha, di Kota Pagar Alam seluas 144,90 ha, dan di Kota Prabumulih seluas 146,51 ha.

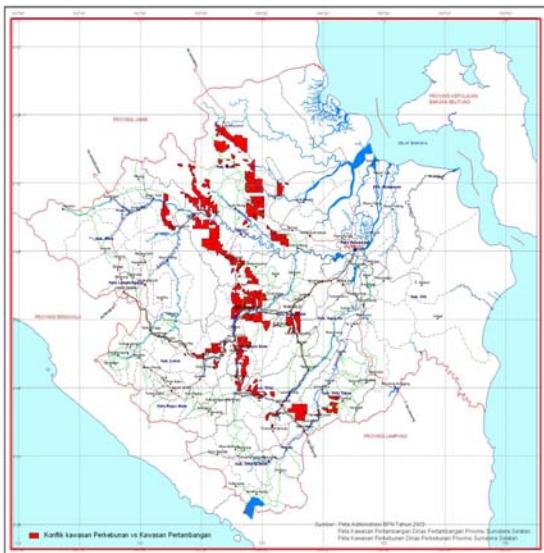
Secara keseluruhan konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan kegiatan perkebunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sekitar 44.227,12 ha atau sekitar 0,51 % (lihat Gambar 2.11).

- Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan kawasan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin seluas 446,19 ha, di Kabupaten Lahat seluas 144,61 ha, di Kabupaten Muara Enim seluas 12.409,55 ha, di Kabupaten di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 15.947,56 ha, di Kabupaten Musi Rawas seluas 1.525,35 ha, di Kabupaten OKU seluas 2.604,09 ha, di Kabupaten OKU Selatan seluas 2.298,07 ha, dan di Kabupaten OKU Timur seluas 876,56 ha.

Secara keseluruhan konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan kawasan pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sekitar 36.251,98 ha atau sekitar 0,42 % (lihat Gambar 2.12).

Gambar 2.10

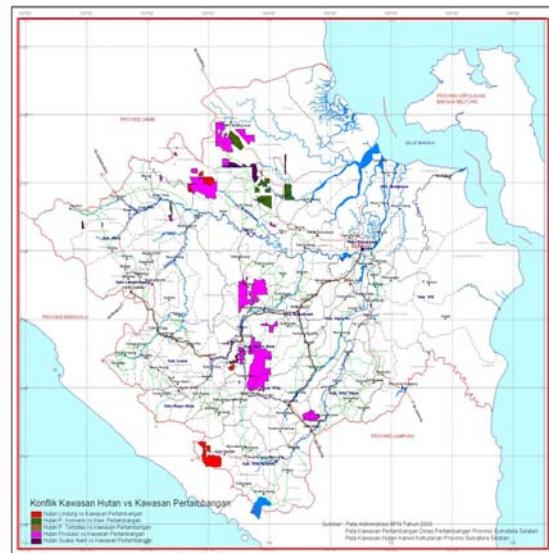
Konflik Pemanfaatan Lahan Antara



Sumber : RTRWP Sumsel

Gambar 2.12

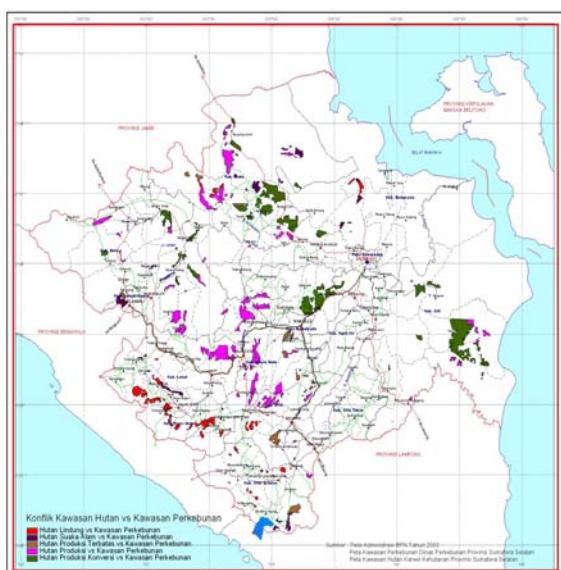
Konflik Pemanfaatan Lahan Antara



Sumber : RTRWP Sumsel

Gambar 2.11

Konflik Pemanfaatan Lahan Antara



Sumber : RTRWP Sumsel

Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan Pemerintah kota belum memiliki legal aspek dan kontrol yang dapat melindungi pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan secara memadai. Lahan yang memang sesuai untuk lahan pertanian tanaman pangan belum memiliki peraturan daerah yang dapat melindungi dari alih fungsi lahan.

Lemahnya kontrol dari pengelola kawasan lindung mengakibatkan kawasan hutan terus menjadi sasaran penebang kayu liar dan perambah hutan (kawasan TNKS), Kawasan lindung dengan tambak udang serta terdapat aktivitas pengeboran minyak di Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan (\pm 130 km Barat Palembang).

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilalui arus transportasi yang padat menyebabkan beban yang melalui jalur lintas Sumatera terus ini terus meningkat setiap tahun, sehingga kondisi jalan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang hanya memiliki daya dukung maksimal sebesar 10 ton sering mengalami kerusakan.

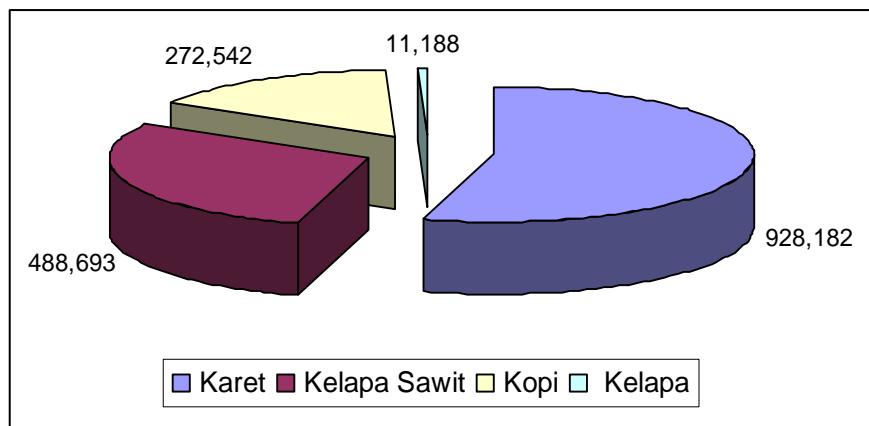
Otonomi daerah yang ditanggapi secara berlebihan tanpa melihat kepentingan yang lebih luas merupakan ancaman bagi keserasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kepentingan antara kabupaten dan kota yang bertetangga atau bahkan kepentingan Pemerintah Provinsi sering diabaikan. Oleh sebab itu, kebijakan Sumatera Selatan Lumbung harus dapat difahami dan dimengerti Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan data RTRWP Sumatera Selatan, sekitar 238.974 ha atau sekitar 37,41 % lahan persawahan dari total lahan seluas 659.748 ha, saat ini dibiarkan menjadi lahan tidur, hal ini dikarenakan luas lahan yang ada tidak sebanding dengan jumlah petani penggarap. Selain itu modal usaha dan penggunaan teknologi pertanian juga masih terbatas.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi memiliki tingkat erosi peka sampai dengan sangat peka seluas 104.235 ha. Sehingga perlu optimasi dalam pemanfaatannya agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungan atau bahkan bencana (lihat Gambar 2.8).

Selanjutnya, selain RTRWK pemerintah kabupaten dan kota belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota. Hal ini dapat menyebabkan alih fungsi lahan menjadi hal yang umum, sehingga lahan pertanian dengan mudah berubah menjadi fungsi yang lain.

Luas perkebunan untuk seluruh komoditi (21 komoditi) di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Juni 2005 adalah seluas 1.778.646 ha atau sekitar 20,44% dari luas Provinsi Sumatera Selatan (Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2005). Khusus untuk komoditi unggulan seperti karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa luasannya berturut-turut adalah 928.182 ha, 488.693 ha, 272.542 ha dan 50.941 ha.



Gambar 3.2 Grafik sebaran luasan komoditi perkebunan unggulan di Provinsi Sumatera Selatan

Peta-peta sebaran komoditi perkebunan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada halaman berikut.

3.4. Rencana Tata Ruang Pertanian

3.4.1. Penggunaan Lahan

Secara garis besar rencana pola pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

A. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung

Rencana pemantapan kawasan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2019 setelah mempertimbangkan hasil analisis, teridentifikasi seluas 1.633.237,98 ha atau sekitar 18,77% (belum termasuk kawasan hutan yang berfungsi lindung) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana pemantapan kawasan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- (1) Hutan Lindung seluas 589.512,30 ha atau sekitar 6,77% yang tersebar di Kabupaten Banyuasin seluas 55.356,67 ha, Kabupaten Lahat seluas 136.297,67 ha, Kabupaten Muara Enim seluas 58.597,09 ha, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 19.229 ha, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 85.188,12 ha, Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 84.542,02 ha, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 145.962,95 ha, dan Kota Pagar Alam seluas 4.338,58 ha.
- (2) Hutan Suaka alam seluas 780.028,69 ha atau sekitar 9,55 % yang tersebar di Kabupaten Banyuasin seluas 325.073,18 ha, Kabupaten Lahat seluas 53.545,59 ha, Kota Lubuk Lingau seluas 7.206,15 ha, Kabupaten Muara Enim seluas 9.973,97 ha, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 49.058 ha, Kabupaten Musi Rawas seluas 247.503,80, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 15.972,77 ha, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 51.695,21.
- (3) Kawasan Sempadan Pantai seluas 112.277,55 ha atau sekitar 1,29% yang tersebar di Kabupaten Banyuasin seluas 27.089,43 ha dan Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 85.188,12 ha.
- (4) Kawasan Sempadan Sungai seluas 100.935,22 ha atau sekitar 1,16% yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang kawasan budidaya meliputi kawasan budidaya pertanian dalam arti luas dan kawasan budidaya non pertanian (perkotaan). Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan kawasan budidaya pertanian dalam arti luas di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 6.981.760,20 ha atau sekitar 80,23% dari luas wilayah provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota (Gambar 3.11). Kegiatan yang dapat dikembangkan pada kawasan budidaya pertanian meliputi; pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, tanaman hortikultura, peternakan, perikanan dan hutan produksi.

Selain kawasan pertanian dalam arti luas, yang termasuk dalam kawasan budidaya ialah kawasan budidaya non pertanian (disebut juga pengembangan kegiatan perkotaan) yang meliputi permukiman eksisting, prasarana jalan, rencana pengembangan permukiman, kegiatan industri dan kawasan pertambangan. Luas areal yang direncanakan sebagai kawasan budidaya non pertanian ialah 157.228,04 ha atau 1,81% dari luas wilayah provinsi dengan lokasi penyebaran terdapat di seluruh kabupaten/kota (Gambar 3.12).

Berikut adalah rincian rencana pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan:

(1) Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian

a. Pertanian Lahan Basah

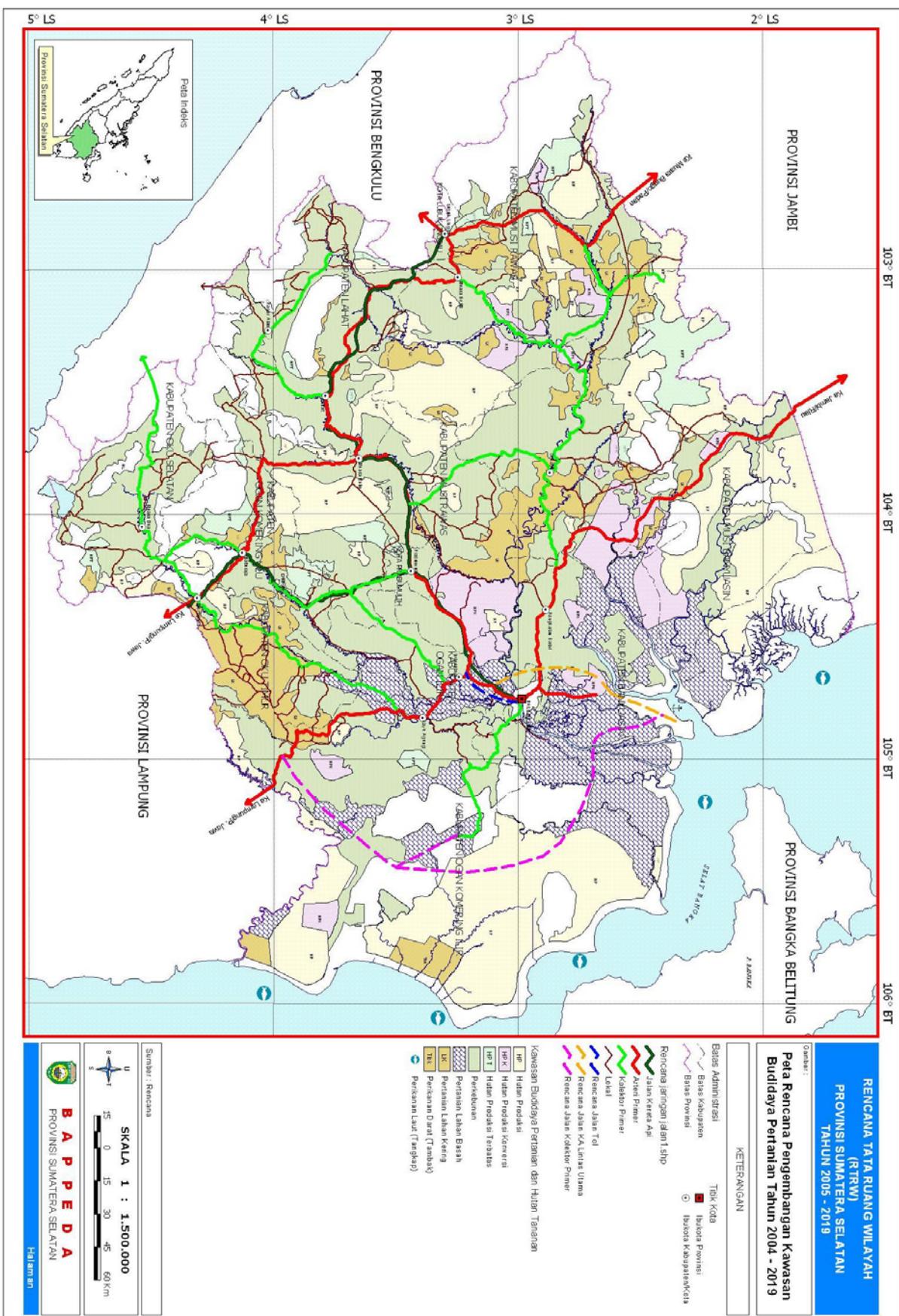
Pertanian lahan basah diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan kecuali Kota Pagar Alam dengan luas total 1.027.900,81 ha atau sekitar 11,81%.

b. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan kecuali Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang dan Kota Pagar Alam dengan luas total 745.654,68 ha atau sekitar 8,57%.

c. Perkebunan

Perkebunan diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas total 2.674.163,84 ha atau sekitar 30,73% (Gambar 3.14, 3.15, 3.16, 3.17)



Gambar 3.11. Peta rencana pengembangan budidaya pertanian

d. Perikanan Darat

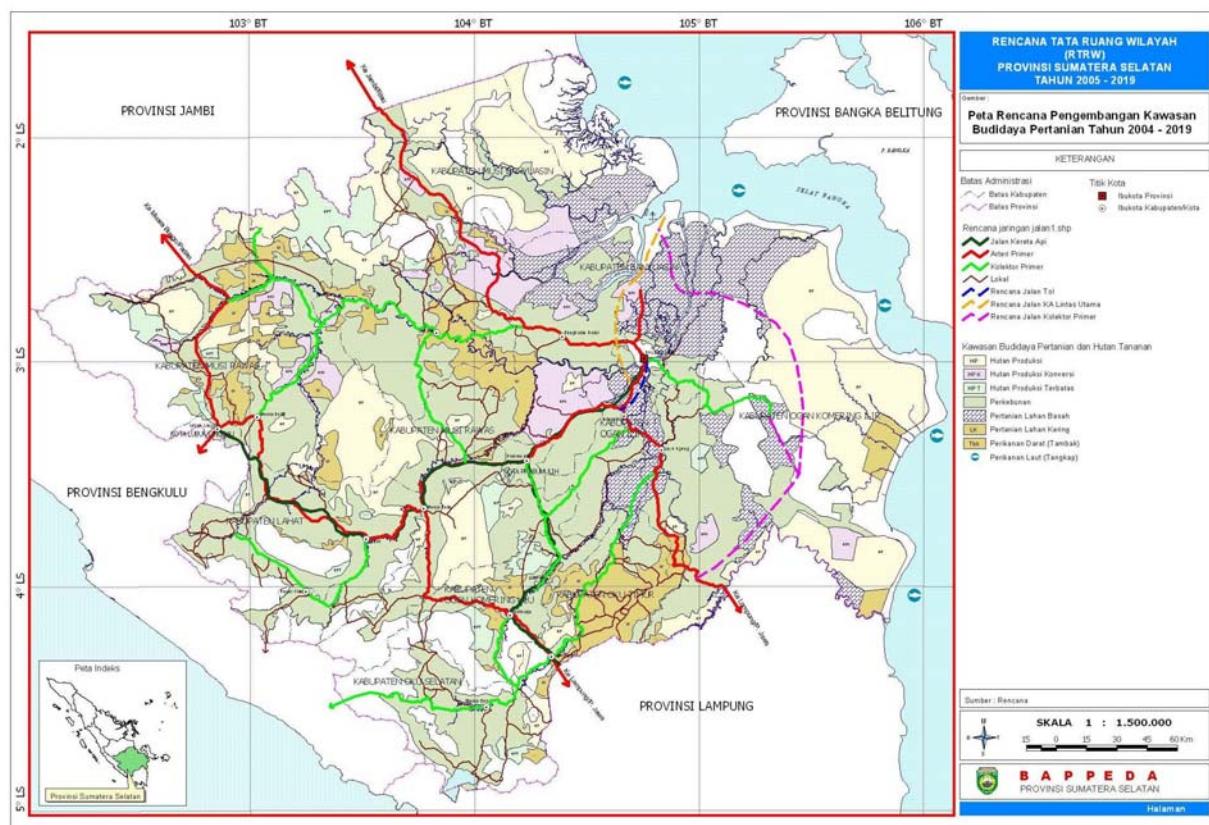
Perikanan darat diarahkan pengembangannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas total 42.594,06 ha atau sekitar 0,49 %.

e. Hutan Produksi

Hutan produksi diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten kota kecuali Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang dan Kota Pagar Alam dengan luas total 2.244.310,16 ha atau sekitar 25,79%.

f. Hutan Produksi Terbatas

Hutan produksi terbatas diarahkan pengembangannya di Kabupaten Lahat, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Prabumulih dengan luas total 247.136,63 ha atau sekitar 2,84%.

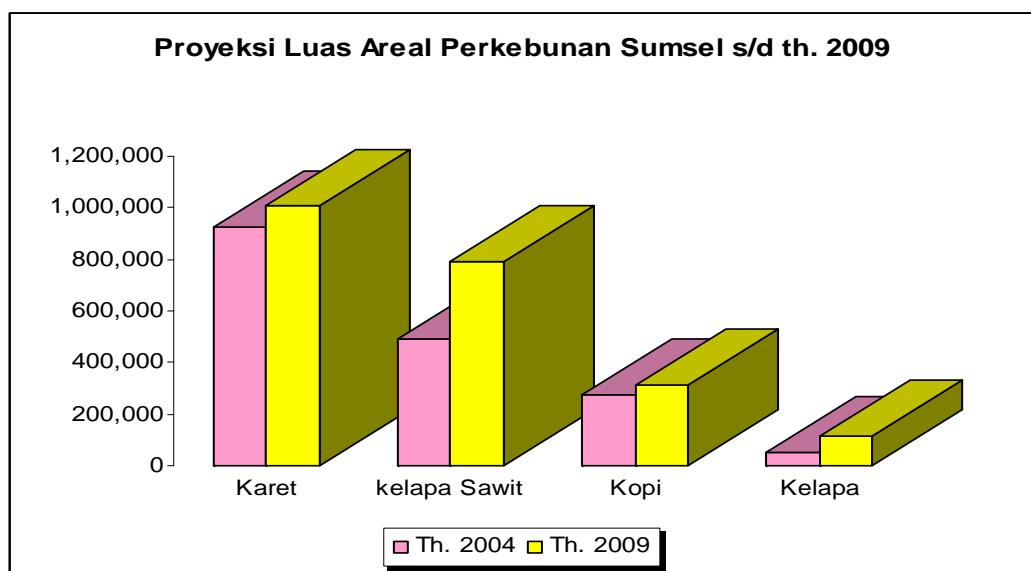


Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.12. Peta rencana pengembangan kawasan budidaya Provinsi Sumatera Selatan

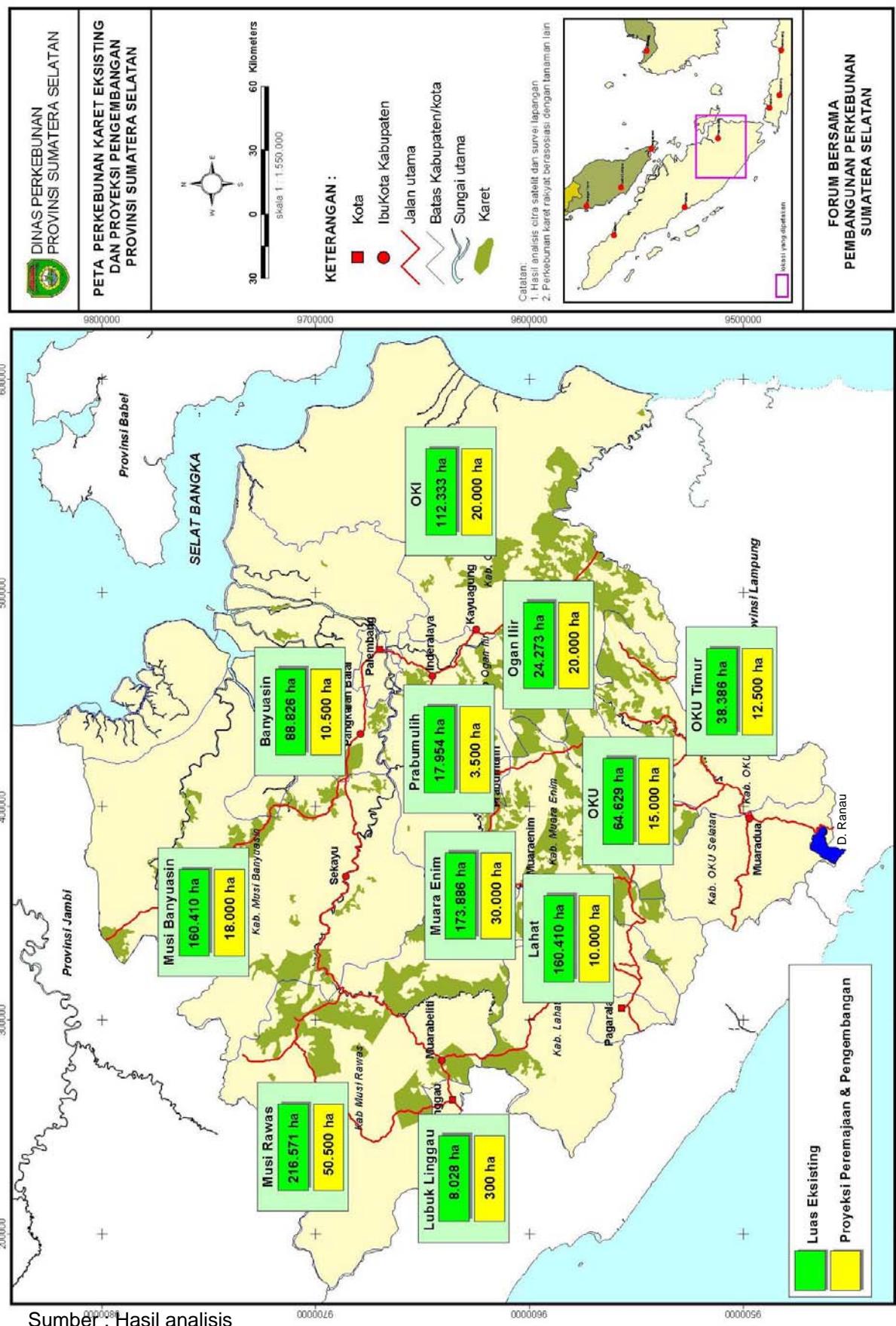
Berdasarkan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2019, sektor perkebunan diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas total 2.674.163,84 ha atau sekitar 30,73%. Dengan asumsi proyeksi produksi perkebunan komoditi unggulan di Sumatera Selatan, maka diprediksikan penambahan luas areal berkisar sekitar 484.692 ha sehingga jumlah luas perkebunan untuk komoditi unggulan mencapai 2.225.048 ha.

Perbandingan kondisi eksisting dan Proyeksi perluasan, peremajaan serta rehabilitasi tanaman perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005–2009 untuk setiap komoditi unggulan dapat dilihat pada grafik (Gambar 3.13) di bawah ini:



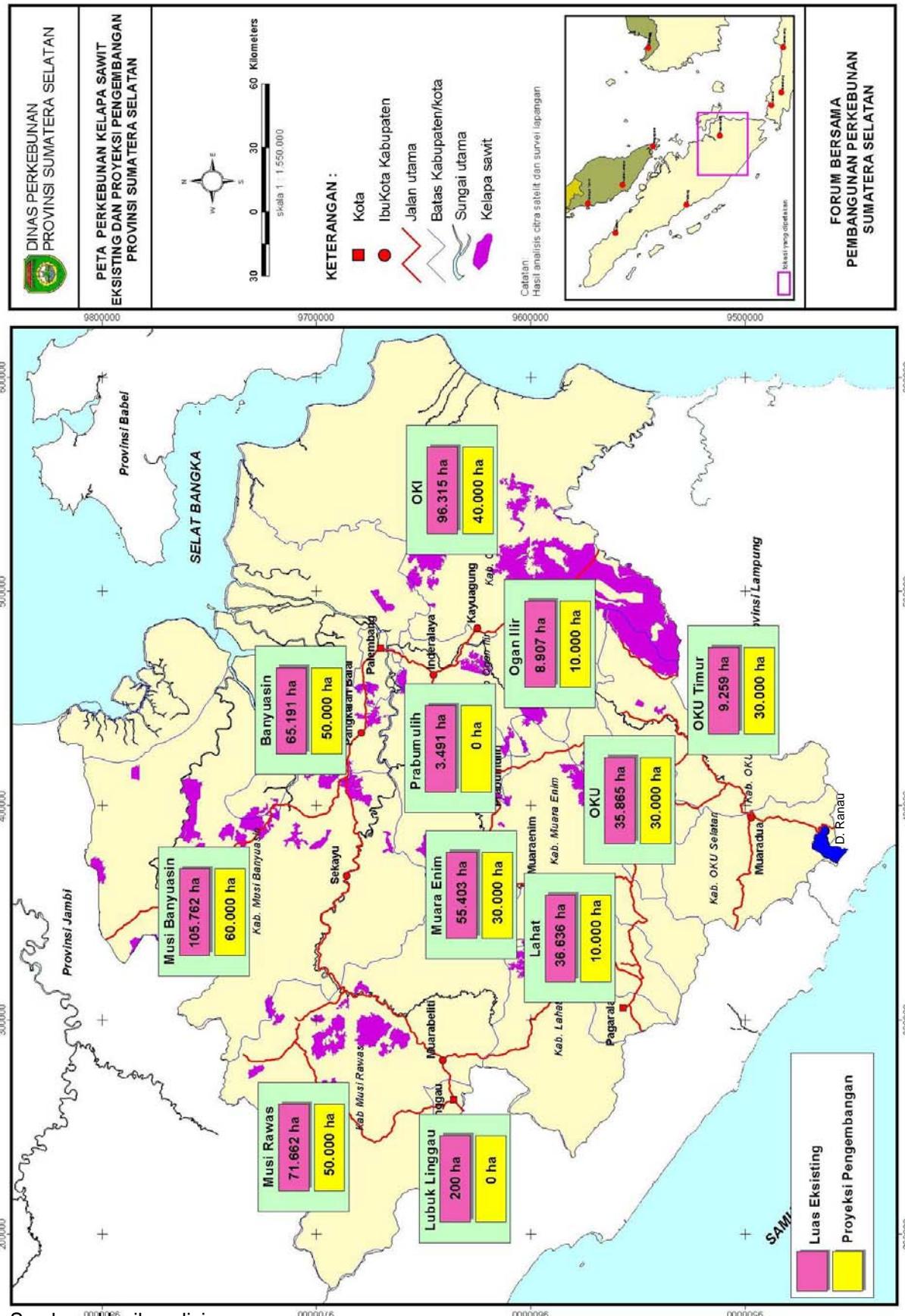
Sumber: Hasil Analisis

Gambar 3.13. Proyeksi luas areal perkebunan Provinsi Sumatera Selatan



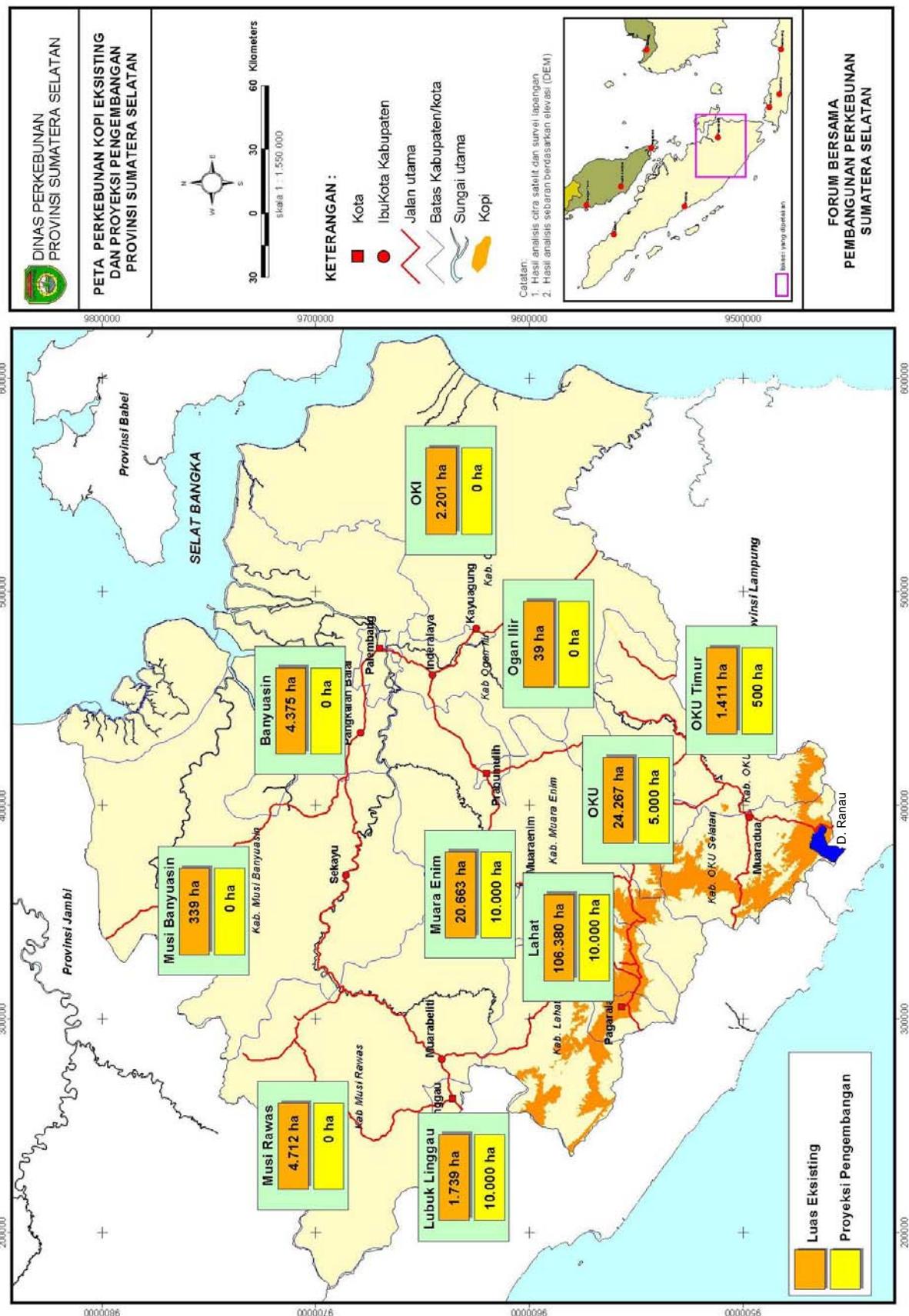
Sumber : Hasil analisis

Gambar 3.14. Peta perkebunan karet eksisting dan proyeksi pengembangan



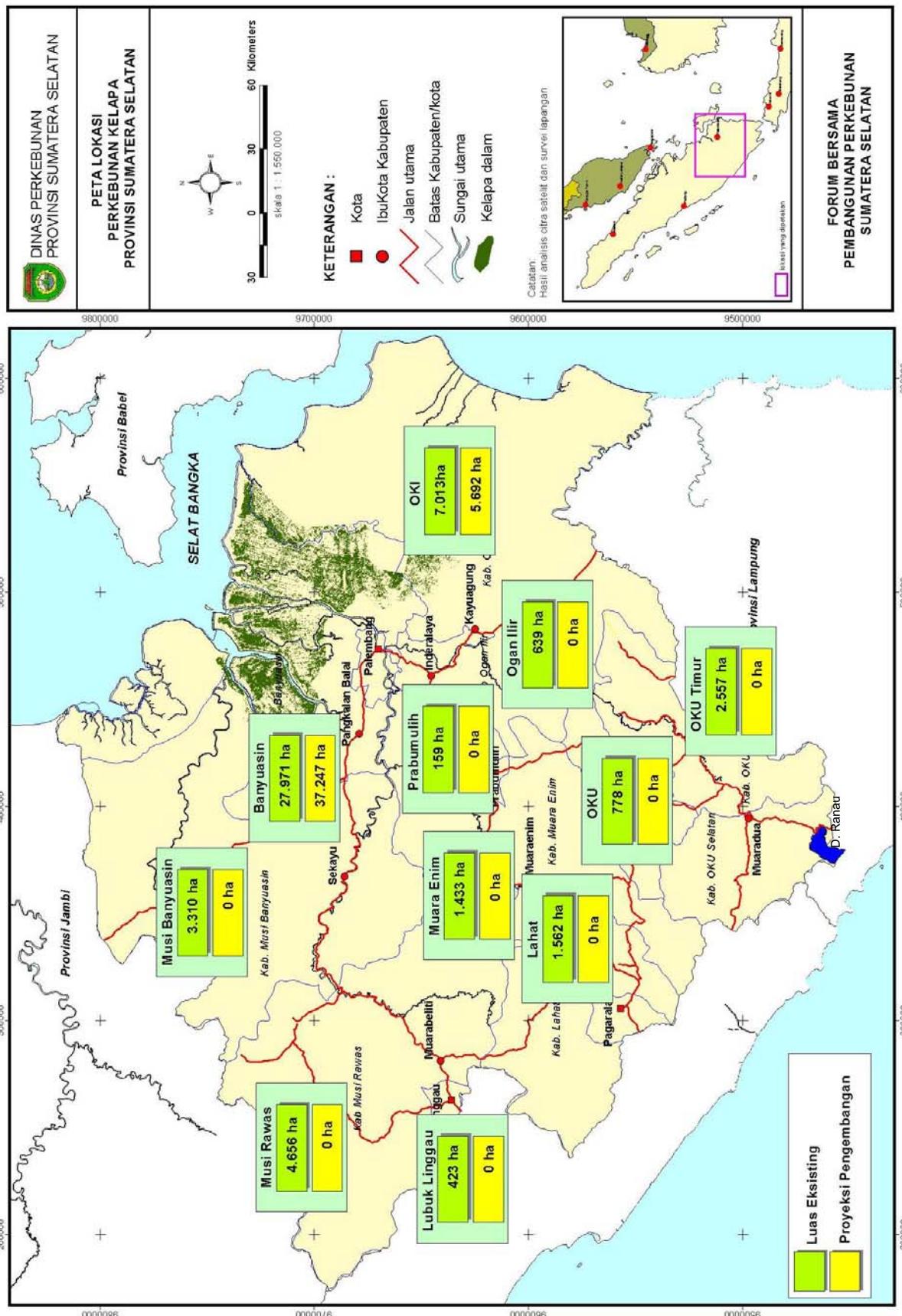
Sumber : Hasil analisis

Gambar 3.15. Peta perkebunan kelapa sawit eksisting dan proyeksi pengembangan



Sumber: Hasil analisis

Gambar 3.16. Peta perkebunan kopi eksisting dan proyeksi pengembangan



Sumber: Hasil analisis

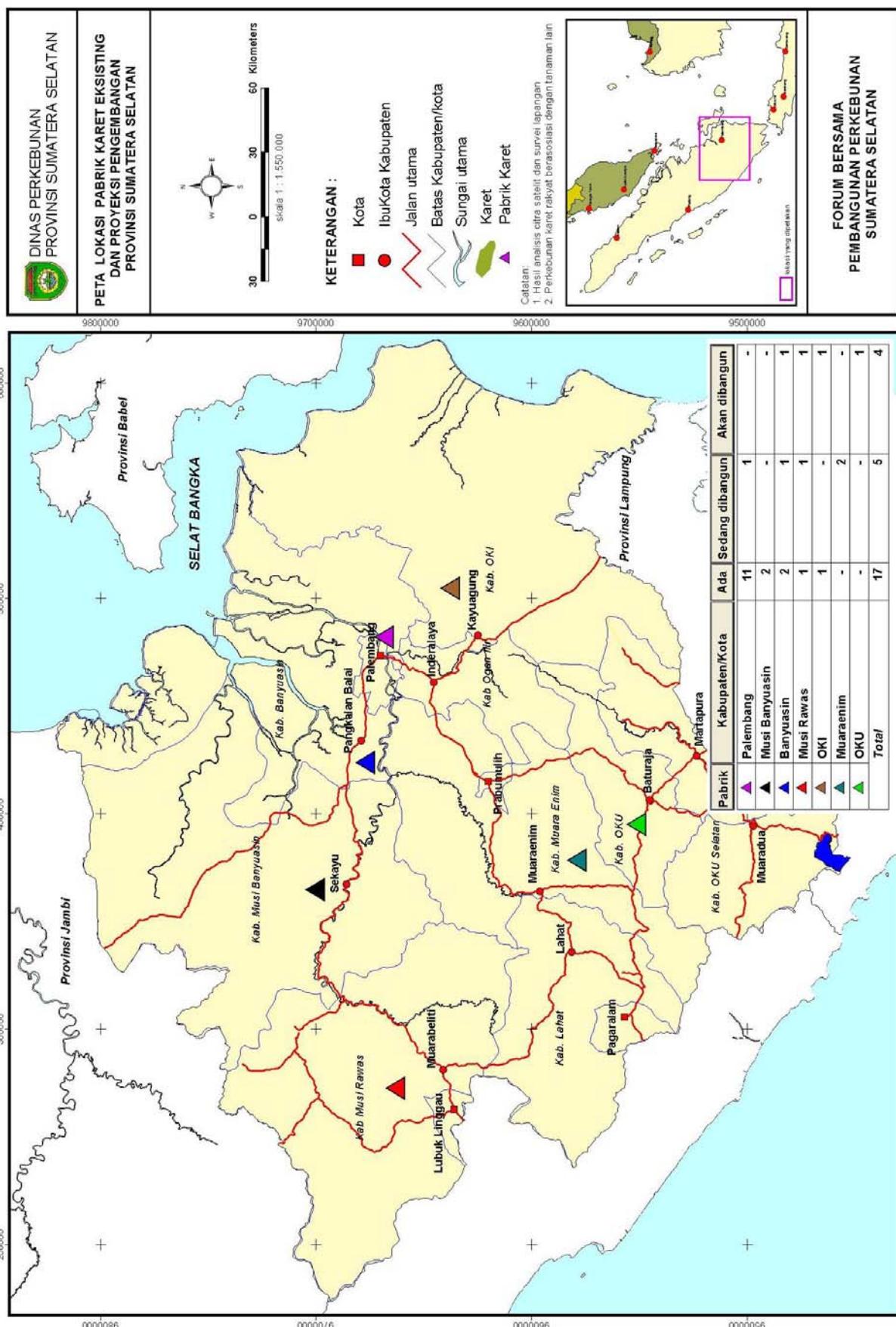
Gambar 3.17. Peta perkebunan kelapa eksisting dan proyeksi pengembangan

3.4.2. Pengembangan Pabrik Pengolahan

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan dalam rangka mendukung arus keluar masuk produksi hasil pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan perkebunan dari setiap komoditi unggulan belum tersebar secara merata menurut luasan areal dan kapasitas produksinya. Pembangunan infrastruktur transportasi akan memacu investor dalam pembangunan pabrik pengolahan. Pembangunan prasarana seperti yang telah dijelaskan pada uraian di atas diharapkan akan diikuti dengan pembangunan prasarana ke lokasi pabrik pengolahan. Sebaran lokasi pabrik pengolahan produksi perkebunan yang sudah ada dan perkiraan penambahannya dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

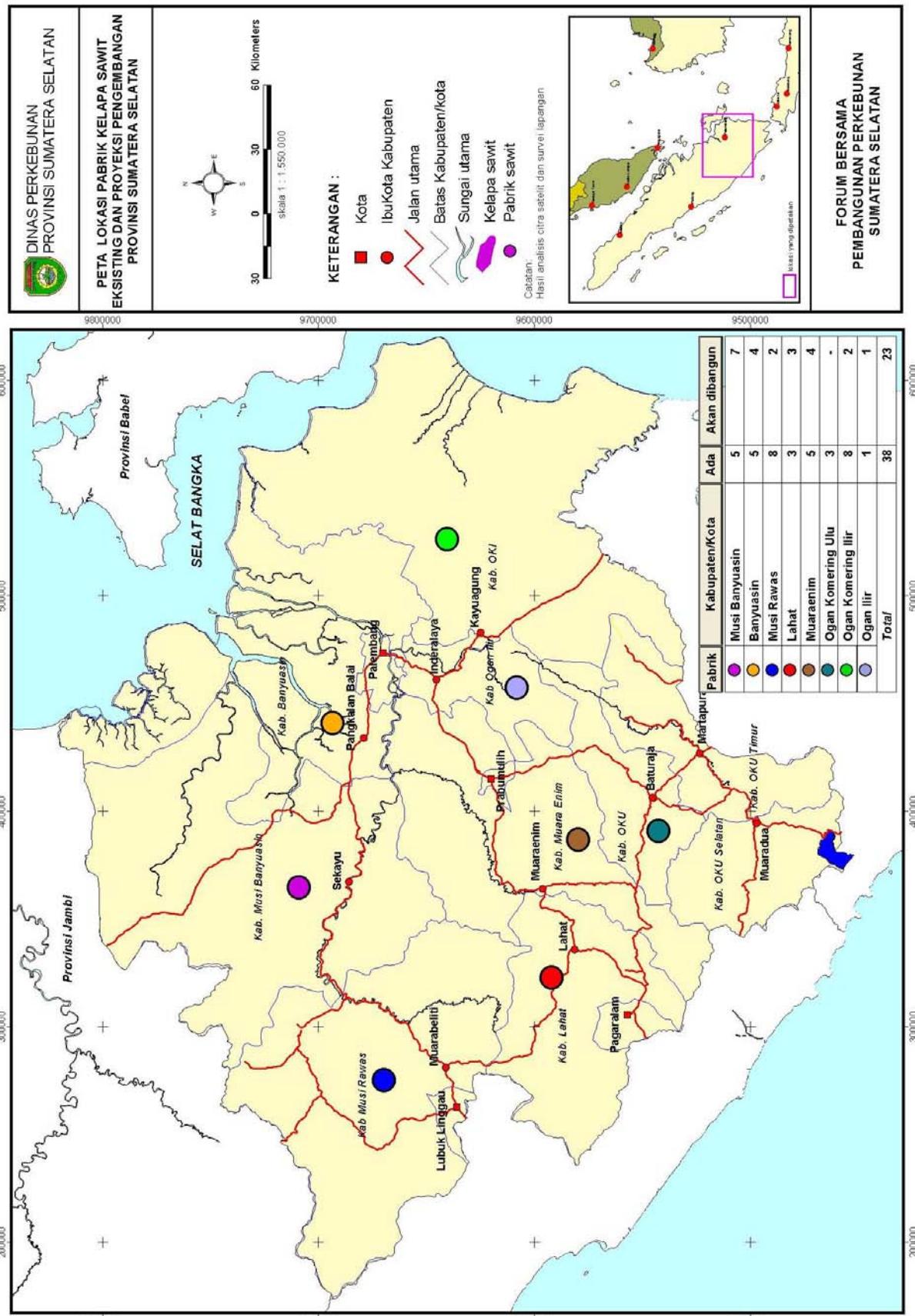
Tabel 3.8. Pabrik pengolahan komoditi perkebunan di Provinsi Sumsel

No.	Komoditi	Pabrik Pengolahan (unit)	
		Eksisting	Akan di Bangun
1	Karet	17	9
2	Sawit	38	23
3	Kopi	5	2
4	Kelapa	0	2
Total		459	36



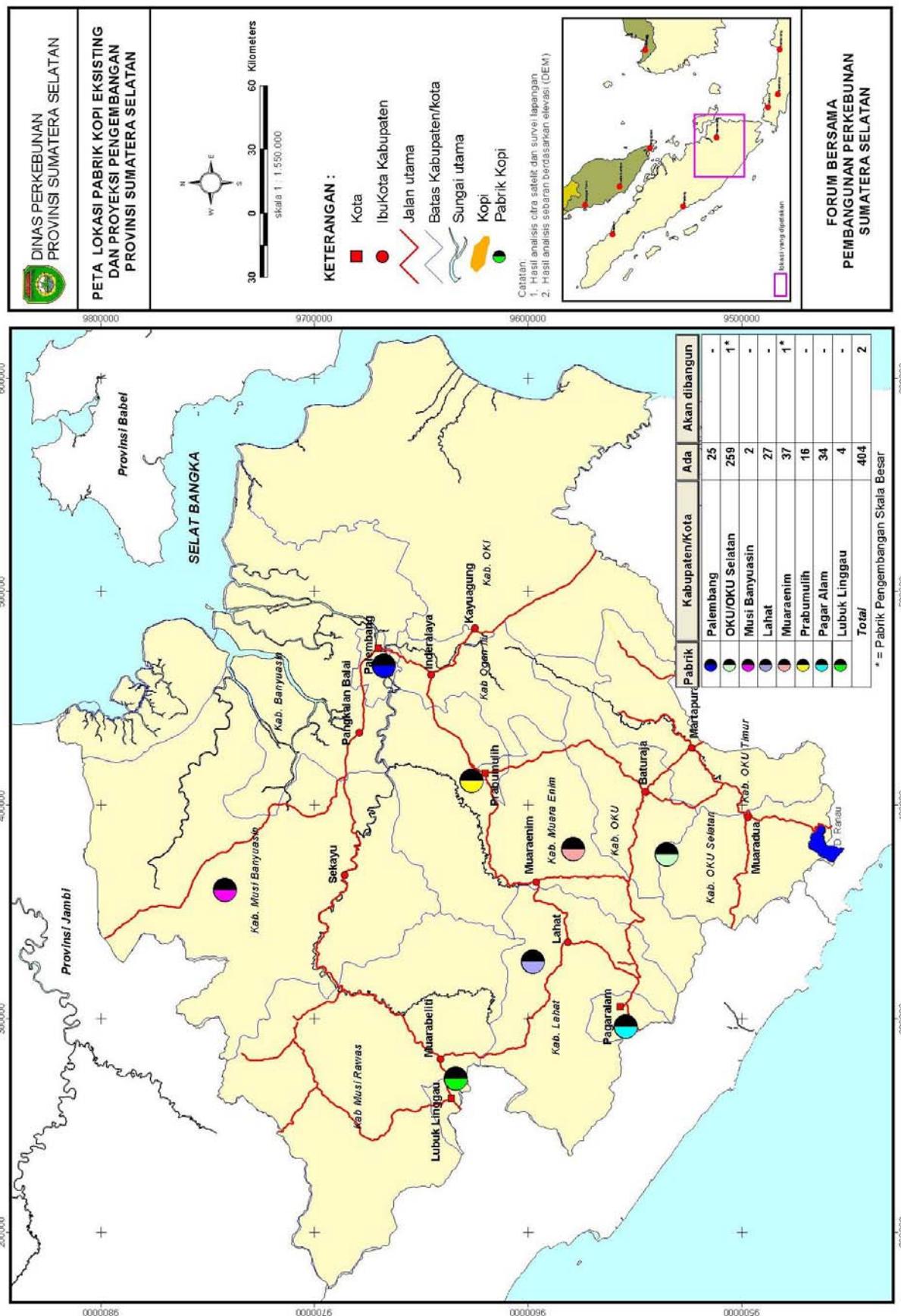
Sumber: Disbun Prov. Sumsel dan Hasil Analisis

Gambar 3.18. Peta lokasi pabrik karet eksisting dan proyeksi pengembangan

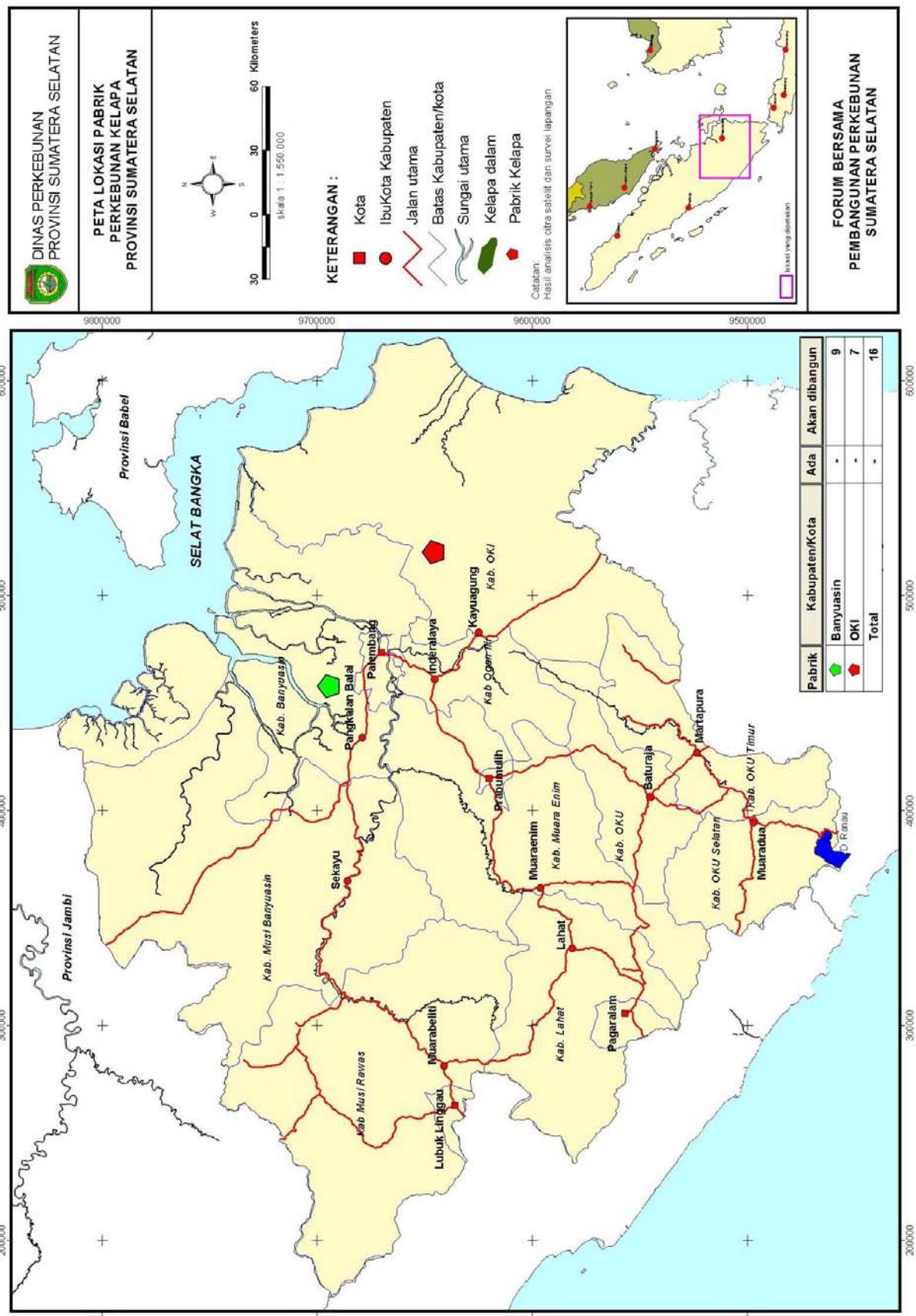


Sumber: Disbun Prov. Sumsel dan Hasil Analisis

Gambar 3.19. Peta lokasi pabrik kelapa sawit eksisting dan proyeksi pengembangan



Gambar 3.20. Peta lokasi pabrik kopi eksisting dan proyeksi pengembangan



Gambar 3.21. Peta lokasi pabrik kelapa eksisting dan proyeksi pengembangan

3.5. Kondisi dan Pengembangan Infrastruktur

3.5.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi

A. Pola Pergerakan

Sejalan dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2019, pola pergerakan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1. *Pergerakan Eksternal*,** yaitu pergerakan yang berasal dari luar wilayah perencanaan atau pergerakan yang menuju ke luar wilayah perencanaan. Pergerakan eksternal memperlihatkan peran Provinsi Sumatera Selatan berada dalam konstelasi regional yang penting dengan Wilayah di sekitar Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melayani pergerakan eksternal terdapat empat *outlet* (pintu gerbang) yaitu: Stasiun Kereta Api Kertapati, Pelabuhan Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pelabuhan Laut Boom Baru Palembang dan Terminal Angkutan Penumpang di Palembang.

Pada sistem transportasi darat, wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki dua poros jalan utama yang melayani pergerakan regional (pergerakan lintas Provinsi di Pulau Sumatera), yaitu Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera. Kedua poros jalan tersebut memegang peranan yang sangat penting bagi pergerakan orang dan barang di wilayah Pulau Sumatera. Konsekuensi wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap wilayah Provinsi lainnya. Transportasi darat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai melalui mobil dan kereta api.

Untuk mengakses wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dicapai melalui transportasi udara. Jalur penerbangan yang dapat dijangkau oleh Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang cukup banyak diantaranya Jakarta, Padang, Batam, Medan untuk penerbangan domestik, Singapore dan Penang, Malaysia untuk penerbangan internasional. Untuk menjangkau wilayah Provinsi Sumatera Selatan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat. Pergerakan menggunakan transportasi laut dapat dilayani Pelabuhan Palembang. Pelabuhan Palembang ini melayani rute pelayaran dalam negeri maupun luar negeri.

- 2. *Pergerakan Internal*,** yaitu pergerakan yang terjadi dalam wilayah perencanaan itu sendiri, meliputi pergerakan antar kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk pergerakan internal di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan banyak dilayani oleh transportasi jalan raya. Transportasi jalan raya memegang peranan sangat

penting dalam menunjang mobilitas orang dan barang. Disamping itu transportasi sungai juga perlu ditingkatkan untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal itu sesuai dengan karakteristik wilayah Sumatera Selatan dengan banyak sungai yang dapat dijadikan jalur transportasi seperti Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Lakitan, Rupit, Rawas, Mesuji, Lalan, dan Banyuasin. Transportasi sungai tersebut ditekankan untuk melayani hubungan antar kota, kecamatan atau desa.

Pengembangan konsep sistem jaringan transportasi dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan integrasi dari sistem transportasi intermoda darat, laut, sungai dan udara.

B. Transportasi Darat

Saat ini indeks mobilitasnya jalan darat ada yang berada di atas dan di bawah standar pelayanan minimal. Mendukung rencana pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan program Lumbung pangan. Sumatera Selatan akan meningkatkan jaringan jalan darat yang sudah ada dan membangun jaringan jalan baru untuk mendukung aktivitas masyarakat yang sangat membutuhkan akses jalan darat.

C. Transportasi Laut

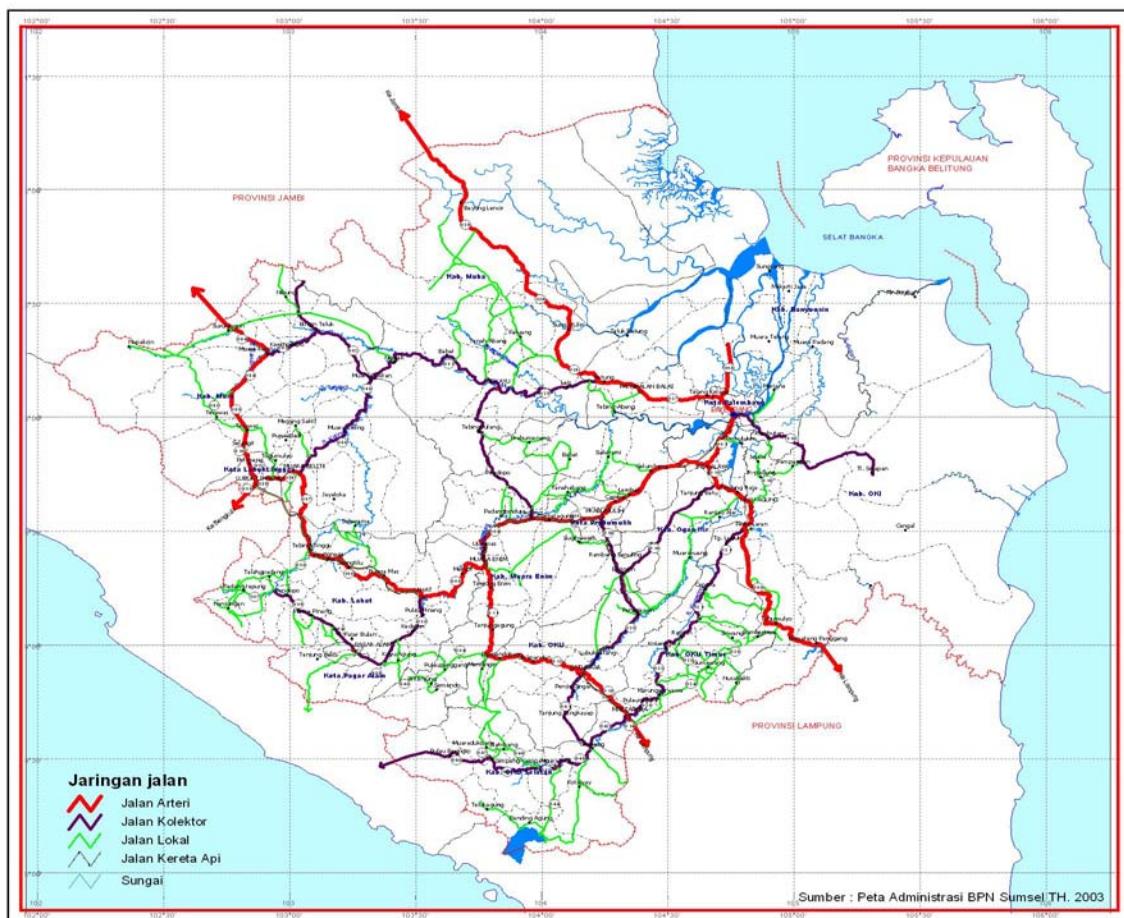
Transportasi melalui laut saat ini dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru Palembang. Tetapi dalam pengembangannya, keberadaan pelabuhan Boom Baru Palembang terdapat beberapa kendala seperti Jarak yang jauh ke muara sungai, alur pelayaran yang relatif sempit, sedimentasi tinggi dan sangat tergantung pada pasang surut. Oleh karena itu Pemerintah akan membangun Pelabuhan samudera Tanjung Api-Api untuk mendukung pembangunan Sumatera Selatan.

D. Transportasi Udara

Dengan telah dibangunnya Pelabuhan Udara Sultan Mahmud Badaruddin II yang bertaraf internasional, selanjutnya akan lebih banyak dibuka jalur-jalur trasportasi udara untuk menjangkau kota-kota besar lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini kapasitas pelayanan rata-rata bandara berkisar antara 30-90%. Dengan perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang pesat, untuk kedepan pemerintah provinsi Sumatera Selatan melakukan peningkatan kapasitas pelayanan bandara.

Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat beberapa lapangan terbang yang melayani pergerakan lokal, diantaranya terdapat di Sekayu, Lubuk Linggau, dan

Danau Ranau. Keberadaan lapangan terbang tersebut akan dimanfaatkan sebagai alternatif transportasi antar kabupaten di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Bappeda Prov. Sumsel: RTRW Provinsi Sumsel).



Gambar 3.22. Peta jaringan jalan eksisting

3.5.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

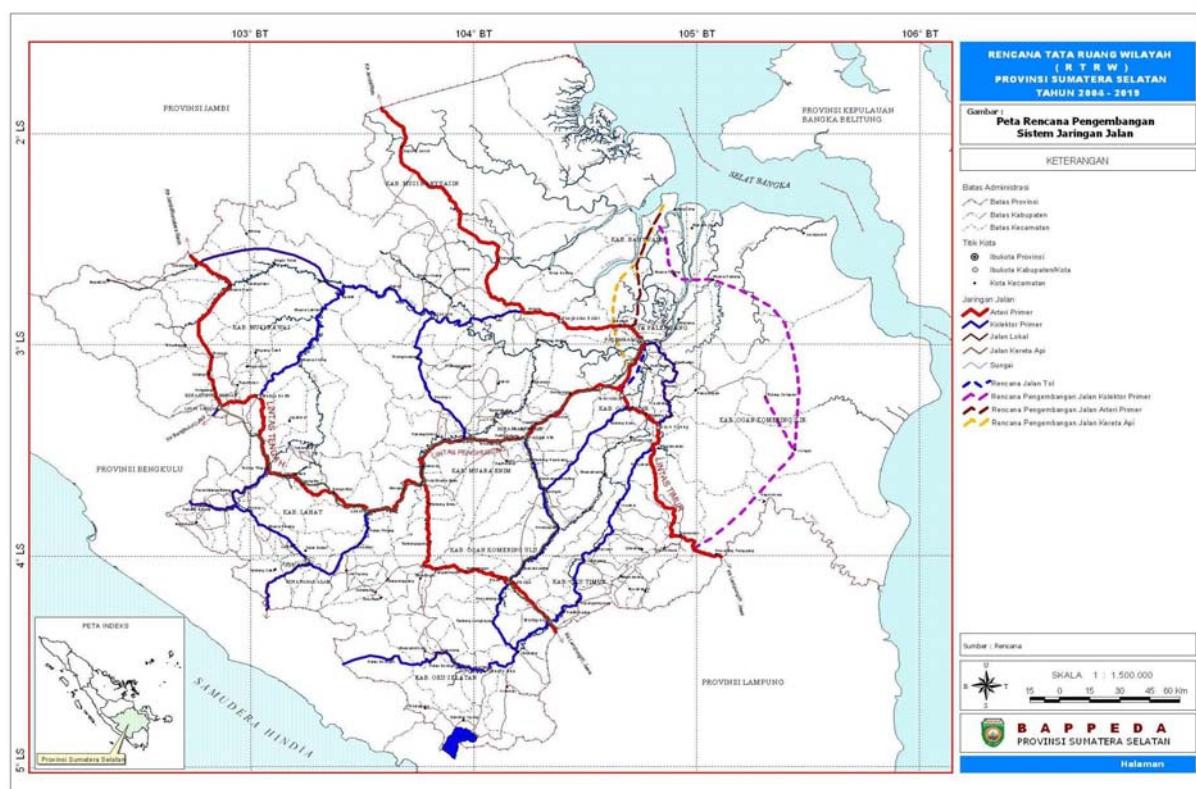
A. Peningkatan dan Pembangunan Jalan Baru

Dengan adanya pembangunan pelabuhan laut di Tanjung Api Api, maka diperkirakan arus kendaraan yang menggunakan jalan akses menuju ke pelabuhan tersebut akan semakin besar dan ini tentunya akan membebani jaringan jalan yang ada. Jaringan jalan akses menuju ke pelabuhan Tanjung Api Api yang ada saat ini melalui Kota Palembang. Hal ini dapat menimbulkan beban berlebih terhadap jaringan jalan di Kota Palembang yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemacetan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibangun jalan lingkar luar barat untuk melayani arus tersebut. Selain itu, perlu juga ditingkatkan atau dibangun jalan sekelas arteri primer yang menghubungkan Kota Palembang dengan pelabuhan laut di Tanjung Api Api.

a. Jalan Kereta Api

Selain menggunakan transportasi jalan raya, pergerakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat juga dilayani oleh jaringan kereta api. Transportasi Kereta Api ini, selain melayani rute pergerakan internal, juga melayani pergerakan keluar wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.23. Peta rencana pengembangan sistem jaringan jalan

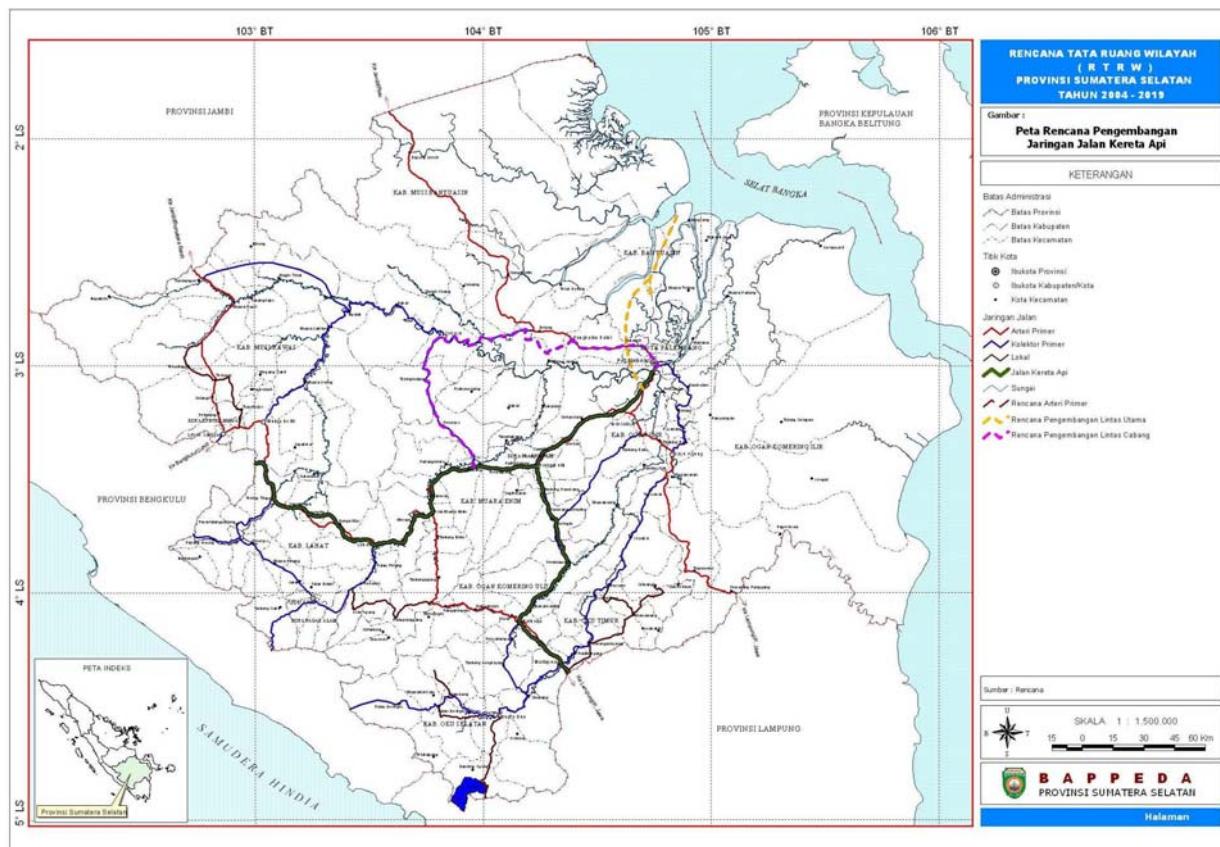
Jaringan transportasi kereta api ini perlu dikembangkan sebagai alternatif transportasi umum masal yang melayani pergerakan internal maupun eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban jaringan jalan raya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan pelabuhan samudra di Tanjung Api Api, akan dikembangkan jaringan kereta api yang menghubungkan Palembang dengan pelabuhan laut di Tanjung Api - Api tersebut untuk melayani pergerakan barang dan penumpang. Dengan demikian wilayah belakang (*hinterlandnya*) dapat terlayani dengan baik.

Tabel 3.9. Rencana pengembangan jaringan kereta api

Lintas Utama	Lintas Cabang
Tarahan – Bd. Lampung – Baturaja - Blimbing – Muaraenim – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau Betung – Palembang Tanjung Api-Api – Palembang – Simpang Kertapati – Simpang – Prabumulih Palembang – Bandar Lampung	Tebing Tinggi – Bengkulu Simpang – Kayu Agung – Kilometer 3 Kilometer 3 – Bakauheni Lubuk Linggau – Muara Bungo Tg. Enim – Baturaja Betung – Sekayu Belimbings – Sekayu

Sumber. RTRW Provinsi Sumatera Selatan



Sumber. RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.24. Peta rencana pengembangan jaringan rel kereta api

b. Terminal

Dalam konteks pengembangan perkebunan, Pemerintah Sumatera Selatan akan membangun terminal barang. Terminal Barang itu dibangun menurut fungsi pelayanan penyebaran atau distribusinya dibedakan atas:

- **Terminal Utama**, berfungsi melayani penyebaran antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bagi wilayah yang memiliki PKN didalamnya, dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke PKN, antar PKW, serta angkutan barang perpindahan antar moda di simpul-simpul utama kegiatan transportasi terutama pelabuhan laut dan penyeberangan.
- **Terminal Pengumpulan**, berfungsi melayani penyebaran dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ke PKW, dan anatar Pusat Kegiatan PKL.
- **Terminal Lokal**, berfungsi melayani penyebaran dari sub PKL 1 ke PKL, antar sub PKL 1 dan ke kawasan-kawasan produksi di dalam wilayah kabupaten/kota.

Pembangunan terminal peti kemas akan dibangun di Lubuk Linggau dan Martapura, diharapkan dapat memberikan manfaat ganda terhadap pengembangan perekonomian wilayah, karena yang akan berkembang adalah industri pengolahan (agroindustri) yang diikuti dengan pesatnya pengembangan perkebunan secara swadaya sebagai sumber bahan baku.

c. Transportasi Air

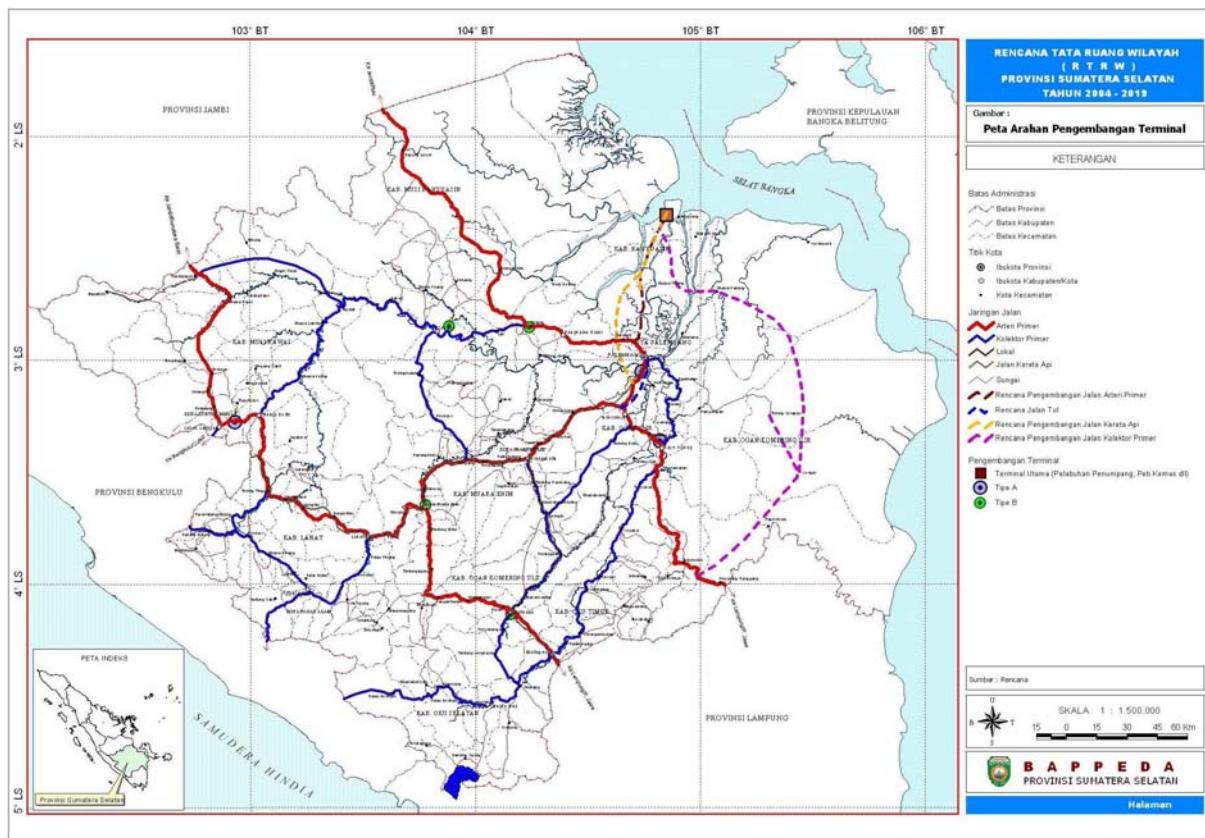
- **Transportasi Sungai**

Transportasi sungai pada hakekatnya termasuk ke dalam transportasi darat, yang dimanfaatkan sebagai media untuk pergerakan penumpang dan barang antara wilayah yang belum terhubungkan oleh jaringan jalan.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sungai yang dapat dikembangkan untuk pelayanan pergerakan penduduk dan barang seperti sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Lakitan, Rupit, Rawas Mesuji, Lalan, dan Banyuasin. Keberadaan transportasi sungai tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk melayani pergerakan penduduk dan atau barang antar kecamatan dan desa sepanjang sungai-sungai tersebut selama jaringan jalan raya belum dibangun. Dalam pengembangannya akan diintegrasikan sistem transportasi jalan.

- **Transportasi Laut**

Arahan pengembangan pelabuhan laut di Tanjung Api-Api diarahkan sebagai pelabuhan utama primer yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dengan jangkauan pelayanan yang menengah serta merupakan simpul jaringan transportasi laut nasional.



Sumber. RTRW Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.25. Peta rencana pengembangan terminal

Selain pelabuhan umum, pengembangan pelabuhan khusus yang melayani kegiatan pertambangan batubara akan dikembangkan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pelabuhan khusus ini akan melayani terkait dengan kegiatan pertambangan batubara di kawasan tersebut.

d. Transportasi Udara

Transportasi udara berfungsi menyalurkan penumpang dan barang secara cepat. Mengingat kondisi wilayah nasional, pengembangan transportasi udara disamping untuk menghubungkan kawasan-kawasan dalam ruang wilayah nasional dengan pusat perkembangan internasional, juga digunakan untuk membuka dan mendorong perkembangan kawasan-kawasan kurang berkembang dan terisolasi.

Sesuai dengan fungsinya dalam tata ruang wilayah, jaringan transportasi udara menggambarkan lokasi pelabuhan udara untuk pelayanan penumpang dan bongkar muat barang untuk melayani kawasan dan wilayah pelayanan masing-masing.

Kualitas pelayanan suatu bandara secara umum selain ditentukan oleh kondisi fisik dan pelayanan bandara yang bersangkutan, juga terkait dengan aksesibilitas bandara tersebut dari/ke daerah pelayanannya.

Untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan bandara pusat penyebaran primer adalah di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Dengan pelayanan rute penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Sedangkan 3 bandar udara lain yang masing-masing terdapat Sekayu, Lubuk Linggau, dan Danau Ranau arah pengembangannya menjadi bandara pusat penyebaran tersier.

B. Program Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan-kawasan sentra produksi, maka program pengembangan sistem transportasi (darat, laut, dan udara) adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas pelayanan jaringan jalan arteri primer.
- Peningkatan kapasitas jaringan jalan kolektor primer.
- Pengembangan sistem angkutan massal, dalam hal ini kereta api.
- Pengembangan dan pembangunan sarana terminal.
- Peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan dan bandara udara.

Program-program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi antara darat laut dan udara, sehingga membentuk satu kesatuan pola sistem transportasi untuk menghubungkan seluruh Provinsi Sumatera Selatan.
2. Berdasarkan penilaian Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas dibawah standar pelayanan minimal, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan jaringan jalan dengan jalan menambah panjang jalan yang ada.
3. Penetapan klasifikasi fungsi jaringan jalan yang disesuaikan dengan pengembangan sistem pusat-pusat yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2019.
4. Pengembangan dan pembangunan sistem transportasi angkutan massal, dalam hal ini sistem angkutan kereta api yang menghubungkan pusat-pusat utama (pusat-pusat kegiatan wilayah) yang akan dikembangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dengan melihat karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sungai akan dikembangkan untuk pelayanan pergerakan penduduk dan barang seperti sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Lakitan, Rupit, Rawas Mesuji, Lalan, dan Banyuasin. Keberadaan transportasi sungai tetap dipertahankan dan

dikembangkan untuk melayani pergerakan penduduk dan atau barang antar kecamatan dan desa sepanjang sungai-sungai tersebut. Dalam pengembangannya, tentunya harus diintegrasikan sistem transportasi jalan.

6. Mengingat keberadaan pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai sudah kurang layak untuk melayani perkembangan dan pertumbuhan perdagangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dicari alternatif lokasi pelabuhan pengganti. Berdasarkan studi yang telah dilakukan lokasi yang dianggap layak untuk dikembangkan pelabuhan samudera adalah di Tanjung Api-Api. Dalam pengembangannya perlu didukung dan diintegrasikan dengan pengembangan jaringan transportasi darat (jalan raya dan jalan rel kereta api), sehingga memudahkan daerah belakangnya (hinterland) mengakses pelabuhan samudera tersebut. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Tanjung Api Api diarahkan sebagai pelabuhan utama tersier yang berfungsi khususnya untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dengan jangkauan pelayanan yang menengah serta merupakan simpul jaringan transportasi laut nasional.
7. Pengembangan pelabuhan udara utama dengan jaringan pelayanan transportasi primer adalah di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Dengan pelayanan rute penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Sedangkan 3 bandara udara lain yang masing-masing terdapat Sekayu, Lubuk Linggau, dan Danau Ranau arah pengembangannya menjadi bandara udara kelas tiga dengan jaringan pelayanan transportasi sekunder.
8. Dengan adanya pemekaran wilayah (kabupaten) di Provinsi Sumatera Selatan, maka akan dilakukan penataan sistem simpul (terminal) agar struktur jaringan jalan dengan sistem simpul yang ada dapat terintegrasi dengan baik. Selain itu, tentunya perlu dilakukan juga penataan jaringan trayek angkutan umum yang melayani pergerakan antar wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan fungsi terminal disesuaikan sistem pusat-pusat yang akan dikembangkan.

C. Program Pengembangan Prasarana Wilayah

Untuk meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, program pengembangan prasararana energi dan telekomunikasi, meliputi:

- a. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi.
- b. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

- c. Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telekomunikasi alternatif.

Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan berikut ini:

- a. Pengembangan jaringan transmisi/sistem kelistrikan Sumbagsel-Lampung-Bengkulu-Sumbar-Riau, dengan pembangunan gardu induk baru dan pembangunan pembangkit tenaga listrik (PLTU, PLTA, dan PLTD) untuk menambah kapasitas daya terpasang.
- b. Peningkatan jaringan distribusi listrik ke daerah perdesaan.
- c. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya mikrohidro, angin, dan surya di perdesaan.
- d. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa.
- e. Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

D. Program Pengembangan Sumatera Selatan Lumbung Pangan

Pengembangan kawasan andalan dilaksanakan melalui program pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, usaha bisnis kelautan, jasa dan sumber daya manusia. Program-program ini kemudian dijabarkan melalui beberapa kegiatan berikut ini:

- 1. Program pengembangan agribisnis, kegiatannya adalah:
 - a. Penataan kawasan sentra produksi pertanian di kabupaten dan kota.
 - b. Pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan lumbung pangan.
 - c. Pembangunan dan pengadaan infrastruktur pendukung untuk transportasi (jalan, jembatan, terminal, pelabuhan/dermaga), irigasi/pengairan, listrik, dan telekomunikasi serta perdagangan (pasar, sub terminal agribisnis, gudang).
 - d. Pengembangan IPTEK atau pendidikan dan latihan teknis bagi aparat dan petani.
 - e. Optimalisasi balai-balai penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
 - f. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil melalui pengadaan alat mesin pertanian, pengering, dan penggiling.

- g. Pembangunan kebun bibit dan pengadaan benih atau bibit unggul beserta pelatihannya.
 - h. Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi unggulan (padi, jagung, karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa).
 - i. Pencetakan sawah, dan perluasan kebun.
 - j. Penelitian dan pengembangan varitas unggulan di Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan sekitarnya, serta Muara Enim dan sekitarnya.
 - k. Penguatan kelembagaan tani di setiap kawasan andalan.
 - l. Pemanfaatan teknologi dan sarana produksi yang ramah lingkungan.
- 2. Program pengembangan industri, kegiatannya ialah:
 - a. Identifikasi dan pengembangan kelompok industri.
 - b. Penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal.
 - c. Mendorong masuknya investasi melalui regulasi dan perizinan.
 - d. Pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri.
 - e. Mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri (*industrial estate*).
- 3. Program pengembangan pariwisata, kegiatannya ialah:
 - a. Penataan kawasan wisata di Pagar Alam, Danau Ranau dan Sungai Musi Palembang.
 - b. Promosi pariwisata dan pengembangan tempat wisata dan penyelenggaraan festival atau *event* wisata
 - c. Pengembangan produk agroindustri.
 - d. Pengembangan *agro estate*.
 - e. Pengembangan *ecotourism* di kawasan TNKS, Pagar Alam, Banyuasin, Muara Enim dan Lahat.
 - f. Pengembangan agrowisata di Pagar Alam, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu Selatan.
- 4. Program pengembangan bisnis kelautan, kegiatannya ialah:
 - a. Identifikasi daerah-daerah penangkapan ikan, sumberdaya ikan, dan budidaya ikan.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan (dermaga, pelabuhan, tempat pendaratan ikan / TPI) di Pantai Timur Sumatera Selatan.
 - c. Pengembangan sarana penyimpanan (*cold storage*).
 - d. Penguatan kelembagaan nelayan/masyarakat pesisir di Pantai Timur Sumatera Selatan.
 - e. Pengembangan sentral pemasaran dan pengolahan hasil laut.
 - f. Perbaikan alur-alur pelayaran di Pantai Timur Sumatera Selatan.
 - g. Rehabilitasi hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera Selatan.
5. Program pengembangan jasa, kegiatannya ialah:
- a. Penumbuhan jasa informasi.
 - b. Pengembangan jasa perdagangan.
 - c. Pengembangan jasa konsultansi.
 - d. Pengembangan jasa pendidikan.
 - e. Pengembangan jasa riset dan teknologi.
6. Program pengembangan sumber daya manusia, kegiatannya ialah:
- a. Pengembangan balai-balai riset dan teknologi.
 - b. Pengembangan perguruan tinggi.
 - c. Pengembangan balai-balai pelatihan.

IV. RENCANA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

4.1. Kondisi Saat Ini

Sektor pertanian secara umum menunjukkan sumbangan yang penting dalam perekonomian daerah (Tabel 4.1). Kontribusi sektor pertanian terhadap PRDB Sumsel tanpa migas sekitar 28,06%. Secara rinci ternyata kontribusi sub sektor tanaman pangan (6,29%), tanaman perkebunan (12,92%), peternakan (2,16%), kehutanan (2,24%), dan perikanan (4,45%). PDRB sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan sejak tahun 2002 (7,02%), tahun 2003 (6,75%) dan tahun 2004 (6,29%).

Pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan selama hampir selama dua dekade terakhir telah berperan penting dalam menjaga stok beras nasional. Peran inilah yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan melalui program **Sumatera Selatan Lumbung Pangan Nasional** yang telah mendapat respon Pemerintah langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tabel 4.1. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Selatan, 2004

Sektor / Sector	Pertumbuhan (%) Tahun 2004
Pertanian / Agriculture	28,06
Pertambangan dan Penggalian / Mining, Quarry	5,83
Industri Pengolahan / Manufacturing Industries	18,79
Listrik, Gas dan Air Bersih / Electricity, Gas, Clean Water	0,96
Bangunan / Construction	9,94
Perdagangan, Hotel dan Restoran / Trade, Hotel and Restaurant	14,44
Pengangkutan dan Komunikasi / Transportation and Communication	5,73
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan / Finance, Rent Service, Companies	5,07
Jasa-jasa / Service	11,19
PDRB dengan Migas / GRDP with Ogan Ilir Gas	4,34
PDRB tanpa Jasa / GRDP without Gas	6,01

Keterangan: Angka sangat sementara

Peran Sumatera Selatan sebagai stok beras Nasional untuk mendukung Program Sumsel Lumbung Pangan Nasional dimungkinkan mengingat fakta potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Selatan yang dapat ditunjukkan dengan luasnya ketersediaan lahan budidaya pertanian sebesar 5.524.725 ha (Tabel 4.2). Luas lahan tersebut meliputi hampir 70% dari luas wilayah administrasi Sumatera Selatan yaitu sebesar 8.701.742 ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kabupaten yang memiliki lahan budidaya pertanian terluas (1.375.471 ha), berikutnya ialah Kabupaten Banyuasin (773.228 ha), Musi Rawas 734.067 ha, Kabupaten Musi Banyuasin (728.664 ha).

Tabel 4.2. Tabel Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Budidaya Pertanian (Ha)
1.	Ogan Komering Ulu	72.560
2.	Ogan Komering Ulu Timur	272.514
3.	OKU Selatan	389.569
4.	Ogan Komering Ilir	1.375.471
5.	Ogan Ilir	248.709
6.	Muara Enim	499.913
7.	Lahat	324.909
8.	Musi Rawas	734.067
9.	Musi Banyuasin	728.664
10.	Banyuasin	773.228
11.	Palembang	12.656
12.	Prabumulih	20.154
13.	Pagaralam	49.602
14.	Lubuk Linggau	22.711
Jumlah		5.524.725

Total jumlah penduduk Sumatera Selatan yang besarnya 6.755.900 jiwa (Tabel 4.3), diantaranya sebesar 4.117.877 jiwa atau sekitar 65% hidup dari mata pencaharian pertanian. Jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan budidaya pertanian, maka Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki rasio ketersediaan lahan per penduduk tertinggi yakni 2.09; diikuti oleh Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin masing-masing 1.55, Ogan Komering Ulu Selatan 1.23 dan Banyuasin 1.05. Khusus untuk kota Palembang ternyata ratio tersebut sangat kecil yaitu 0.01. Walaupun demikian, sebagian lahan tersebut telah diolah secara intensif untuk kegiatan hortikultura dan sebagian lagi untuk kegiatan budidaya padi sawah lebak sehingga dapat menambah pendapatan rumah tangga.

Tabel 4.3. Ketersediaan Lahan dan Rasio Lahan dengan Penduduk di Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk MPP	Kawasan Budidaya Pertanian (Ha)	Rasio KBP per Pddk
1.	Ogan Komering Ulu	171.015	72.560	0.28
2.	Ogan Komering Ulu Timur	372.527	272.514	0.49
3.	Ogan Komering Ulu Selatan	212.576	389.569	1.23
4.	Ogan Komering Ilir	440.075	1.375.471	2.09
5.	Ogan Ilir	239.179	248.709	0.70
6.	Muara Enim	423.589	499.913	0.79
7.	Lahat	365.655	324.909	0.60
8.	Musi Rawas	317.868	734.067	1.55
9.	Musi Banyuasin	314.347	728.664	1.55
10.	Banyuasin	491.665	773.228	1.05
11.	Palembang	535.517	12.656	0.01
12.	Prabumulih	87.328	20.154	0.15
13.	Pagaralam	76.757	49.602	0.43
14.	Lubuk Linggau	69.781	22.711	0.13
Jumlah		4.117.877	5.524.725	0.79

MPP: Mata Pencaharian Pertanian

KBP: Kawasan Budidaya Pertanian

Pada saat ini Sumatera Selatan memiliki luas lahan sawah abadi sebesar 752.150 Ha dengan rincian sebesar 399.521 Ha atau 55% merupakan lahan sawah IP 100; 113.655 Ha atau 15% lahan sawah IP 200 dan sisanya 238.974 Ha atau 30% adalah lahan sawah yang belum ditanami (Tabel 4.4.).

Tabel 4.4. Ketersediaan Lahan Sawah Abadi

	Lahan Sawah Abadi	752.150 Ha
1	Indeks Panen 100	399.521 Ha
2	Indeks Panen 200	113.655 Ha
3	Lahan Sawah Tidak Ditanami	238.974 Ha

Padi yang ada di Sumsel dihasilkan dari areal sawah (553.216 ha), dan ladang (71.797 ha). Dari aspek luas panen sawah ternyata kontribusi Banyuasin (27.2%), OKI (21.93%), OKU Timur (11.19%) dan Muba (10.09%) maka pada Tahun 2004 ada luasan panen sebesar 625.013 dengan produktifitas rata-rata 36,17 kuintal/Ha menghasilkan produksi padi sebesar 2.260.794 Ton. Dari jumlah produksi tersebut ada sekitar 71.797 Ha dengan produksi 169.945 Ton yang dihasilkan dari lahan kering. Kabupaten utama yang memiliki luas areal dan produksi padi tertinggi secara berurutan adalah: Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu. Akan tetapi Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat

ini sudah mekar menjadi tiga kabupaten yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan. Dari ke tiga kabupaten ini kabupaten yang memiliki luas areal padi terbesar dan menjadi lumbung beras adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga didukung oleh infrastruktur berupa irigasi teknis sehingga memungkinkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang cukup tinggi melalui intensifikasi dan penerapan berbagai pola tanam, termasuk juga pertanian terpadu. Lahan sawah yang ada di Sumsel terdiri dari sawah teknis, setengah teknis, sederhana, sederhana non PU, tada hujan, pasang surut dan lebak (valley). Irigasi teknis terluas terdapat di OKU Timur dan pasang surut terdapat di Kabupaten Banyuasin (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Keragaman Sawah per Kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/kota	Sawah						
	Teknis	Setengah teknis	Sederhana	Sederhana non PU	Tada hujan	Pasang surut	Lebak
Ogan Komering Ulu	-	350	417	1.442	1.092	-	1.476
Ogan Komering Ilir	1.000	-	-	-	72.467	1.760	80.655
Muara Enim	-	2.706	1.080	2.159	5.972	-	490
Lahat	270	4.265	9.294	11.781	5.972	-	490
Musi Rawas	6.993	1.598	2.813	3.121	10.376	-	18.404
Musi Banyuasin	-	-	129	270	750	42.023	28.563
Banyuasin	-	-	-	482	10.119	151.825	30.944
Ogan Komering Ulu Sel.	-	1.145	3.228	4.977	1.131	-	70
Ogan Komering Ulu Timur	23.362	2.266	160	40	29.199	-	24.542
Ogan Ilir	-	-	-	-	1.452	-	68.168
Palembang	-	-	-	-	194	100	4.022
Prabumulih	-	50	200	-	60	-	905
Pagar Alam	-	900	1.266	1.059	200	-	-
Lubuk Linggau	390	86	52	330	367	-	112
Jumlah	32.015	13.366	18.639	25.661	136.064	197.708	288.637

Disamping padi, komoditas palawija sangat banyak dan perkembangannya cukup pesat pada beberapa tahun terakhir. Dari sekian banyak komoditas palawija beberapa diantaranya berdasarkan luas tanam dan produksinya dikategorikan komoditas utama, yaitu: jagung, ubi kayu, kedelai, serta beberapa komoditas sayuran yang utama adalah kacang panjang dan cabe (Tabel 4.6).

Tahun 2004 luas tanam jagung adalah 23.859 Ha dengan produksi sebesar 65.234 Ton. Musi Banyuasin adalah kabupaten penghasil utama jagung, berikutnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu. Ubi kayu terutama dihasilkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Produksi ubi kayu tahun 2004 sebesar 284.844 Ton dari luas areal tanam sebesar 19.979 Ha. Kedelai terutama dihasilkan dari Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir dengan produksi sebesar 4.664 Ton dari luasan sebesar 2.539 Ha.

Tabel 4.6. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Semusim Unggulan Sumatera Selatan, 2004

Kabupaten/Kota	Padi		Jagung		Ubi Kayu		Kedelai	
	luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	luas (ha)	Produksi (ton)
Ogan Komering Ulu	125.664	499.762	2.340	6.256	4.858	57.151	980	1.332
OKU Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir	156.963	569.972	3.597	9.806	8.787	118.796	390	535
Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-
Muara Enim	40.049	124.948	1.379	3.618	490	5.517	100	131
Lahat	42.359	149.346	1.239	3.290	643	7.319	1.219	1.529
Musi Rawas	55.263	189.403	1.317	3.518	639	7.383	294	374
Musi Banyuasin	46.345	158.883	10.148	28.004	1.204	13.911	330	452
Banyuasin	142.813	518.083	2.955	8.163	2.208	25.724	224	308
Palembang	6.361	17.282	522	1.286	698	7.892	-	-
Prabumulih	1.350	3.571	94	254	210	2.390	-	-
Pagaralam	5.064	19.430	261	710	155	1.758	-	-
Lubuk Linggau	2.782	10.115	7	19	87	1.003	2	2
Jumlah 2004	625.013	2.260.794	23.859	65.234	19.979	284.844	2.539	4.664
2003	570.010	1.977.345	24.404	69.261	13.894	158.042	3.977	4.815
2002	561.724	1.899.849	21.751	53.436	23.110	171.049	3.263	3.788
2001	511.928	1.723.433	28.831	68.769	27.875	323.675	4.761	5.337

Sumber: BPS 2004

Produksi sayuran penting yang terdapat di semua Kabupaten dan kota di Sumatera Selatan Tahun 2004 adalah sebesar 257.971 Ton dengan areal tanam seluas 31.751 Ha. Produksi sayuran menyebar hampir di seluruh kabupaten/kota secara merata Tabel 4.7. Untuk komoditas utama kacang panjang dan cabe produksi Tahun 2004 tanaman kacang adalah: 7.188 Ton dan luas tanam adalah 5.461 Ha, sedangkan Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir merupakan wilayah produksi utama. Cabe terutama diproduksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Banyuasin dengan luas tanam sebesar 7.366 Ha dan produksi sebesar 41.859 Ton.

Sayuran lainnya mencakup banyak komoditas, termasuk di dalamnya komoditas sayuran dataran tinggi seperti kubis, sawi, tomat yang diproduksi di kawasan pegunungan dan dataran tinggi di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Produksi sayuran dataran tinggi dari Kota Pagar Alam seperti kentang (452 Ton), kubis (1.637 Ton), petsai (1.467 Ton) dan wortel (1.212 Ton). Khusus untuk bawang merah hanya ditanam pada areal sekitar 16 Ha. Komoditas timur (64.267 Ton) adalah sayuran yang tertinggi dihasilkan Sumsel dan yang kedua yaitu cabe (41.859 Ton).

Tabel 4.7. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Semusim Unggulan Sumatera Selatan, 2004

Kabupaten/Kota	Kacang		Cabe		Sayuran	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
Ogan Komering Ulu	2.207	3.028	792	4.258	5.636	48.732
Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir	1.021	1.293	1.194	7.987	3.496	22.801
Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-
Muara Enim	255	301	1.252	5.709	3.397	25.602
Lahat	371	495	499	2.790	3.276	26.992
Musi Rawas	393	532	179	982	1.067	6.743
Musi Banyuasin	534	681	820	5.161	3.590	27.702
Banyuasin	348	456	1.281	7.847	3.682	31.382
Palembang	211	243	941	4.544	5.251	37.777
Prabumulih	7	8	83	501	564	5.312
Pagaralam	108	142	311	2.013	1.580	23.095
Lubuk Linggau	6	9	14	67	212	1.832
Jumlah	5.461	7.188	7.366	41.859	31.751	257.971

Sumber: BPS 2004

Sumatera Selatan juga terkenal dengan produksi buah-buahan lokal di tingkat nasional, khususnya nenas, jeruk, pisang, durian dan duku (Tabel 4.8). Nenas diproduksi terutama di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Jeruk lebih banyak diproduksi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin dan Muara Enim. Tanaman pisang juga banyak di produksi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, dan Musi Rawas. Tanaman pisang mempunyai prospek yang cukup baik, untuk itu akan ditingkatkan teknik budidaya dan pengelolaan hasil panennya. Durian terluas ditanam di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan yang kedua Lahat. Duku terutama terkenal dihasilkan dari Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir Lahat dan Musi Banyuasin. Kondisi durian dan duku banyak yang sudah tua, maka pemerintah akan memperhatikan program peremajaan dengan penyediaan bibit dan pengelolaan kebunnya.

Luas tanaman dan produksi tanaman padi dibandingkan dengan palawija, sayuran dan buah-buahan dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004 relatif lebih stabil dan bahkan cenderung terus terjadi peningkatan dibandingkan tanaman lainnya.

Tabel 4.8. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Buah-buahan Unggulan Sumatera Selatan 2004

Kabupaten/ Kota	Nenas		Jeruk Siam		Pisang		Durian		Duku	
	Luas (ha)	Produksi (ton)								
Ogan Komering Ulu	26	945	4.092	56.812	1.102	63.842	1.705	4.364	1.204	5.757
Ogan Komering Ulu Timur *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ulu Selatan *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir	-	-	335	2.989	607	18.900	296	6.457	273	777
Ogan Ilir	1.373	20.936	-	-	-	-	-	-	-	-
Muara Enim	194	4.699	577	13.758	50	1.260	317	142	175	588
Lahat	1	26	55	1.576	29	1.949	1.520	24.659	220	1.011
Musi Rawas	2	176	187	2.219	270	13.883	461	6.595	165	738
Musi Banyuasin	1	85	340	3.694	199	5.385	165	3.870	196	2.186
Banyuasin	26	1.693	765	9.788	104	6.103	143	934	49	368
Palembang	70	6.524	24	439	86	4.771	8	41	1	2
Prabumulih	926	85.348	37	704	97	3.293	8	24	27	122
Pagaralam	1	21	12	43	6	160	15	234	1	14
Lubuk Linggau	1	16	2	115	19	483	42	202	21	120
Jumlah	2.621	120.469	6.426	92.137	629	2.569	4.680	47.522	2.332	11.683

Keterangan: *) Data masih tergabung pada kabupaten induk

Untuk mendukung program lumbung pangan Provinsi Sumatera Selatan maka telah ditetapkan sasaran pembangunan yaitu:

- a. Produksi beras sebesar 2.000.000 Ton
- b. Produksi jagung sebesar 200.000 Ton

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan program lumbung pangan Provinsi Sumatera Selatan maka dilakukan berbagai upaya-upaya, seperti yang dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

4.2. Perkembangan Areal dan Produksi

Tersedianya potensi lahan yang cukup merupakan salah satu keuntungan dari upaya yang akan ditempuh dalam mewujudkan sasaran program lumbung pangan di Sumatera Selatan. Sasaran pengembangan dan pembukaan sawah baru adalah pada semua jenis lahan sawah, akan tetapi sasaran utama dengan wilayah yang luas adalah pada jenis lahan rawa lebak, baru kemudian lahan sawah rawa pasang surut dan tada hujan (Tabel 4.9).

Kabupaten yang menjadi sasaran pembukaan sawah baru adalah Kabupaten Banyuasin yakni seluas lebih dari 95.000 Ha. Kabupaten lainnya adalah Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Ilir. Sedangkan wilayah kota sesuai dengan fungsi dan ketersediaan lahannya tidak ada pembukaan sawah baru. Perkembangan areal sawah lebih ditekankan kepada sawah rawa lebak (142.000 Ha) yang difokuskan di OKI, Banyuasin, OKU Timur, dan Ogan Ilir. Sementara itu, irigasi masih dapat diandalkan untuk pengembangan sawah terutama di OKU Timur, Musi Rawas, dan OKI.

Potensi areal tadah hujan yang merupakan sawah IP 100 dapat dikembangkan lebih lanjut mencapai 39.500 Ha dengan luas terbesar di Banyuasin dan semua kabupaten. Kawasan timur Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin masih dapat dikembangkan sawah pasang surut yang mencapai 45.000 Ha. Secara umum, Propinsi Sumatera Selatan masih dapat menambah luas sawah sampai 238.974 Ha.

Tabel 4.9. Sasaran Pembukaan Sawah Baru

Kabupaten/Kota	LAHAN SAWAH				Luas Sawah Seluruhnya	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak, Polder, Lainnya		
Ogan Komering Ulu	-	199	-	-	199	239
OKU Selatan	1.356	249	-	670	2.275	2.730
OKU Timur	4.257	9.349	-	24.490	38.096	45.715
Ogan Komering Ilir	2.500	3.644	-	32.925	39.069	46.883
Ogan Ilir	-	634	-	25.615	26.249	31.499
Muara Enim	310	605	-	9.174	10.089	12.107
Lahat	445	365	-	490	1.300	1.560
Musi Rawas	2.102	1.717	-	6.587	10.406	12.487
Musi Banyuasin	-	30	8.380	2.081	10.491	12.589
Banyuasin	-	22.311	37.332	35.866	95.509	114.611
Palembang	-	-	-	-	-	-
Prabumulih	650	437	-	4.204	5.291	6.349
Pagar Alam	-	-	-	-	-	-
Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11.620	39.540	45.712	142.102	238.974	286.769

Upaya pengembangan areal dalam ekstensifikasi akan diikuti juga oleh upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui program intensifikasi, seperti peningkatan intensitas tanam, penerapan tumpang sari, pergiliran tanaman, dengan dukungan irigasi dan teknologi dan sarana produksi, seperti Alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan.

Pada Tabel 4.10 di bawah ini, dapat dilihat luasan lahan sawah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang akan menjadi sasaran peningkatan produktifitas padi pada kegiatan IP 200. Berdasarkan data pada Tabel 4.10, terdapat 4 kabupaten utama yang menjadi sasaran pengembangan IP 200 yaitu: Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Lahat; Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas. Keempat kabupaten tersebut memungkinkan untuk pengembangan program IP 200 karena memiliki jaringan irigasi teknis dan irigasi desa dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun.

Tabel 4.10. Sasaran Peningkatan Produktifitas Padi pada IP 200 per Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	LAHAN SAWAH				Lahan Sawah Seluruhnya
	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak, Polder, Lainnya	
Ogan Komering Ulu	2.269	437	-	-	2.706
OKU Selatan	8.486	802	-	-	9.288
OKU Timur	23.365	13.195	-	-	36.560
Ogan Komering Ilir	350	13.797	-	2.708	16.855
Ogan Ilir	-	-	-	1.508	1.508
Muara Enim	2.058	745	-	-	2.803
Lahat	20.087	56	-	-	20.143
Musi Rawas	11.713	3.284	-	118	15.115
Musi Banyuasin	-	100	750	-	850
Banyuasin	25	-	3.223	317	3.565
Palembang	-	-	25	75	100
Prabumulih	-	-	-	-	-
Pagar Alam	2.524	154	-	-	2.678
Lubuk Linggau	1.325	159	-	-	1.484
Jumlah	72.202	32.729	3.998	4.726	113.655

Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dikembangkan pada wilayah dan kawasan lain yang belum didukung oleh jaringan irigasi teknis atau irigasi setengah teknis dan irigasi desa, dan dengan kondisi pengendalian air yang terbatas sepanjang tahun. Dengan demikian musim hujan air menggenang sawah dan pada saat musim kemarau jumlah air yang masuk ke sawah tidak mencukupi sehingga lahan sawah menjadi kering. Oleh karenanya program ini akan dikembangkan di sebagian besar persawahan tada hujan dan lebak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan seperti terlihat pada Tabel 4.11. Kabupaten utamanya adalah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Banyuasin, termasuk juga Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin.

Tabel 4.11. Sasaran Peningkatan Produktifitas Padi pada IP 100 per Kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	TIPOLOGI LAHAN (Ha)		Jumlah (Ha)
		Tadah Hujan	Lebak/Polder	
1.	Ogan Komering Ulu	613	1.467	2.080
2.	Ogan Komering Ulu Timur	13.193	4.243	17.436
3.	Ogan Komering Ulu Selatan	307	-	307
4.	Ogan Komering Ilir	58.955	42.978	101.933
5.	Ogan Ilir	457	39.877	40.334
6.	Muara Enim	4.809	17.310	22.119
7.	Lahat	2.264	-	2.264
8.	Musi Rawas	3.166	8.931	12.097
9.	Musi Banyuasin	350	17.082	17.432
10.	Banyuasin	3.002	21.185	24.187
11.	Palembang	210	2.535	2.745
12.	Prabumulih	60	905	965
13.	Pagaralam	-	-	-
14.	Lubuk Linggau	198	102	300
JUMLAH		87.584	156.615	244.199

Selain itu, akan dikembangkan pula program peningkatan produktifitas padi melalui kegiatan peningkatan IP 100 menjadi IP 200 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.12. Pada program peningkatan produktifitas dari IP 100 menjadi IP 200 akan ditunjang oleh prasarana irigasi teknis baik pembangunan baru, peningkatan maupun pengembangan dan peningkatan irigasi teknis, setengah teknis dan tata air mikro yang sudah ada.

Daerah yang menjadi sasaran utama adalah Kabupaten Banyuasin, kemudian Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Daerah ini terutama Banyuasin memiliki wilayah rawa lebak dan pasang surut yang cukup luas. Sedangkan tata air mikro yang mengairi sawah di daerah ini akan menjadi program pendukung utama yang akan ditingkatkan, disamping penyediaan obat-obatan untuk mengendalikan hama-penyakit yang menjadi faktor kendala di daerah pasang surut.

Tabel 4.12. Sasaran Peningkatan IP 100 Menjadi IP 200 per Kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	TIPOLOGI LAHAN (Ha)		Jumlah
		Irigasi	Pasang Surut	
1.	Ogan Komering Ulu Timur	120	-	120
2.	OKU Selatan	977	-	977
3.	Ogan Komering Ilir	650	8.711	9.361
4.	Muara Enim	3.674	-	3.674
5.	Lahat	4.156	-	4.156
6.	Musi Rawas	639	-	639
7.	Musi Banyuasin	140	23.264	23.404
8.	Banyuasin	421	111.912	112.333
9.	Pagaralam	537	-	537
10.	Lubuk Linggau	121	-	121
Jumlah		11.435	143.887	155.322

4.3. Pengembangan Sarana Produksi

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang digunakan petani dalam mengelola tanah dan tanaman cukup bervariasi (Tabel 4.13). Ada beberapa jenis mesin pertanian yang sering digunakan, seperti: *traktor* digunakan untuk pegolahan tanah, pompa air untuk mengairi sawah dan tanaman. Jenis traktor ada dua macam, yakni traktor roda 4 dan traktor roda 2 atau dikenal dengan hand traktor. Jumlah mesin pertanian yang ada di Sumatera Selatan juga cukup bervariasi diantara kabupaten.

Data yang tercatat pada Tabel 4.13. tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan di Kabupaten/Kota karena data tersebut merupakan data dropping dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki program pengadaan Alsintan. Pada saat ini Traktor roda 4 baru ada 4 unit, terdapat di Muara Enim, Musi Rawas dan Palembang. Traktor roda 2 terdapat sebanyak 557 unit, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali Prabumulih, dan terbanyak terdapat di Kabupaten OKU Timur. Jumlah pompa air cukup banyak yaitu: 427 unit, tetapi penyebarannya hanya terdapat di beberapa kabupaten saja yang selama ini menjadi lumbung beras Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Muara Enim, dan Musi Banyuasin.

Tabel 4.13. Jenis, Jumlah dan Sebaran Alsintan di kabupaten/kota Sumatera Selatan (2006 - Sementara)

Kabupaten/ Kota	Jenis dan Jumlah Alsintan									
	Traktor Roda 4	Traktor Roda 2	Pompa Air	Power Thresher	V- Dryer	Corn Shller	Penepung	Rotary Dryer	RMU	Bed Dryer
OKU	0	4	0	4	0	0	0	0	2	2
OKU Timur	0	113	106	54	4	2	0	2	16	13
OKU Selatan	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
OKI	0	88	108	77	1	9	0	2	27	26
Ogan Ilir	0	2	0	5	0	7	3	6	0	0
Muara Enim	2	74	70	51	0	2	0	2	21	21
Lahat	0	92	0	67	0	0	1	0	31	28
Musi Rawas	1	62	0	39	0	1	1	0	12	12
Musi Banyuasin	0	56	24	48	0	3	0	0	23	22
Banyuasin	0	57	117	63	8	0	0	2	28	20
Palembang	1	2	2	2	0	0	1	0	0	0
Prabumulih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagar Alam	0	3	0	4	0	0	1	0	1	1
Lubuk Linggau	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	557	427	418	13	24	7	14	161	145

Penggunaan mesin-mesin pertanian ini sangat penting bagi petani, karenanya akan terus digalakkan dan jumlah petani pemilik mesin akan terus ditingkatkan. Untuk kedepan pemerintah dan juga melalui bekerja sama dengan pihak swasta misalnya dengan memberikan kredit ringan untuk pembelian mesin-mesin pertanian tersebut sehingga kegiatan IP 200 dapat lebih mudah realisasinya.

Kondisi sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, pestisida dan masukan lainnya tersedia di lokasi usahatani dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan petani. Hal tersebut terjadi karena sangat berperannya distributor/penyalur, agen atau koperasi unit desa yang membuka kios-kios pertanian di dekat wilayah produksi. Selain itu didukung pula oleh kondisi prasarana jalan dan sarana kendaraan yang cukup memadai sehingga memperlancar arus transportasi barang, Namun untuk yang berada di daerah pasang surut kelancaran transportasi di beberapa wilayah memang masih menjadi faktor pembatas, karena akan segera diperhatikan untuk ditingkatkan terutama kanal akan selalu dioptimalisasi.

Sarana produksi lain berupa benih tanaman pangan, palawija, sayuran dan buah-buahan. Propinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau Litbang pertanian agar kecukupan dan droping benih dapat sampai tepat waktu pada petani. Hal lain yang paling pokok dalam rangka pengembangan areal tanaman baik untuk padi, jagung, kacang-kacangan, dan hortikultura adalah pompa, saluran irigasi dan drainase. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah pompa, perpanjangan saluran air dan hand tractor akan ditingkatkan jumlahnya.

4.4. Pengembangan Pascapanen dan Industri

Sarana pasca panen khususnya padi adalah alat perontok, V Dryer, lantai jemur dan RMU (*Rice Milling Unit*) untuk penggilingan padi. Untuk tanaman palawija adalah alat perontok, pemipil. Alat perontok (Power Thresher) terdapat sebanyak 418 unit terdapat di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Prabumulih. Kabupaten yang banyak memiliki alat perontok adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lahat, Banyuasin, OKU Timur, Muara Enim, Musi Banyuasin. V-Dryer jumlahnya hanya 13 unit terdapat di Banyuasin, OKU Timur, dan Ogan Komering Ilir. Rotary Dryer jumlahnya sebanyak 14 unit terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Timur dan Muara Enim. Bed Dryer atau lantai jemur jumlahnya lebih banyak yakni 145 unit. Kabupaten yang banyak memiliki lantai jemur adalah: Lahat, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur, dan Musi Rawas.

Alat pemipil jagung atau Corn Sheller terdapat di 6 kabupaten dan jumlah seluruhnya sebanyak 24 unit. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki alat pemipil jagung terbanyak sebanyak 9 unit, Ogan Ilir sebanyak 7 unit, Banyuasin 3 unit, OKU Timur dan Muara Enim masing-masing 2 unit dan Musi Rawas 1 unit. Penepung atau alat pembuat tepung terdapat hanya 7 unit, 3 unit diantaranya di Kabupaten Ogan Ilir, sisanya masing-masing 1 unit di Lahat, Musi Rawas, Pagar Alam dan Palembang. Total RMU sebesar 161 unit, sebagian besar terdapat di Lahat, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas. Sementara *box drayer* hanya 72 unit. Lantai jemur merupakan sarana lainnya yang sangat dibutuhkan di sentra-sentra produksi padi dan palawija. Sarana lantai jemur juga akan menjadi sasaran program Sumsel Lumbung Pangan Nasional untuk ditingkatkan.

Peningkatan kapasitas pabrik penggilingan padi (RMU) dari single pass menjadi double-pass merupakan hal yang mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan mutu hasil tanaman padi, karena mutu padi yang dihasilkan akan meningkat dengan mesin double-pass diharapkan daya saing produk padi petani akan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di perdesaan.

Antisipasi terhadap gejolak harga baik diakibatkan oleh faktor panen raya atau sebaliknya menurunnya produksi sebagai akibat dari kegagalan panen karena faktor lingkungan, seperti serangan hama belalang kembara yang perlu diantisipasi, serta kekeringan atau banjir perlu dilakukan upaya-upaya stabilitas harga baik melalui program dana talangan maupun pendekatan teknologi seperti penyediaan lumbung-lumbung padi dan gudang untuk penyimpanan.

Ke depan Propinsi Sumatera Selatan akan menyediakan gudang-gudang besar untuk penyimpanan produk pertanian pangan. Gudang besar tersebut juga berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan mutu produk seperti polishing beras asalan menjadi beras berkualitas. Lokasi gudang besar tersebut tentunya hanya pada sentra produksi saja yang pembangunannya bekerjasama dengan pihak swasta atau investor.

4.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor yang lain di Provinsi Sumatera Selatan maupun secara nasional. Berdasarkan hasil Sensus tahun 2004, dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas 66,72% bekerja di sektor pertanian. Dari angka tersebut, proporsi penduduk perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih banyak yaitu 69,70% dan penduduk laki-laki yang bekerja di sektor pertanian sebesar 64,91%.

Keadaan sumber daya manusia umumnya masih sangat rendah, hal ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rata-rata hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan bagi petani yang pendidikan yang lebih maju umumnya pergi dan pindah keluar desa atau memilih pekerjaan lain. Namun dari segi ketenagakerjaan hampir 95% dari responden berada pada umur produktif (20 sampai 45 tahun). Hal ini sangat menguntungkan sekali karena pada umumnya pada tingkat umur ini produktivitas kerjanya sangat baik dan lebih efisien.

Tabel 4.14. Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Pertanian

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total Pertanian	Total Sumsel
	Laki-Laki	Perempuan		
Ogan Komering Ulu*)	300.668 (83.60%)	217.363 (82.27%)	518.031 (83.04%)	359.648 (100.00%)
OKU Timur*)	-	-	-	-
OKU Selatan*)	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir*)	225.686 (76.50%)	139.132 (81.02%)	364.818 (78.16%)	295.009 (100.00%)
Ogan Ilir*)	-	-	-	-
Muara Enim	131.154 (67.33%)	88.034 (76.14%)	219.188 (70.61%)	194.803 (100.00%)
Prabumulih*)	-	-	-	-
Lahat	148.818 (76.33%)	104.574 (80.99%)	253.392 (78.19%)	194.977 (100.00%)
Pagar Alam*)	-	-	-	-
Musi Rawas	131.224 (71.85%)	79.555 (71.28%)	210.779 (71.63%)	182.638 (100.00%)
Lubuk Linggau*)	-	-	-	-
Musi Banyuasin	297.281 (78.74%)	183.515 (85.99%)	480.796 (81.36%)	377.556 (100.00%)
Banyuasin*)	-	-	-	-
Palembang	14.899 (4.65%)	3.101 (1.89%)	18.000 (3.71%)	320.655 (100.00%)
Total	1.249.730 (64.91%)	815.274 (69.70%)	2.065.004 (66.72%)	1.928.286 (100.00%)

Sumber : Susenas 2004

Keterangan : *) Daerah Pemekaran ; Data tergabung Kab/Kota induk di atasnya

Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa masih cukup besar petani Sumatera Selatan yang berpendidikan tingkat SD yaitu sekitar 45.27 %, sedangkan tingkat SLTP 27.82 %, dan tingkat SLTA sekitar 21.45 %. Namun telah ada pula petani yang kualifikasi pendidikannya telah mencapai diploma dan S₁ yaitu sebanyak 5.46 % yang menunjukkan ada perkembangan kemajuan kualitas SDM petani di Sumatera Selatan, meskipun belum begitu menggembirakan. Sementara itu mayoritas isteri petani atau sebanyak 61.45 % hanya berpendidikan SD, sekitar 25.00 % berpendidikan SLTP, sekitar 12.55 % telah mengenyam pendidikan SLTA, dan hanya 1.00 % yang telah berpendidikan diploma dan S₁. Fakta di atas juga dapat dijadikan rujukan bagi penyusunan program pembinaan petani dan program lain yang terkait dengan prasyarat kualitas SDM petani.

Kegiatan temu lapang, kursus intensif spesifik dan pelatihan akan selalu dilaksanakan secara rutin dan terpadu sehingga wawasan dan keterampilan petani meningkat. Titik tekan kegiatan tersebut dalam jangka pendek adalah pengendalian OPT, efisiensi panen dan pasca panen, pemberdayaan kelembagaan kelompok tani.

4.6. Kondisi Kelembagaan

Dalam meningkatkan pengetahuan petani di bidang pertanian, sekitar 59,5% petani di Sumatera Selatan sudah pernah mengikuti pelatihan seperti penyadapan karet, pemupukan, budidaya tanaman, penanganan pasca panen, teknik pemupukan, pengelolaan irigasi, agribisnis, perbaikan mutu benih, SLPHT, pengamatan hama, pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida, pengenalan hama dan penyakit, KOPTAN, penangkatan bibit jeruk, mekanisasi pertanian, penggunaan alsitan, pertanian organik, managemen keuangan kewirausahaan, P4K, KPK, KTNA, dan pengolahan karet.

Kelembagaan penunjang lainnya yang berupa balai penelitian dan pengkajian baru ada di Belitang Ogan Komering Ulu Timur dan Tugumulyo Musi Rawas, yaitu berupa balai benih padi. Kantor lembaga ini juga sering dipakai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petani oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta dalam bentuk proyek. Sedangkan lembaga khusus yang menangani pendidikan dan pelatihan petani secara kontinyu belum ada di semua lokasi sentra produksi.

Penyuluhan pertanian yang dilakukan PPL sekitar 81,1% aktif dilakukan, sementara itu kelompok tani sebagian besar sudah terbentuk di setiap kabupaten. Sementara itu keberadaan koperasi unit desa (KUD) rata-rata di setiap kabupaten hanya 47,6% yang biasanya mempunyai kegiatan jual beli hasil pertanian, simpan pinjam, menyediakan sembako, pengadaan saprodi dan pembayaran listrik.

Aspek kelembagaan petani masih sangat lemah. Petani secara umum berusaha sendiri-sendiri dan belum banyak yang menyatu membentuk wadah baik berupa kelompok tani maupun koperasi. Aspek kebudayaan merupakan faktor pendorong yang kuat guna meningkatkan produktivitas dan posisi rebut tawar petani. Terutama budaya yang berupa gotong royong dan kebersamaan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Hal ini perlu terus dimotivasi dan ditingkatkan intensitasnya. Kelembagaan yang berbasis plasma untuk petani pangan kiranya diperluas wilayahnya. Hal tersebut sangat berguna untuk keserempakan tanam, pemeliharaan, panen dan pasca panen sehingga kegiatan tersebut efisien dan efektif. Program plasma tanaman pangan berupa suplai saprodi dan pembelian produk pertanian. Dengan demikian, masalah modal bukan kendala untuk melaksanakan usaha tani.

4.7. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Luas lahan yang digunakan untuk sawah relatif cukup luas dengan jenis irigasi yang beragam dan tersebar di setiap kabupaten/kota. Sawah beririgasi teknis terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Luas lahan sawah irigasi setengah teknis terbesar di Kabupaten Musi Rawas, jenis sawah ini juga terdapat di kabupaten/kota lain namun dalam luasan yang lebih sempit. Jenis lahan sawah irigasi sederhana terluas di Kabupaten Lahat sedangkan di kabupaten/kota lain relatif lebih sedikit bahkan tidak terdapat di Ogan Komering Ilir dan Lubuk Linggau. Jenis lahan sawah irigasi desa juga terluas di Kabupaten Lahat, sedangkan di kabupaten/kota lain jauh lebih kecil. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki lahan sawah irigasi terluas dan bila dilihat dari jenis irigasi ternyata sawah irigasi teknis dan irigasi desa merupakan jenis sawah yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain sawah beririgasi, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat juga sawah yang tidak memiliki irigasi bahkan jauh lebih luas dibandingkan dengan sawah irigasi. Lahan sawah tada hujan terdapat di semua kabupaten/kota kecuali kota Pagar Alam, lahan terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan terendah terdapat di Kota Prabumulih. Lahan sawah pasang surut terdapat di Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Kota Palembang. Dari keempat daerah tersebut, Kabupaten Banyuasin memiliki sawah pasang surut terluas, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Palembang. Jenis lahan sawah lebak dan lainnya masih banyak tersebar di kabupaten/kota dengan total luas lahan sebesar 205.748 ha, terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan terkecil terdapat di Kota Prabumulih.

Alat transportasi lainnya yang menjadi andalan petani khususnya di daerah perairan dan kebun-kebun di talang adalah kendaraan sepeda dan motor/mobil. Sebagian besar petani berjalan kaki pulang pergi ke lahan (49.1%), sementara yang menggunakan sepeda 29.3% dan hanya 19.7% yang menggunakan motor/mobil.

Daerah pertanian untuk yang bukan irigasi teknis atau setengah teknis maka persoalan jalan dari desa ke lahan merupakan hal yang serius. Oleh sebab itu, pembangunan jalan usaha tani atau parit sebagai sarana transportasi akan dibangun secara bertahap. Dengan demikian, biaya pengangkutan saprodi dan produk pertanian menjadi murah ditingkat petani.

Sebagian besar petani (67.7%) sudah memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk menambah atau memenuhi konsumsi keluarga. Jenis tanaman yang biasa digunakan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, bumbu dapur dan kelapa. Persentase terbesar komoditi yang ditanam adalah buah-buahan sebesar 31.5% diikuti oleh umbi-umbian (21.6%), sayur-sayuran (19.7%), bumbu dapur (2.7%) dan kelapa (2.3%).

V. RENCANA PENGEMBANGAN PERIKANAN

5.1. Kondisi Saat Ini

Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat strategis untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, karena secara komparatif merupakan salah satu sektor unggulan dari 6 (enam) sektor unggulan Sumatera Selatan. Hal ini sangat terkait dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) perikanan.

Pembangunan sektor perikanan di Sumatera Selatan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Sebaliknya juga pembangunan sektor perikanan mempunyai tantangan yang cukup besar, seperti pencemaran laut, penangkapan lebih (*over fishing*), degradasi fisik habitat wilayah pesisir, konflik penggunaan ruang dan sumber daya, pencurian ikan, pembuangan limbah secara ilegal, kemiskinan yang terus melilit rumah tangga perikanan dan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan penduduk di sektor perikanan khususnya pembangunan perikanan di Sumatera Selatan, terutama dalam menyongsong Sumatera Selatan Lumbung Pangan, pembangunan perikanan menitikberatkan pada kegiatan budidaya dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan langsung masyarakat perikanan didalam pengelolaannya.

Usaha perikanan berdasarkan areal dan jenis usahanya dapat dikelompokkan dalam bidang usaha penangkapan dan budidaya di laut, wilayah pesisir, penangkapan di perairan umum dan perikanan budidaya. Produksi perikanan selama ini lebih banyak menggantungkan dari hasil penangkapan di laut dan perairan umum, sedangkan dari hasil usaha budidaya masih belum dikembangkan secara optimal.

Kondisi sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari perkembangan jumlah penduduk, khususnya Rumah Tangga Perikanan (RTP). Dari jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2004 berjumlah 6.628.416 jiwa, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) mencapai 95.695 RTP. Persentase RTP terbesar berasal dari usaha budidaya ikan sebesar 54,16 %, RTP di perairan umum 39,72 % dan 6,12 % RTP pada perikanan laut. Jumlah RTP terbesar di Sumatera Selatan yang terbanyak berada di Kabupaten Muara Enim (30.104 RTP) dan Kabupaten OKI (28.903 RTP) dan yang terendah Kota Palembang (1.879 RTP) (Tabel 5.1).

Dari usaha budidaya perikanan di perairan darat, persentase RTP terbesar ada pada usaha budidaya kolam skala kecil dengan luasan kurang dari satu hektar 27,31%, budidaya tambak 18,48%, sawah 12,58% dan keramba 7,84%.

Tabel 5.1. Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Sumatera Selatan 2004

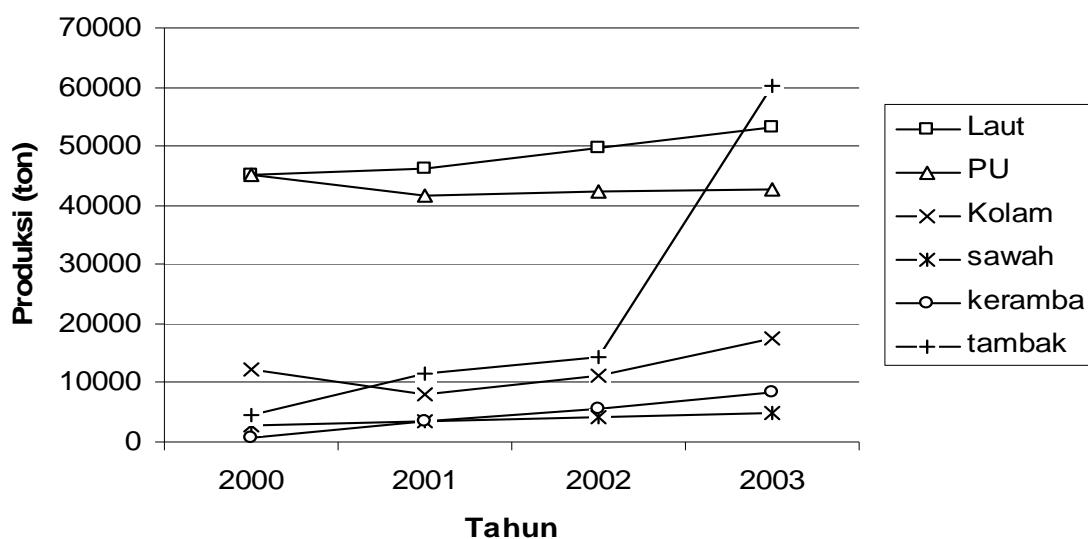
No.	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya				Jumlah
				Kolam	Sawah	Keramba	Tambak	
1.	OKU	-	3.479	3.407	5.465	31	-	12.382
2.	OKU Timur *)	-	-	-	-	-	-	-
3.	OKUSelatan*)	-	-	-	-	-	-	-
4.	OKI	1.622	14.567	2.152	471	3.210	6.881	28.903
5.	Ogan Ilir *)	-	-	-	-	-	-	-
6.	Muara Enim	-	12.161	13.624	4.105	264	-	30.104
7.	Lahat	-	-	2.146	3.068	-	-	5.214
8.	Musi Rawas	-	1.491	2.115	1.165	-	-	4.869
9.	Musi Banyuasin	4.224	2.863	-	-	1.613	391	5.207
10.	Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-
11.	Palembang	-	578	1.203	-	98	-	1.879
12.	Prabumulih *)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pagaralam *)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Lubuk Linggau *)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2004		5.486	38.013	24.976	14.372	5.216	7.272	95.695
2003 **)		4.600	1.500	2.183	8.743	5.848	19.490	82.364
2002		4.026	31.448	10.252	8.530	4.751	16.041	75.321
2001		4.034	31.751	11.311	7.393	4.122	16.041	74.652

Sumber : BPS Provinsi Sumatera selatan, 2005

*) Angka masih tergabung dengan kabupaten induk

**) Angka sementara

Produksi ikan secara aktual dari tahun 2000-2003 mengalami peningkatan (Gambar 5.1). Produksi perikanan berasal dari penangkapan di laut dan di perairan umum memberikan kontribusi mencapai 51.34% yang diikuti oleh produksi dari budidaya tambak udang mencapai 32.19%. Sebagian besar produksi udang tersebut dilakukan oleh petambak skala kecil.

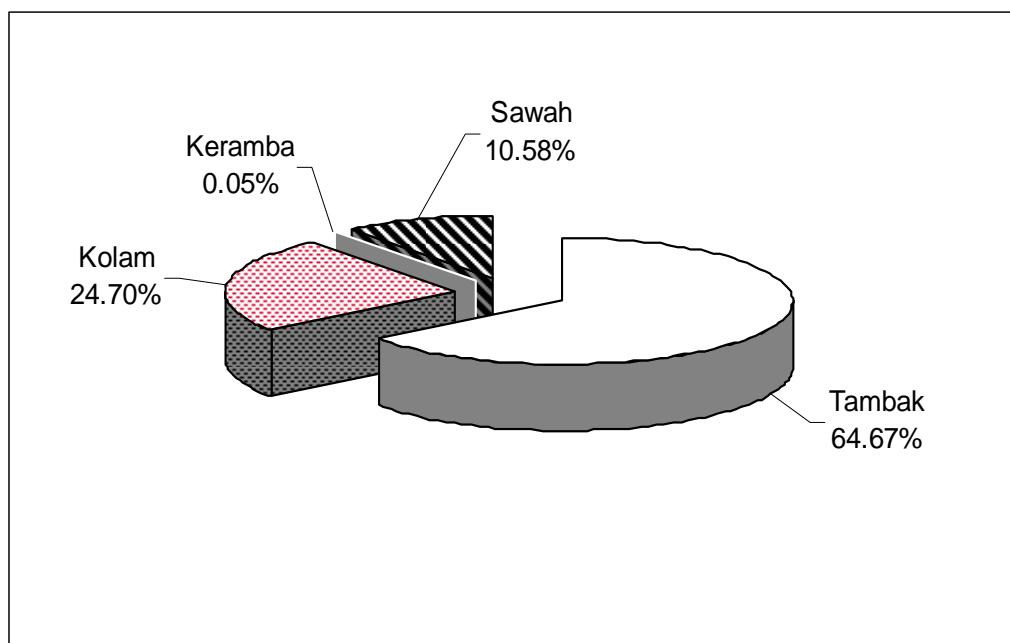


Gambar 5.1. Perkembangan produksi usaha perikanan Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2000-2003

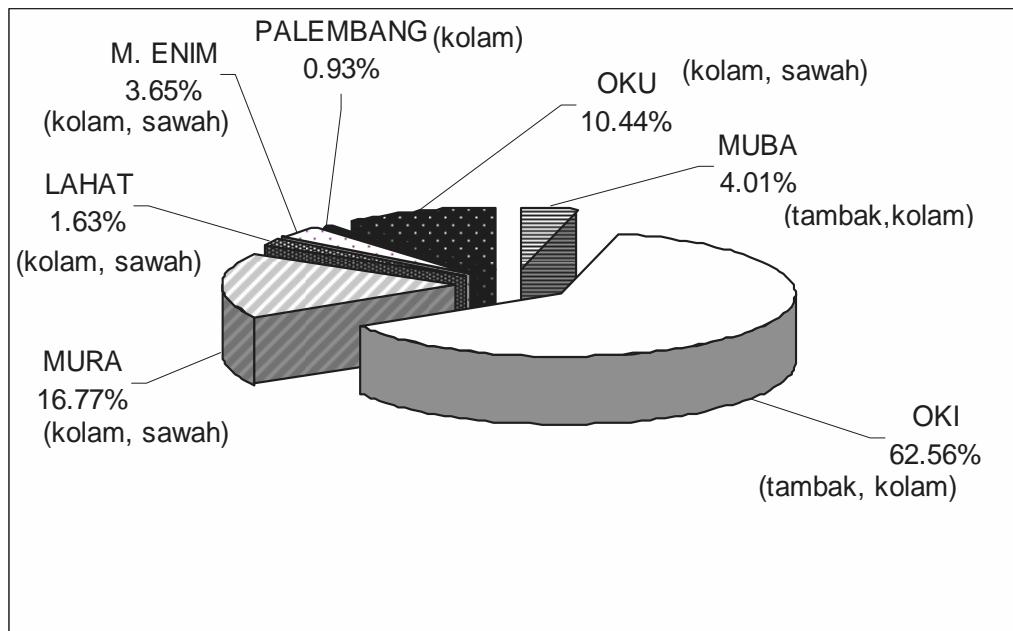
Sampai dengan Tahun 2003, luas lahan darat dan perairan untuk usaha budidaya perikanan mencapai 24.196 hektar yang terdiri dari lahan/perairan untuk budidaya kolam, sawah, keramba dan tambak. Persentase luas lahan darat dan perairan untuk usaha perikanan tersebut, terbesar berasal dari budidaya tambak (64.67%), budidaya dalam kolam, sawah dan keramba (Gambar 5.2). Sebagian besar lahan budidaya terdapat di Kabupaten OKU, OKI, Lahat, dan Musi Rawas (MURA) (Gambar 5.3).

Bila dikaitkan antara luas lahan budidaya dan produksi perikanan pada berbagai teknologi budidaya (Gambar 5.3), teknologi budidaya ikan dalam kolam berpotensi dikembangkan di Kabupaten Lahat, MURA, dan OKU. Teknologi budidaya dalam sawah (minapadi) berkembang sangat baik di kabupaten Lahat dan MURA.

Untuk teknologi budidaya dalam keramba di sungai, danau mati atau waduk baik dikembangkan di Kabupaten OKI, OKU dan Kota Palembang. Teknologi budidaya pantai (tambak) hanya berpotensi dikembangkan di Kabupaten OKI dan MUBA.



Gambar 5.2. Persentase luas lahan berdasarkan teknologi budidaya di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003



Gambar 5.3. Persentase luas lahan budidaya berdasarkan teknologi dan kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003

Produktifitas perikanan pada masing-masing teknologi budidaya ikan pada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan cukup bervariasi (Tabel 5.2). Hal ini dikarenakan salah satunya kurang lengkap informasi proses produksi (seperti jumlah siklus produksi) yang diberikan pada saat pembuatan data statistik perikanan. Berdasarkan analisis, produktifitas budidaya dalam kolam terbesar terdapat di Kota Palembang, Kabupaten MUBA, OKU dan MURA.

Tabel 5.2. Produksi Tangkap dan Budidaya Perikanan Provinsi Sumsel Tahun 2003

Kabupaten/kota	Tangkap (%)				Budidaya (%)		
	Laut	PU	Jumlah	Kolam	Sawah	Keramba	Tambak
Pantai Timur Sumatera							
Banyuasin	32.11	4.99	37.10	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir	6.35	10.49	16.85	0.11	0.06	1.42	12.16
Pedalaman Sumatera Selatan							
Musi Banyuasin	-	4.88	4.88	0.53	-	0.10	0.08
Musi Rawas	-	0.72	0.72	2.49	0.97	0.15	-
Lahat	-	-	-	2.42	0.61	0.21	-
Muara Enim	-	2.90	2.90	0.58	0.16	0.37	-
Palembang	-	0.47	0.47	2.10	-	0.71	-
Ogan Komering Ulu	-	6.12	6.12	3.78	1.14	0.83	-
Jumlah	38.47	30.57	69.03	12.01	2.93	3.78	12.24

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, 2004.

Usaha budidaya di sawah, produktifitas terbesar di Kabupaten OKU dan MURA. Budidaya dalam keramba, kabupaten yang berpotensi dikembangkan adalah OKI, M. Enim dan Kota Palembang, sedangkan budidaya tambak, produktifitas terbesar pada umumnya di Kabupaten OKI. Kondisi produksi perikanan Sumatera Selatan Tahun 2004 ditampilkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Produksi Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2004

No.	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya				Jumlah (Ton)
				Kolam	Sawah	Keramba	Tambak	
1.	OKU	-	8.484,7	5.816,4	1.795,6	1.308,5	-	26.333,1
2.	OKU Timur *)	-	-	-	-	-	-	-
3.	OKUSelatan *)	-	-	-	-	-	-	-
4.	OKI	8.927,9	14.546,8	164,9	87,5	2.220,4	19.073,4	36.093,0
5.	Ogan Ilir *)	-	-	-	-	-	-	-
6.	Muara Enim	-	4.018,0	908,5	244,2	577,9	-	5.748,6
7.	Lahat	-	-	3.803,5	952,9	322,8	-	5.079,2
8.	Musi Rawas	-	994,9	3.908,8	1.514,4	236,6	-	6.654,7
9.	MUBA	-	-	6.759,5	835,5	149,9	129,3	7.874,2
10.	Banyuasin	45.113,8	6.911,0	-	-	-	-	52.025,4
11.	Palembang	-	655,0	3.408,3	-	1.112,2	-	5.175,5
12.	Prabumulih *)	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pagaralam *)	-	-	-	-	-	-	-
14.	Lubuk Linggau *)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2004		54.041,7	42.370,5	18.845,9	4.595,6	5.928,3	19.202,7	144.983,7

*) Angka masih tergabung dengan kabupaten induk

**) Angka sementara

Berdasarkan Tabel 5.3, produksi ikan perikanan laut terbesar adalah di Kabupaten Banyuasin (45.113,8 ton) ini dikarenakan wilayah perairan laut di kabupaten ini lebih luas dibanding dengan Kabupaten OKI. Produksi ikan di perairan umum yang terbesar adalah di Kabupaten OKI dengan produksi 14.546,8 ton; perikanan budidaya kolam yang terbesar adalah di Kabupaten MUBA dengan produksi 6.759,5 ton; perikanan budidaya sawah yang terbesar adalah di Kabupaten OKU dengan produksi 1.795,6 ton; produksi ikan keramba terbesar di Kabupaten OKI sebesar 2.220,4 ton dan produksi ikan perikanan budidaya tambak yang terbesar di Kabupaten OKI sebesar 19.073,4 ton.

Pada Tabel 5.4, produktivitas perikanan di Sumatera Selatan berdasarkan data 2003 menunjukkan bahwa produktivitas kolam di Kota Palembang lebih tinggi dibandingkan kabupaten dan kota yang ada. Produktifitas ikan asal sawah tertinggi di OKU dan tambak sekitar 1.57 Ton/Ha/Tahun dari OKI. Berdasarkan angka produktifitas tersebut berarti beberapa kabupaten dan kota masih mungkin ditingkatkan terutama ikan asal kolam dan sawah.

Tabel 5.4 . Produktivitas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Berbagai Teknologi Budidaya pada Tahun 2003

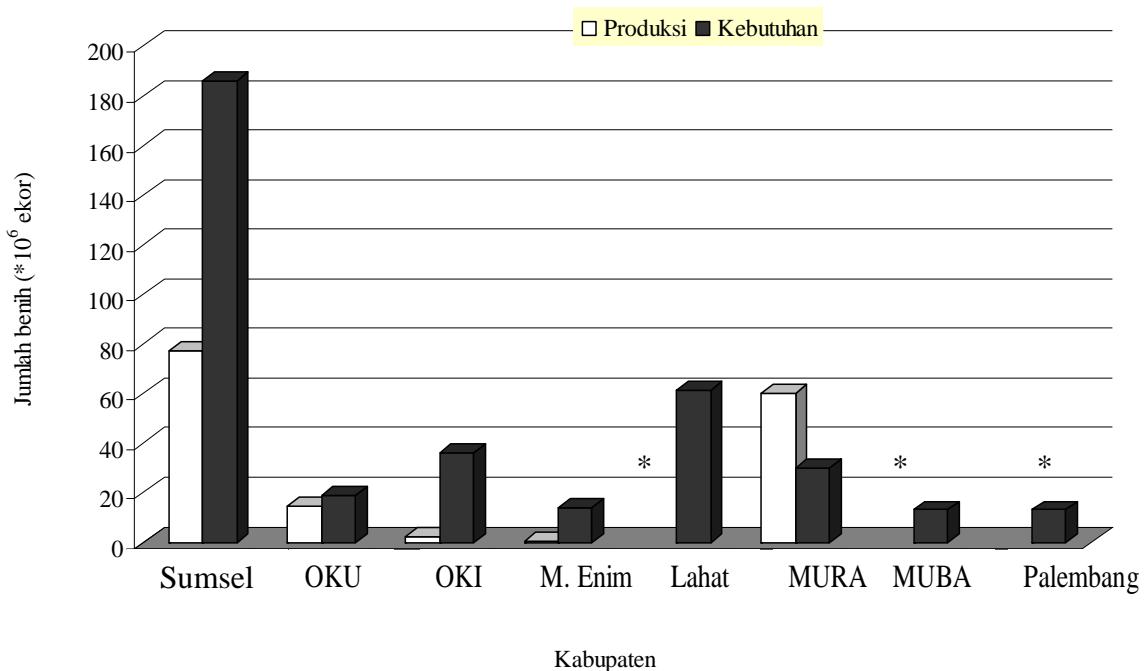
Kabupaten/Kota	Produktivitas (ton/ha/tahun)			
	Kolam	Sawah	Keramba ton/unit*	Tambak
Ogan Komering Ulu	1.50	2.20	-	-
Ogan Komering Ilir	0.65	1.99	2673	1.60
Muara Enim	1.06	0.17	591	0.35
Lahat	1.21	0.34	-	-
Musi Rawas	1.45	1.03	-	-
Musi Banyuasin	3.70	-	164	0.10
Palembang	5.19	-	1174	0.70

* Penghitungan unit keramba didasarkan pada ukuran yang banyak digunakan pembudidaya ikan dengan panjang dan lebar masing-masing adalah 3 m dan 2 m (luas 6 m²).

Usaha peningkatan produksi ikan melalui usaha budidaya ikan perlu dilakukan mengingat besarnya konsumsi masyarakat terhadap ikan dibandingkan dengan produksinya kecuali Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Ikan Tebakang dan Gurame digemari oleh masyarakat cuma persoalan pengadaan bibit ikan tersebut masih sulit dan terbatas sehingga budayanya belum intensif. Khusus untuk ikan Gabus dan Toman telah mulai dibudidayakan oleh masyarakat sebab harganya yang tergolong tinggi. Pembudidayaan ikan Belida secara sangat terbatas telah pula dilakukan masyarakat saat ini.

Dominansi pemilihan ikan introduksi diperkirakan karena teknologi budidaya jenis ikan introduksi telah mudah diadopsi dan kemudahan mendapatkan pasokan yang bibit ikan. Kebutuhan benih ikan untuk usaha budidaya ikan di Sumatera Selatan lebih dari 180 juta ekor yang dapat dipenuhi dari produksi lokal sebanyak 42% (Gambar 5.4) dan sebanyak 58 % didatangkan dari Jawa Barat. Produksi benih sebagian besar dihasilkan dari kabupaten Musi Rawas. Jenis ikan yang dominan adalah ikan mas yang mencapai 78% dari total produksi.

Makanan ikan (pakan) umumnya petani membuat sendiri, sehingga kandungan gizi pakan masih dibawah minimum. Pabrik pakan ikan umumnya di Provinsi Bandar Lampung sehingga memerlukan ongkos transportasi untuk sampai ke provinsi Sumatera Selatan. Bahan baku pakan ikan tidak tersedia di Sumsel. Produksi tambak di wilayah pesisir Kabupaten OKI dan Kabupaten Banyuasin cenderung menurun karena kerusakan hutan Mangrove sehingga kualitas air laut di pesisir menurun, dan plankton berkurang, predator hama berkurang, akibatnya hama-penyakit ikan meningkat.



Gambar 5.4. Produksi dan kebutuhan benih Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim (M. Enim), Musi Rawas (Mura), Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Madya Palembang. (*) data kurang lengkap.

Pada umumnya jenis ikan yang dipelihara oleh pembudidaya ikan adalah jenis ikan introduksi dan bukan ikan asli perairan Sumatera Selatan. Jenis ikan dibudidaya pada sistem kolam adalah ikan Mas dan Nila. Pada budidaya ikan di sawah didominasi ikan Mas dan Mujair (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Produksi Ikan Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan di Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2004

Kab/Kota	Tawes	Mas	Mujair	Nila	Lele	Sp Siam	Tebakang	Gurame	Lainnya	Jumlah
OKU	2.365,8	39,7	394,2	1.257,2	141,2	-	46,6	31,5	1.646,7	5.922,9
OKU Timur *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OKI	16,5	-	-	31,2	36,2	26,5	36,9	17,7	-	165,0
Ogan Ilir *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muara Enim	222,3	20,5	111,1	315,6	45,9	5,6	-	1,5	186,1	908,6
Lahat	1.615,9	-	-	1.634,5	-	-	-	-	-	3.803,6
Musi Rawas	2.119,5	4,4	27,7	1.634,5	99,6	-	-	3,1	19,9	3.908,7
MUBA	105,7	-	26,8	49,3	165,9	-	34,5	77,9	375,4	835,5
Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palembang	50,5	-	-	142,9	390,3	15,3	3,3	1.310,6	1.388,7	3.301,6
Prabumulih *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagaralam *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lb.Lingga *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2004	6.496,2	64,6	559,8	5.618,4	879,1	47,4	121,3	1.442,3	3.616,8	18.845,9
2003 **)	9.027,9	200,2	906,8	3.146,8	445,6	-	97,5	335,8	3.244,3	17.404,9
2002	5.869,2	130,1	592,4	2.054,9	290,8	-	63,5	222,8	2.118,2	11.368,9
2001	5.144,5	111,8	467,0	1.093,0	261,8	-	36,7	61,3	977,9	8.154,2

*) Angka masih tergabung dengan kabupaten induk

**) Angka sementara

Sebagian besar (48.41%) produksi ikan dikonsumsi sebagai ikan segar. Pengolahan ikan terbatas di industri rakyat dalam bentuk ikan asin, ikan asap, terasi dan ikan pindang (Tabel 5.6). Di Sumsel belum ada pabrik bakso ikan, burger ikan, sosis ikan, pengalengan ikan.

Tabel 5.6. Pengolahan Hasil Perikanan di Sumatera Selatan pada Tahun 2003

Jenis Pengolahan	Percentase Produksi Perikanan						
	Laut	PU	Total	Sungai	Danau	Waduk	Rawa
Perlakuan produksi	34.64	50.63	85.27	40.95	12.17	0.38	32.56
Dipasarkan segar	16.94	31.48	48.41	24.77	8.30	0.26	20.17
Pengeringan/penggaraman	11.74	12.69	24.43	10.79	2.51	0.08	8.19
Pindang	-	-	-	0.27	-	-	-
Terasi	1.62	0.00	1.62				
Pengasapan	1.86	4.67	6.53	3.84	1.12	0.02	2.96
Lain-lain	2.48	1.63	4.12	1.27	0.24	0.02	1.25
Jumlah ikan olahan	6.53	8.20	14.73	6.17	1.86	0.05	5.86
Pengeringan/penggaraman	4.72	6.10	10.82	4.53	1.40	0.04	4.40
Terasi	0.24	0.00	0.24	-	-	-	-
Pengasapan	0.63	1.63	2.26	1.30	0.39	0.01	1.07
Lain-lain	0.93	0.47	1.40	0.34	0.07	0.01	0.39
Total	41.17	58.83	100.00	47.12	14.03	0.43	38.42

Dinas Perikanan dan Kelautan (2003)

Ekspor hasil perikanan Sumatera Selatan terdiri dari bentuk olahan segar/beku seperti: udang, cumi-cumi, kepiting, ikan kakap, tenggiri, bawal, paha kodok. Ekspor hasil perikanan dalam bentuk hidup antara lain: ikan hias, ikan betutu, labi-labi, kura-kura, ikan karapu, kepiting dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian di lapangan rantai pemasaran ikan atau hasil tangkapan ikan belum menguntungkan petani/nelayan. Misalnya, harga hasil tangkapan atau hasil produksi budidaya ikan masih sangat rendah. Harga yang rendah di tingkat petani/nelayan menjadi disinsentif peningkatan hasil budidaya perikanan.

Petani masih sebagai *price taker*. Industri es untuk penyimpanan ikan masih terbatas. Di pesisir belum ada industri pabrik es yang sangat diperlukan untuk pengiriman ikan nelayan ke tempat penjualan di Palembang. Permodalan bagi petani ikan/nelayan sangat terbatas karena ketiadaan agunan dan penjaminan.

5.2. Pengembangan Areal dan Produksi

Pengembangan usaha perikanan selain ditujukan untuk percepatan penambahan devisa dari sektor perikanan juga dimaksudkan untuk ketahanan pangan khususnya pasokan protein berasal dari perikanan. Sampai dengan tahun 2009, produksi dan

pendapatan masih dititikberatkan pada usaha penangkapan di alam. Walaupun demikian, usaha budidaya ikan mulai dikembangkan baik di pantai (tambak) ataupun di perairan tawar (kolam, sawah dan keramba). Usaha budidaya yang dikembangkan hendaknya berbasis potensi wilayah berdasarkan jenis teknologi budidaya dan komoditas dan kriteria pemilihan wilayah didasarkan pada ketersedian faktor pendukung usaha budidaya ikan dari hulu hingga hilir seperti ketersediaan benih dan pakan ikan, penyerapan produksi, proses pengolahan pasca panen dan kemudahan untuk akses dan pemasaran.

Dengan demikian, usaha perikanan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, PDRB, dan pendapatan sesuai dengan sasaran pada Tahun 2009. Luas areal pemeliharaan/penangkapan ikan di Sumatera Selatan Tahun 2004 ditampilkan di Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Luas Areal Pemeliharaan/Penangkapan Ikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

No.	Kabupaten/Kota	Kolam	Sawah	Keramba	Tambak	Jumlah
1.	Ogan Komering Ulu	2.153,9	757,9	1,2	-	2.913,0
2.	OKU Timur *)	-	-	-	-	-
3.	OKU Selatan *)	-	-	-	-	-
4.	Ogan Komering Ilir	220,2	42,6	3,5	19.273,9	19.640,2
5.	Ogan Ilir *)	-	-	-	-	-
6.	Muara Enim	753,2	263,3	1,2	-	1.017,7
7.	Lahat	242,3	232,7	-	-	475,0
8.	Musi Rawas	2.722,2	2.107,5	-	-	4.829,7
9.	Musi Banyuasin	242,3	-	7,1	968,5	1.217,9
10.	Banyuasin	-	-	-	-	-
11.	Palembang	246,7	-	1,1	-	247,8
12.	Prabumulih *)	-	-	-	-	-
13.	Pagaralam *)	-	-	-	-	-
14.	Lubuk Linggau *)	-	-	-	-	-
Jumlah 2004		6.580,8	3.404,0	14,1	20.342,4	30.341,3
2003 **)		11.603,3	6.738,2	6,9	40.109,6	58.458,0
2002		5.298,0	3.575,0	6,4	38.127,0	47.006,4
2001		8.511,0	3.609,0	6,0	38.127,0	50.253,0

*) Angka masih tergabung dengan kabupaten induk

**) Angka sementara

Berdasarkan Tabel 5.7, luas areal pemeliharaan/penangkapan yang terluas adalah di Kabupaten OKI (19.640,2 ha); budidaya kolam sawah terluas di Kabupaten Musi Rawas (kolam 2.722,2 ha dan sawah 2.107,5 ha); perikanan keramba terluas di Kabupaten Musi Banyuasin serta perikanan tambak terluas di Kabupaten OKI (19.273,9 ha).

Permasalahan umum pengembangan usaha budidaya ikan di laut dan perairan darat di Sumatera Selatan adalah (1) jumlah dan jenis benih yang dihasilkan belum mencukupi permintaan pasar, (2) teknologi budidaya ikan terbatas pada ikan introduksi seperti mas, nila dan lele dan bukan jenis ikan asli perairan di Sumatera Selatan,

(3) produksi pakan lengkap dengan sumber daya lokal belum berkembang dan sebagian besar pakan lengkap didatangkan dari luar daerah dengan harga relatif mahal, (4) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen, (5) lemahnya posisi petani ikan/nelayan dalam penentuan harga pasar, (6) terbatasnya pemberian fasilitas kredit usaha skala kecil, dan (7) terbatasnya dan kurangnya keseragaman data dan informasi budidaya ikan antar kabupaten di Sumatera selatan. Untuk mewujudkan **Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangang**, pendekatan yang digunakan untuk mencapai target yang ditetapkan hendaknya mengacu pada pemecahan masalah tersebut di atas.

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk Sumatera Selatan pada Tahun 2009 mencapai 6.866.565 jiwa dan tingkat konsumsi ikan 25 kg/kapita/tahun, maka produksi perikanan pada Tahun 2009 diharapkan mencapai 206.257 ton atau pertambahan produksi 69.861 ton (Tabel 5.8).

Tabel 5.8. Usaha Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2003 dan Tahun 2009

No.	Jenis	2003	2009	Pertambahan	
				(ekor/ton/ha/unit/US \$)	%
1.	Prod. Benih ikan (1000 ekor)	82.449,28	98.534,37	16.085,1	3.01
2.	Produksi (ton)	136.395	206.257	69.861	6.96
	a. Penangkapan	94.159	108.562	14.403	2.40
	Laut	52.467	62.648	10.181	3.00
	Perairan umum	41.693	45.928	4.236	1.63
	b. Budidaya	42.236	97.695	55.458	15.00
	Budidaya	42.236	97.695	55.458	15.00
3.	Lahan usaha (ha)	24.596	91.876	67.280	24.57
	a. Kolam	5.976	10.656	4.680	10.12
	b. Sawah	2.960	6.860	3.900	15.00
	c. Tambak	15.648	75.530	59.882	30.00
	d. Keramba (ha/unit)	12	31	19	17.12
4.	Armada nelayan	35.161	40.353	5.192	2.32
	a. Perahu tanpa motor (unit)	31.566	35.548	3.982	2.00
	b. Motor tempel (unit)	221	267	46	3.20
	c. Kapal motor (unit)	3.374	4.548	1.174	5.10
5.	Rumah Tangga Perikanan	79.746	238.121	158.375	20.00

Berdasarkan berbagai jenis usaha perikanan (Tabel 5.9), diharapkan seluruh stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung agar mampu dengan bidang perikanan, mengembangkan/meningkatkan sektor perikanan agar adanya penyerapan tenaga kerja, PDRB, dan pendapatan sesuai dengan sasaran program pembangunan sektor perikanan.

Tabel 5.9. Estimasi Tenaga Kerja, PDRB, Ekspor, Konsumsi Ikan dan Pendapatan Sektor Perikanan pada Tahun 2009

Jenis	Tahun		Pertambahan	
	2003	2009	(ton/ha/nit.US \$)	%
Tenaga kerja	398.730	922.286	523.556	15.00
PDRB (Rp. 1.000)	1.280.989.163	4.886.585.855	3.605.596.693	25.00
Ekspor perikanan (ton)	8.651	15.948	7.296	10.73
Nilai ekspor (US \$)	40.983.789	55.642.841	14.659.052	5.23
Konsumsi/kapita/tahun	23.29	25.09	1.80	1.25
Pendapatan/rtp/tahun	16.233.031	48.471.571	32.238.540	20.00

Rincian dari masing-masing input usaha budidaya untuk mencapai target pada tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Produksi benih

Sentra produksi benih difokuskan pada empat kabupaten yaitu M. Enim,OKU, Lahat, dan MURA (Tabel 5.10). Lokasi pemberian di Kab. OKU diarahkan pada kecamatan buay Madang, Belitang dan Muara Kisam, di Kab. MURA adalah kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo dan BKLU Terawas. Jenis ikan yang dihasilkan adalah ikan mas, nila, tawes, mujair, dan lele.

Tabel 5.10 . Pencapaian Produksi Benih Ikan Provinsi SUMSEL pada Tahun 2006-2009

Kabupaten	Kemampuan Produksi (%) [*]	Produksi Tahun ke (x 1000 ekor)			
		2006	2007	2008	2009
Ogan Komering Ulu	11.11	10.011	10.313	10.624	10.944
Muara Enim	56.67	51.083	52.623	54.210	55.844
Lahat	18.56	16.727	17.231	17.751	18.286
Musi Rawas	13.66	12.313	12.684	13.067	13.461
Total	100.00	90.134	92.851	95.651	98.534

* Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SUMSEL (2003)

b. Produksi ikan

Pencapaian produksi ikan pada tahun 2006-2009 bervariasi ditentukan oleh potensi kabupaten pada masing-masing sistem atau teknologi budidaya. Untuk budidaya kolam, target produksi diarahkan pada Kab. OKU, MURA, Lahat dan Kodya Palembang. Untuk budidaya sawah (minapadi) diarahkan pada Kabupaten MURA, OKU dan Lahat. Budidaya keramba difokuskan pada Kab.OKI, Kodya Palembang dan OKU, sedangkan budidaya tambak difokuskan pada Kab. OKI. Lokasi budidaya kolam di Kab. MURA diantaranya adalah Muara Beliti, Tugumulyo, dan BKLU Terawas. Pada Kab. OKU, lokasi produksi adalah Buay Madang, Belitang, Muara Dua dan Cempaka (Tabel 5.11).

Tabel 5.11. Pencapaian Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2009

Teknologi/ Kabupaten/Kota	Kemampuan Produksi (%) [*]	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
Kolam					
Musi Banyuasin	1.72	1.105	1.271	1.462	1.681
Ogan Komering Ilir	0.34	218	251	288	332
Musi Rawas	8.03	5.157	5.930	6.820	7.843
Lahat	7.83	5.031	5.786	6.654	7.652
Muara Enim	1.87	1.202	1.382	1.589	1.828
Palembang	6.80	4.368	5.023	5.776	6.642
Ogan Komering Ulu	12.20	7.835	9.010	10.361	11.916
Jumlah	38.79	24.916	28.653	32.950	37.894
Sawah					
Ogan Komering Ilir	0.18	116	133	153	176
Musi Rawas	3.12	2.003	2.304	2.649	3.047
Lahat	1.96	1.260	1.450	1.667	1.917
Muara Enim	0.50	323	372	427	491
Ogan Komering Ulu	3.70	2.375	2.731	3.141	3.612
Jumlah	9.46	6.077	6.990	8.037	9.243
Keramba					
Musi Banyuasin	0.31	198	228	262	302
Ogan Komering Ilir	4.57	2.937	3.378	3.884	4.467
Musi Rawas	0.49	313	360	414	476
Lahat	0.66	427	491	565	649
Muara Enim	1.19	765	879	1.011	1.163
Palembang	2.29	1.471	1.692	1.946	2.237
Ogan Komering Ulu	2.69	1.731	1.990	2.289	2.632
Jumlah	12.21	7.842	9.018	10.371	11.926
Tambak					
Musi Banyuasin	0.27	171	197	23	260
Ogan Komering Ilir	39.28	25230	29.014	3.335	38.372
Jumlah	39.54	25401	29.211	3.358	38.632
Jumlah Total	100	64236	73.871	84.952	97.695

c. Lahan produksi

Penentuan lokasi lahan sentra produksi perikanan untuk masing-masing sistem budidaya ikan perlu pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur meliputi sarana produksi budidaya seperti jumlah dan luasan kolam, sawah, keramba dan tambak, jumlah benih, jumlah pakan, Balai Penyedia Stock Induk dan Unit Pemberian Rakyat, industri pakan ikan, industri pengolahan ikan.

Tabel 5.12. Target Pencapaian Lahan Produksi Ikan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2006-2009

Teknologi/ Kabupaten/Kota	Kemampuan Produksi (%) [*]	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
Kolam					
Musi Banyuasin	0.91	426	534	671	835
Ogan Komering Ilir	0.83	388	485	610	759
Musi Rawas	10.22	4.790	5.995	7.535	9.386
Lahat	0.91	426	534	671	835
Muara Enim	2.83	1.327	1.661	2.088	2.601
Palembang	0.93	434	543	683	851
Ogan Komering Ulu	8.08	3.790	4.744	5.963	7.427
Jumlah	24.70	11.581	14.496	18.221	22.694
Sawah					
Ogan Komering Ilir					
Musi Rawas	0.13	62	78	98	122
Lahat	6.55	3.071	3.844	4.832	6.018
Muara Enim	0.72	339	424	533	664
Ogan Komering Ulu	0.81	382	478	601	748
Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0
Musi Rawas	2.36	1.104	1.382	1.738	2.164
Jumlah	10.58	4.958	6.206	7.802	9.716
Tambak					
Musi Banyuasin	3.08	1.443	1.807	2.271	2.829
Ogan Komering Ilir	61.59	28.875	36.143	45.429	56.588
Jumlah	64.67	30.318	37.950	47.700	59.417
Keramba					
Musi Banyuasin	0.025	12	15	18	23
Ogan Komering Ilir	0.012	6	7	9	11
Musi Rawas		0	0	0	0
Lahat		0	0	0	0
Muara Enim	0.004	2	2	3	4
Palembang	0.004	2	2	3	4
Ogan Komering Ulu	0.004	2	2	3	4
Jumlah	0.050	24	28	36	46
Jumlah Total	100	46.881	58.680	73.759	91.873

Untuk itu akan diperhatikan tahapan kerja yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi sentra produksi untuk masing-masing sistem budidaya ikan
2. Pembangunan infrastruktur (sarana produksi budidaya seperti jumlah dan luasan kolam, sawah, keramba dan tambak, jumlah benih, jumlah pakan, Balai Penyedia Stok Induk dan Unit Pemberian Rakyat, industri pakan ikan, industri pengolahan ikan
3. Perencanaan permodalan pembudidaya ikan dan nelayan
4. Pemberian penyuluhan dan pendampingan
5. Penelitian dan pengembangan

5.3. Pengembangan Pasca Panen dan Industri

Produksi ikan di Sumatera Selatan pada tahun 2003 mencapai 186.904,2 ton. Pada tahun 2004 produksi perikanan turun sekitar 22,43 persen, hingga menjadi 144.983,7 ton. Dari total produksi ikan tahun 2004 tersebut, sekitar 37,27 persen berasal dari produksi perikanan laut, 49,48 persen berasal dari produksi perikanan darat, dan 13,24 persen berasal dari produksi tambak. Produksi perikanan laut sebesar 54.041,7 ton tahun 2004 tersebut, meningkat sebesar 1,38 persen jika dibanding dengan produksi tahun 2004. Secara umum produksi perikanan darat yang terdiri dari perairan umum, kolam, sawah dan keramba tahun 2004 di Sumatera Selatan menurun sebesar 2,31 persen dari tahun 2003.

Dengan melihat kondisi perkembangan produksi perikanan di Sumatera Selatan maka ada kecenderungan penurunan produksi ikan. Untuk mengantisipasi penurunan produksi tersebut akan dilakukan berbagai usaha/solusi seperti penguatan permodalan usaha di tingkat nelayan, perbaikan teknologi penangkapan, ketersediaan sarana produksi yang efisien dan murah serta jaminan pasar hasil tangkapan/produksi budidaya ikan.

Salah satu usaha yang dalam waktu dekat segera dilakukan adalah pengembangan pasca panen dan industri. Hal ini dikarenakan hasil tangkapan dan produksi budidaya ikan yang dihasilkan petani ikan/nelayan umumnya berupa hasil segar, hasil olahan segar/beku dan sebagian kecil rumah tangga nelayan yang mengolah hasil tangkapan menjadi bahan makanan lanjutan (agroindustri perikanan) seperti industri ikan asin, ikan asap, terasi, kerupuk dan jenis makanan lainnya.

Pengembangan pasca panen dan industri perikanan dapat pula berupa pengembangan sarana dan prasarana, seperti tersedianya pabrik es batu yang berlokasi di wilayah pemukiman nelayan, Tempat Pengumpulan hasil tangkapan (*Coldstorage*). Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Pelabuhan Perikanan Pantai, Balai Benih Ikan, dan tersedianya Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Sarana tersebut akan tersedia pada setiap Kabupaten OKI, MUBA, Banyuasin, dan Musi Rawas.

Dalam usaha pengembangan pasca panen dan perikanan melalui pengembangan sarana perikanan tersebut maka perlu juga dilakukan pengembangan usaha industri perikanan baik ditingkat skala rumah tangga maupun sekali usaha kecil dan menengah di tingkat pedesaan pada rumah tangga perikanan. Pengembangan industri tersebut berupa usaha industri berbahan baku ikan/udang seperti terasi, ikan asin, ikan asap, abon ikan, kerupuk/kemplang dan lainnya.

Untuk pengembangan pasca panen dan industri tersebut, akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perikanan, seperti penambahan jumlah teknis lapangan (PTL), dan Penyuluhan Perikanan Lapangan (PPL). Hal juga sejalan dengan

program Pemerintah Pusat dalam Program Revitalisasi pertanian serta dalam mendukung Program Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan. Selain peningkatan kualitas SDM perikanan tersebut, juga dilakukan pembinaan petani/nelayan dalam bidang kewirausahaan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya jiwa usaha di sebagian besar petani/nelayan. Kondisi ini ditunjang dengan pemasaran produksi perikanan umumnya dilakukan petani/nelayan di pasar lokal dan perdagangan antar pulau/provinsi, seperti ke Jakarta, Bangka-Belitung, dan daerah sekitarnya belum optimal.

Dalam rangka mendukung Sumsel Lumbung Pangan, maka mulai tahun 2007 – 2010 ke depan akan segera dilakukan pengembangan pasca panen dan industri perikanan, berupa pembangunan pabrik es batu di Kabupaten OKI, MUBA dan Banyuasin masing-masing satu unit pada tahun 2007 dan tempat pengumpulan hasil tangkapan/hasil budidaya (*Colstorage*). Untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 pembangunan sarana lainnya seperti TPI, PPI dan lainnya.

5.4. Pengembangan Sarana Produksi

Sarana produksi perikanan merupakan hal yang sangat pokok dalam mendukung peningkatan produksi ikan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sarana produksi perikanan budidaya berupa benih ikan, benur udang, pupuk, pestisida, peralatan budidaya seperti pompa, bak penampung hasil panen dan lain-lainnya. Sarana produksi untuk perikanan tangkap berupa perahu motor atau kapal motor, bak penampungan es batu, bak penampung hasil tangkapan, ikan seperti : jaring insang hanyut, jaring insang tetap, Anco/Trawl, serok, rawai, pancing, sero, jernal, bubu dan lainnya.

Kondisi sarana produksi perikanan yang dimiliki oleh petani/nelayan di Sumatera Selatan umum masih sederhana/tradisional dan jumlah yang dimiliki sangat terbatas serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penggunaan sarana tersebut masih rendah. Untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya oleh petani/nelayan di Sumatera Selatan akan dilakukan usaha pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana produksi perikanan.

Kegiatan/program pengembangan sarana produksi perikanan tersebut berupa

1. Pembuatan/pemijahan benur udang atau bibit ikan oleh petambak.
2. Bantuan permodalan untuk petambak/nelayan membeli, seperti alat tangkap.
3. Pembangunan industri perahu/kapal penangkap ikan, pembuatan jaring, bubu, jernal dan lainnya.
4. Pembangunan pabrik pakan ikan, pabrik pestisida, pupuk skala menengah di wilayah kabupaten yang potensi perikanan, seperti Kabupaten OKI, MUBA, Musi Rawas dan Banyuasin.

5. Pembangunan kios-kios sarana produksi dan kios-kios Bahan Bakar Minyak/BBM di wilayah pedesaan yang potensi perikanan, seperti di wilayah pesisir (Kabupaten OKI, MUBA, dan Banyuasin).

Apabila program kegiatan pengembangan sarana produksi perikanan di Sumatera Selatan tersebut dapat berjalan dengan baik, diharapkan dapat tercapainya sasaran dalam mendukung Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan, dengan konsekuensi semua *stakeholder* yang terlibat langsung dan tidak langsung sepenuhnya didalam program tersebut.

5.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan

Sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan, baik aparat maupun masyarakat perikanan sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan perikanan. Karena itu, ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan tingkat penguasaan teknologi sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat petani/nelayan adalah kunci utama dalam pengelolaan pembangunan sektor perikanan di Sumatera Selatan. Apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka secara langsung akan dapat memberikan kontribusi dalam mensejahterakan penghidupannya. Para pengelola di tingkat pemerintah harus pula di tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, karena tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sumber daya manusia meliputi tenaga teknis, UPT, tenaga administrasi, tenaga fungsional, petani/nelayan dan masyarakat perikanan lainnya yang profesional.

Pengembangan sumberdaya manusia sektor perikanan tersebut akan dilakukan melalui penumbuhan kebersamaan (dinamika kelompok) dalam membahas permasalahan dan mencari solusi tentang usaha perikanan yang sedang dihadapi, dilakukan pelatihan teknis budidaya dan pasca panen usaha perikanan, pelaksanaan revitalisasi penyuluhan oleh pemerintah daerah, pemberdayaan petani maju di desa perikanan dengan melalui pengukuhan SK Bupati serta usaha pengembangan SDM lainnya.

Dalam upaya mendorong pengembangan usaha sektor perikanan akan dilakukan reorientasi pembinaaan sumberdaya manusia petani/nelayan maupun SDM lainnya seperti penyuluhan dan SDM yang ada di lembaga terkait. Pembinaan SDM rumah tangga perikanan untuk peningkatan kemampuan penyuluhan perikanan akan dilakukan baik melalui pendidikan formal yang lebih tinggi maupun melalui kursus singkat (*short course*), studi perbandingan ke negara yang maju agribisnis perikanannya.

Kunci utama dalam pengembangan SDM perikanan yang terpenting saat ini bukan hanya prinsip *the rightman on the right place*, tetapi harus bertumpu terhadap mengembangkan SDM perikanan yang ada (dengan latar belakang yang berbeda-beda) menjadi suatu kerjasama tim (*team work*) yang harmonis. Untuk membangun suatu kerjasama tim yang harmonis, setiap SDM akan mampu berpikir atau berwawasan secara *Cross-job*, yakin memahami dengan baik apa peranan pekerjaannya (*on job discription*) dalam perusahaan dan implikasi kinerja pekerjaannya terhadap pekerjaan orang lain. Selain itu, sumberdaya manusia perikanan akan dipacu untuk memiliki wawasan yang luas baik *micro-behavior*, *macro-behavior* maupun *global-behavior* dari agribisnis perikanan.

Sebagai sebuah sistem agribisnis, perikanan melibatkan banyak pelaku, diantaranya adalah petani ikan/nelayan, penyuluhan, lembaga permodalan, pengusaha sarana produksi ikan, pengusaha pengolahan ikan. Peningkatan daya saing sistem agribisnis perikanan memerlukan kelembagaan pelaku yang kuat, dan sinerji antar lembaga dalam sistem agribisnis tersebut.

Posisi tawar petani yang lemah mengakibatkan keuntungan yang diperoleh petani ikan/nelayan sangat kecil sehingga tidak terdorong untuk meningkatkan produksi dengan menerapkan teknologi produksinya. Oleh karena itu, asosiasi usaha akan dibentuk seperti kelompok tani, koperasi, koperasi syariah, baitul mal wa tamwil (BMT), kelompok usaha bersama (kube). Pembentukan asosiasi petani ini akan disertai pendampingan agar petani lebih memahami manajemen dalam organisasi,

Terkait dengan pendampingan ini, lembaga penyuluhan pertanian menjadi penting. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian menjadi titik kritis kemajuan lembaga petani. Upaya peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan dengan pengaktifan *reward and punishment*, dan penyusunan program *bottom up*.

Keberadaan kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis perikanan sangat penting untuk menciptakan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan yang tangguh dan kompetitif. Lembaga-lembaga pendukung tersebut sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi bisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis perikanan. Beberapa lembaga pendukung dalam pengembangan agribisnis perikanan di Sumatera Selatan adalah: pemerintah, lembaga pembiayaan seperti bank, lembaga pemasaran dan distribusi, koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal, lembaga penyuluhan pertanian lapangan, dan lembaga penjamin dan penanggung resiko, seperti asuransi pertanian sangat tepat untuk dikembangkan sejalan dengan upaya aplikasi teknologi agribisnis perikanan yang semakin meningkat. Selain itu, instrumen *hedging* dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan resiko dalam agribisnis perikanan dan industri pengolahannya.

5.6. Pengembangan Pemasaran

Kunci dari pengembangan sektor perikanan adalah tersedianya pasar, baik pasar untuk produk segar maupun produk olahan. Lemahnya akses nelayan/petambak ke pasar menyebabkan mereka hanya menerima 25 sampai 50 persen dari harga konsumen akhir untuk sebagian besar komoditas perikanan. Lembaga pemasaran yang ada belum secara signifikan membantu para nelayan/petambak, dan lebih banyak menguntungkan para pedagang. Di pasar ekspor juga ada kecenderungan yang surplus perdagangan hasil perikanan terus menurun, baik karena pengaruh volume ekspor/import maupun karna pengaruh harga.

Pemasaran merupakan kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberikan kepuasan dari barang dan jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai dalam sektor perikanan. Pemasaran ini secara parsial terdiri atas pemasaran input dan alat-alat perikanan, pemasaran produk perikanan, pemasaran produk agroindustri perikanan serta pemasaran jasa-jasa pendukung sektor perikanan.

Sistem pemasaran produk perikanan merupakan sistem yang kompleks dibanding komoditas lainnya, hal ini disebabkan oleh sifat produk perikanan, sistem produksi, serta struktur dan karakteristik pasar produk perikanan yang khas. Sifat-sifat produk perikanan terdiri dari tidak tahan lama, memerlukan tempat yang khusus/besar/luas, mutu produk bervariasi dalam jenis , jumlah dan nilai, serta bersifat musiman.

Peran sistem pemasaran dalam usaha pengembangan sektor perikanan mencakup banyak lembaga, baik berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran produk perikanan. Sistem pemasaran yang kompleks ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam upaya memaksimumkan tingkat konsumsi, kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat. Peran sistem pemasaran tersebut antara lain: memaksimumkan tingkat konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan, dan memaksimumkan mutu hidup. Selain daripada sistem pemasaran tersebut, ada beberapa pendekatan dalam sistem pemasaran produk perikanan antara lain: pendekatan fungsional, pendekatan kelembagaan, pendekatan komoditas, pendekatan manajerial dan pendekatan sistem.

Dalam usaha mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai “Lumbung Pangan” maka perlu dilakukan berbagai strategi pengembangan pemasaran sektor perikanan terutama agrbisnis perikanan. Strategi pengembangan pasar sektor perikanan tersebut seperti upaya perluasan pangsa pasar akan dilakukan setiap tahun. Peningkatan pasar dapat dilakukan dengan cara konvensional dan non konvensional. Cara konvensional adalah (1) mengaktifkan strategi serba siasat untuk merebut simpati pasar (*mixid strategy*,

price-product-place-promotion), (2) memperjuangkan tambahan porsi (partisipasi) pemenuhan quota ekspor, (3) mengisi volume kontrak yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan agribisnis terhadap mitra dagangnya. Sedangkan cara non-konvensional adalah : (1) menempatkan keberadaan aktivitas agribisnis ke dalam ajang perdagangan elektronis “e-commerce”; dan (2) menempatkan perusahaan ke dalam pasar berjangka dan bursa komoditi.

Kesemua cara memperluas pangsa pasar tersebut tidak mungkin dilakukan sekaligus, melainkan secara terencana dapat diperioritaskan kepada siasat yang paling tepat kondisi dan tepat sasaran, serta efisiensi dan efektivitas pemberian harus menjadi pertimbangan dasar.

Pengembangan pemasaran produksi perikanan dapat melalui promosi, hal ini sangat erat kaitannya dengan penonjolan sebutan dagang untuk kekhasan dan kelebihan produk. Informasi seperti keunggulan produk perikanan karena perlakuan organik ketimbang kimiawi, atau lebih non kolestrol daripada kolestrol. Informasi itu sangat spesifik lokasi dan spesifik varietas dan karenanya peran divisi Litbang perikanan sangat perlu untuk memastikan kadar informasi yang akurat dan terpercaya.

Usaha lain akan dilakukan dalam pengembangan pemasaran produk perikanan di Sumatera Selatan adalah dengan perencanaan pangsa pasar dengan pendekatan lain dengan menggunakan jasa konsultan pemasaran yang berpengalaman. Walaupun demikian peran sumberdaya manusia perikanan yang ahli dan terampil di Sumatera Selatan akan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga akan dapat menghemat banyak biaya yang perlu untuk memperkuat upaya pemasaran hasil agribisnis perikanan.

Pengembangan pemasaran sektor perikanan di Sumatera Selatan dalam mendukung Sumsel Lumbung Pangan, akan melalui berbagai program pembangunan sektor perikanan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan/industrialisasi, penanganan pasca panen, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi yang lebih baik dan modern. Perbaikan dan peningkatan mutu produk, kepastian/jaminan hak atas proses dan produksi, pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran.

Adapun kegiatan pemasaran tersebut meliputi berbagai hal yaitu

1. Penanganan pasca panen produk perikanan, yang dimulai dari rumah tangga petambak/nelayan sehingga adanya peningkatan nilai tambah dari produksi ikan dan atau hasil tangkapan.
2. Pengembangan dan pembinaan unit-unit pengolahan/industri pengolahan sampai pada *final product* oleh lembaga/dinas pemerintah dan swasta yang bergerak pada bidang perikanan.

3. Pengembangan tempat-tempat penyimpanan, baik dalam bentuk gudang, *cool room*, *sylo* dan lain-lain.
4. Pengembangan jaringan pasar baik fisik maupun sistem *on line*.
5. Pemberian hak paten bagi proses dan produk yang dihasilkan.
6. Pengembangan lembaga sertifikasi dan akreditasi produk perikanan.
7. Pengembangan *trading house*, *market intelligent*, penetrasi pasar, promosi, misi dagang dan sejenisnya.
8. Penciptaan iklim kondusif melalui pengembangan secara wajar, proporsional, rasional dan dapat diterima terhadap beban finansial usaha perikanan. Misal PPn, PPh, pajak eksport, retribusi dan lain-lain.

5.7. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Karateristik usaha dan produk perikanan khususnya di Sumatera Selatan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan produksi/jalan usahatani, air/pengairan, transportasi, listrik, pelabuhan/dermaga, telekomunikasi, pergudangan, *cool storage* dan lain-lain. Infrastruktur tersebut dibutuhkan di wilayah produksi, yang justru sampai saat ini masih kurang mendapat sentuhan dan perhatian memadai dari pemerintah. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pembangunan sektor perikanan terutama terhadap efisiensi, kehilangan hasil, kualitas produksi, sistem budidaya, produktivitas yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani/petambak/nelayan.

Salah satu dari enam kriteria pembangunan sektor perikanan, penyediaan infrastruktur seperti pelabuhan ikan, kapal-kapal ikan, listrik dan lainnya merupakan hal pokok yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan agribisnis perikanan secara keseluruhan. Pengembangan pelabuhan perikanan memerlukan pengembangan wilayah pesisir secara keseluruhan. Infrastruktur yang lain yang sangat diperlukan saat ini di bidang perikanan dalam mendukung Sumsel Lumbung Pangan adalah: pembangunan Balai Benih Induk (BBI), BBIP, UPR, Pasar Pelelangan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI); pembangunan/rehabilitasi saluran tambak, pengembangan keramba di perairan umum, pembukaan cabang pabrik pakan ikan atau skala rumah tangga, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan produksi di daerah terisolir, pengembangan jaringan riset dan teknologi perikanan dan peningkatan jaminan keamanan.

Dalam pengembangan infrastruktur tersebut diatas diperlukan dana yang cukup besar, sehingga dana berasal dari APBD maupun APBN sangat terbatas, untuk diperlukan bantuan dari pihak luas seperti Bank Dunia serta investor asing. Dilihat dari perkembangan pembangunan di Indonesia umunya dan Sumatera Selatan khususnya makin jelas bahwa para investor asing maupun domestik sangat berminat pada proyek infrastruktur skala besar

seperti jalan tol, rel kereta api, pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan (seperti Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumsel). Dalam perspektif makro, pembangunan infrastruktur pasti mampu menggariskan aktivitas perekonomian sampai ke pelosok negeri, tidak terkecuali aktivitas perekonomian sektor perikanan, agroindustri dan pembangunan pedesaan yang menjadi salah satu strategi pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah/kabupaten/kota.

Dalam perspektif pengembangan ekonomi daerah pedesaan khususnya wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur di satu sisi menjadi salah satu tulang punggung aktivitas dan daya tarik investasi di daerah tersebut. Di sisi lain pemerintah daerah akan berupaya keras memberikan informasi yang sebenarnya bahwa pembangunan infrastruktur khususnya perikanan di daerahnya akan semakin meningkatkan nilai tambah produk perikanan serta perputaran roda ekonomi di daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan pengembangan infrastruktur pendukung di sektor perikanan tersebut, dalam mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung pangan maka diperlukan kerjasama yang harmonis, saling percaya, saling terbuka dan saling menguntung bagi semua Stakeholder (pemerintah, swasta/investor, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan lembaga-lembaga lainnya). Hal ini dikarenakan dalam pengembangan infrastruktur pembangunan pertanian khususnya perikanan banyak kendala yang dihadapi seperti SDA, SDM dan yang paling pokok adalah besarnya dana/biaya yang diperlukan. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya melalui pihak investor asing maupun domestik.

VI. RENCANA PENGEMBANGAN PETERNAKAN.

6.1. Kondisi Saat Ini

Bahan pangan asal ternak merupakan sumber protein hewani yang tak tergantikan oleh bahan pangan lainnya yang turut membantu dalam menyehatkan dan mencerdaskan bangsa. Hal inilah yang menyebabkan produk peternakan berupa daging, telur, dan susu masuk ke dalam Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115 Tahun 1998. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan serta kesadaran akan kepentingan produk-produk hewani, maka permintaan terhadap produk-produk peternakan terus meningkat (Tabel 6.1), namun hal ini tidak diiringi dengan jumlah produksi (Tabel 6.2) sehingga menyebabkan harga jual produk peternakan semakin tinggi.

Tabel 6.1. Perbandingan tingkat pertumbuhan produksi dan konsumsi hasil ternak di Sumatera Selatan pada Periode 1993 – 2003 (ton)

No	Jenis	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak			
		1993 -1999		1999 -2003	
		Produksi	Konsumsi	Produksi	Konsumsi
1.	Daging	22.43	23.11	12.75	14.38
2.	Telur	78.93	11.98	128.70	11.37
3.	Susu	- 5.83	6.99	-18.56	9.34

Sumber: Laporan Dinas Peternakan Prop. Sumsel 2005

Pertumbuhan produksi ternak (kecuali telur) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi hasil ternak, sehingga jumlah permintaan produk ternak (kecuali telur) lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang ada. Hal tersebut merupakan suatu peluang yang harus dikembangkan di Sumatera Selatan sehingga kebutuhan pangan hewani dapat dipenuhi sendiri.

Untuk memenuhi permintaan susu untuk Sumatera Selatan, memang harus mendatangkan dari luar daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi dan budaya masyarakat Sumatera Selatan yang kurang cocok untuk pengembangan ternak perah (sapi dan kambing). Namun ada satu komoditi Sumatera Selatan yang sering terlupakan yaitu potensi kerbau rawa pampangan yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan susu, namun pengembangan ternak ini belum optimal, begitu juga dengan potensi kerbau lain di Sumatera Selatan belum dikembangkan dengan optimal karena pada umumnya daerah baik kabupaten maupun kota masih terkonsentrasi dengan pengembangan sapi. Pada hal potensi kerbau sebagai penghasil daging dan susu dapat diandalkan karena

lingkungan hidup untuk kerbau sangat cocok di Sumatera Selatan. Kelebihan produksi telur dibandingkan dengan konsumsi merupakan suatu potensi yang sangat menguntungkan karena hasil produksi ini sudah dapat mensuplai kebutuhan daerah lain seperti Bengkulu, Riau dan Jambi.

Tabel 6.2. Perkembangan populasi ternak di Sumatera Selatan 1993 - 2003*

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)			
		1993	1999	2003	2004
1.	Sapi potong	439.411	404.448	419.937	438.666
2.	Sapi perah	130	180	220	250
3.	Kerbau	139.633	82.597	83.104	86.528
4.	Kambing	534.845	418.436	436.607	435.504
5.	Domba	98.085	54.564	54.512	58.273
6.	Babi	27.597	23.553	32.811	33.253
7.	Kuda	3.040	1.469	1.452	1.430
8.	Ayam Ras Pedaging	781.000	13.148.000	16.742.000	16.408.000
9.	Ayam Ras Petelur	564.000	1.200.000	5.858.000	5.863.000
10.	Ayam Buras	9.406.000	13.141.000	13.303.000	13.231.000
11.	Itik	1.444.000	2.117.000	2.103.000	2.101.000

Sumber: Statistik Peternakan Sumatera Selatan Dinas Peternakan Provinsi Sumsel 2005

Tingkat pertambahan populasi ternak di Sumatera Selatan masih sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan konsumsi ternak (Tabel 6.1), bahkan terlihat beberapa komoditi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas di lapangan seperti PPL dan para medis hewan di daerah binaan dalam pengembangan peternakan rakyat yang tersebar cukup luas. Dalam hal ini termasuk ketersediaan tenaga pada UPTD Balai Inseminasi Buatan Sembawa, Poskeswan, Penyuluhan Lapangan dan tenaga teknis lainnya. Keterbatasan ini berakibat pada kurangnya pelayanan oleh aparat terhadap peternak.
- b. Penerapan teknologi mulai dari praproduksi, budidaya dan pasca panen belum sepenuhnya diterapkan secara ekonomis dan efisien terutama dalam teknologi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB)
- c. Rendahnya tingkat kepemilikan modal mengakibatkan usaha peternakan masih terbatas pada skala usaha rumah tangga dan belum mengarah pada usaha agribisnis yang berorientasi pasar. Selain itu dengan panjangnya jalur tataniaga untuk setiap komoditi peternakan serta peran kelompok yang masih terbatas pada subsistem budidaya mengakibatkan rendahnya pendapatan di tingkat petani ternak.
- d. Belum tertatanya lahan sebagai basis budidaya peternakan dan sumber pakan hijauan secara konsisten yang dituangkan dalam peraturan tata ruang daerah menjadi hambatan bagi para investor untuk mengembangkan usahanya dibidang peternakan.

Secara umum penyebaran ternak ruminansia di Sumatera Selatan cukup merata. Dominasi untuk populasi ternak sapi potong terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu. Ternak kerbau paling banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir. Ternak kuda paling banyak ditemui di Kabupaten OKU, Lahat dan Muara Enim. Polpulasi ternak kambing terbanyak ada di Kabupaten Musi Rawas, Lahat dan Muara Enim, sedangkan ternak domba banyak terdapat di Kabupaten Lahat. Musi Rawas dan Muara Enim. Ternak babi banyak ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Penyebaran ternak ruminansia kuda dan babi pada Tahun 2004 menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Ternak						
		Sapi Perah	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1.	OKU	15	29.994	7.564	506	37.739	4.167	298
2.	OKU Timur	-	72.177	3.786	83	29.099	6.491	20.312
3.	OKU Selatan	-	20.328	3.041	63	24.392	4.447	602
4.	OKI	-	80.560	15.281	-	25.398	2.438	4.016
5.	Ogan Ilir	-	21.213	2.344	18	20.065	5.624	187
6.	Muara Enim	94	76.546	16.270	172	64.173	7.373	-
7.	Lahat	-	37.340	7.399	544	77.843	8.261	236
8.	Musi Rawas	3	33.732	25.390	5	83.351	7.458	4.945
9.	Musi Banyuasin	-	25.685	685	-	15.023	1.179	-
10.	Banyuasin	138	19.968	1.580	-	23.188	4.742	2.357
11.	Palembang	-	5.707	364	-	17.805	4.458	-
12.	Prabumulih	-	8.281	536	12	6.228	613	68
13.	Pagaralam	-	4.826	1.270	17	9.030	812	-
14.	Lubuk Linggau	-	2.309	1.018	10	2.170	210	232
Jumlah		250	438.666	86.528	1.430	435.504	58.273	33.253

Sumber : Statistik Peternakan Sumatera Selatan Dinas Peternakan Provinsi Sumsel 2005

Ternak unggas juga merupakan ternak primadona yang telah lama dikembangkan oleh masyarakat di Sumatera Selatan dengan alasan mudah dipelihara dan tidak memerlukan investasi yang besar dalam mengembangkan usaha ini. Penyebaran populasi ternak unggas di Kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Populasi ternak ayam ras pedaging terbesar ada kotamadya Palembang, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir. Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang paling besar populasi ayam ras petelur, diikuti oleh Kotamadya Palembang dan Prabumulih. Untuk ternak ayam buras Kabupaten OKU induk memiliki populasi terbesar diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Kotamadya Palembang. Populasi ternak itik terbesar terdapat di Kabupaten Muara Enim yang diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir.

Tabel 6.4. Penyebaran ternak unggas pada tahun 2004 menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Ayam Buras	Itik
1.	Ogan Komering Ulu	425.000	-	3.008.000	22.000
2.	OKU Timur	8.000	3.000	1.630.000	96.000
3.	OKU Selatan	4.000	-	592.000	19.000
4.	Ogan Komering Ilir	59.000	-	1.439.000	495.000
5.	Ogan Ilir	1.957.000	90.000	598.000	287.000
6.	Muara Enim	3.822.000	186.000	2.015.000	665.000
7.	Lahat	39.000	-	444.000	66.000
8.	Musi Rawas	30.000	-	906.000	108.000
9.	Musi Banyuasin	376.000	-	909.000	25.000
10.	Banyuasin	1.437.000	4.870.000	425.000	86.000
11.	Palembang	6.798.000	420.000	975.000	73.000
12.	Prabumulih	1.380.000	294.000	112.000	96.000
13.	Pagaralam	23.000	-	66.000	20.000
14.	Lubuk Linggau	50.000	-	112.000	43.000
	Jumlah	16.408.000	5.863.000	13.231.000	2.101.000

Sumber : Statistik Peternakan Sumatera Selatan Dinas Peternakan Provinsi Sumsel 2005

Jumlah dan kualitas bahan baku pakan ternak baik untuk ternak ruminansia maupun non ruminansia di Sumsel masih sangat terbatas dan belum mencukupi kebutuhan untuk ternak baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada umumnya peternak yang memelihara ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan kuda hanya mengandalkan rumput alam yang kualitasnya sangat rendah (Tabel 6.5).

Tabel 6.5. Perkiraan sumber bahan baku pakan dari hasil samping beberapa komoditi pertanian dan perkebunan yang dapat dijadikan pakan ternak (ton/tahun).

No.	Kabupaten/kota	Padi	Jagung	Ubikayu	Kacang Kedele	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Kelapa Sawit
1.	Ogan Komering Ulu	50.132	3.767	7.000	20	td		110
2.	Ogan Komering Ilir	45.000	1.445	3.279	100	-	-	147
3.	Banyu Asin	10.285	4.960	1.051	-	42	98	115
4.	Muara Enim	25.107	825	14.08	4	-	-	-
5.	Lahat	4.583	3.685	1.193	885	386	343	-
6.	Musi Rawas	7.123	784	879	501.8	16	1.785	81
7.	Musi Banyuasin	50.403	9.294	17.057	261	390	2.172	108
8.	Banyu Asin	10.285	4.960	1.051	-	42	98	115
9.	Palembang	1.090	63	4.560	-	100	5	77
10.	Pagar Alam	3.123	67	119	6.5	3	179	102
11.	Lubuk Linggau	2.616	68	172	16	3	2	

Sumber. Laporan Tahunan Dinas Peternakan 2004

Luas Kebun Hijauan dan Makanan Ternak (HMT) yang dikelola secara intensif (Tabel 6.6) di Sumsel masih sangat terbatas terutama rumput unggul dan tidak mencukupi kebutuhan ternak terutama ternak ruminansia yang populasi cukup besar (Tabel 6.2). Namun dari segi penyediaan hijauan di Sumatera Selatan cukup banyak, terutama rumput alam yang banyak tumbuh disekitar tanah marjinal yang jumlahnya cukup luas. Tidak ada

informasi tentang jenis hijauan yang ditanam. Hal tersebut juga mendapat perhatian karena ketidak-tersedianya hijauan yang berproduksi dan berkualitas tinggi akan dapat menurunkan produksi dan produktifitas ternak.

Tabel 6.6. Luas kebun HMT dan padang pengembalaan serta perkiraan produksi di Kabupaten di Sumatera Selatan.

No.	Kabupaten/kota	Hijauan Makanan Ternak		Padang Pengembalaan	
		Luas (ha)	Perkiraan Produksi/tahun (ton)	Luas (ha)	Perkiraan Produksi/tahun (ton)
1.	OKU Induk	200.00	12.000	30.00	1.600
2.	OKU Timur				
3.	UKU Selatan		Gabung dengan OKU Induk		
4.	Ogan Komering Ilir	12.50	750	142.00	8.520
5.	Ogan Ilir		Gabung dengan OKI		
6.	Muara Enim	92.75	3.900	670.00	40.000
7.	Lahat	42.84	285	47.00	2.820
8.	Musi Rawas	4.75	900	8.50	510
9.	Musi Banyuasin	25.10	1.506	9.00	540
10.	Banyuasin	65.00	3.900	670.00	40.000
11.	Palembang	td	td	td	td
12.	Prabumulih	26.00	1.560	17.00	1.020
13.	Pagar Alam	35.00	2.100	163.50	9.810
14.	Lubuk Linggau	15.00	900	8.50	510

Sumber. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Sumsel 2004.

Peternak unggas tradisional umumnya memanfaatkan limbah dapur rumah tangga, dan hasil sampingan industri dan hasil sampingan pertanian sebagai pakan yang mutunya masih rendah dan ketersediaanya pun sangat terbatas. Peternak komersial dan beberapa peternak ayam buras yang telah mendapat bantuan dari pemerintah yang menggunakan bahan pakan komersial, namun bahan pakan komersial yang beredar di pasar masih ada yang kualitasnya tidak memenuhi standar yang dibutuhkan ternak.

Bibit merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak. Untuk mendapatkan bibit ternak yang bermutu di Sumatera Selatan telah ada Balai Pembibitan Ternak Sapi Dwiguna dan Ayam Buras dan Balai Inseminasi Buatan di Sembawa, Banyuasin. Kedua lembaga ini bertugas untuk memproduksi bibit unggul untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Satu lembaga lagi yang sekarang memang sudah mengarahkan kegiatan pengembangan peternakan adalah dengan adanya AgroTechnoPark (ATP) yang kegiatannya diarahkan pada usaha pembibitan ayam, itik dan sapi. Lembaga ini berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir tepat di lokasi bekas Patra Tani, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang. ATP ini dibayai oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pelaksanaan inseminasi buatan di Sumatera Selatan sejak tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 6.7 berikut , sedangkan pelaksanaan inseminasi buatan di Sumatera Selatan Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.7. Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) di Sumatera Selatan.*

Tahun	Jumlah Inseminasi	Jumlah Akseptor
2000	21.055	18.779
2001	17.386	15.568
2002	16.786	9.183
2003	11.804	6.268
2004	14.263	8.480

*Sumber. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Sumsel 2005.

Tabel 6.8. Data pelaksanaan inseminasi buatan di Sumatera Selatan.

No.	Kabupaten/Kota	Akseptor		Dosis		Lahir	
		T	R	T	R	T	R
1.	OKU Induk	3.000	528	3.000	1.500	150	50
2.	OKU Timur			Gabung dengan OKU Induk			
3.	UKU Selatan			Gabung dengan OKU Induk			
4.	Ogan Komering Ilir	5.000	1.446	10.000	2.554	2.240	355
5.	Ogan Ilir			Gabung dengan Ogan Komering Ilir			
6.	Muara Enim	1.040	450	3.400	800	1.150	213
7.	Lahat	1.650	511	3.000	1.200	109	46
8.	Musi Rawas	2.350	758	4.900	1.600	500	220
9.	Musi Banyuasin	2.250	725	4.500	2.200	1.000	300
10.	Banyuasin			Gabung dengan Musi Banyuasin			
11.	Palembang	500	450	500	250	200	87
12.	Prabumulih	2.500	Td	td	td	td	td
13.	Pagar Alam	td	Td	td	td	td	td
14.	Lubuk Linggau	1.400	400	1.700	600	200	21
	Jumlah	21.090	5.468	32.000	11.204	6.575	1.348

Sumber. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Sumsel, 2004.

Pelaksanaan inseminasi buatan di Sumatera Selatan mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2003 dan pada Tahun 2004 mengalami sedikit peningkatan. Jumlah inseminasi yang dilakukan tidak mencapai target yang diinginkan dimana jumlah aseptor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah inseminasi yang dilakukan, begitu juga dengan target akseptor yang terealisasi hanya sekitar 25.93%, dan hanya 35.02% dari dosis yang ditargetkan dapat direalisasikan. Dari hasil inseminasi buatan jumlah anak yang lahir hanya mencapai 20.51% dari yang ditargetkan.

Tingkat pemotongan ternak di Sumsel terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan produksi ternak cendrung menurun terutama untuk ternak ruminansia besar (Sapi dan Kerbau). Namun pada ternak kambing terjadi peningkatan produksi, tetapi hasilnya tidak begitu signifikan (Tabel 6.9).

Tingkat pemotongan dan produksi ternak unggas juga tidak memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mungkin disebabkan pertumbuhan dan produksi ternak unggas di Sumsel hampir mencapai titik optimum. Untuk mengatasi keadaan ini akan dilaksanakan langkah-langkah yang cukup strategis agar produksi ternak terus melaju diatas tingkat pemotongan.

Tabel 6.9. Pemotongan dan produksi ternak di Sumatera Selatan Tahun 2003 dan 2004 menurut komoditi (khusus daging)

No.	Komoditi	Pemotongan (ekor)		Produksi (kg)	
		2003	2004	2003	2004
1.	Sapi potong	49.223	56.756	9.623.000	8.704.000
2.	Kerbau	8.350	9.353	2.650.000	2.024.000
3.	Kambing	76.880	83.868	961.000	1.061.000
4.	Domba	6.400	6.812	80.000	88.000
5.	Babi	21.345	22.682	1.174.000	1.248.000
6.	Ayam pedaging	10.567.960	10.452.000	10.885.000	11.706.000
7.	Ayam petelur	437.349	458.000	363.000	481.000
8.	Ayam buras	17.892.157	17.875	18.250.000	18.590.000
9.	Itik	800.000	820.000	664.000	763.000

Sumber : Dinas Peternakan, Sumsel, 2003 dan 2004

Tingkat produktifitas ternak di Sumsel tahun 2004 pada umumnya cenderung lebih rendah dibanding tahun sebelumnya terutama untuk ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. Sedangkan untuk ternak ruminansia dan unggas tidak terdapat peningkatan yang signifikan (Tabel 6.10).

Tabel 6.10. Produktifitas ternak di Sumatera Selatan tahun 2003 dan 2004 menurut komoditi (khusus daging)

No.	Komoditi	SUMSEL		Nasional	
		2003	2004	2003	2004
1.	Sapi potong	195.50	153.35	212.00	212.00
2.	Kerbau	317.36	216.40	210.00	210.00
3.	Kambing	12.5	12.65	15.00	15.00
4.	Domba	12.59	12.87	15.00	15.00
5.	Babi	55.00	55.00	70.00	70.00
6.	Ayam pedaging	1.03	1.12	1.10	1.10
7.	Ayam petelur	0.83	1.05	1.10	1.10
8.	Ayam buras	1.02	1.04	0.77	0.77
9.	Itik	0.83	0.93	1.10	1.10

Sumber : Dinas Peternakan, Sumsel, 2003 dan 2004

Kegiatan pengamanan penyakit atau lebih dikenal dengan kegiatan Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner) adalah suatu upaya yang dilakukan dalam upaya penganggulangan penyakit yang dititikberatkan pada pencegahan, pemberantasan dan

pengendalian penyakit. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir wabah penyakit ternak yang sering ditemui adalah penyakit Rabies, Brucellosis, SE, ND, Jembrana, IBR, dan parasit darah. Untuk usaha ini telah dilakukan beberapa test seperti test brocellocic dan vaksinasi. Beberapa program yang sudah dilakukan dalam pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan adalah 1) pelatihan kader vaksinasi flu burung (AI), 2) kesigapan darurat veteriner Indonesia, 3) pengamatan dini penyakit hewan menular, 4) supervisi dan monitoring penyakit Rabies 5) pertemuan tim koordinasi pemberantasan penyakit dan 6) test Rose Bengal Ternak besar untuk mendeteksi terjangkitnya penyakit brucellosis.

Peredaran obat hewan di Sumsel dapat dikatakan masih belum terkontrol karena banyaknya distributor obat hewan yang belum memiliki izin untuk peredaran obat hewan. Pada umumnya distributor ini menjual langsung obat-obat hewan kepada peternak sehingga hal ini menganggu terhadap kelangsungan poultry shop yang ada di Sumatera Selatan. Dalam pelayanan kesehatan hewan telah didirikan beberapa poskeswan di berbagai kabupaten/kota di Sumsel.

Hingga saat ini sudah cukup banyak lembaga masyarakat yang ada di desa-desa seperti kelompok tani, KUBA, KTNA, KUD serta lembaga lainnya, termasuk kelembagaan pemerintah desa. Pengalaman menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan subsektor peternakan belum memiliki rasa kebersamaan untuk menunjang pembangunan peternakan secara terpadu yang melibatkan lembaga petani atau lembaga terkait lainnya untuk tujuan pengembangan peternakan.

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan, maka pendekatan pembiayaan agribisnis akan dilakukan melalui :

1. Kredit pengentasan kemiskinan (Bantuan Langsung berupa Taskin Agribisnis dan Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM).
2. Kredit Program (subsidi bunga berupa KKP (Kredit Ketahanan Pangan), KKPA (Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya), Laba BUMN dan KUMK/SUP (Kredit Usaha Mikro Kecil/ Sisa Utang Pemerintah).
3. Kredit Komesial (Suku Bunga Pasar) berupa Skim kredit agribisnis, KUMLTA (Kredit Mikro Layak Tanpa Agunan).

Namun fasilitas yang sudah ada belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh peternak karena kemampuan para peternak atau petani dalam menyusun perencanaan pengajuan kredit untuk meyakinkan pihak perbankan dan investor lainnya untuk menginvestasikan modalnya dalam bidang usaha peternakan, dilain pihak skim kredit sering menyulitkan petani untuk memperoleh bantuan dana.

Sumsel akan mengejar ketertinggalan dalam mengembangkan produk olahan dari bahan baku ternak seperti bakso, nugget yang membutuhkan cara pengemasan yang dapat menarik para pembeli, hal ini disebabkan oleh karena disamping tingkat pengetahuan tentang cara pengolahan hasil ternak yang masih kurang juga belum ada investor yang mau bergerak di bidang ini.

6.2. Pengembangan Produksi dan Wilayah

Secara keseluruhan tingkat produktifitas ternak di Sumatera Selatan masih dibawah rata-rata nasional, kecuali untuk ternak kerbau dan ayam buras. Hal ini merupakan suatu peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha peternakan yang berorientasi agribisnis. Oleh sebab itu usaha peternakan harus menjadi usaha yang lebih insentif dengan orientasi usaha agribisnis, dengan tetap mengintegrasikan dengan usaha lainnya.

Untuk mencapai produksi yang maksimum maka strategi yang akan diambil dalam pengembangan produksi ternak adalah :

- a. Menginventarisasi seluruh sumber daya yang ada
- b. Meningkatkan produktifitas ternak melalui perbaikan genetik melalui teknik inseminasi buatan dan pengembangan sentra pembibitan ternak BPTU Sembawa dan AgroTechno Park.
- c. Meningkatkan ketersediaan pakan dalam jumlah dan kualitas yang baik melalui pemanfaatan pakan lokal yang berorientasi pada kecukupan gizi ternak dengan tidak mengabaikan nilai ekonomisnya
- d. Meningkatkan jumlah dan kualitas hijauan makanan ternak dengan mendatangkan jenis hijauan unggul dan memanfaatkan lahan marginal untuk pengembangan padang pengembalaan
- e. Meningkatkan kewaspadaan kesehatan ternak terutama terhadap serangan penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di tingkat peternak maupun aparat pemerintah, swasta atau lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang peternakan.
- g. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha ternaknya.
- h. Mendirikan Balai dan Laboratorium Kesehatan Hewan di tingkat Propinsi.

Pengembangan sentra sentra peternakan sesuai dengan agroekosistem dan menetapkan prioritas pada masing-masing kabupaten dan kota (hanya 2 komoditi utama pada tiap kab/kota dengan pengwilayahannya komoditi peternakan seperti yang disajikan pada Tabel 6.11 berikut :

Tabel 6.11. Prioritas Daerah Pengembangan Ternak di Masing-masing Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.

No.	Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing/Domba	Itik	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras
1.	Ogan Komering Ulu			XX				X
2.	OKU Timur	X						XX
3.	OKU Selatan			X				XX
4.	OKI	X	XX					
5.	Ogan Ilir				X		XX	
6.	Muara Enim	XX					X	
7.	Lahat	XX		X				
8.	Musi Rawas	X	XX					
9.	Musi Banyuasin	X			XX			
10.	Banyuasin	XX				X		
11.	Palembang					X	X	XX
12.	Prabumulih							XX
13.	Pagaralam			X				XX
14.	Lubuk Linggau	X					XX	

Ket. X : Prioritas pertama dan XX prioritas kedua.

6.3. Aspek Legal/Perda

Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengembangan peternakan di Sumsel dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Sumsel dengan tugas pokoknya untuk “Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi Bidang Peternakan”. Fungsi Dinas Peternakan Propinsi adalah sebagai pembina teknis dan teknologi di bidang peternakan, teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan sumberdaya manusia, pemberian izin/rekomendasi, fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dibidang peternakan serta kerjasama antar propinsi, pembinaan usaha peternakan, penyusunan program pembangunan peternakan dan pembinaan umum tatausaha serta pembinaan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).

Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan subsektor peternakan diperlukan langkah-langkah menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di bidang peternakan melalui aturan-aturan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan peternakan. Aturan-aturan yang sudah dikeluarkan akan disosialisasikan agar usaha

peternakan baik masyarakat dan petugas yang disertai dengan penegakkan hukum (*Law Enforcement*) atas peraturan-peraturan yang sudah ada seperti :

- a. Peraturan Agri-food and Veterinary Authority Singapura tahun 1998
- b. Kep. Pres No. 22 Tahun 1990 tentang "**Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras**"
- c. Keputusan Menteri Pertanian No. 208/Kpts/OT.210/2/2001 tentang "**Pedoman Perbibitan Ternak**"
- d. Keputusan Menteri Pertanian No. 751/Kpts/UM/10/1982 tentang "**Tatacara Penyelenggaraan Inseminasi Buatan, Syarat-syarat serta Tatacara Inseminator**"
- e. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang "**Ketentuan dan Tatacara Perizinan Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan**"
- f. Surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian No. 40/Kpts/Um/2/1975 dan No 149/M/SK/1975 tentang "**Perizinan dan Pengawasan atas Pembuatan , Peredaran dan Penyimpanan Ransum Makanan Ternak**"
- g. Peraturan Pemerintah Indonesia tentang "**Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Serum dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan**"
- h. Instruksi bersama Menteri Dalam Negri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 1979 dan No 05/ins/UM/3/1973 tentang "**Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Bibit**".
- i. Surat edaran Dirjen Peternakan No 505/XIV-UM/C tentang "**Persyaratan Bagi Lalu Lintas Sapi/kerbau Antar Pulau**".
- j. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999 tentang **Tentang Peraturan Perundangan Pada Bidang penyuluhan**".
- k. Surat keputusan Menteri Pertanian No. HK.050/52/Kpts/2/1994 "**Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah**"

Mengingat harga pakan yang semakin tinggi dan sulitnya mendapatkan bahan pakan lokal yang murah, maka perlu dicarikan bahan baku alternatif dari sumber-sumber nonkonvensional seperti pemanfaatan hasil sampingan dari industri pengolahan tebu (molases) dan kelapa sawit (bugkil kelapa sawit). Hasil kedua pabrik ini tersebut potensial untuk penyediaan bahan baku yang tinggi kualitas dan ketersediaannya dapat dijamin. Untuk memfasilitasi hal tersebut akan dikeluarkan "**Peraturan Daerah**" yang mengatur tentang distribusi hasil sampingan kedua industri ini agar terlebih dahulu memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pakan di Sumsel .

6.5. Riset dan Pengembangan SDM

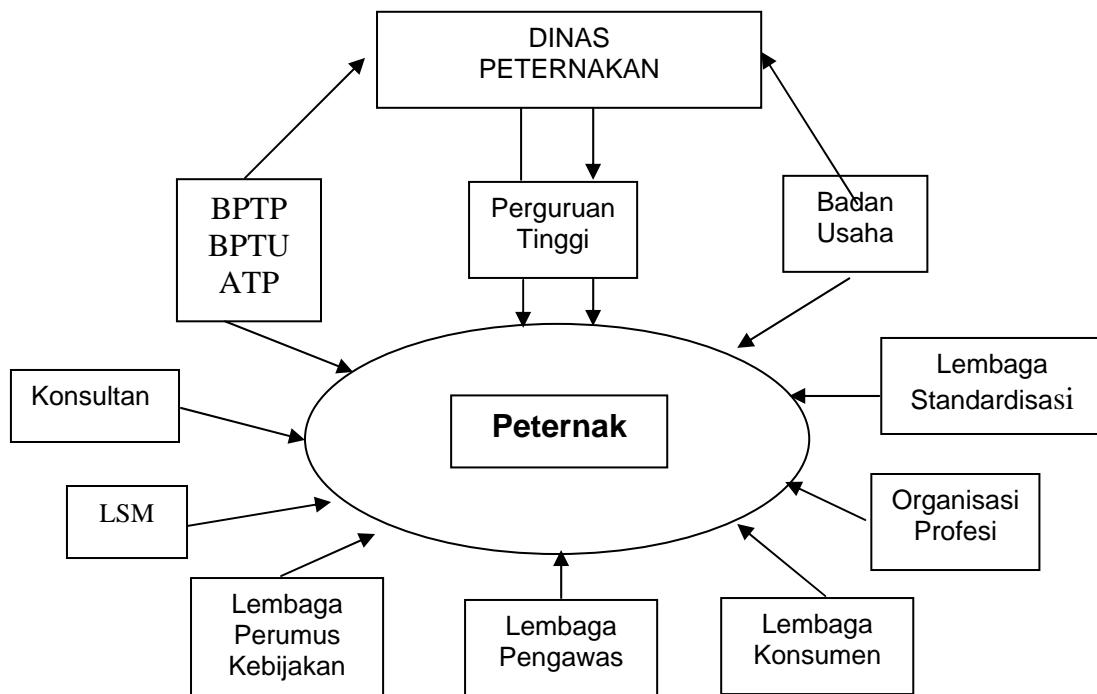
Sumber daya manusia dan perkembangan teknologi sangat menentukan sekali dalam upaya peningkatan produktivitas ternak. Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia yang akan ditempuh antara lain :

- a. Memberikan pendidikan tambahan pada petugas baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan tingkat pendidikan petugas mulai dari petugas Dinas Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan petugas teknis lapangan.
- c. Perekutran tenaga lapangan yang mempunyai latar belakang ilmu peternakan dan bersedia tinggal di lokasi binaaan.
- d. Melaksanakan penelitian kearah teknologi produksi dan pakan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat dan kemudian menerapkannya langsung ada sentra-sentra peternakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset yang ada, baik di pusat maupun daerah.
- e. Mengembangkan sistem informasi yang lengkap untuk mengakses kemajuan teknologi.

6.6. Penguatan Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan agribisnis peternakan tidak akan terlepas dari kebijakan instansi/lembaga terkait sehingga diperlukan koordinasi yang sangat baik antar lembaga/instansi terkait, sehingga kesamaan pandangan dalam pembangunan dapat tercapai. Seluruh lembaga yang terkait harus difungsikan dengan koordinasi tetap pada Dinas Peternakan. Seperti terlihat pada Gambar 6.1.

Selain meningkatkan keterkaitan antar lembaga dalam pembinaan agribisnis diperlukan juga pembinaan terhadap WBPP (Wilayah Binaan Penyuluhan Pertanian) agar terbentuk BPP yang membawahi sub-sub kelompok dengan baik terutama bagi para petugas sebagai pembinaan dan pelayanan Inseminasi Buatan. Kelompok dan asosiasi peternakan perlu digiatkan melalui pola kemitraan terutama dalam kemitraan hilir dalam hal pemasaran hasil ternak yang belum optimal.



Gambar 6.1. Lembaga-lembaga Terkait Dalam Pembinaan Agribisnis Peternakan

6. 7. Sistem dan Sumber Pendanaan

Untuk mendukung bekerjanya sistem agribisnis peternakan secara optimal diperlukan subsitem penunjang berupa permodalan atau pembiayaan usaha peternakan. Suatu kegiatan agribisnis memerlukan modal yang cukup. Kondisi masyarakat pertanian khususnya subsektor peternakan saat ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha ke arah usaha peternakan yang berbasis agroindustri dan agribisnis karena keterbatasan modal. Untuk mempercepat/mempermudah dalam mengakses sistem pendanaan maka diperlukan langkah-langkah strategis antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan peternak dalam menyusun perencanaan pengajuan kredit untuk meyakinkan pihak perbankan dan investor lainnya untuk menginvestasikan modalnya dalam bidang usaha peternakan.
- b. Memperbaiki skema sistem kredit usaha yang ada dan diintroduksi oleh pemerintah agar dapat menyentuh para pelaku agribisnis khususnya peternak kecil.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan modal usaha peternakan yang sudah ada.
- d. Meningkatkan upaya fasilitasi dalam pembiayaan.
- e. Pemberian subsidi bunga kredit KKP.
- f. Pengembangan Pola Kemitraan.
- g. Pemberdayaan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank).
- h. Pengembangan Sistem Syariah.
- i. Pemberdayaan LKM.

6.8. Penanganan Panen, Pasca Panen, Pengembangan Industri

Rumah potong hewan merupakan tempat penanganan pasca panen yang telah disediakan, namun keberadaan rumah potong hewan ini belum optimal fasilitasnya. Oleh sebab itu, nilai hasil ternak akan ditingkatkan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Melengkapi fasilitas rumah potong hewan dengan cold storage, alat tranportasi dan peralatan lain yang sesuai dengan standar.
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah potong hewan melalui pelatihan pasca panen.
- c. Meningkatkan sanitasi dan higenis lingkungan sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat mencapai standar yang sudah ditetapkan.

Untuk pengembangan industri pengolahan akan direncanakan selaras dengan potensi yang ada baik potensi sumber daya alam (lahan dan agroklimat) dan juga potensi sumber daya manusia (petani) serta kelembagaan yang terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan memerlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan dan kenyamanan berusaha bagi investor yang bergerak dibidang industri prosesing hasil perternakan.
- b. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan kredit investasi dan kredit modal kerja.
- c. Meningkatkan sinergis antara peternaki dan pengusaha prosesing hasil pertanian melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

6.9. Insentif Fiskal

Kebijakan sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan pengembangan usaha peternakan sangat diperlukan. Oleh sebab itu, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan subsidi pajak terhadap import bibit ternak
- b. Mengurangi jalur birokrasi terhadap pendirian usaha peternakan.
- c. Menghapuskan restribusi terhadap produk peternakan.
- d. Meningkatkan penetapan restribusi kepada masyarakat terhadap pemakaian fasilitas peternakan.
- e. Membuat Perda yang mengatur ekspor hasil sampingan perkebunan dan pertanian seperti tetes tebu dan bungkil sawit.

6.10. Pengembangan Training House dan Promosi.

Ternak, produk olahan ternak, potensi sumber daya dan di bidang peternakan akan selalu dipromosikan agar dikenal dan mampu menembus pasar regional dan nasional. Oleh sebab itu, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyebaran secara luas informasi pembangunan peternakan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan penyebaran informasi hasil-hasil penelitian pembangunan peternakan melalui media masa, media elektronik, pameran dan expo.

VII. RENCANA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

7.1. Kondisi Saat Ini

Subsektor perkebunan menduduki posisi yang strategis dan dominan dalam perekonomian Sumatera Selatan, terutama untuk kelompok sektor non migas. Posisi ini tidak hanya dilihat dari sisi peranan dalam perolehan devisa dari volume eksportnya, melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, efek pengganda kegiatan ekonomi. Pendapatan keluarga petani subsektor perkebunan juga relatif lebih baik dibandingkan kegiatan pertanian lainnya dalam arti luas. Secara kuantitatif peran tersebut ditunjukkan oleh kontribusi nilai ekspor komoditi perkebunan terhadap ekspor non migas Sumatera Selatan. Data tahun 1999 hingga tahun 2004 (Tabel 7.1) terlihat angka yang terus menunjukkan peningkatan.

Tabel 7.1. Nilai ekspor komoditi non migas di Sumatera Selatan 1999 dan 2004

Komoditi	1999			2004		
	Volume (ton)	Nilai (juta US\$)	%	Volume (ton)	Nilai (juta US\$)	%
Karet	361.798	205	25,6	527.370	618	51,0
Produk kelapa sawit	258.713	67	8,4	559.779	217	17,9
Kopi	36.021	42	5,2	6.655	4	0,3
Kayu/pulp	78.244	41	5,1	99.017	59	4,8
Lainnya		446	55,7		315	26,0
Total Non Migas	801	100,0		1.213	100,0	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, 2005

Sementara dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 8,8% dari PDRB nonmigas atau 5,8% dari PDRB migas. Di samping itu penanaman komoditi perkebunan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, karena petani menanami lahan kritis yang ditumbuhi alang-alang dan belukar dengan komoditi perkebunan dan memperoleh pendapatan dari pengusahaannya.

Subsektor perkebunan diusahakan pada areal yang cukup luas di wilayah Sumatera Selatan (Tabel 7.2). Hal tersebut dikarenakan komoditi perkebunan secara geografis dan ekologis cocok untuk ditanam di daerah Sumatera Selatan.

Tabel 7.2. Luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Sumatera Selatan, 2004

No.	Jenis Perkebunan	Komoditi	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Perkebunan rakyat	Karet	859.832,30	565.494,00
		Kopi	300.541,67	144.162,60
		Kelapa	50.941,00	67,22
		Lada	13.080,00	3.687,00
		Kelapa sawit	44.210,00	127.652,58
		Lainnya	38.291,00	7.017,98
2.	PIR-BUN/SUS	Karet	2.750,00	-
			4.035,00	-
		Kelapa sawit	25.294,00	-
			12.188,00	-
3.	PIR-TRANS	Karet	-	-
			-	-
		Kelapa sawit	50.933,00	-
			30.070,00	-
4.	Pola Inti Plasma (KKPA/KUK)	Karet	-	-
			-	-
		Kelapa sawit	3.126,00	-
			14.460,00	-
5.	Perusahaan Besar Negara (PBN) Murni	Karet	8.232,00	5.914,00
		Kelapa sawit	1.086,00	3.909,00
		Teh	1.571,00	2.962,00
		Tebu	13.677,00	58.309,00
6.	Perusahaan Besar Swasta (PBS) Murni	Karet	30.354,00	36.424,00
		Kelapa sawit	219.670,00	361.793,00

Dalam subsektor perkebunan ternyata untuk areal perkebunan rakyat pada umumnya dominan untuk semua komoditi yang diusahakan, sementara perkebunan besar diusahakan kelapa sawit secara luas (Tabel 7.2). Dari sisi komoditi, ada empat komoditi utama yang menjadi andalan Provinsi Sumatera Selatan yaitu karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa.

Meskipun demikian ada beberapa komoditi perkebunan yang juga prospektif pada masa mendatang, seperti lada, pinang, coklat, aren dan nilam sehingga akan juga diperhatikan secara serius upaya pengembangannya. Tabel 7.3 menunjukkan jenis tanaman yang diusahakan oleh petani pada perkebunan rakyat yang juga masih didominasi oleh keempat komoditas unggulan tersebut, sementara luas areal komoditi lain masih sangat kecil. Satu hal yang diperhatikan yaitu tingkat produktivitas perkebunan rakyat masih rendah dibandingkan potensinya, dan peluang usaha untuk meningkatkannya masih sangat besar.

Tabel 7.3. Luas areal dan produksi perkebunan rakyat di Sumatera Selatan, 2004
 (kecuali karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa)

Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)			Jumlah (ha)	Produksi (ton)
	TBM	TM	TR/TT		
Lada	5.696,00	6.150,00	1.232,00	13.080,00	3.687,00
Kayu Manis	370,20	1.297,25	15,40	1.682,85	1.079,72
Coklat	375,72	176,50	89,40	641,62	132,59
Kemiri	262,60	1.441,05	34,40	1.738,05	830,54
Cengkeh	143,00	195,10	62,50	400,60	56,86
Panili	29,80	25,40	1,10	56,30	28,33
Gambir	40,00	363,00	38,00	361,00	146,30
Pinang	560,11	1.431,32	133,72	2.125,15	2.158,86
Aren	5.394,70	113,95	10,80	5.519,45	107,21
Kencur	2,00	15,00	-	17,00	1,70
Jahe	224,00	289,25	11,00	524,25	214,75
Tembakau	12,50	50,75	-	63,25	51,81
Kapuk	183,00	667,25	122,50	912,75	344,62
Jambu Mete	2,25	8,15	34,23	44,60	4,69
Nilam	342,00	299,00	14,00	655,00	1.860,00

Untuk itulah dalam master plan pengembangan perkebunan difokuskan pada empat komoditi utama tersebut yaitu karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa sebagai komoditi andalan Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, bukan berarti komoditi lainnya tidak diperhatikan, melainkan dilakukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi daya saing dan kebutuhan daerah serta petani itu sendiri di masa mendatang.

Produksi karet rakyat Sumatera Selatan selama 22 tahun terakhir menunjukkan laju pertumbuhan produksi yang sangat fantastis. Pada tahun 1982 ekspor karet Sumatera Selatan baru sekitar 120.000 ton, namun tahun 2004 telah mencapai 514.000 ton atau meningkat menjadi lebih dari 4 kali lipat dalam kurun waktu 22 tahun. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mengalami peningkatan produksi karet yang paling pesat. Hal tersebut merupakan kerja keras semua komponen yang berkecimpung di bidang perkaretan baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari petani, pemerintah dan lembaga penelitian serta lembaga informal lainnya. Namun demikian, secara umum produktivitas karet rakyat di Sumatera Selatan masih relatif rendah karena antara lain mayoritas kebun petani masih menggunakan bahan tanam non-unggul dan masih luasnya areal karet tua/rusak.

Sebaran perkebunan karet rakyat di Sumatera Selatan yang terluas terletak di Kabupaten Musi Rawas (23%), Muara Enim (19%), Musi Banyuasin (17%), Ogan Komering Ilir (12%), dan Banyuasin (10%) serta Ogan Komering Ulu (7%) (Tabel 7.4).

Tabel 7.4. Luas areal karet di Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota, 2003

No	Kabupaten/ Kota	Luas areal (ha)				Jumlah Petani (kk)
		TBM	TM	TT/TR	Total	
1	OKU	15.920	43.293	5.416	64.629	9.161
2	OKU Timur	15.367	17.808	5.211	38.386	19.029
3	OKU Selatan	5	90	-	95	57
4	OKI	42.339	57.573	12.421	112.333	27.637
5	Ogan Ilir	6.617	13.385	4.271	24.273	11.626
6	Muara Enim	57.254	100.080	16.552	173.886	110.093
7	Lahat	5.330	10.419	6.960	22.709	12.713
8	Musi Rawas	27.299	137.294	51.978	216.571	96.317
9	Musi Banyuasin	37.308	99.381	23.721	160.410	78.612
10	Banyuasin	19.030	58.220	11.576	88.826	31.828
11	Palembang	0	0	0	0	0
12	Kota Prabumulih	4.015	11.286	2.653	17.954	9.161
13	Kota Pagar Alam	54	28	-	82	59
14	Kota Lubuk Linggau	1.132	4.416	2.480	8.028	3.113
Jumlah		231.670	553.273	143.239	928.182	409.406

Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan, 2004

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa tanaman tua/rusak (TTR) telah mencapai 143 ribu ha atau 16% dari total areal, dengan demikian peremajaan karet tua akan mendapat prioritas karena:

- (a) Setiap tahun terdapat tanaman menghasilkan (TM) yang akan memasuki masa nonproduktif dengan laju sekitar 3-4% per tahun;
- (b) Peremajaan karet tua dengan menggunakan klon unggul akan memberikan dampak peningkatan produksi dan pendapatan petani yang nyata di masa mendatang.

Namun demikian yang akan menjadi perhatian adalah permasalahan masih dihadapi dan harus dapat diatasi pada masa mendatang yaitu:

- a. Masih luasnya areal karet tua yang perlu diremajakan
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- c. Rendahnya minat investor dalam pengembangan industri hilir
- d. Rendahnya aksesibilitas transportasi ke pusat produksi, terutama jalan dan jembatan
- e. Rendahnya kesiapan SDM

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan telah terjadi dengan sangat pesat sejak dua puluh tahun terakhir. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan dengan beberapa pola, yaitu Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR)/plasma. Luas areal perkebunan kelapa sawit berdasarkan pola pengembangan adalah Perkebunan rakyat seluas 234.793 ha

(48,05%), Perkebunan Besar Swasta 219.670 ha (44,95%) dan Perkebunan Besar Negara 34.228 ha (7,0%), secara rinci disajikan pada Tabel 7.5.

Tabel 7.5. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan berdasarkan pola pengembangan tahun 2004

No.	Kabupaten/Kota	Luas Areal (ha)			
		PR/Plasma	PBS	PBN	Jumlah
1	OKU	22.672	7.563	5.631	35.865
2	OKU Timur	5.664	3.595	-	9.259
3	OKI	59.408	36.907	-	96.315
4	Ogan Ilir	4.000	4.907	-	8.907
5	Muara Enim	24.192	18.830	12.381	55.403
6	Lahat	10.752	25.884	-	36.636
7	Musi Rawas	21.733	49.929	-	71.662
8	Musi Banyuasin	51.314	54.448	-	105.762
9	Banyuasin	31.366	17.608	16.216	65.191
10	Prabumulih	3.491	-	-	3.491
11	Lubuk Linggau	200	-	-	200
Jumlah		234.793	219.670	34.228	448.691
Per센		48.05	44.95	7.00	100

Sumber : Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2005

Sumatera Selatan memiliki luas areal perkebunan 1.677.703 ha. Luas kebun kelapa sawit mempunyai areal seluas 488.963 ha dengan produksi 1.459.693 ton. Areal pertanaman kelapa sawit tersebar di sepuluh kabupaten/kota seperti disajikan pada Tabel 7.6. Sedangkan kepemilikan pabrik pengolahan PKS, dan pabrik minyak goreng semuanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar (PBN, PBSN, PBSA).

Tabel 7.6. Luas areal dan produksi kelapa sawit di Sumatera Selatan, 2005

No	Kabupaten/kota	Luas Areal (ha)				Produksi (ton)	Jumlah KK
		TBM	TM	TT	Jumlah		
1.	OKU	4.876	28.468	2.519	35.865	106.697	3.003
2.	OKU Timur	5.304	3.955	0	9.259	2.755	1.065
3.	OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
4.	OKI	42.752	53.563	0	96.315	293.364	642
5.	Ogan Ilir	5.074	3.833	0	8.907	26.499	200
6.	Muara Enim	9.285	46.118	0	55.403	171.822	9.386
7.	Lahat	12.422	18.456	4.758	36.636	108.992	420
8.	Musi Rawas	0	71.663	0	71.663	219.997	635
9.	Musi Banyuasin	60.315	45.448	0	105.763	321.444	2.619
10.	Banyuasin	31.289	33.457	445	65.191	200.742	185
11.	Prabumulih	2.271	1.220	0	3.491	7.411	610
12.	Pagar Alam	0	0	0	0	0	0
13.	Lubuk Linggau	200	0	0	200	0	0
Jumlah		173.790	307.181	7.722	488.693	1.459.723	18.767

Provinsi Sumatera Selatan merupakan sentra produksi kopi nomor dua terbesar di Indonesia setelah Provinsi Lampung dengan luas areal perkebunan kopi pada tahun 2004 tercatat sekitar 272.543 ha. Hampir semua lahan kebun kopi yang ada ditanami dengan kopi jenis robusta secara monokultur pada ketinggian 500–1000 m di atas permukaan laut. Ada pula kopi jenis Arabika yang telah diusahakan, tapi arealnya masih kurang dari 500 ha. Kopi di Sumatera Selatan mempunyai potensi dan akan mendapat perhatian dan pengembangannya mengingat kopi merupakan komoditas andalan setelah kopi dan kelapa sawit. Selain sebagai penghasil devisa, kopi yang dihasilkan sepenuhnya diusahakan dari perkebunan rakyat dan merupakan mata pencaharian utama sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Dari empat belas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, terdapat lima daerah sentra produksi kopi di Sumatera Selatan yaitu secara berturut-turut Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU, dan Kabupaten Muara Enim. Luas areal perkebunan kopi di kelima daerah tersebut mencapai 94,56% total areal di Sumatera Selatan, sementara produksinya mencapai 93,69% (Tabel 7.7). Daerah sentra produksi ini berada di kawasan Bukit Barisan yang kondisi agroekosistemnya memang cocok untuk tanaman kopi Robusta.

Tabel 7.7. Luas areal dan produksi kopi Sumatera Selatan tahun 2004

Kabupaten/ Kota	Luas Areal (ha)			Produksi (ton)		Jumlah KK
	TBM	TM	TT	Jumlah Produksi	Rata- rata	
OKU	3.779,00	18.549,00	1.939,00	24.267,00	17.533,00	0,95
OKU Timur	264,25	1.140,25	6,50	1.411,00	696,00	0,61
OKU Selatan	1.111,00	67.440,00	2.188,00	70.739,00	30.341,00	0,45
OKI	685,00	1.494,00	22,00	2.201,00	656,00	0,44
Ogan Ilir	0,00	39,00	0,00	39,00	6,00	0,15
Muara Enim	458,00	19.627,00	578,00	20.663,00	12.136,00	0,62
Lahat	7.713,00	95.252,00	3.415,00	106.380,00	57.328,00	0,60
Musi Rawas	693,00	2.777,00	1.242,00	4.712,00	5.021,00	1,81
Musi Banyuasin	61,00	254,00	24,00	339,00	1.119,00	0,47
Banyuasin	1.094,00	2.694,00	587,00	4.375,00	1.152,00	0,43
Kota Prabumulih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Pagar Alam	46,00	34.900,00	732,00	35.678,00	18.664,00	0,53
Kota Lubuk Linggau	339,00	944,00	456,00	1.739,00	510,00	0,54
Jumlah	16.243,25	245.110,25	11.189,50	272.543,00	145.162,00	0,59
						176.389,00

Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (Rekapitulasi hingga Juni 2005)

Sebenarnya ada pula jenis kopi yang ditanam di dataran rendah yaitu di lahan pasang surut Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Jenis kopinya dikenal dengan nama kopi ekselsa, namun karena rasanya yang agak masam kopi ini belum begitu disukai oleh konsumen lokal dan lebih banyak diekspor melalui Jawa Timur.

Luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2004 telah mencapai 50.941 ha. Luas areal pertanaman kelapa sejak tahun 2000 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Kabupaten Banyuasin memiliki luas perkebunan kelapa terbesar yaitu 27.971 ha atau 54,9% dan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas areal perkebunan kelapa 7.013 ha atau 13,7% dari total keseluruhan luas perkebunan kelapa di Sumatera Selatan. Total produksi dari Kabupaten Banyuasin sekitar 30.000 ton sehingga menjadi kawasan penghasil kelapa terbesar di Sumatera Selatan.

Tabel 7.8. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten	Luas areal (ha)
Ogan Komering Ulu	778
OKU Timur	2.557
OKU Selatan	328
Ogan Komering Ilir	7.013
Ogan Ilir	639
Muara Enim	1.433
Lahat	1.562
Musi Rawas	4.656
Musi Banyuasin	3.310
Banyuasin	27.971
Palembang	0
Prabumulih	159
Pagar Alam	112
Lubuk Linggau	423
Jumlah	50.941

Perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Banyuasin terluas terdapat di Kecamatan Telang dan Muara Padang. Di Kabupaten Banyuasin terdapat perkebunan swasta yang bernama PT Sumatera Candi Kencana dengan luas 2.945 ha. Perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir terluas terdapat di Air Sugihan dan di daerah pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Industri pengolahan karet Indonesia bernaung dalam wadah Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo). Saat ini Gapindo Sumatera Selatan memiliki anggota sebanyak 17 perusahaan yang terdiri atas pabrik SIR (14 buah), pabrik RSS (1 buah), dan pabrik lateks pekat (2 buah). Lebih dari 90% produk karet Sumatera Selatan dihasilkan dalam bentuk karet remah. Tabel 7.9 menunjukkan bahwa total produksi karet remah Sumatera Selatan pada tahun 2004 sekitar 512 ribu ton dan seluruhnya diekspor.

Meningkatnya produksi karet remah menunjukkan keberhasilan pembangunan perkebunan karet di Sumatera Selatan yang telah berjalan selama ini, yang merupakan kerja keras dari semua *stakeholder* terkait. Melihat angka pertumbuhan produksi karet alam yang demikian pesat, bukan mustahil target 800.000 ton karet kering akan dapat dicapai pada tahun 2009 dan pada tahun 2025 telah mencapai 1.2 -1.5 juta ton.

Tabel 7.9. Produksi karet remah di Sumatera Selatan berdasarkan jenis mutu, 1974-2004 ^a

Tahun	Jenis					Jumlah (ton)
	Remmiled	SIR 5	SIR 10	SIR 20	SIR 50	
1974	86.842	-	-	14.975	36.910	138.737
1984	-	-	-	147.959	656	140.643
1994	-	1.028	5.348	224.236	-	230.612
2004	-	60	4.230	507.422	-	511.712

Sumber: Gapindo Sumsel, 2005

Di samping karet remah, terdapat produk sit asap (Ribbed Smoked Sheet/RSS) yang dihasilkan perkebunan besar negara (PTPN VII) dan swasta (PT. PP Melania). Lateks pekat diproduksi oleh PT Swasthi Paramamulya (Kabupaten Muara Enim) dan PT. Tjakrawala Sembawa (Kabupaten Banyuasin). Produk lateks pekat ini pada umumnya dipasok ke industri barang jadi karet di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Data terakhir tahun 2005 menunjukkan bahwa ternyata kapasitas riil pabrik karet remah baru mencapai 76% dari kapasitas terpasang (Tabel 7.10.)

Tabel 7.10. Produksi dan kapasitas pabrik karet remah, 2001 – 2004

Uraian	2001	2002	2003	2004
Produksi (ton)	346.121	394.482	439.654	511.712
Kapasitas produksi (ton)	493.000	557.600	602.400	673.400
(%)	70	71	73	76

Untuk mengatasi permasalahan bau busuk bokar, telah ditemukan asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis limbah cangkang sawit yang dikenal dengan “Deorub”. Dengan adanya asap cair Deorub yang dapat mengatasi bau busuk karet maka tidak diperlukan relokasi pabrik yang sudah ada. Namun, untuk pabrik baru sebaiknya dapat dibangun di sentra bahan baku, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan potensi bahan baku, ketersediaan air, dan prasarana transportasi.

Volume pasokan kayu untuk bahan baku industri perkayuan yang berasal dari hutan alam semakin berkurang. Kayu karet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai substitusi kayu hutan alam. Hal tersebut didukung oleh beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kayu karet di antaranya sifat fisis dan mekanis, serta sifat lainnya seperti warna dan

tekstur kayu karet. Namun, dalam pemanfaatan kayu karet masih ditemui berbagai kendala di antaranya tidak tersedianya akses jalan terutama pada perkebunan karet rakyat, rendemen kayu karet yang rendah, suplai kayu karet umumnya hanya tersedia pada musim-musim tertentu saja dan lokasi pabrik pengolahan jauh dari lokasi kebun sehingga nilai ekonomis kayu karet masih rendah.

Berdirinya pabrik pengolahan kayu karet di sentra perkebunan karet rakyat diharapkan akan memberikan nilai tambah yang cukup berarti bagi petani karet yang akan meremajakan karetnya. Untuk lokasi kebun yang dekat pabrik, dan kondisi mutu kayu karetnya baik, hasil penjualan kayu karet akan dapat digunakan sebagai modal untuk membiayai kegiatan peremajaan. Salah satu pabrik pengolahan kayu karet yang sudah melakukan kemitraan dengan petani dalam pemanfaatan kayu karet adalah PT SUMATERA PRIMA FIBREBOARD yang terletak di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Produk yang dihasilkan adalah panel kayu MDF. Saat ini produk MDF sudah digunakan oleh industri furniture dan bahan bangunan sebagai pengganti kayu gergajian (*solid wood*). Kapasitas pabrik adalah 140.000 m³ MDF per tahun, atau butuh sekitar 238.000 ton kayu atau setara dengan 4000 ha kebun karet tua per tahun.

Di Kabupaten OKU terdapat industri pengolahan kayu karet yang cukup besar yaitu CV Ciptomoro Abadi yang terletak di Batumarta I, yang memproduksi "sawntimber" atau kayu gergajian, total produksi kayu karet yang terserap baru mencapai 1600 m³ sawntimber atau 8000 m³ atau setara 200 ha kebun karet tua. Kayu karet memiliki nilai ekonomis apabila lokasi kebun memiliki akses jalan, sehingga dapat dijangkau truk, dan jarak kebun ke pabrik < 100 km dan biaya transportasi masih cukup memadai (< Rp 150.000 per truk). Sementara pada lokasi kebun relatif jauh dan belum ada prasarana jalan yang memadai, kayu karet tidak memiliki nilai ekonomis dan biasanya hanya dibakar.

Industri pengolahan kelapa sawit hingga saat ini masih dimiliki oleh perusahaan besar negara dan swasta, belum ada yang dimiliki oleh kelompok petani. Namun demikian karena basis pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah pola kerjasama petani dan perusahaan dengan Pola PIR dan lainnya, industri pengolahan tersebut terikat dengan perjanjian untuk selalu membeli produk TBS petani.

Dalam bidang pengolahan kopi, industri yang ada sekarang masih berupa industri pengolahan kopi bubuk dalam skala menengah ke bawah. Tercatat ada 5 industri pengolahan skala menengah di kota Palembang dan ratusan industri kecil yang menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan.

Sementara itu, produk kelapa yang dihasilkan hingga saat ini baru sebatas kopra, arang batok kelapa dan minyak goreng kelapa untuk memenuhi kebutuhan lokal di dekat

sentra produksi. Ada pula yang telah merintis pembuatan VCO (*virgin coconut oil*) dalam skala kecil namun masih perlu ditingkatkan kualitas hasil dan distribusi pemasarannya.

Kegiatan peremajaan dilaksanakan dengan model partisipatif, dengan mengikuti sertakan seluruh *stakeholder*. Dari program peremajaan seluas 100.000 ha, sekitar 40% atau 40.000 ha dilaksanakan dengan pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) dengan *grace priode* selama 6 tahun. Sumber kredit diharapkan dari perbankan, sedangkan sertifikasi, pemberdayaan dan pembinaan petani, serta pembangunan kebun entres bersumber dari dana pemerintah. Kayu karet dijual ke perusahaan industri pengolahan kayu karet dengan kewajiban perusahaan antara lain menyediakan bibit unggul, dan herbisida.

Sekitar 60% atau 60.000 ha dilaksanakan dengan pola swadaya meliputi 30.000 ha dengan pola swadaya murni dan 30.000 ha lainnya dengan pola swadaya berbantuan. Pola swadaya murni dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah mampu yang secara turun temurun sudah melaksanakan usaha tani karet. Pola swadaya berbantuan dilaksanakan dengan pemberian bantuan bibit ditujukan kepada para petani belum maju/marginal. Untuk areal peremajaan karet seluas 100.000 ha disesuaikan dengan potensi luas areal karet tua/rusak yang ada di masing-masing kabupaten/kota, dengan rincian seperti pada Tabel 7.11.

Tabel 7.11. Luas peremajaan karet di Sumatera Selatan, 2005 – 2009

No	Kabupaten	Luas Peremajaan (ha)					
		2005	2006	2007	2008	2009	Total
1	OKU	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2	OKU Timur	500	500	500	500	500	2.500
3	OKI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
4	Ogan Ilir	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5	Muara Enim	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
6	Lahat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7	MURA	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	18.500
8	MUBA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
9	Banyuasin	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
10	Prabumulih	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
11	Lubuk Linggau	300	300	300	300	300	1.500
Total		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Pengembangan perkebunan karet rakyat seluas 80.000 ha akan dilaksanakan hampir di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan potensi yang tersedia (Tabel 7.12).

Kebijakan pengembangan karet di Sumsel mengacu pada pedoman peremajaan karet nasional yang menggunakan pendekatan/model partisipatif. Model Peremajaan Karet Partisipatif berlandaskan pada upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perkebunan secara lebih optimal. Sasaran akhir adalah percepatan peremajaan karet dengan menggunakan teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Agar tujuan ini dapat tercapai, terdapat lima komponen model program yang akan dijalankan yaitu: (a) Pemberdayaan/penguatan kapabilitas petani, (b) Penguatan Lembaga Ekonomi Petani (LEP), (c) Penyediaan Sarana dan Paket Teknologi Peremajaan, (d) Pembiayaan Pemberdayaan dan Peremajaan, dan (e) Manajemen Partisipatif. Penerapan komponen model tergantung pada kesiapan sarana dan parasarana yang tersedia di masing-masing daerah.

Tabel 7.12. Luas pengembangan karet di Sumatera Selatan, 2005 – 2009

No.	Kabupaten	Luas Pengembangan (ha)					
		2005	2006	2007	2008	2009	Total
1.	OKU	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2.	OKU Timur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
3.	OKI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
4.	Ogan Ilir	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5.	Muara Enim	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
6.	Lahat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7.	MURA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
8.	MUBA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
9.	Banyuasin	600	600	600	600	600	3.000
10.	Prabumulih	400	400	400	400	400	2.000
Total		15.000	16.500	16.500	16.500	15.500	80.000

Peremajaan akan dilakukan secara partisipatif dengan mengembangkan swadaya masyarakat atau dengan manajemen koperasi. Peremajaan tanaman kelapa sawit diantara tanaman yang masih produktif (*intercropping*), atau melakukan penjarangan secara berangsur-angsur perlu dilakukan. Keperluan peremajaan kebun kelapa sawit diperkirakan 8.000 ha sampai dengan 2009, atau sekitar 1.600 ha per tahun. Kebutuhan investasi untuk peremajaan relatif lebih murah dibandingkan perluasan (pembangunan kebun baru), karena kegiatan pembangunan non-tanaman yang lebih sedikit. Diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk peremajaan kebun sampai siap panen sekitar Rp 15 juta. Total dana

yang dibutuhkan setiap tahun untuk peremajaan Rp. 24 miliar. Kebutuhan dana total selama lima tahun adalah Rp. 120 miliar.

Peluang investasi untuk perluasan kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan masih terbuka lebar dengan areal pengembangan seluas 1.085.282 ha, tersebar di 10 kabupaten yaitu: Lahat, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, Muara Enim dan Kota Prabumulih. Peluang investasi pada areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan ditunjukkan pada Tabel 7.13.

Luas areal pengembangan diperkirakan mencapai 300.000 ha selama lima tahun, atau sekitar 60.000 ha per tahun. Kebutuhan investasi untuk perluasan kebun kelapa sawit untuk lima tahun ke depan dengan asumsi biaya pembangunan kebun sampai siap panen Rp. 20 juta per ha ialah Rp. 6 triliun atau sebesar Rp. 1.2 triliun per tahun.

Tabel 7.13. Peluang investasi pada areal perkebunan kelapa sawit

Kabupaten/kota	Izin Lokasi (ha)	Existing 2004 (ha)	Potensi Perluasan (ha)	Rencana (ha) 2005-2009
OKU	14.735	35.865	74.103	30.000
OKU Timur	9.000	9.259	47.103	30.000
OKI	80.488	96.315	228.185	40.000
Ogan Ilir		8.907	52.382	10.000
Muara Enim	28.105	55.403	48.373	30.000
Lahat	49.640	36.636	56.292	10.000
Musi Rawas	57.196	71.662	84.768	40.000
MUBA	212.000	105.762	260.436	60.000
Banyuasin	191.952	65.191	224.513	50.000
Prabumulih	227	3.491	-	-
Lubuk Linggau		200	-	-
Total	692.924	488.691	1.076.155	300.000

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2005

Dengan potensi lahan yang tersedia saat ini, pengembangan kopi tidak lagi mengarah pada perluasan areal kecuali yang dilaksanakan secara alami oleh masyarakat atau swasta. Namun demikian, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten akan melakukan pengawasan dan pengendaliannya agar tidak terjadi perambahan hutan. Luas areal yang masih dapat dikembangkan dari posisi sekarang saat ini adalah 25.000 ha. Daerah yang potensial untuk penambahan areal ini adalah Kabupaten Musi Rawas, OKU, OKU Selatan, Lahat dan Muara Enim dan sedikit di Pagar Alam. Untuk mengatasi masalah perambahan hutan akan dilakukan pengawasan hutan lindung dan kawasan secara ketat, sehingga perambahan dapat ditekan secara maksimal. Sedangkan untuk menjaga kelestarian hutan lindung yang masih ada maupun kawasan lindung yang telah terlanjur dirambah oleh masyarakat, baik untuk kegiatan budidaya tanaman perkebunan maupun non budidaya,

akan dilakukan rehabilitasi melalui diversifikasi antara tanaman perkebunan dengan tanaman kehutanan, untuk reboisasi diantaranya dengan kayu Bambang, Kayu Medan, maupun jenis kayu yang diperlukan untuk hutan yang lainnya. Sedangkan hutan lindung maupun kawasan lindung yang rusak akibat penebangan ilegal non kebun akan direboisasi.

Karena kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dan kebanggaan Sumatera Selatan, eksistensinya akan tetap dijaga, tentu dengan senantiasa memperhatikan nilai ekonomisnya. Untuk itu lahan-lahan kopi yang ada dan dikelola petani saat ini akan dibuatkan sertifikat tanahnya sehingga petani mempunyai kepastian hukum atau legalisasi hak atas tanahnya dan sertifikat itu sekaligus dapat dijadikan jaminan perbankan. Selain itu, untuk membantu peningkatan pendapatan petani kopi akan diupayakan optimalisasi penggunaan sumberdaya alam atau lahan pada seluruh kawasan budidaya baik dengan rehabilitasi/peremajaan dan intensifikasi tanaman kopi maupun dengan diversifikasi tanaman kopi-karet, kopi-coklat, kopi-lada, kopi-vanili atau tanaman lainnya yang peluang pasarnya cukup besar. Peremajaan pohon kopi tua di lima daerah sentra produksi sudah saatnya dilakukan karena sudah mencapai lebih dari 500 ha, bahkan di Kabupaten Lahat, OKU, dan OKI lebih dari 1.200 ha. Termasuk pula akan dilakukan peremajaan kopi di Kabupaten Musi Rawas yang cukup potensial kontribusi produksi kopinya, tetapi areal tanaman tuanya sudah di atas 1.000 Ha. Intensifikasi juga merupakan upaya pemantapan lahan yang ada karena tingkat produktivitas rata-rata saat ini yang sebesar 0.6 ton per ha masih dapat ditingkatkan.

Selain itu, akan dibangun komitmen bersama seluruh *stakeholders* secara tegas melalui penetapan peraturan atau kesepakatan daerah untuk tidak mengkorvesi atau mengalihkan fungsi lahan kopi secara kewilayahan menjadi lahan komoditi lainnya, kecuali yang berkaitan dengan diversifikasi. Maksudnya adalah total areal kopi seluas 300.000 ha di Provinsi Sumatera Selatan tetap dipertahankan keberadaannya, meskipun secara individu tidak dapat dipaksakan kepada petani untuk tetap menanam kopi ketika ada alternatif tanaman lain yang menguntungkan.

Peningkatan produktivitas, produksi dan mutu kopi merupakan program utama dalam pengembangan produksi kopi Sumatera Selatan. Hal itu akan dilakukan dengan sub program kegiatan utama berupa intensifikasi, diversifikasi dan peremajaan dan hanya sedikit melalui perluasan areal secara alami.

Beberapa sub program yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Dorongan dan pengawalan penggunaan sarana produksi sesuai rekomendasi berupa percontohan dan perluasan areal intensifikasi, optimalisasi pemupukan, perbandingan

penggunaan pupuk majemuk dan pupuk tunggal, dan pemeliharaan areal dan tanaman di kecamatan sentra produksi utama kopi,

2. Rehabilitasi/peremajaan tanaman kopi melalui teknis sambung pucuk/rejuvinasi/pemangkasan di semua sentra produksi,
3. Diversifikasi kopi rakyat yaitu diversifikasi antara kopi-lada, kopi-vanili, kopi-pisang putri, pada sesuai untuk ketinggian lebih dari 500 m dpl sementara antara kopi-nilam, kopi-kakao, kopi-karet pada ketinggian di bawah 500 m dpl,
4. Penerapan teknik budidaya yang benar dan baik mengenai sistem penanaman, pemangkasan, pemupukan, pengendalaian hama penyakit dan pengaturan waktu dan sistem panen,
5. Peremajaan partisipatif dengan menggunakan varietas unggul yang dianjurkan.

Peremajaan ini akan menggunakan pinjaman dana perbankan yang disubsidi bunga melalui giro beku pemerintah, pabrikan mitra usaha dan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI),

6. Pengembangan kopi arabika dan kopi organik pada lahan yang sesuai pada ketinggian di atas 1.200 dpl. Kegiatannya akan dimulai dengan percontohan budidaya pada sebagian lahan kelompok petani, setelah dipantau dan dievaluasi keberhasilannya akan dilanjutkan dengan pengembangannya pada areal perkebunan rakyat yang lebih luas,
7. Dorongan dan pengawalan teknik penanganan panen dan pasca panen untuk peningkatan mutu kopi. Rincian kegiatannya berupa perbaikan dan percontohan dan aplikasi sistem, teknik dan waktu panen, pengeringan, sortasi, grading, pengemasan dan penyimpanan pada kelompok-kelompok tani binaan, yang nantinya diharapkan akan menyebarluaskan teknik tersebut kepada petani lainnya.

Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar untuk pengembangan komoditi kelapa adalah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi 72,03% dan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan kontribusi 12,85% dari total produksi kelapa di Sumatera Selatan. Kawasan penanaman kelapa yang ada di Kabupaten Banyuasin yang potensial adalah Muara Padang dan Muara Telang dan untuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Air Sugihan dan Mesuji (Tabel 7.14). Luas areal penanaman berdampak terhadap hasil panen kelapa. Oleh sebab itu, Kecamatan Muara Padang dan Muara Telang (Kabupaten Banyuasin) dapat memproduksi kelapa yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, sedangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, produksi kelapa yang dominan terdapat di Kecamatan Air Sugihan dan Mesuji (Tabel 7.15). Kondisi tanaman kelapa yang ada saat ini sebagian besar merupakan tanaman kelapa yang sudah tua. Oleh karena itu, diperlukan

suatu usaha peremajaan tanaman agar produksi yang dihasilkan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Tabel 7.14. Estimasi luas areal tanaman kelapa tahun 2005-2009 di beberapa kecamatan potensial di Kabupaten Banyuasin dan OKI

Kabupaten/ Kecamatan	Luas Perkebunan Kelapa (ha)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kabupaten Banyuasin:					
Pulau Rimau	3.392	3.425	3.459	3.493	3.527
Muara Padang	13.901	14.040	14.179	14.318	14.457
Makarti Jaya	3.492	3.526	3.561	3.596	3.631
Muara Telang	12.328	12.451	12.574	12.697	12.821
Banyuasin II	2.703	2.730	2.757	2.784	2.811
Jumlah	35.816	36.172	36.530	36.888	37.24
Kabupaten OKI:					
Tulung Selapan	660	667	673	680	686
Cengal	711	718	725	732	739
Lempuing	767	775	782	790	798
Mesuji	901	910	919	928	937
Air Sugihan	2.436	2.460	2.484	2.508	2.532
Jumlah	5.475	5.530	5.583	5.638	5.692

Tabel 7.15. Estimasi produksi tanaman kelapa dari tahun 2005-2009 di beberapa kecamatan potensial di Kabupaten Banyuasin

Kabupaten/ Kecamatan	Produksi (000 butir)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kabupaten Banyuasin :					
Pulau Rimau	20.352	20.550	20.754	20.958	21.162
Muara Padang	83.406	84.240	85.074	85.908	86.742
Makarti Jaya	20.952	21.156	21.366	21.576	21.786
Muara Telang	73.968	74.706	75.444	76.182	76.926
Banyuasin II	16.218	16.380	16.542	16.704	16.866
Jumlah	214.896	217.032	219.180	221.328	223.482
Kabupaten OKI					
Tulung Selapan	3.960	4.002	4.038	4.080	4.116
Cengal	4.266	4.308	4.350	4.392	4.434
Lempuing	4.602	4.650	4.692	4.740	4.788
Mesuji	5.406	5.460	5.514	5.568	5.622
Air Sugihan	14.616	14.760	14.904	15.048	15.192
Jumlah	32.850	33.180	33.498	33.828	34.152

Peremajaan kelapa tua yang diperlukan adalah seluas 5.000 ha, masing-masing di Kabupaten Banyuasin seluas 4.000 ha dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 1.000 ha. Kegiatan peremajaan secara bertahap terus dilakukan dan sampai tahun 2009 luas yang akan dicapai sekitar 3.000 ha dengan menggunakan bibit unggul. Untuk Kabupaten Banyuasin seluas 2.500 ha dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 500 ha.

Pengembangan lahan budidaya kelapa untuk areal bukaan baru sampai dengan tahun 2009 mencapai luas 2.000 ha. Pengembangan kelapa untuk di Banyuasin sekitar 1.500 ha dan di Ogan Komering Ilir sebanyak 500 ha. Distribusi areal pengembangan dapat dilihat pada Tabel 7.15. Total luas areal intensifikasi akan dilakukan sebanyak 20.000 ha pada tahun 2006 dan 30.000 ha pada tahun 2007. Lokasi intensifikasi menyebar di semua kabupaten dengan harapan agar produktivitas kelapa meningkat mulai tahun 2007 nanti.

7.2. Rencana Pengembangan Sarana Produksi

Sarana produksi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan produksi. Ketersediaan sarana produksi yang dekat dengan petani dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik merupakan syarat untuk berhasilnya pembangunan bidang perkebunan. Hal ini karena di bidang perkebunan, sarana produksi secara umum berada di perkotaan, sedangkan tempat usaha berada di pedesaan, maka perlu usaha untuk mendekatkan kedua kutub ini. Kondisi ini menyebabkan biaya sarana produksi menjadi lebih mahal. Apalagi kondisi tersebut diikuti dengan buruknya prasarana transportasi. Oleh karena itu ke depan akan dikembangkan:

- a) Mengembangkan kios-kios sarana produksi agrokimia dan pupuk di sentra-sentra produksi,
- b) Mengembangkan jaringan distribusi agrokimia dan pupuk yang lancar dan efisien di sentra-sentra produksi,
- c) Mengembangkan kegiatan memproduksi sarana produksi alat panen (dodos) yang secara teknis dan ekonomis mampu dihasilkan di sentra-sentra produksi,
- d) Mengembangkan sistem waralaba bibit di sentra-sentra produksi.

Penanganan sarana produksi terutama bibit tanaman perkebunan masih belum optimal karena terbatasnya kemampuan produsen bibit yang memegang varietas dan instansi terkait lain yang berwenang mengawasi peredaran bibit unggul. Bibit yang dihasilkan penangkar saat ini sangat beragam dan mutunya sebagian tidak dapat dijamin, antara lain karena keterbatasan sumber bibit. Melalui Sistem Waralaba Benih diharapkan dapat memecahkan

persoalan penyediaan bibit, sekaligus kegiatan penyebaran klon unggul adaptif kepada petani dan *stakeholder* lainnya akan dapat dipercepat.

Sekalipun konsep Waralaba Benih, terutama untuk karet sudah mulai disosialisasikan beberapa tahun yang lalu, namun untuk aplikasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu masih akan dilakukan kajian untuk pemantapan konsep ini agar dapat diaplikasikan dalam skala luas, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas komoditi perkebunan rakyat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Untuk mendukung revitalisasi perbenihan perkebunan maka kegiatan yang akan dilakukan untuk peningkatan mutu benih pada sentra-sentra pembibitan tanaman perkebunan di Sumatera Selatan adalah:

1. Inventarisasi terhadap para penangkar yang potensial sebagai peserta Waralaba Benih dan penangkar diwajibkan terdaftar di Dinas Perkebunan dengan memiliki TRUP (Tanda Registrasi Usaha Perbenihan),
2. Inventarisasi dan pemetaan terhadap sumber biji/benih/entres yang ada, baik yang dimiliki pemerintah maupun perorangan,
3. Pembangunan kebun entres induk di sentra-sentra pembibitan dan pemusnahan semua entres palsu yang ada,
4. Pemurnian kebun-kebun entres milik penangkar dan dinas,
5. Penumbuhan dan penguatan kelompok penangkar benih peserta Waralaba, baik secara teknis maupun administratif,
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina secara periodik/berkala oleh BP2MB bersama instansi terkait,
7. Mempublikasikan para penangkar yang bibitnya telah dibina/terakreditasi melalui pola waralaba, sehingga para konsumen/pemasok/suplier bibit untuk proyek dinas dapat memperoleh informasi mengenai sumber benih yang benar,
8. Pelatihan bagi para penangkar, terutama untuk menekankan pentingnya "mutu benih" sehingga dapat meningkatkan kesadaran penangkar akan tanggung jawabnya terhadap mutu benih yang akan diedarkan, dan agar penangkar memiliki persepsi yang sama dengan pengawas mengenai standar "benih bermutu".

Sarana produksi lain yang diperlukan lalah pupuk, pupuk akan diupayakan tersedia di desa, dan keterbatasan modal petani untuk membeli pupuk akan teratasi apabila petani membentuk kelompok tani dan selanjutnya koperasi yang dapat mengakses modal,

Program sertifikasi lahan akan dipercepat melalui koordinasi antara Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional dan bantuan diberikan dengan sistem bergulir dengan demikian penataan administrasi pertanahan dapat dipercepat.

Sebagian dari kenaikan produktivitas, produksi dan pendapatan petani perkebunan kopi di Sumatera Selatan ditentukan oleh ketersediaan dan penggunaan sarana produksi yang sesuai dan memang dibutuhkan. Sarana produksi yang dimaksud meliputi bibit unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian untuk budidaya tanaman kopi. Untuk memacu peningkat produktivitas dan produksi tersebut akan dilakukan beberapa sub program berikut sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha penangkaran benih unggul yang dana awalnya berasal dari pemerintah dan kemudian dikembangkan dengan sistem waralaba. Pada tahap awal bibit unggul akan diperoleh dari hasil kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, perguruan tinggi di Sumatera Selatan yang relevan dan pemerintah daerah. Para penangkar yang menjadi waralabanya adalah para petani binaan,
- b. Fasilitasi ketersediaan pupuk bagi petani dan pengembangan pupuk organik dalam skala ekonomis,
- c. Pengembangan sistem pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu dan minim penggunaan zat kimia,
- d. Pengembangan, bantuan dan pinjaman alat mesin untuk budidaya tanaman kopi,
- e. Penyediaan pinjaman modal yang ringan bagi petani untuk memperoleh sarana produksi.

Sarana produksi untuk program intensifikasi tanaman kelapa akan lebih difokuskan kepada pengadaan dan penyaluran pupuk tunggal berimbang. Pupuk N, P dan K akan disuplai sesuai dengan kebutuhan, dan wilayah yang diprioritaskan adalah wilayah sekitar industri pengolahan kelapa. Program perluasan selama 4 tahun ke depan mencakup 2.000 ha sehingga total pengadaan bibit yang akan dilaksanakan sebanyak 200.000 bibit kelapa. Khusus untuk peremajaan kelapa tua maka jumlah bibit baru yang akan disebar di kawasan sentra produksi kelapa sebanyak 400.000 bibit. Oleh sebab itu, total bibit yang akan disiapkan sebanyak 600.000 bibit untuk 4 tahun ke depan.

7.3. Rencana Pengembangan Industri

Pada tahun 2005 kapasitas pabrik karet remah di Sumatera Selatan sebesar 650 ribu ton, ditargetkan akan menjadi 900 ribu ton pada tahun 2009. Pembangunan pabrik crumb rubber dengan kapasitas 250.000 ton/tahun akan dilaksanakan dengan pola investor. Izin pembangunan industri karet remah harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan bahan baku, sehingga harus ada koordinasi antara Dinas Perkebunan yang mengetahui potensi bahan baku yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengeluarkan izin industri dan Gapindo yang menaungi pabrik-pabrik karet remah.

Rencana pendirian pabrik karet remah di Kabupaten Musi Rawas dan Banyuasin pada tahun 2006 merupakan langkah tepat, karena kedua kabupaten tersebut merupakan sentra karet alam terbesar di Sumatera Selatan. Pada tahun 2007 pembangunan pabrik akan dilakukan di Muara Enim dan untuk tahun 2008 dan 2009 ditargetkan 4 pabrik dengan total kapasitas 120 ribu ha (Tabel 7.16). Namun untuk lokasi pabrik ada beberapa alternatif antara lain:

Tabel 7.17. Kapasitas olah pabrik karet remah, 2005 - 2009

Kabupaten/ Kota	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (000 ton/tahun)				
		2005	2006*	2007*	2008**	2009**
OKU	Baru				30	
OKI	Multi Agro Kencana Prima Baru		9			30
Muaraenim	Kirana Permata Felda Indo Rubber				26	20
Mura	Nibung Artha Mulia Kirana Musi Windu Baru	18		36		30
Muba	Karini Musi Persada Pinago Utama	36		24		
Banyuasin	Melania Mardec Musi Lestari Bintang Gasing Persada Baru	2.4			36	
Palembang	Aneka Bumi Pratama Baja Baru Gajah Ruku Hok Tong Muara Kelangi I Muara Kelangi II Panca Samudera Simpati Prasida Aneka Niaga I Prasida Aneka Niaga II Remco Sunan Rubber Sri Terang Lingga Indonesia	93 35 40 65 36 36 60 30 30 50 60 20				
	Total	648.4	92	46	60	60

* Sudah tahap pembangunan

** Direncanakan

- Kabupaten Banyuasin: di kawasan industri Tanjung Api-api, yang juga berdekatan dengan Pelabuhan Samudera.

- b. Kabupaten OKU: karena di Martapura direncanakan akan dibangun terminal peti kemas.
- c. Kabupaten Musi Rawas: potensi bahan baku karet cukup besar dan direncanakan akan dibangun terminal peti kemas.
- d. Kabupaten OKI: sampai saat ini baru ada 1 pabrik karet remah dengan kapasitas hanya 9 ton

Di samping penggunaan “**Deorub**” sebagai penghilang bau di pabrik karet remah, juga terdapat **Deorub K** yaitu formula asap cair yang merupakan bahan pembeku bokar yang tidak berbau. Penggunaan **Deorub K** dapat mengatasi masalah nilai Po dan PRI yang rendah karena mengandung senyawa yang dapat mencegah dan mematikan pertumbuhan bakteri serta berfungsi sebagai antioksidan (*fenol* dan derivatnya), di samping mengatasi bau busuk karena mengandung senyawa yang mudah menguap dan berbau asap kuat (*karbonil, furan, fenol, siklopenten, benzene* dan lain-lain). Penanganan masalah bau tidak dapat dilakukan oleh pabrik sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari petani dan pemerintah.

Selain produksi karet remah, akan dikembangkan pembuatan RSS yang dibekukan dengan Deorub K yang memiliki beberapa manfaat, di antaranya: tidak berbau, tidak berjamur, proses pengolahan lebih cepat dan menghemat bahan baku kayu karet untuk pengasapan. Pengembangan pembuatan produk RSS Deorub akan dilakukan di perkebunan besar dan RSS Deorub yang dihasilkan dapat langsung diekspor.

Industri barang jadi akan memberikan nilai tambah, jaminan kepastian harga dan menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini Sumatera Selatan baru memiliki keunggulan dalam pengembangan industri karet remah yang masih merupakan produk primer bahan baku industri yang hampir seluruh produksinya diekspor, sementara industri barang jadi karet belum berkembang. Kedepan, Pemerintah akan mendorong pengembangan industri barang jadi karet dengan memberikan berbagai kebijakan pendukung, seperti:

- a. Kebijakan perindustrian dan perdagangan: peningkatan SDM, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitasi kawasan industri dan memperluas jaringan pemasaran,
- b. Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, termasuk regulasi/kepastian hukum dan penegakan hukum bagi investor, sehingga dapat menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan.

Industri yang akan difasilitasi pengembangannya adalah yang banyak menyerap bahan baku karet alam seperti industri ban baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Pada tahap awal dapat dicoba ban untuk kendaraan umum dengan harga bersaing.

Sebagaimana yang sering terjadi pada pabrik pengolahan kayu karet sebelumnya, kendala yang akan dihadapi pabrik adalah kesinambungan pasokan bahan baku kayu,

akibat kesulitan pengangkutan kayu dari lokasi kebun ke pabrik, terutama pada musim hujan, di samping berbagai kendala lainnya, seperti kelayakan biaya angkutan, perizinan dan retribusi. Untuk lebih memberikan jaminan ketersediaan bahan baku kayu karet bagi pabrik dan di pihak petani sendiri nantinya akan memiliki posisi tawar yang cukup kuat, maka perlu disusun suatu perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. antara pabrik pengolahan kayu dengan kelompok tani peremajaan.

Pemerintah akan memfasilitasi kerjasama kemitraan antara pabrik pengolahan kayu dengan kelompok tani, pihak mitra dapat memperoleh bahan baku sedangkan petani dapat meremajakan tanaman karetnya dengan mutu bibit yang terjamin. Di samping itu pemerintah akan terus mengupayakan penyediaan sarana/prasarana transportasi terutama sarana jalan.

Perizinan usaha kayu karet hendaknya dipermudah dan retribusinya juga disederhanakan, sehingga investor tertarik dalam usaha industri pengolahan kayu. Secara langsung hal itu akan membantu petani dalam hal permodalan untuk pembangunan/ peremajaan kebun karet. Di samping itu industri yang memanfaatkan kayu karet yang bersifat terbaharui (*renewable*) diharapkan dapat mengurangi eksplorasi hutan alam dan mengurangi tingkat polusi akibat asap. Kedepan, kelembagaan yang integratif dalam peremajaan tanaman karet termasuk pemanfaatan kayu karet sangat diperlukan sehingga baik petani maupun pengusaha kayu karet akan sama-sama mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil usahanya.

Pembangunan pabrik industri pengolahan kayu karet dengan kapasitas 300.000 ton MDF/tahun akan dilaksanakan oleh investor. Secara teoritis pabrik pengolahan kayu karet seharusnya terdesentralisasi pada setiap kabupaten sentra karet, karena faktor jarak menjadi pembatas untuk kelayakan nilai ekonomis kayu karet yang diterima petani, yaitu maksimal 100 km dari pabrik. Salah satu lokasi yang representatif terletak di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki areal karet tua sangat luas, di samping terdapat areal ex proyek SRDP, dan akan dibangun terminal peti kemas yang dapat langsung berhubungan dengan Pelabuhan Tanjung Api-api. Alternatif lainnya ialah Kabupaten Musi Banyuasin atau Banyuasin, yang juga memiliki potensi areal karet tua cukup luas.

Pengembangan industri kelapa sawit bertujuan agar ekspor kelapa sawit tidak lagi berupa bahan mentah (CPO), tapi dalam bentuk hasil olahan, sehingga nilai tambah dinikmati di dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Penerapan pengembangan industri kelapa sawit ini akan dilakukan melalui:

1. Pendirian PKS terpadu dengan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala 5 sampai 10 ton TBS per jam di areal sentra produksi CPO beberapa Kabupaten/kota yaitu Musi Banyuasin, Musi Rawas, Banyuasin, Muara Enim, Lahat, OKU, OKI dan Ogan Ilir.

2. Pendirian PKS di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang masih kekurangan pabrik yaitu di Musi Banyuasin (5 unit), Banyuasin (3 unit), Muara Enim (2 unit), Lahat (2 unit), OKI (1 unit) dan Ogan Ilir (1 unit), ditambah dengan rencana perluasan kebun baru seluas 300.000 ha sampai dengan 2009, yaitu membutuhkan penambahan PKS di Musi Banyuasin sebanyak 10 unit, Banyuasin 8 unit, Musi Rawas 6 unit, Lahat 2 unit, Muara Enim 5 unit, OKU 5 unit, OKU Timur 5 unit, Ogan Ilir 2 unit dan OKI 6 unit.
3. Pembangunan industri biodiesel di sentra-sentra produksi kelapa sawit.
4. Pembangunan klaster industri hilir kelapa sawit di Kawasan Gasing.

Peluang investasi pada PPKS (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit), analisis kelayakan dan kesesuaian dari Dirjen Perkebunan menunjukkan bahwa kapasitas 1 ton TBS per jam pada PKS membutuhkan luas lahan 200 ha atau (200 ton TBS). Bila ketentuan dari Dirjen Perkebunan ini dijadikan acuan untuk merencanakan penyebaran/distribusi pabrik pengolahan kelapa sawit, maka masing-masing daerah yang mempunyai perkebunan kelapa sawit akan melakukan tambahan (Δ) pabrik. Sejalan dengan penelitian (Hasbi, 2001), untuk membangun PKS skala mini 5 ton TBS per jam membutuhkan areal kebun 1000 ha pada lahan kelas II di Sumatera Selatan. Dengan demikian investasi pabrik PKS yang baru dapat diestimasi sebagai berikut:

Ada dua daerah perkebunan kelapa sawit yang belum mempunyai pabrik PKS yaitu OKU Timur dan Prabumulih, dengan kapasitas masing-masing 45 ton TBS/jam, 30 ton TBS/jam (Tabel 7.17). Total pabrik PKS di Sumsel tahun 2004 sebanyak 35 unit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. Pembangunan pabrik PKS baru berjumlah 23 unit pabrik PKS, dengan investasi total sekitar Rp. 770 miliar. Adapun total investasi pada satu unit PKS sekitar Rp. 45.miliar/30 ton TBS/jam.

Tabel 7.17. Perkiraan investasi dan perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit

Kabupaten Kota	Existing 2004 Luas Kebun (ha)	Kebutuhan Ideal PKS (ton TBS/jam)	Kapasitas Existing (ton)	Estimasi Kapasitas Pabrik Baru (Δ) Ton TBS /jam	Investasi* PKS (Milyar Rp)	Estimasi Δ PKS 30 ton TBS/jam (dalam unit)	Existing 2004 PPKS (Dalam unit)	Estimasi Total PKS 2005 (dalam unit)
OKU	35.865	180	210	(30)	-	-	3	-
OKI	96.315	480	435	45	67,5	2	8	10
Ogan Ilir	8.901	45	30	15	22,5	1	1	2
Muaraenim	55.403	277	195	82	123	4	5	9
Lahat	36.636	183	110	73	110	3	3	6
Musirawas	71.662	358	310	48	72	2	8	10
Muba	105.762	529	375	154	225	7	5	12
Banyuasin	65.191	325	225	100	150	4	5	9
Jumlah	475.735	2.377	1.890	547	770	23	38	61

Terdapat satu daerah kabupaten yang over kapasitas yaitu di kabupaten OKU sebesar 30 ton TBS per jam. Sedangkan di Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai potensi yang sangat besar tambahan investasi untuk pembangunan pabrik PKS, yaitu ± 7 unit PKS dengan kapasitas 30 tonTBS per jam.

Dengan memperhatikan penambahan areal perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2009 seluas 300.000 ha, dibutuhkan pembangunan pabrik baru dengan kapasitas 1.500 ton TBS per jam atau sebanyak 50 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Total dana yang dibutuhkan sejumlah Rp. 1.35 triliun. Secara keseluruhan total dana yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan PKS sebesar Rp. 2.12 triliun

Pabrik biodiesel minyak sawit yang akan dibangun dengan kapasitas produksi 1 ton/jam atau 20 ton/hari atau 6.000 ton/tahun (skala kecil) dan kapasitas 100.000 ton/tahun (skala besar).

1. Pabrik biodiesel skala kecil (6.000 ton per tahun), biaya untuk membangun dan mengoperasikan satu unit pabrik biodiesel berkisar antara Rp. 14.3 miliar hingga Rp. 14,6 miliar. Biaya produksi pabrik skala kecil sekitar Rp. 4.164/lt hingga Rp. 4.840/lt pada tingkat harga CPO di pasar internasional US\$ 300/ton hingga US\$ 375/ton.
2. Pabrik biodiesel skala besar (100.000 ton per tahun), biaya untuk mengoperasikan pabrik skala besar sekitar Rp. 36.5 miliar hingga 42.75 miliar. Biaya produksi pabrik skala besar antara Rp. 3.547/lt hingga Rp. 4.224/lt.

Pabrik minyak goreng yang dibangun dengan kapasitas produksi 1.000 ton/bulan, yang merupakan minyak goreng kualitas curah guna memenuhi kebutuhan lokal memerlukan biaya investasi untuk mengoperasikannya sekitar Rp. 166 miliar.

Pengembangan industri kopi merupakan tuntutan kemajuan perekonomian saat ini yang tidak lagi dapat diabaikan, karena dengan cara ini nilai tambah ekonomi kopi akan dapat diperoleh petani dan para pelaku bisnis kopi lokal dan regional. Beberapa sub program yang dapat ditempuh antara lain ialah:

1. Penawaran dan fasilitasi pembangunan pabrik pengolahan atau industri hilir produk kopi seperti kopi bubuk instan, minuman ringan, permen di Muara Enim dan Martapura dengan mengundang investor besar seperti Nestle atau perusahaan lainnya. Pengembangan di Martapura selain dalam rangka menampung hasil produksi kopi biji di Kabupaten OKU, OKU Selatan dan OKU Timur, juga dikaitkan dengan rencana pembangunan Terminal Peti Kemas di Martapura sehingga produk-produk kopi tersebut dapat diangkut dalam skala yang besar secara efisien. Pembangunan pabrik di Muara Enim dimaksudkan untuk dapat menampung hasil produksi kopi biji dari kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim sendiri;

2. Pengembangan industri pengolahan kopi besar dan terpadu berskala ekonomis. Sub program ini akan dilaksanakan dengan mengundang investor baik sebagai alternatif apabila sub program pertama kurang direspon perusahaan besar yang sudah mapan atau secara paralel sebagai pembanding pengembangan industri tersebut;
3. Pengembangan kluster industri kopi di Kawasan OKU, Muara Enim dan Lahat Pagaralam. Sub program ini akan menggunakan pola kluster yang dikembangkan oleh sekaligus bekerja sama dengan the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO); Lembaga ini melalui bagian pengembangan sektor swastanya memang khusus membantu negara-negara penghasil bahan baku tertentu untuk mengembangkan kluster industri, termasuk memberikan pinjaman dana investasinya.
4. Pengembangan industri pengolahan kopi spesial/khas daerah seperti kopi Semendo, kopi Gunung Dempo dan kopi Ranau. Pada tahap pertama akan dimulai dengan melakukan pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan kopi khas tersebut di daerah sentra produksi, mempromosikannya dan sejalan dengan itu pula akan diupayakan pembangunan pabriknya dalam skala yang ekonomis.
5. Pengembangan kemitraan kelompok tani atau asosiasi kelompok tani untuk membentuk perusahaan yang berbadan hukum (Perseroan Terbatas) dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh petani. Perusahaan ini akan bekerjasama dengan investor pabrik pengolahan sehingga petani juga mempunyai saham di pabrik pengolahan sekaligus posisi tawar yang kuat.

Untuk pengembangan industri pengolahan kelapa di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan suatu sentra industri kelapa terpadu yang mengarah kepada terbentuknya *cluster industry* (Tabel 7.18). Industri kelapa terpadu akan dibangun di Kabupaten Ogan

Tabel 7.18. Rencana pembangunan industri pengolahan produk kelapa Sumatera Selatan

Kabupaten	Kecamatan	Pola	Jumlah Unit
Banyuasin	Pulau Rimau	Parsial	2
	Muara Padang	Terpadu	2
	Makarti Jaya	Parsial	2
	Muara Telang	Terpadu	2
	Banyuasin II	Parsial	1
Ogan Komering Ilir	Tulung Selapan	Parsial	1
	Cengal	Parsial	1
	Lempuing	Parsial	1
	Mesuji	Parsial	1
	Air Sugihan	Terpadu	3

Produk industri terpadu : serat sabut, arang aktif, karbon aktif, crude coconut oil, desiccated coconut, oleochemical, coconut wood, virgin coconut oil

Produk industri Parsial : serat sabut, arang aktif, tepung tempurung, furniture, gula kelapa

Komering Ilir dan Banyuasin. Sentra industri terpadu dan parsial yang diperlukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 7 unit dan di Kabupaten Banyuasin 9 unit (Tabel 7.18). Selain sentra industri kelapa terpadu, dibutuhkan juga pembangunan industri pengolahan produk hilir yang berlokasi di Palembang sebanyak 1 unit. Industri pemanfaatan air kelapa dan industri VCO (*Virgin Coconut Oil*) akan dibangun di setiap kawasan sentra produksi potensial.

7.4. Rencana Pengembangan Pemasaran

Berbagai upaya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem dan kelembagaan pemasaran bokar sudah mulai dirintis dan diterapkan, seperti penerapan sistem pemasaran bokar dengan kemitraan dan lelang. Kedua sistem pemasaran tersebut mempunyai ciri dasar mengaktifkan peran kelompok tani usaha bersama dalam satu hamparan kebun atau pemukiman, kemudian bokar ditawarkan/ dijual langsung ke pabrik pengolah. Secara faktual proyek rintisan tersebut telah terlihat menghasilkan banyak manfaat kepada pelaku pemasaran khususnya petani karet rakyat yang selama ini dianggap posisinya lemah dalam tawar menawar, sekaligus meningkatkan ekonomi pedesaan.

Melalui sistem pemasaran terorganisasi, petani memasarkan bokarnya secara berkelompok melalui Koperasi/KUD dan umumnya mampu menghasilkan bagian harga petani (farmer's share) lebih tinggi dibandingkan jika petani harus memasarkannya sendiri-sendiri seperti pada sistem pemasaran tradisional. Dalam sistem pemasaran bokar terorganisir melalui kelompok, umumnya selalu disertai dengan aturan main pemasaran, misalnya diberlakukannya standarisasi mutu bokar yang dihasilkan petani seperti keseragaman, adanya indikator harga, penentuan waktu penjualan dan penentuan besarnya jasa untuk KUD. Sistem pemasaran terorganisir akan semakin baik dan kuat, jika mampu memenuhi skala penjualan yang efisien dan berkesinambungan.

Pengembangan pemasaran produk kelapa sawit khususnya pasar ekspor akan ditindaklanjuti melalui upaya promosi. Promosi produk olahan kelapa sawit akan ditingkatkan dan kontinyu guna memperluas pangsa pasar dan mempertahankan pasar yang ada (khususnya pasar ekspor) akan dilakukan oleh semua pihak dan semua lapisan, yaitu mahasiswa, para eksekutif dan legislatif yang berkunjung ke luar negeri, staf kedutaan atasé perdagangan kedutaan besar Indonesia di negara-negara yang merupakan konsumen potensial dan para pengusaha.

Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia ialah Eropa Barat, India, Pakistan, Cina dan Jepang. Produk yang dieksport ialah minyak olahan tahap awal seperti RBD *palm oil*, CPO dan beberapa produk oleokimia. Pengembangan pasar produk kelapa

sawit kedepan ditingkatkan ke produk yang lebih hilir PPO (*Processed Palm Oil*) dan ditunjukan mencari pasar baru seperti Negara-negara Timur Tengah dan Negara lainnya yang potensial.

Hingga saat ini, konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan sekitar 50-60% dari produksi dan penggunaannya sebagian besar untuk pangan, sedangkan untuk industri oleokimia relatif masih kecil (15-20%). Kedepan pengembangan produk akan ditingkatkan produk-produk yang lebih hilir lagi, ke bentuk yang lebih terspesialisasi seperti ramuan makanan, aplikasi non-makanan dan produk-produk akhir seperti lemak, margarine, *cocoa butter replacer, fats*, oleokimia, bahan-bahan kosmetik dan biodiesel guna memenuhi pasar domestik dan meningkatkan nilai tambah.

Pengembangan pasar kopi ditujukan untuk (a) mencari pasar ekspor baru di luar pasar tradisional, (b) penetrasi pasar internasional, regional maupun domestik untuk produk-produk baru yang dikembangkan dan (c) pasar yang menghendaki kualitas kopi yang baik. Hal ini dilakukan dengan menerapkan strategi 4P (product, promotion, place, price). Pengembangan produk dilaksanakan dengan cara perbaikan kualitas kopi, pengembangan kopi khas kawasan, pengemasan yang memperhatikan prinsip estetika dan higienitas, variasi jenis produk atau product line yang mungkin untuk dikembangkan, seperti permen, kopi bubuk instan, minuman kopi dalam kemasan dan lain-lain. Hasil pengembangan produk ini ditindaklanjuti dengan upaya promosi melalui berbagai cara, saluran dan media. Salah satu yang penting adalah melakukan kerjasama dengan atase perdagangan kedutaan besar Indonesia di negara-negara asing baik yang merupakan konsumen tradisional maupun konsumen potensial. Berarti pula akan dilakukan penempatan produk kopi Indonesia baik secara fisik maupun *image* dengan promosi intensif baik ke negara-negara importir tradisional maupun importir baru dan potensial, sehingga hal itu menjadi peluang peningkatan pangsa dan penetrasi pasar yang besar. Berdasarkan hal itu atau secara simultan akan dilakukan pula aplikasi strategi penetapan harga produk yang bersaing namun memperhatikan segmen pasar, jenis dan kualitas produk kopi yang dihasilkan.

Terkait dengan itu pula pengembangan sistem pemasarannya dibedakan untuk pasar domestik dan pasar ekspor.

(a) Untuk pengembangan sistem pemasaran domestik akan dilakukan perbaikan sistem dan mekanisme pemasarannya yang lebih proaktif melibatkan instansi sektoral, lembaga pemasaran, asosiasi petani dan pedagang, KADIN, Forbes, perguruan tinggi dan lain-lain serta mengembangkan jaringan informasi melalui website provinsi dan kabupaten.

(b) Pengembangan sistem pemasaran untuk pasar ekspor akan memperhatikan aspek *fundamental* (perubahan atau fluktuasi *global supply*) dan aspek *non fundamental* (kondisi dan perkembangan *market sentiments*). Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mencermati perubahan selera yang dicerminkan dengan kecenderungan jenis, bentuk dan kualitas kopi yang diminta atau dikonsumsi maupun yang tidak disukai di negara-negara konsumen importir tradisional, importir baru dan importir potensial (calon importir)

Pada era globalisasi dan pasar bebas ini akan dilakukan pula pengembangan sistem pemasaran yang mampu mengakses *future trade* atau perdagangan berjangka guna melakukan “lindung nilai” (hedging). Memang kopi merupakan salah satu komoditi pertanian yang telah masuk sistem pasar berjangka dalam perdagangannya. Berarti akan diupayakan menguasai sistem pasar ini agar tidak diperdayakan oleh pelaku-pelaku bisnis yang curang.

Produk kelapa Indonesia selain untuk kebutuhan dalam negeri dan juga untuk ekspor. Pasar tradisional petani kelapa Sumatera Selatan terutama dari Ogan Komering Ilir melalui pedagang pengumpul yang mensuplai ke pasar Lampung dan dari Banyuasin banyak dipasarkan ke Palembang, Jambi dan Riau. Pemasaran tradisional demikian akan dirubah dengan beroorientasi kepada pemasaran produk olahan dengan memanfaatkan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api sebagai outlet komoditas yang dihasilkan oleh Sumatera Selatan.

Ekspor produk kelapa Indonesia dilakukan ke berbagai negara tujuan, yaitu ke USA, Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Belgia, Irlandia, Singapura, Malaysia, Bangladesh, India, Srilanka, China, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan negara-negara lainnya. Produk kelapa tradisional yang diekspor ialah kelapa segar, kopra dan minyak kelapa serta arang tempurung. Suplai produk olahan tradisional tersebut berasal dari kawasan sentra produksi kelapa Air Sugihan dan kabupaten lain.

Pemasaran produk yang dihasilkan dari kawasan sentra produksi kelapa Air Sugihan ke depan akan berbasis industri terpadu yang menghasilkan coconut cream powder, hydrogenated coco oil, paring oil, crude glycerine, coco chemical, alkanolamide dan coco shell flour. Untuk mengkondisikan agar produk tersebut lebih mampu bersaing global maka pemerintah akan memfasilitasi pembangunan industri pengolahan produk hilir kelapa di Kota Palembang sehingga produk yang diekspor adalah dalam bentuk barang jadi.

Masyarakat pedesaan di kawasan sentra produksi kelapa masih banyak yang mengkonsumsi minyak kelapa sebagai minyak goreng. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengupayakan fasilitasi dari sisi higenitas agar minyak kelapa yang dihasilkan

kelompok tani mempunyai mutu ekspor. Pasar untuk minyak goreng tersebut adalah mayarakat perkotaan dan ekspor.

Tempurung, sabut dan air kelapa dapat dijadikan bahan baku produk industri yang mempunyai nilai ekonomis. Tempurung dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti kerajinan tangan, arang tempurung, tepung tempurung yang selanjutnya dapat diolah lebih lanjut menjadi obat nyamuk. Produk karbon aktif akan dijadikan bahan pembersih, bahan pemurni, bahan penyerap dan katalisator.

Pasar untuk produk serat kelapa seperti springbed, karpet, sikat, keset, filter air bahkan limbah serbuk kelapa dapat menjadi pupuk kompos dan media tanam. Pemasaran produk olahan serat dan serbuk kelapa akan dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mensuplai pasar domestik dan ekspor. Kawasan sentra produksi kelapa akan dikembangkan agar mampu memproduksi produk jadi tersebut. Kerajinan tangan yang berbasis tempurung kelapa lebih diberdayakan lebih lanjut sehingga nilai tambah produk dapat didapat oleh pengrajin kelapa.

Pada tahap pengembangan pasar produk olahan kelapa diarahkan untuk mensuplai pasar lokal, dan selanjutnya dibina lebih lanjut untuk mensuplai pasar regional dan nasional. Khusus untuk pasar nasional maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Sumatera Selatan akan memfasilitasi agar terwujudnya pasar langsung produk kelapa ke provinsi atau kabupaten atau perusahaan swasta. Lokasi pasar yang potensial terdekat adalah pulau Jawa. Melalui SDM pelaku usaha kelapa yang handal maka pasar luar negeri akan secara bertahap diciptakan dan yang menjadi target adalah Eropa dan Cina.

7.5. Rencana Pengembangan SDM dan Kelembagaan

Penguatan kapabilitas petani dan lembaga ekonomi petani akan menggunakan **Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)** yang akan terus didorong pelaksanaannya di Kabupaten dengan mengoptimalkan Fasda/Pendamping yang ada di daerah. Pemda melalui Dinas Teknis terkait akan memberikan pelatihan kepada petani mengenai:

- a. Pelatihan Penumbuhan Kelompok
- b. Pelatihan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penguatan Kelembagaan

Untuk mendukung kegiatan pengembangan/peremajaan karet di desa diperlukan tenaga penyuluh atau pendamping, kinerja penyuluh harus dibangkitkan melalui revitalisasi penyuluh pertanian. Saat ini jumlah tenaga penyuluh formal yang ada sangat terbatas, upaya yang dapat dilakukan adalah penyediaan penyuluh swakarsa melalui pemberdayaan petani maju di desa. Pemilihan petani maju untuk setiap desa dapat dilakukan melalui seleksi, baik dari kinerjanya sebagai petani maupun dari aspek loyalitasnya terhadap

sesama petani serta disetujui seluruh warga desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa, petani terpilih akan diberikan pelatihan dan penunjukannya melalui SK Bupati.

Peningkatan intensitas penyuluhan di daerah "belum maju" (belum ada proyek) dilakukan dengan memanfaatkan petugas penyuluhan pertanian yang telah tersebar hampir ke seluruh pelosok desa. Sementara itu, petani di desa "maju" (ada proyek) pada umumnya telah mempunyai minat dan motivasi yang kuat untuk menerapkan teknologi anjuran. Pendekatan penyuluhan umum dan masal tidak lagi diperlukan, karena petani telah berada pada tahap penerapan teknologi. Pendekatan penyuluhan yang dibutuhkan ialah pendampingan dengan materi penyuluhan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan petani.

Penyuluhan yang terlibat dalam kegiatan ini dapat berasal dari staf UPP (dinas teknis) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Untuk dapat memberikan petunjuk teknis yang spesifik dan pendampingan yang intensif, penyuluhan perlu diberikan pembekalan materi yang memadai. Selain memberikan bimbingan teknis, penyuluhan bersama FASDA dapat berfungsi sebagai fasilitator dalam pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Koperasi. Penyuluhan dan FASDA perlu mengambil peran sebagai pendamping petani untuk memfasilitasi kegiatan lain yang mungkin diperlukan dalam peremajaan karet seperti kegiatan pengolahan karet dan pemasarannya, serta memfasilitasi kemitraan antara petani dengan lembaga lainnya.

Seiring dengan upaya pemberdayaan petani melalui pelatihan SKE, akan dilakukan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat **Lembaga Ekonomi Petani** (LEP) sebagai wadah untuk menunjang kegiatan usahatani petani dan kegiatan ekonomi lainnya yang diperlukan untuk membantu perekonomian petani dan keluarganya. Melalui pelatihan SKE, proses pembentukan organisasi petani mulai dari tingkat kelompok tani sampai dengan tingkat koperasi dapat difasilitasi. Dalam proses pelatihan tersebut, prioritas pembentukan organisasi petani adalah pembentukan kelompok tani yang berorientasi pada kegiatan peremajaan tanaman karet, pengolahan dan pemasaran karet. Proses pembentukan lembaga petani ini harus didekati dengan pendekatan yang lebih bersifat partisipatif. Inisiatif pembentukan lembaga harus berasal dari petani sendiri (*bottom-up approach*), dengan dibantu, difasilitasi dan didampingi oleh penyuluhan atau petugas dinas terkait.

Pemberdayaan adalah suatu proses perubahan pola pikir yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran anggota masyarakat yang telah diproses melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk mau memperbaiki kehidupannya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu terdapat dua kata penting yang diharapkan muncul dari pengertian pemberdayaan ini, yaitu *kemandirian* dan *partisipasi*.

Terdapat empat kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan kelembagaan dan organisasi pelaku agribisnis kelapa sawit, yaitu: (a) pengembangan petani, (b) pengembangan koperasi, (c) pengembangan asosiasi petani dan (d) pengembangan Penyuluhan Pertanian Lapangan.

Pengembangan petani meliputi kegiatan-kegiatan yang diupayakan untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan penguatan kelembagaan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ialah: memberikan pembinaan-pembinaan aspek teknis budidaya, pelatihan dan pendampingan pada petani. Pengembangan Koperasi khususnya pengurus koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya agar lebih berorientasi bisnis, ini nantinya diharapkan tidak saja usaha agribisnis pada sub sistem input produksi dan budidaya tetapi berkembang ke sub sistem pengolahan dan pemasaran. Assosiasi Petani Kelapa Sawit dibentuk sebagai sarana *networking* dan *sharing* antar stakeholder komoditi (per kabupaten). Pengembangan assosiasi petani ditujukan guna mendorong petani untuk memacu kelompok tani dan (kelembagaan petani/koperasi) atau mengembangkan lembaga-lembaga tani yang sudah ada di wilayah kebun dengan cara memotivasi terbentuknya suatu organisasi petani yang berkembang secara *bottom up*, dan mandiri.

SDM penyuluhan sekarang adalah makin banyaknya penyuluhan yang sudah berusia tergolong tua (hingga kemampuan fisik mereka menurun) serta pengetahuan mereka yang masih terfokus pada teknis usahatani. Oleh karena itu SDM penyuluhan ini secara bertahap perlu mendapatkan tambahan pengetahuan yang terkait dengan agribisnis secara lebih luas. Untuk itu pendidikan baik yang sifatnya formal maupun informal akan diberikan pada para penyuluhan. Pengembangan PPL meliputi kegiatan-kegiatan yang diupayakan untuk informasi dan pelayanan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu, dan pengembangan produk olahan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ialah memberikan pelatihan-pelatihan aspek teknis pertanian/perkebunan, dengan memberikan transfer pengetahuan tentang cara-cara *good agricultural practices* (GAP) memperbaiki mutu penanganan pascapanen, peningkatan hasil panen dan cara-cara menerapkan *quality control* pada setiap proses produksi sejak dari penanaman di kebun hingga pascapanen .

Pembangunan perkopian ke depan harus ditunjang dengan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan kelembagaan yang mantap. Untuk tujuan peningkatan intelektualitas akan ditingkatkan pendidikan masyarakat secara umum, sedangkan untuk tujuan peningkatan keterampilan akan dilakukan beberapa kegiatan berikut:

- a. Pelatihan dan pendampingan teknis budidaya yang berkaitan dengan pemupukan berimbang, tepat jumlah dan tepat waktu, rehabilitasi atau peremajaan tanaman kopi

- dengan teknik sambung pucuk/rejuvinasi, diversifikasi budidaya kopi Arabika dan kopi organik,
- b. Pelatihan, pembinaan dan pendampingan teknis panen dan penanganan pasca panen. Hal ini bertujuan untuk menaikkan grade kopi dari Grade IV, minimal ke Grade III dan pencegahan kontaminasi *ochratoxin* (OTA). Hal ini penting agar daya saing produk kopi Sumatera Selatan tetap atau bahkan makin tinggi di pasar internasional karena kualitas kopinya yang tinggi pula,
 - c. Pelatihan teknis dan pendampingan pengolahan produk seperti pembuatan kopi bubuk khas kawasan dan kopi blok industri skala rumah tangga dan skala sedang,
 - d. Pelatihan teknis aparat lapangan yang berikatan dengan revitalisasi penyuluhan untuk memperbaiki dan atau membekali keterampilan penyuluhan atau petugas lapangan misalnya mengenai teknik sambung pucuk/ rejuvinasi,
 - a. Pengembangan, pembinaan dan pendampingan organisasi petani berupa kebersamaan dan kerjasama kelompok, dan manajemen kelompok/organsasi,
 - b. Pemberdayaan petani maju di desa untuk menjadi penyuluhan atau fasilitator desa dengan pengukuhan dengan SK Bupati dan diberikan berbagai pelatihan yang relevan, dan
 - c. Pengembangan, pemantapan dan pendampingan asosiasi petani dan kelompok petani dalam rangka mengaplikasikan sistem pemasaran bersama, pembentukan perusahaan terbatas milik petani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan besar swasta.

Seperti pada komoditi lainnya, pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan penguatan kelembagaan petani pelaksana sistem industri kelapa terpadu dan parsial di kawasan sentra produksi di setiap kecamatan. Pada tahap awal pengembangan pelaku usaha industri kelapa adalah penguatan assosiasi kelapa, penyuluhan dan pelatihan home industri produk kelapa.

Kegiatan pengembangan assosiasi petani kelapa akan terus diberdayakan dan ditingkatkan lagi kemampuannya agar dapat mengakomodasi kepentingan petani, sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh petani. Pemberdayaan organisasi petani dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, pembinaan petani juga diarahkan untuk membangun dan memperkuat kelembagaan petani agar mereka dapat bekerjasama dalam kelompok sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembinaan petani.

Pengembangan SDM dan kelembagaan dilakukan dengan mendorong petani untuk dapat lebih berperan dalam pembangunan perkelapaan melalui peningkatan peran kelompok tani, KUD dan memberikan perlindungan terhadap industri kecil dan menengah

serta memperkenalkan pola kemitraan kepada para petani mengenai teknologi pertanian dan industri serta permodalan.

Hal lain yang akan dikembangkan pada tingkat petani, assosiasi perkelapaan dan industri kelapa adalah sosialisasi tentang produk organik. Oleh sebab itu, program sosialisasi tentang standarisasi dan sertifikasi produk-produk organik di Indonesia yaitu SNI 01-6729-2002 tentang sistem pangan organik yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan disosialisasikan secara bertahap. Untuk mensejajarkan pemahaman aparatur dan assosiasi terhadap sertifikasi dikeluarkan oleh IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) maka kegiatan lokakarya, seminar dan sosialisasi tentang hal tersebut akan terus digalakkan. Dengan demikian, produk industri pengolahan kelapa dapat menembus pasar internasional dengan harga yang kompetitif.

SDM dan kelembagaan perkelapaan juga akan difasilitasi untuk senantiasa mengikuti trend produk olahan kelapa, penguasaan teknologi olahan, pencarian pasar baru luar negeri dan manajemen produksi sehingga produk olahan kelapa senantiasa berorientasi pasar, efisien dan kompetitif.

7.6. Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Pendukung

Kebijakan dalam pengembangan infrastruktur agribisnis karet diarahkan pada upaya konsolidasi dan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya infrastruktur yang ada. Pada kenyataannya, infrastruktur untuk mendukung pengembangan agribisnis karet di daerah pada umumnya masih kurang atau sangat terbatas. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan umumnya dibangun tidak secara langsung untuk mendorong pengembangan agribisnis karet di daerah, melainkan terkait dengan program pembangunan infrastruktur daerah. Untuk mendukung kelancaran ekspor komoditas karet, Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat akan merealisasikan pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-api. Di samping itu akan diprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah sentra produksi yaitu semua jalan produksi (jalan desa) yang menghubungkan sentra bahan baku dan industri pengolahan serta pelabuhan ekspor.

Program pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Musi Rawas yang meliputi: pembangunan infrastruktur agropolitan, pembangunan pembangkit listrik skala besar dan pembangunan terminal cargo, diharapkan akan mendongkrak pengembangan agroindustri di wilayah tersebut, juga wilayah lain yang dilewati.

Pengembangan Agrowisata Perkebunan termasuk Paket Wisata Karet akan menjadi program unggulan yang dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Balai Penelitian Sembawa dengan semua fasilitas yang ada akan digunakan sebagai percontohan atau pilot proyek Agrowisata Perkebunan.

Keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit akan sangat tergantung kepada dukungan sarana dan prasarana yang dibangun. Dukungan kebijakan yang berasal dari dinas instansi terkait dan kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan. Adapun beberapa dukungan yang diharapkan dari dinas instansi terkait adalah:

1. Pembangunan dan perbaikan jalan-jalan dan jembatan penghubung, produksi dan koleksi (usaha tani) pada kebun-kebun kelapa sawit, jalan penghubung (*acces road*) yang menghubungkan desa dengan jalan raya yang menuju pusat kecamatan atau kabupaten.
2. Pengembangan dan Penyediaan sumber energi listrik. Arah pengembangan jaringan listrik adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kapasitas energi pelistrikan
 - b) Mengembangkan jangkauan jaringan pelistrikan
 - c) Meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan serta kenyamanan konsumen
3. Pengembangan dan penyediaan jaringan komunikasi telepon di sentra-sentra produksi kelapa sawit.
4. Pengembangan jaringan riset dan pengembangan teknologi perkebunan
5. Peningkatan jaminan keamanan.
6. Sistem dan sumber pendanaan dengan Skim Kredit khusus yang layak.

Pengembangan lingkungan pendukung dan infrastruktur yang dilaksanakan adalah:

1. Pembangunan jalan produksi (jalan usahatani)

Jalan produksi akan dibangun di areal perkebunan terutama yang masih belum dapat dilalui atau diakses kendaraan pengangkut barang roda empat, karena selama ini para petani hanya dapat membawa hasil panennya melalui jalan setapak yang terjal sehingga jumlah yang dapat dibawa juga terbatas.

2. Pembangunan/perbaikan jalan ke lokasi kebun

Jenis jalan ini adalah jalan kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu pada masa mendatang akan ada fokus pengembangan infrastruktur jalan ke lokasi kebun di empat kabupaten kota sentra produksi utama kopi.

3. Perbaikan jalan dari sentra produksi ke pusat pengolahan dan pasar

Sentra produksi kopi umumnya di daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan kondisi jalan yang relatif sempit sehingga cukup sulit untuk dilalui mobil truk besar. Hal ini menyebabkan ongkos transportasi menjadi tidak efisien. Kondisi jalan di kawasan dari Pagar Alam ke Lahat, dari Kawasan Semendo ke Tanjung Enim, dan dari Banding Agung ke Martapura dalam jangka menengah dan panjang akan di perlebar, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing produk kopi.

4. Peningkatan ketersediaan jaringan komunikasi dan publikasi

Saat ini jaringan telepon sudah mencapai ibukota kecamatan, hanya jumlah SST-nya masih relatif terbatas. Ada pula yang telah terliliti jaringan telepon seluler, seperti di Pagar Alam, namun biayanya masih relatif mahal. Untuk kepentingan transparansi dan kelancaran informasi pasar maka ke depan organisasi petani dan/atau pelaku usaha agribisnis kopi akan diprogramkan untuk memiliki sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi dan dikemas dalam network telekomunikasi.

5. Pembangunan dan penambahan daya listrik

Pengembangan industri pedesaan akan dilakukan pembangunan listrik sesuai dengan kebutuhan kapasitasnya, sementara pada daerah yang sudah ada listrik akan ditingkatkan daya listriknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Pengembangan jaringan riset dan teknologi budidaya, penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil

Saat ini riset dan pengembangan kopi secara nasional masih terpusat di Jember Jawa Timur. Kegiatannya di wilayah Sumatera Selatan masih minim, oleh karena itu pada tingkat lapangan akan dikembangkan riset dan pengembangan teknologi budidaya, penanganan panen dan pascapanen, dan pengolahan hasil yang merupakan kerjasama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember dengan lembaga penelitian lokal baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga lain di Sumatera Selatan.

7. Peningkatan keamanan areal perkebunan kopi

Letak perkebunan kopi di Sumatera Selatan yang rata-rata relatif jauh dari pemukiman petani menyebabkan tingkat keamanannya cukup rawan. Hal ini menyebabkan para petani sering melakukan panen kopi muda untuk menghindari pencurian dan akibat lanjutannya adalah mutu kopi menjadi rendah. Kondisi ini jelas perlu diperbaiki pada masa mendatang. Aparat dan sistem keamanan akan ditingkatkan kemampuannya untuk memperbaiki keamanan di wilayah tersebut. Sistem keamanan swakarsa di kalangan petani dan masyarakat juga akan dikembangkan lagi untuk mendukung aparat keamanan resmi.

8. Pengembangan paket wisata berbasis komoditi kopi dan teh di daerah pegunungan Kawasan Bukit Barisan. Program ini berkaitan dengan upaya mempromosikan daerah wisata dan komoditi perkebunan dalam satu paket wisata terpadu.

Prioritas pengembangan infrastruktur pendukung adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi dari sentra produksi sampai ke pelabuhan ekspor atau tempat pemasaran lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta akan menyusun suatu rencana pengembangan sarana dan prasarana yang komprehensif yang mampu memberikan dukungan menyeluruh bagi pembangunan perkebunan. Konsep KIMBUN (Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan) akan dikembangkan agar prinsip

keterpaduan dan efisiensi biaya dapat terpenuhi. Industri pengolahan kelapa mempunyai kemiripan infrastruktur dengan komoditas perkebunan lainnya. Dengan demikian, jaringan transportasi air (kanal) dan pengaturan tata air akan dilakukan agar tidak terlalu membebani biaya produksi kelapa. Pengembangan infrastruktur tentunya sejalan dengan pemaksimalan akses dan potensi daerah sehingga semua faktor pertanian dapat memanfaatkannya.

VIII. RENCANA PENGEMBANGAN KEHUTANAN MENDUKUNG SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN

8.1. Kondisi Saat Ini

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi surplus beras di Indonesia. Untuk memperkuat dan mempertegas peran dan posisi Sumatera Selatan tersebut, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan mencanangkan program strategis yang disebut Sumatera Selatan Lumbung Pangan. Sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam Program Lumbung Pangan Sumatera Selatan, karena hutan mempunyai kaitan langsung dan tidak langsung dengan keberhasilan revitalisasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peran langsung sektor kehutanan antara lain dalam bentuk hutan cadangan pangan. Hutan cadangan pangan merupakan sumbangsih sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan pohon kehidupan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, buah-buahan, sukun, sagu, mete dan lain-lain.

Upaya lain yang dilakukan adalah tumpang sari padi gogo, jagung dan tanaman hortikultura. Data yang ada menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2004, baru sekitar 10.000 ha areal Hutan Cadangan Pangan di Sumatera Selatan dengan total produksi 15.000 ton dari areal HTI juga telah dihasilkan madu sebanyak 28 ton (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2005).

Dengan potensi areal HTI yang ada serta merujuk pada produksi di atas, maka areal ini perlu dikembangkan lebih lanjut tetapi pengembangannya ini menghadapi kendala karena tidak semua tanah mampu menghasilkan biji dan buah. Selain itu dalam dekade terakhir ini terjadi berbagai kerusakan lingkungan akibat dari ulah manusia yang memanfaatkan hutan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi, oleh karena itu pengembangan hutan sebagai cadangan pangan perlu dilakukan sekaligus dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Peran tidak langsung sektor kehutanan dalam bentuk pemeliharaan stabilitas iklim mikro dan makro serta siklus hidrologi di alam. Dengan dasar ini, maka pembangunan hutan cadangan pangan dibangun dan diintegrasikan dengan kegiatan lain seperti reboisasi, penghijauan, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman industri dengan menanam jenis "pohon kehidupan" atau tanaman serbaguna, sekaligus optimalisasi pemanfaatan lahan hutan untuk kesejahteraan rakyat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.

Komponen ekosistem yang berkaitan langsung dengan sumber daya hutan ialah sumberdaya air. Air dan sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat

utama bagi kehidupan, serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik langsung maupun tidak langsung. Jumlah air di bumi tidak berubah, yaitu $1.385.984.610 \text{ km}^3$.

Air tawar hanya meliputi 2,5 % dari total air tersebut. Mengingat jumlah air tawar yang terbatas tersebut, maka diperlukan langkah pemanfaatan secara efisien dan pengelolaan yang tepat dan baik. Oleh karena itu peruntukan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan dan pengusahaan air harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, untuk tujuan tersebut harus ada upaya konservasi dan pelestarian sumber daya air yang secara terpadu dan menyeluruh berbasis wilayah sungai.

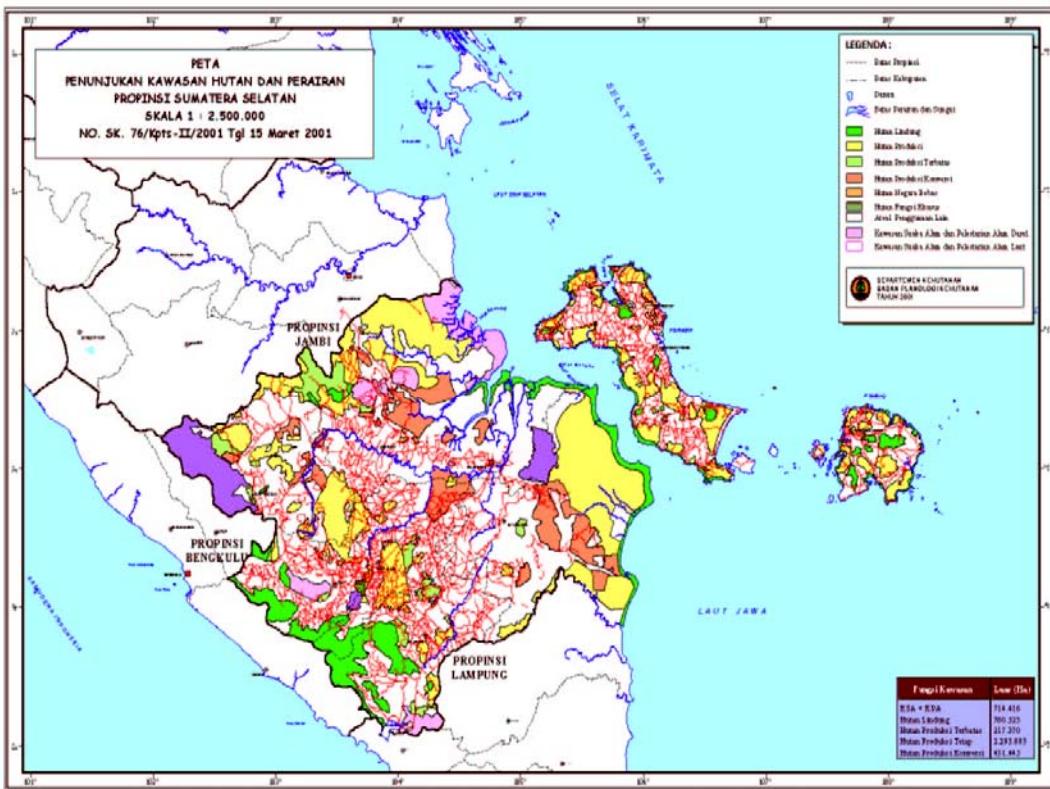
Kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 75/Kpts-II/2001, Tanggal 15 Maret 2001 seluas $\pm 4.416.837 \text{ ha}$ (Tabel 8.1). Luas kawasan hutan ini mencakup $\pm 40,43\%$ dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan hutan ini terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi (16,17%), Hutan Lindung (17,22%) dan Hutan Produksi (66,61%) (Tabel 8.1). Sebaran spasial kawasan hutan tersebut disajikan dalam Gambar 8.1.

Tabel 8.1. Kawasan hutan di Propinsi Sumatera Selatan

Fungsi Kawasan	Luas	
	Hektar	Persen
Kawasan Hutan Konservasi		
• Daratan	714.416	16,17
• Perairan	0	0
Kawasan Hutan Lindung	760.523	17,22
Kawasan Hutan Produksi		
• Hutan Produksi Terbatas	217.370	4,92
• Hutan Produksi Tetap	2.293.083	51,92
• Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	431.445	9,77
Total	4.416.837	100

Sumber: Badan Planologi Departemen Kehutanan (2002)

Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan tersebut saat ini telah banyak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil tata batas pengukuhan hutan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2003, diketahui bahwa kawasan hutan di Propinsi Sumatera Selatan seluas $3.774.457 \text{ ha}$ yang sesuai fungsinya terdiri dari: kawasan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi konservasi (HPK)) dan kawasan non budidaya (hutan lindung dan hutan konservasi).



Sumber: Badan Planologi Departemen Kehutanan (2002)

Gambar 8.1. Sebaran spasial kawasan hutan di Propinsi Sumatera Selatan

Rincian perkembangan luas kawasan hutan di Sumatera Selatan menurut fungsinya berdasarkan data tahun 2003 disajikan dalam Tabel 8.2.

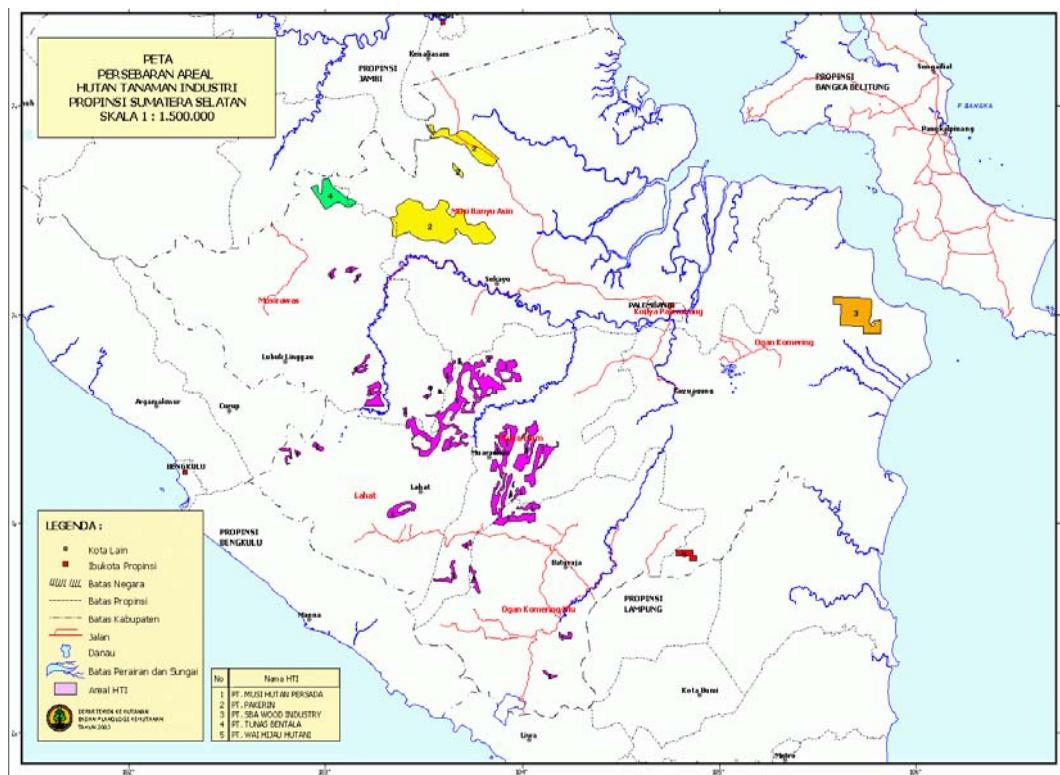
Tabel 8.2. Luas kawasan hutan per kabupaten dirinci berdasarkan fungsinya.

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan per Fungsi (ha)					Jumlah (ha)
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Konservasi	
1.	OKU, OKUT dan OKUS*)	50.950	151.021	65.682	45.931	-	313.584
2.	OKI dan OI	4.828	105.159	645.100	9.886	188.913	953.886
3.	Muara Enim dan Prabumulih*)	9.440	71.700	189.115	30.105	66.887	367.247
4.	Lahat dan Pagaralam *)	52.829	141.100	41.747	11.881	-	247.557
5.	MURA dan Lb. Linggau *)	251.252	1.842	301.458	26.480	50.072	631.104
6.	Musi Banyuasin	83.350	10.201	497.921	90.396	126.406	808.280
7.	Banyuasin	259.129	58.616	69.000	-	66.054	452.799
Jumlah		711.778	539.645	1.810.023	214.679	498.332	3.774.457

Keterangan: Rincian luas hutan masih berdasarkan kabupaten induk (sebelum pemekaran).

Sumber: Renstra Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2004-2009 (2004)

Pembangunan HTI di Sumatera Selatan dimulai pada tahun 1990 dan sampai saat ini areal yang dicadangkan seluas 476.330 ha yang dikelola oleh 9 pemegang ijin HTI. Sebaran areal HTI di Sumatera Selatan yang dikelola oleh 5 perusahaan disajikan dalam Gambar 8.2.



Sumber: Departemen Kehutanan Republik Indonesia (2005)

Gambar 8.2. Sebaran areal HTI di Sumatera Selatan

Pencadangan areal untuk HTI sesuai rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan telah mencapai 877.195 ha dengan target akhir total luas areal HTI mencapai 1.496.825. Namun demikian, realisasi tanaman HTI jenis tanaman utama *Accacia mangium* sampai tahun 2004 baru 193.500 ha dilakukan oleh PT. Musi Hutan Persada untuk memenuhi bahan baku industri pulp. Tingkat produksi yang berhasil direalisasi sampai tahun 2004 adalah 2.271.400 m³/tahun.

Mengingat kebutuhan kayu di masa mendatang sangat besar, maka mengembangkan HTI dapat dilakukan terutama pada areal bekas kebakaran hutan dan areal eks HPH lainnya. Untuk mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman tersebut perlu regulasi dan diregulasi dari pemerintah pengingat rente ekonomi penanaman hutan rendah dan jangka waktu panen yang cukup lama.

Hutan Konservasi di Sumatera Selatan terdiri dari 1 unit Cagar Alam, 7 unit Suaka Margasatwa dan 1 unit Taman Wisata, (Tabel 8.3). Kawasan ini harus tetap dipertahankan agar fungsi hutan sebagai penopang utama siklus hidrologi menunjang Sumatera Selatan lumbung pangan bisa berfungsi seperti yang diharapkan.

Tabel 8.3. Kawasan Hutan Konservasi yang telah ditunjuk untuk peruntukan Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata di Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Kawasan	Kabupaten	Fungsi	SK Penetapan
1.	Bunga Mas Kikim	Lahat	CA	GB.83, Stbl. 392
2.	Gumai Pasemah	Lahat	SM	408/Kpts/Um/6/1976
3.	Gunung Raya	OKU	SM	55/Kpts/Um/1/1978
4.	Isau-Isau Pasemah	Lahat	SM	69/Kpts/Um/2/1978
5.	Bentayan	Banyuasin	SM	276/Kpts/Um/4/1981
6.	Dangku	Banyuasin	SM	276/Kpts/Um/4/1981
7.	Padang Sugihan	Banyuasin	SM	003/Kpts-II/1983
8.	Terusan Dalam	Banyuasin	SM	410/Kpts-II/1986
9.	Punti Kayu	Palembang	TW	602/Kpts-II/1992
10.	Kerinci Sebelat	Mura	TN	901/Kpts-II/1999

Sumber: Badan Planologi Departemen Kehutanan (2002)

8.2. Pengembangan Areal dan Produksi

Visi pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan ke depan ialah hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat sehingga dapat mendukung Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan. Berdasarkan kondisi sumberdaya hutan saat ini dan visi yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka kebijakan pembangunan sumberdaya hutan mempunyai misi jangka panjang sebagai berikut: mempertahankan hutan dan kawasan hutan, mendayagunakan hutan secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan dan memperkuat kelembagaan.

Oleh karena itu pembangunan terutama ditujukan untuk :

1. Memantapkan status kawasan hutan dalam tata ruang untuk menciptakan prakondisi bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan,
2. Memantapkan fungsi hutan untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, dan
3. Mewujudkan pengaturan yang baik untuk sinergisme stakeholder dalam pengurusan hutan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pengamanan, perlindungan dan pelestarian sumber daya hutan disusun oleh perangkat peraturan perundang-undangan (Tabel 8.4).

Tabel 8.4. Perangkat Peraturan Perundang Undangan Sumber Daya Hutan

Ketentuan Yang Ada	Objek yang ditangani
UU Nomor 41 Tahun 1999 (yang merupakan penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1967)	Tentang Kehutanan
UU No. 22 Tahun 1999	Tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 25 Tahun 1999	Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
UU Nomor 12 Tahun 1992	Tentang Sistem Budidaya Tanaman
UU No. 24 Tahun 1992	Tentang Penataan ruang
UU No. 5 Tahun 1990	Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
PP.No. 34 Tahun 2002	Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
PP No. 35 Tahun 2002	Tentang Dana Reboisasi
PP No. 63 Tahun 2002	Tentang Hutan Kota
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 236 Tahun 2001	Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001

Dalam hubungan internasional, Indonesia mempunyai komitmen dalam pengelolaan hutan, antara lain hasil-hasil KTT Bumi, Konvensi Perubahan Iklim (Protokol Kyoto), Konvensi Penggurunan, Deklarasi Rio, Agenda 21, dan *Principles on Forests*, maupun perjanjian lainnya seperti Konvensi Perdagangan Flora dan Fauna Langka Dunia (CITES), Konvensi Lahan Basah (Ramsar), kesepakatan perdagangan internasional (WTO), *Ecolabelling* dan sertifikasi. Konvensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan kehutanan. Kesepakatan-kesepakatan harus dipergunakan dalam praktek pengelolaan sumberdaya hutan.

Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan lembaga Moneter Internasional (IMF), serta Consultative Group on Indonesia (CGI) melahirkan komitmen pemerintah Indonesia (cq. Depertemen Kehutanan) dalam pembangunan kehutanan.

Dengan berpedoman kepada tujuan pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disusun skenario pembangunan kehutanan untuk mendukung Sumatera Selatan Lumbung Pangan, seperti di bawah ini.

Program ini didasari pada kebijakan dalam mempersiapkan prakondisi bagi pengelolaan hutan lestari untuk mewujudkan kepastian hukum/status kawasan hutan, sehingga misi "menjamin keberadaan kawasan hutan" dapat terlaksana. Tahun 2004 telah disusun Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 -2008.

Ditinjau dari vegetasi yang menutupi kawasan hutan menunjukkan kecenderungan kerusakan hutan semakin meningkat. Menurut penafsiran citra landsat, luas kawasan yang berhutan saat ini tinggal 1.429.521 ha (37,87%), sedangkan sisanya seluas 2.344.936 ha (62,13%) kawasan yang tidak berhutan (non hutan).

Laju pengurangan hutan (deforestasi) di Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil perbandingan Peta Penutupan lahan RePPProT tahun 1985 dengan Peta Penutupan Lahan hasil penafsiran citra Tahun 1998 oleh Pusat Data dan Perpetaan Badan Planologi Kehutanan diperoleh hasil bahwa selama periode waktu 12 tahun telah terjadi perubahan penutupan lahan hutan (Tabel 8.5). Rata-rata laju deforestasi selama periode 1985 sampai 1998 di Sumatera Selatan ialah 192.824 ha per tahun.

Tabel 8.5. Deforestasi di Propinsi Sumatera Selatan

Penutupan Lahan	RePPProT (1985)	Dephut (1991)		Dephut (1998)
		ha		
Luas areal yang ditafsir	10.226.300		10.236.090	10.149.068
Hutan	3.562.100		3.438.140	1.248.209
% hutan	34,8		33,6	12,3

Sumber: Badan Planologi Departemen Kehutanan (2002)

Data di atas mencerminkan adanya perubahan luasan kawasan hutan di Sumatera Selatan yang signifikan. Kondisi penutupan lahan kawasan hutan di Sumatera Selatan saat ini disajikan dalam Tabel 8.6.

Tabel 8.6. Kondisi Penutupan Lahan Kawasan Hutan per Kabupaten di rinci berdasarkan fungsinya.

No	Fungsi Hutan	Luas Kawasan Hutan tiap Kabupaten/Kota per Kondisi Penutupan Vegetasi (ha)						TOTAL
		Muba dan Banyuasin	OKI dan OI	OKU, OKUT, OKUS	M. Enim, Prabumulih	Lahat, Pagaralam	Mura, Linggau	
1.	Luas yang Berhutan (ha)							
	HSA	211.089	645	724	6.777	29.770	216.875	465.880
	HL	58.771	8.289	8.656	51.372	63.596	-	190.648
	HPT	81.295	2.817	2.888	18.985	2.882	9.202	118.069
	HP	344.742	138.988	9.742	46.413	767	87.893	628.545
	Jumlah (1)	696.897	150.739	22.010	123.547	97.015	313.970	1.403.142
2.	Luas Non Hutan (ha)							
	HSA	131.390	4.183	50.226	2.663	23.059	34.377	245.898
	HL	10.052	96.870	142.365	20.328	77.504	1.842	348.961
	HPT	8.101	7.069	43.043	11.120	8.999	17.278	95.610
	HP	222.179	506.112	55.940	142.702	40.980	213.565	1.181.478
	Jumlah (2)	371.722	614.234	291.574	176.813	150.542	267.062	1.871.947
3	Luas Hutan Tetap (1+2)	1.067.619	764.973	313.584	300.842	247.557	581.032	3.275.607
	HPK (ha)	192.460	188.913	-	67.887	-	50.072	499.332
	Total Luas Hutan (1+2+3) (ha)	1.260.079	953.886	313.584	368.729	247.557	631.104	3.774.939

Sumber: Pengolahan data oleh Dishut Prop. Sumsel (2005) berdasarkan data dari Biphut Wil. II (2001)

Mengacu pada data penutupan kawasan hutan (Tabel 8.6), ada sekitar 3.774.457 ha kawasan hutan yang perlu dimantapkan keberadaannya. Sebaran areal yang perlu dimantapkan tersebut dirinci dalam Tabel 8.7.

Tabel 8.7. Rancangan pemantapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/kota	Tahun					Total
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	OKU, OKUT, dan OKUS	66.316	66.316	66.316	66.316	66.320	313.584
2.	OKI dan OI	182.377	182.377	182.377	182.377	182.378	953.886
3.	M. Enim dan Prabumulih	73.745	73.745	73.745	73.745	73.749	368.729
4.	Lahat dan Pagaralam	49.511	49.511	49.511	49.511	49.513	247.557
5.	Mura dan Linggau	126.220	126.220	126.220	126.220	126.224	631.104
6.	Muba dan Banyuasin	252.015	252.015	252.015	252.015	252.019	1.260.079
Total		750.184	750.184	750.184	750.184	750.203	3.750.939

Pengelolaan hutan alam di Sumatera Selatan dimulai pada tahun 1969 dengan diberikannya ijin penguasaan hutan seluas 10.000 ha dan izin HPH. Sampai dengan tahun 1985 terdapat 23 HPH yang mengelola hutan seluas 2.017.300 ha, sedangkan pada tahun 2004 tinggal 2 HPH seluas 163.885 ha, diantaranya 1 HPH tidak aktif dalam pengelolaan hutannya.

Pemanfaatan hutan oleh HPH telah meningkatkan produksi kayu bulat. Namun HPH lebih menekankan nilai ekonomi daripada memperhatikan aspek pelestarian hutan, sehingga kegiatannya menyebabkan hutan rusak. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap hasil kayu alami harus diminimalisasi melalui pengembangan hutan tanaman.

Kesalahan dalam mengelola hutan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dalam pengelolaan hutan Sumatera Selatan mempunyai dasar yang cukup kuat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan, yaitu:

1. Pengelolaan hutan diubah dari sistem hutan berbasis produksi kayu (*timber management*) menjadi berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan (*resources based management*),
2. Pemberian hak penguasaan hutan yang awalnya lebih ditujukan kepada usaha skala besar, beralih pada usaha berbasis masyarakat (*community based forest management*),
3. Orientasi kelestarian hutan yang ditekankan pada aspek ekonomi (produksi kayu) saja, diubah pada upaya mengakomodir kelestarian fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan,
4. Pengelolaan hutan yang semula sentralistik menuju desentralistik, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola hutan secara demokratis, partisipatif dan terbuka
5. Era produksi yang mengutamakan hasil kayu akan dikurangi secara bertahap (*soft*

landing process), menuju era rehabilitasi dan konservasi untuk pemulihan kualitas lingkungan yang lestari.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat. AGROFORESTRI merupakan sistem yang dapat diharapkan dapat memenuhi kedua tujuan tersebut. Beberapa sistem penanaman di Sumatera Selatan yang dapat dikategorikan konsep agroforestri antara lain kebun duku dan durian. Sistem ini pada dasarnya bersifat ramah lingkungan dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama di daerah-daerah sentra produksi duku dan durian.

Pengembangan Agroforestri ini diawali dengan diskusi bentuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat, pakar universitas, pemerintah. Selanjutnya diformulasikan kegiatan dan desain lokasinya. Langkah awal kegiatan ini melibatkan beberapa tokoh petani yang sangat berpengaruh di lokasi yang dapat membantu menyebarluaskan konsep agroforestry tersebut ke kelompok-kelompok tani lainnya.

Dalam konsep ini, petani merupakan stimulan maupun contoh/demo plot bagi petani-petani lainnya. Jenis tanaman yang akan dikembangkan juga perlu memperhatikan faktor kecocokan dengan preferensi masyarakat terkait.

Industri perkayuan perlu ditingkatkan karena bahan baku yang dapat disediakan ±191.988 m³ kebutuhan sebanyak 2,5 juta m³. Pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan yang berkelanjutan harus disertai dengan penanaman tanaman baru. Penanaman tanaman sebagai hutan baru sangat berpotensi dikembangkan (Tabel 8.8).

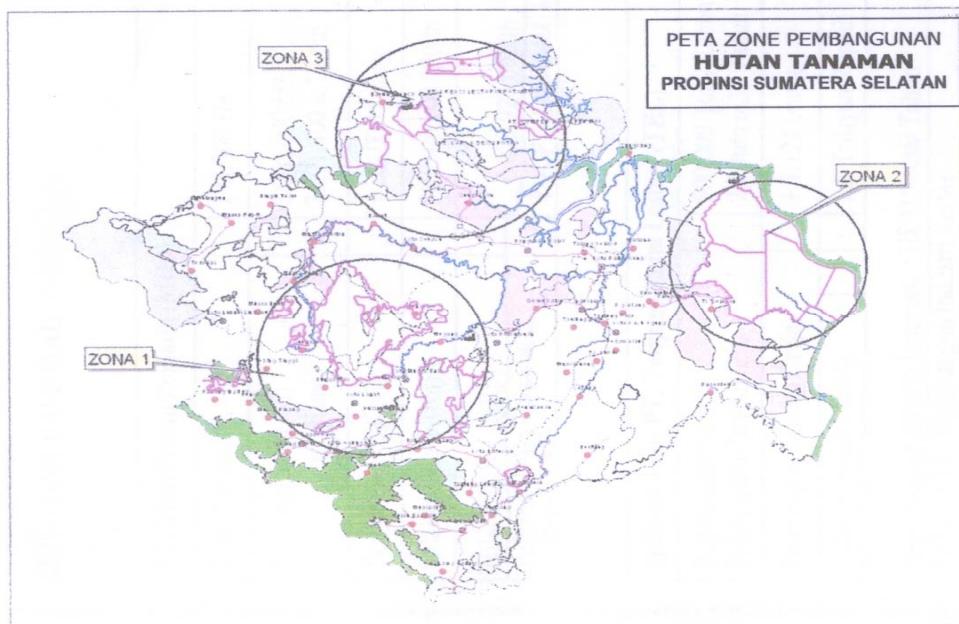
Tabel 8.8. Perkembangan produksi kayu asal hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Ijin	Tahun 1999/2000	Tahun 2003
H P H	91.316 m ³	-m ³
IPK	783.368 m ³	70.412 m ³
IPKTM	92.323 m ³	23.688 m ³
Hutan tanaman	-m ³	883.074 m ³

Melihat prospek hutan tanaman industri yang menjanjikan, maka akan dikembangkan areal hutan tanaman lebih lanjut. Wilayah pembangunan HTI tersebut diusulkan dibagi ke dalam 3 zona utama, yaitu:

1. Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kabupaten Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Musi Rawas,
2. Zona Simpang Heran-Beyuku seluas 585.425 ha yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan

3. Zona Mangsang-Lalan seluas 615.000 ha yang meliputi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Zonasi pembangunan HTI disajikan dalam Gambar 8.3

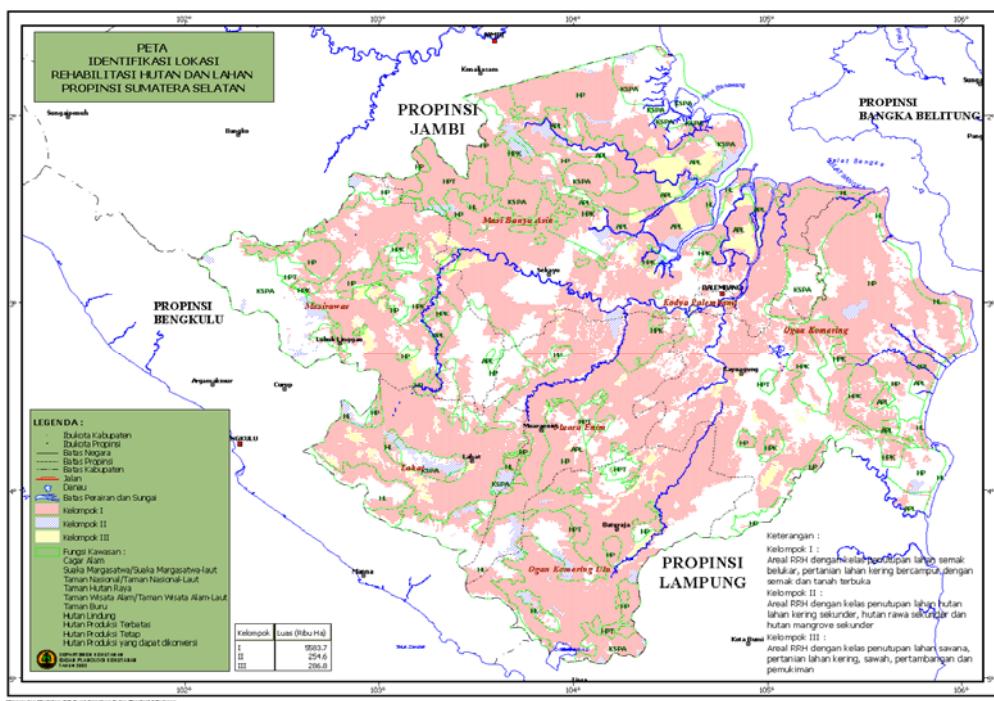


Gambar 8.3. Zonasi pembanguna HTI di Provinsi Sumatera Selatan.

Dampak kerusakan akibat kondisi hutan yang terus mengalami degradasi ditunjukkan oleh kejadian-kejadian antara lain: sering terjadinya bencana tanah longsor, banjir, polusi, kekeringan dan perubahan iklim mikro. Kerusakan-kerusakan yang terjadi tersebut menunjukkan kerugian yang sangat besar dari sisi ekologi dan ekonomi, sekaligus sangat mempengaruhi kondisi keseluruhan bangsa Indonesia dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah merehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi, penghijauan, rehabilitasi lahan.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Palembang (2005), luas kawasan hutan yang termasuk kategori kritis I - II seluas 1.871.947 ha, sedangkan lahan milik masyarakat yang telah kritis (kritis I + II) seluas 2.224.164 ha. Sebaran hutan dan lahan kritis yang perlu direhabilitasi di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 8.4.

Kegiatan rehabilitasi hutan telah diupayakan sejak tahun 1999, namun sampai tahun 2003 belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Rehabilitasi hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan berupa penanaman meranti baru mencapai 325 ha, sedang yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten melalui dana reboisasi seluas 2.206 ha (termasuk penghijauan). Kemajuan rehabilitasi hutan dan lahan Sumatera Selatan sangat lambat dan tidak sebanding dengan luas hutan dan lahan yang rusak. Oleh karena itu, pembangunan sektor kehutanan menjadi prioritas untuk mendukung sektor pertanian lainnya.



Gambar 8.4. Sebaran lokasi rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Selatan

Rehabilitasi areal bekas pertambangan di tambang batubara, emas dan minyak bumi yang berada di kawasan hutan juga menjadi perhatian untuk dikembangkan, kegiatannya meliputi areal bekas penambangan emas di sekitar kelompok hutan Sungai Tiku, Kabupaten Musi Rawas, dan bekas areal tambang batu bara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.

Dengan mempertimbangkan fungsi hutan dalam menopang Sumatera Selatan lumbung pangan. Prioritas kawasan rehabilitasi hutan akan dicapai melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan pertanian memerlukan jaminan pasokan air, khususnya di kawasan hutan yang saat ini sudah tidak bervegetasi lagi seluas $\pm 1.871.947$ ha (Tabel 8.5), perlu dijadikan prioritas kawasan yang harus direhabilitasi. Secara rinci rencana program rehabilitasi sampai dengan tahun 2010 tersebut disajikan dalam Tabel 8.9.

Tabel 8.9. Prioritas program rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/kota	Tahun					TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	
1.	OKU, OKUT, dan OKUS	50.000	60.000	75.000	53.000	53.574	291.574
2.	OKI dan OI	100.000	120.000	150.000	175.000	69.234	614.234
3.	M. Enim dan Prabumulih	35.000	50.000	60.000	20.000	11.813	176.813
4.	Lahat dan Pagaralam	30.000	40.000	50.000	20.000	10.542	150.542
5.	Mura dan Linggau	50.000	60.000	75.000	50.000	32.062	267.062
6.	Muba dan Banyuasin	50.000	60.000	75.000	90.000	96.722	371.722
Total		315.000	390.000	485.000	408.000	273.947	1.871.947

Catatan: Luas lahan rehabilitasi sudah mencakup pembangunan hutan kota di masing-masing ibukota kabupaten/kota

Persoalan utama yang berkaitan dengan upaya perlindungan hutan di Sumatera Selatan meliputi penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Penebangan liar di hutan produksi eks HPH dan hutan konservasi masih belum dapat dihentikan karena medannya yang luas dan berat serta sarana dan prasarana pengawasan yang belum mendukung. Selain itu penegakan hukum di bidang kehutanan juga belum membuat jera pelaku pelanggaran kehutanan karena belum dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Perambahan hutan di hutan produksi dan hutan lindung telah berlangsung cukup lama dan sulit dicegah. Bertambahnya penduduk memerlukan lahan untuk pemukiman dan pertanian. Pembangunan perkebunan dalam skala besar memerlukan lahan yang luas, sehingga mendesak keberadaan kawasan hutan dan mendorong masyarakat membuka hutan.

Kebakaran hutan yang terjadi pada kemarau panjang tahun 1997 menyebabkan kerusakan hutan rawa cukup parah dan mengakibatkan kerusakan pada hutan tanaman. Untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan pengembangan kerjasama dengan Uni Eropa, melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat di daerah rawan kebakaran dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerjasama lokal, nasional, regional, dan internasional semacam ini tetap perlu digalang dan akan ditingkatkan di masa yang akan datang.

8.3. Pengembangan Pasca Panen dan Industri

Data terakhir yang tersedia menunjukkan terdapat 11 perusahaan industri pengolahan hasil hutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan persetujuan rencana produksi kayu olahan lebih dari 6000 m³. Industri pengolahan kayu tersebut sebagian masih menggantungkan pasokan bahan baku yang berasal dari hutan alam dan dari hutan rakyat di Sumatera Selatan maupun dari luar sebesar 819.913 m³. Jumlah bahan baku tersebut tidak seimbang dengan produksi kayu asal tebangan, hal itu menyebabkan terjadinya *over cutting* dan pencurian kayu dari kawasan konservasi. Akibatnya, jumlah industri kayu di Sumatera Selatan semakin turun setiap tahun akibat kurangnya pasokan bahan baku dan saat ini jumlah industri yang aktif sebanyak 96 buah dengan kapasitas produksi 819.913 m³ per tahun.

Berkembangnya permintaan pasar berdampak kepada tidak sinkronnya kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil hutan (sektor hilir) dengan kemampuan produksi bahan baku berupa kayu bulat (sektor hulu) yang menyebabkan terjadinya kesenjangan bahan baku. Kesenjangan antara produksi dengan bahan baku menyebabkan maraknya penebangan illegal yang terorganisir untuk "memenuhi" permintaan industri. Oleh karena itu, upaya mengembalikan potensi hutan pemerintah Sumatera Selatan akan

membangun dan mengembangkan pembangunan dan pengembangan HTI di Sumatera Selatan.

8.4. Pengembangan Sarana Produksi

Peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil produk kehutanan di Sumatera Selatan perlu didukung oleh sarana produksi yang memadai. Sarana yang dimaksud meliputi agro input sarana perbenihan dan pembibitan.

Ketersediaan sumber benih/bibit unggul komoditi kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memadai atau tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan. Kondisi di atas akan dibenahi melalui pembuatan benih-benih unggul yang menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan kehutanan.

Perbenihan tanaman hutan sesungguhnya telah diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Perbenihan Tanaman Hutan Nomor 85/Kpts-II/2001. Surat keputusan tersebut ditujukan untuk (i) Menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan; (ii) Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan; dan (iii) Menjamin kelestarian sumber benih dan pemanfaatannya. Pelaksanaannya akan dilakukan di kabupaten/kota yang meliputi lahan yang berpotensi di bagian sekitar kehutannya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tanaman hutan rakyat di luar kawasan hutan, penanaman turus jalan, pembuatan tanaman reboisasi di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Perbanyakkan bibit secara vegetatif lebih mudah dilaksanakan dan bibit diambil dari terubusan-terubusan yang berumur lebih kurang dua tahun pada tunggul bekas tebangan. Tunggul yang dipilih sebagai induk dari terubusan calon stek adalah tunggul yang berasal dari tegakan terpilih/tegakan plus. Terubusan yang akan dipakai sebagai bahan stek dilakukan dengan memilih terubusan yang sehat dan sudah berkayu. Untuk merangsang pertumbuhan akar, maka stek dapat diberi hormon tumbuh.

Pemerintah Sumatera Selatan akan membangun Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Balai tersebut akan melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi dan akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan pembibitan. Untuk itu akan ditetapkan beberapa lokasi di Sumatera Selatan sebagai kebun benih beberapa tanaman hutan (Tabel 8.10).

Ditinjau dari sisi jumlah dan luas, kebun bibit yang telah ada saat ini sudah memadai. Namun demikian, jika dihubungkan dengan luasnya areal yang perlu direhabilitasi di Sumatera Selatan (Tabel 8.9), maka kemampuan penyediaan bibit saat ini masih belum memenuhi kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan harus didatangkannya bibit

tanaman hutan dari Sumatera Selatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya operasional. Yang perlu lebih ditingkatkan adalah kapasitas produksi bibitnya. Pola yang dapat diterapkan adalah pola penanganan ketersediaan benih/bibit secara terpadu dan komprehensif serta melibatkan secara keseluruhan stakeholder yang bergerak di industri sektor kehutanan.

Tabel 8.10. Daftar kebun bibit yang telah ditetapkan SK Menhut No. 670/Kpts-II/1997

Jenis Tanaman	Lokasi	Luas (ha)	Pengelola
Acacia mangium <i>(Mangium)</i>	Kemampo-Musi Banyuasin	8.00	BPTH Palembang
	Gemawang Petak 5 BKPH Prabumulih	7.20	PT. Musi hutan Persada
	Setuntung, Petak 39 BKPH Pendopo	1.92	PT. Musi hutan Persada
	Setuntung, Petak 37 BKPH Pendopo	0.96	PT. Musi hutan Persada
	Martapura, Petak 109 BKPH Martapura	3.20	PT. Musi hutan Persada
	Serai, Petak 78 BKPH Pendopo	2.00	PT. Musi hutan Persada
	Setuntung, Petak 114 BKPH Pendopo	1.15	PT. Musi hutan Persada
	Register I, RPH Kemampo BKPH PKL Balai, KPH Musi Ilir	5.50	BPTH Palembang
	Petak 109,RPH Martapura BKPH Martapura, KPH Ogan Komering Ulu	3.20	PT. Musi hutan Persada
Sungkai <i>(Peronema canescens)</i>	Kemampo-Musi Banyuasin	5.50	BPTH Palembang
	RPH Pendopo, BKPH Pendopo, KPH Muara Enim	5.00	BPTH Palembang
	Register 1,RPH Kemampo, BKPH PKL Balai, KPH Musi Ilir	10.00	PT. Musi hutan Persada
Nyatoh (<i>Palaquium rostatum</i>)	RPH Subanjeriji BKPH Prabumulih KPH Muara Enim	5.00	BPTH Palembang
Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>)	Petak 22 & 27 RPH Teras BKPH Ma.Lakitan KPH Musi Rawas	5.00	PT. Musi Hutan Persada

Sumber : <http://www.dephut.go.id/informasi/rri/Benih/Kebun%20Benih.htm> . Diakses 13 Februari 2005

Untuk menunjang upaya tersebut, akan dikembangkan pemanfaatan iptek bidang perbibitan tanaman kehutanan, dan aspek pemuliaan genetik dan perbanyakannya spesies tanaman hutan dalam rangka menyeleksi, mengidentifikasi serta mengembangkan tipe lingkungan yang cocok untuk pertumbuhannya, serta sifat-sifat ketahanan tanaman hutan terhadap penyakit dan hama. Bagian-bagian yang perlu dikembangkan oleh BPTH khususnya adalah: (1) Genetik dan Tree Breeding; (2) Bioteknologi dan Cytogenetik Tanaman Hutan; (3) Silvikultur; dan (6) Perlindungan Hutan.

8.5. Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan

Berkembang dan meningkatnya daya saing sektor kehutanan baik sebagai sektor hulu penggerak ekonomi Sumatera Selatan maupun sebagai pemain dalam forum perdagangan internasional, perlu diimbangi dengan upaya pengembangan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, kelembagaan dan sumberdaya manusia, serta teknologi. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan riset dan pengembangan SDM kehutanan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Pada saat ini IPTEK kehutanan belum sepenuhnya menjadi kekuatan pembangunan kehutanan, karena kurangnya apresiasi terhadap inovasi IPTEK yang telah dihasilkan. Disadari juga bahwa litbang kehutanan masih belum secara optimal mendukung program-program pembangunan kehutanan.
- Masih terbatasnya perkembangan SDM sektor kehutanan juga memberatkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sumberdaya yang mendukung pengurusan hutan masih lemah antara lain terbatasnya jumlah personil terbatas, tingkat pendidikan dan dana pendukung. Ketersediaan SDM dan tingkat pelayanan aparat kehutanan kepada masyarakat juga rendah. Jumlah sumber daya manusia Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun 2003 adalah sebanyak 205 orang PNS. Berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV 9 orang, golongan III 122 orang, golongan II 50 orang dan golongan I 2 orang. Sumberdaya manusia sektor kehutanan yang berpendidikan S_3 1 orang, S_2 8 orang, S_1 Kehutanan 35 orang, S_1 non Kehutanan 18 orang, Sarjana Muda Kehutanan 90 orang, SLTP 2 orang dan SD 1 orang.

Jumlah tenaga pengamanan (Polisi Kehutanan) di Sumatera Selatan seluruhnya 191 orang dan dari sejumlah tersebut 20 orang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di Sumatera Selatan 63 orang dan 19 orang berada di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.

Sarana prasarana pengamanan hutan yang ada di Sumatera Selatan meliputi sebagai berikut : Pos pemeriksaan Terpadu (PPT) sebanyak 2 (unit), yaitu PPT Senawar Jaya di Kabupaten Musi Banyuasin dan PPT Pematang Panggang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, senjata api 161 pucuk, terdiri senjata genggam sebanyak 26 pucuk, senjata laras panjang 136 pucuk, kapal patroli 1 unit, speed boat 4 unit (115 PK) dan motor trail 22 unit.

Data statistik SDM, sarana dan prasarana pendukung kehutanan menyatakan jumlah dan kualitas SDM kehutanan di Sumatera Selatan masih belum optimal

mengakomodasi sebagian besar kawasan. Oleh karena itu, akan dilakukan peningkatan jumlah dan tingkat pendidikan SDM di bidang kehutanan.

Dalam tatanan organisasi penerapan otonomi daerah menyebabkan organisasi Departemen Kehutanan mengalami banyak perubahan baik dari sisi tata hubungan kerja pusat-daerah. Penitikberatan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota mengakibatkan pola hubungan menjadi Pusat-Propinsi-Kabupaten Kota dalam proses pengurusan hutan. Perbedaan persepsi dalam penerapan otonomi daerah telah menimbulkan kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan kewenangan Pusat-Propinsi-Kabupaten/Kota. Kerancuan tersebut telah menimbulkan **tumpang tindih** dan atau **kevakuman** pelaksanaan tugas dan fungsi antara Pusat-Propinsi-Kabupaten/Kota. Contoh kasus, tidak berjalannya fungsi penatagunaan dan pemanfaatan hutan serta penyuluhan kehutanan, lemahnya pengendalian peredaran hasil hutan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah yang tugas pokok fungsinya mirip UPT Pusat.

Upaya memperkuat kelembagaan kehutanan di daerah akan dicapai melalui penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pendampingan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan organisasi. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan secara sinergis dan koordinatif antara tingkat wilayah administrative mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kelembagaan akan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan kehutanan. Kelembagaan ini menyangkut organisasi, sumberdaya manusia (SDM), peraturan perundangan, sarana prasarana. Oleh karena itu aspek kelembagaan ini akan selalu ditingkatkan sehingga dapat mendukung kelestarian pengelolaan hutan secara keseluruhan. Untuk mencapai kondisi kelembagaan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah perlu ditetapkan target kondisi kelembagaan sebagai berikut:

1. Terbentuknya penataan organisasi yang dapat memperjelas tata hubungan kerja Pusat-Propinsi-Kab/Kota, sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih dan atau kevakuman pelaksanaan tugas dan fungsi,
2. Terbentuknya organisasi lingkup Dephut (Pusat dan UPT) serta daerah yang efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian pengelolaan hutan lestari,
3. Mendorong restrukturisasi BUMN sektor kehutanan, untuk mendukung era rehabilitasi dan konservasi,
4. Tersusunnya seluruh perangkat peraturan perundangan sebagai penjabaran dari UU No. 41 tahun 1999, antara lain: PP tentang Perencanaan Hutan, PP tentang Hutan Adat. Termasuk turunan dari PP berupa Kepmenhut mengenai beberapa kriteria dan standar yang dapat dijadikan dasar/pedoman bagi implementasi kegiatan di lapangan yang diselaraskan dengan desentralisasi sektor kehutanan,

5. Terwujudnya penyusunan rencana-rencana kehutanan yang komprehensif yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan,
6. Dilaksanakannya Litbang kehutanan yang mendukung program-program pembangunan kehutanan melalui kerjasama yang aktif antara peneliti calon pengguna hasil litbang, serta intensifnya dukungan terhadap penyebarluasan dan pengembangan jejaring IPTEK,
7. Termanfaatkannya skema-skema kerjasama internasional, sehingga pendanaan internasional dapat benar-benar mendukung proses pembangunan kehutanan,
8. Terselenggaranya pengembangan pendidikan/pelatihan serta penyuluhan di lingkungan Dephut maupun masyarakat. Serta penyebaran SDM kehutanan yang proporsional,
9. Meningkatkan upaya penegakan hukum dengan mengefektifkan pengawasan dan pengendalian.
10. Tersedianya data/informasi yang memadai dan selalu *up to date*.

Upaya-upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat akan dilakukan dan memberikan dampak positif yang diharapkan, sehingga masyarakat menyadari pentingnya keberadaan hutan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya mendukung pembangunan kehutanan harus ditingkatkan. Dalam hal peraturan pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan, sektor kehutanan bergerak dipayungi oleh peraturan perundangan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten/kota.

Departemen Kehutanan telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan sebagai penjabaran UU No. 41 tahun 1999, yaitu antara lain PP. No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan; PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota; PP No.63 tahun 2002 tentang Hutan Kota; dan Selain itu telah terbit beberapa Kepmenhut untuk mendukung Pelaksanaan PP tersebut. Selain itu saat ini sedang diproses beberapa RPP lain sebagai penjabaran dari UU No. 41 tersebut antara lain: RPP Perencanaan Kehutanan, RPP tentang Hutan Adat, RPP tentang Rehabilitasi Hutan. Untuk ke depan perencanaan tersebut akan lebih diaplikasikan dalam pembangunan hutan.

Implementasi peraturan perundangan akan dilakukan penegakan hukum melalui pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara reguler dan khusus, hasil penegakan hukum terlihat nyata. Disamping peraturan perundangan, dukungan rencana-rencana kehutanan sangat diperlukan untuk mensinkronkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dirancang. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana kehutanan harus sesuai dengan *master plan* pembangunan kehutanan.

8.6. Pengembangan Pemasaran

Ekonomi sektor kehutanan dikategorikan kepada dua kelompok yaitu kelompok usaha besar (skala industri) dan kelompok usaha rakyat (menengah dan kecil). Oleh karena itu target yang diinginkan: 1) Untuk kelompok usaha besar adalah termanfaatkannya peluang pasar internasional dengan keunggulan kompetitif hutan Sumatera Selatan dan kondisi alam yang menunjang. 2) Untuk kelompok usaha rakyat adalah tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan secara langsung ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan sesuai dengan kemampuannya secara tersendiri maupun sebagai bagian dari kelompok usaha besar. Untuk itu akan diciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perbaikan dan peninjauan kembali sistem pengelolaan hutan produksi, sistem pengelolaan hutan lindung, serta sistem pengelolaan hutan konservasi beserta aturan dan kelembagaannya.

Kecenderungan masyarakat dunia yang semakin sadar akan pentingnya kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya akan menyebabkan antara lain meningkatnya permintaan akan jasa hutan. Hal ini terlihat dari upaya dunia dalam menyelesaikan masalah polusi dan mempertahankan keberadaan hutan melalui pembahasan konsep-konsep antara lain *Clean Development Mechanism (CDM)*, *Debt for Nature Swap (DNS)* dan sebagainya. Permintaan hasil hutan di dalam maupun di luar negeri yang cenderung meningkat dan aspek penting yang berkaitan dengan peluang pasar ialah upaya promosi. Promosi yang akan dilakukan harus mencakup dua aspek penting, berkaitan dengan peluang investasi di bidang kehutanan, dan peluang pemasaran produk kehutanan.

Peluang investasi akan disatukan dengan program rehabilitasi lahan melalui pengembangan hutan tanaman industri, terutama di lahan-lahan yang tergolong kritis. Promosi produk kehutanan ditujukan untuk mencari pasar baru, penetrasi pasar untuk produk baru, pasar dengan produk yang berkualitas baik dengan tekanan pada pengembangan kehutanan dan produk kehutanan berbasis ramah lingkungan (*eco-lebelling*).

Produk jasa yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan (seperti air, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan) mempunyai manfaat yang besar sebagai penyangga kehidupan dan mampu mendukung sektor ekonomi lainnya. Sebagian besar produk jasa tersebut tergolong kedalam manfaat yang tidak tergantikan (*intangible*). Berdasarkan hasil penelitian, nilai ekonomi jasa jauh lebih besar dari nilai produk kayu. Di Sumatera Selatan memiliki seperti wisata air di Kota Palembang, perkebunan teh di Pagar Alam, Taman Nasional Sembilang di Banyuasin, dan Taman Nasional Kelinci Sebelat di Musi Rawas ke depan akan dimanfaatkan dan diupayakan secara maksimal. Pemanfaatan di Hutan Lindung juga akan dilakukan rehabilitasi yang dilaksanakan dengan

sumber dana dalam dan luar negeri, sedangkan kegiatan di luar kawasan HL yang dapat mendukung kelestarian HL akan dilaksanakan melalui program penghijauan, HKM, HR, dan pengendalian perladangan berpindah.

Promosi lain yang akan dikembangkan ialah pengembangan rumah dagang dan pengembangan situs internet (*website*). Rumah dagang yang dikembangkan bersifat akan melainkan digabungkan dengan sektor lainnya, seperti perkebunan, tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan. Internet mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan sistem lainnya karena bisa diakses setiap saat dan oleh siapapun dan darimanapun. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berskala besar dan profesional.

8.7. Pengembangan Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan sektor kehutanan di Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana jalan produksi, listrik, dan telekomunikasi. Pembangunan kehutanan di Propinsi Sumatera Selatan meliputi pembangunan HTI, pengembangan ekowisata, dan hutan kemasayarakatan. Kondisi jalan ke daerah-daerah sentra kehutanan tersebut akan ditingkatkan untuk memekan biaya transportasi. Pembangunan tersebut akan berdampak positif untuk kelancaran pemasaran hasil komoditi kehutanan, pengembangan wilayah secara keseluruhan. Pembangunan prasarana jalan sebagai penunjang mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah kabupaten/kota maupun investor di bidang kehutanan.

Selain itu, penambahan jaringan telekomunikasi, khususnya untuk daerah-daerah potensi pengembangan investasi yang belum terjangkau sarana komunikasi (*Blank Spot*) perlu juga ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kemitraan antara Pemda dengan operator Telkom serta peningkatan stasiun pemancar televisi.

Untuk mengatasi masalah kelangkaan energi listrik, perlu dirintis kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah, PLN dan swasta melalui pembangunan pembangkit listrik kecil - menengah, berdasarkan rencana umum listrik daerah. Mengenai regulasi perijinan dan penetapan tarif regional perlu dibahas lebih lanjut. Selain itu perlu diupayakan pula pengembangan alternatif sumber daya baru energi listrik yang bahan bakunya dari batubara kalori rendah, panas bumi dan tenaga uap.

IX. RENCANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

9.1. Kondisi Sumberdaya Air Saat Ini

Penduduk yang makin banyak konsekwensinya memerlukan air yang juga banyak. Pendayagunaan sumberdaya air yang intensif berakibat pada degradasi fungsi lingkungan yang dapat menganggu kelangsungan hidup masyarakat. Fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pendangkalan alur sungai, degradasi dasar sungai, pencemaran sungai, berkurangnya kapasitas tampung sumber air karena pemukiman dan tumpukan sampah padat merupakan bentuk dari degradasi fungsi lingkungan.

Air secara alamiah tidak ada yang betul-betul murni. Kualitas air secara alamiah akan berbeda pada setiap ruang dan waktu yang berbeda. Sumber air yang berada di atas maupun di bawah permukaan tanah kualitasnya ditentukan oleh sifat fisik, kimia dan kandungan bakteri di dalamnya. Daerah Aliran Sungai Musi dengan 10 sungai tersebar di seluruh wilayah Provinsi, atau dengan panjang 700 km dengan luas wilayah mencapai 55.900 km² merupakan sumber utama air untuk kehidupan di Sumatera Selatan. Beberapa daerah yang sulit memperoleh sumber air permukaan mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan airnya. Untuk memenuhi kriteria kualitas air minum, air hujan itu perlu ditingkatkan kandungan mineralnya.

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi terletak di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah DAS Musi mencapai 6.267.216 ha. Dengan distribusi masing-masing luas menurut administrasi pemerintahan Provinsi yaitu di Provinsi Sumatera Selatan 6.006.519 ha, di Provinsi Bengkulu 218.495 ha serta di Provinsi Jambi 42.202 ha. Luasan, iklim dan anak sungai pada Daerah Aliran Sungai Musi disajikan pada Tabel 9.1.

Sumber utama air untuk keperluan kehidupan adalah air sungai, air waduk, air sumur, air mataair, air hujan, air di lahan gambut, dan air laut (pasang surut air laut). Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak di dataran tinggi hingga dataran rendah memiliki beberapa sumber utama air tersebut. Daerah Aliran Sungai Musi dengan anak-anak sungainya, merupakan sumber air utama bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari (Tabel 9.2).

Bentang lahan gambut di Sumatera Selatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin merupakan daerah tampungan air alami. Air gambut mempunyai sifat fisik dan kimia yang

khas, dan dalam pemanfaatannya sangat tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan seperti kehutanan, perkebunan, pertanian dan keperluan domestik.

Tabel 9.1. Sebaran tipe iklim berdasarkan sub DAS pada wilayah DAS Musi

No	Sub DAS	Luas Sub DAS (HA)	Tipe Iklim
1	Komering	833.385	B
2	Lematang	996.262	B
3	Musi Hulu	487.170	A
4	Rawas	920.460	A
5	Lakitan	289.962	A
6	Ogan	935.882	A
7	Kelingi	223.963	A
8	Kikim	173.185	A
9	Semangus	565.814	A
10	Batanghari Leko	381.799	A
11	Musi Hilir	459.334	A
Luas Total		6.267.216	

Sumber: The Study on Comprehensive Water Management of Musi River Basin, 2003.

Tabel 9.2. Nama dan panjang sungai daerah aliran Sungai Musi

No	Sub DAS	Nama Sungai Utama	Panjang (Km)	Anak Sungai
1	Komering	Komering	145.45	Saka, Penaku, Gilas, Lempuing
2	Lematang	Lematang	97.56	Enim, Selangis, Endikat, Lengi
3	Musi Hulu	Musi Hulu	51.71	Keruh, Lintang, Kungku
4	Rawas	Rawas	67.23	Rupit, Liam, Klumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam
5	Lakitan	Lakitan	70.08	Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai
6	Ogan	Ogan	69.33	Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laya
7	Kelingi	Kelingi	49.53	Pring, Beliti, Noman, Kati
8	Kikim	Kikim	38.81	Lingsing, Pengi, Cawang
9	Semangus	Semangus	60.12	Keruh, Teras, Sialang, Temuan, Sembuta
10	Batanghari Leko	Batanghari Leko	98.75	Kapas, Menanti, Lain
11	Musi Hilir	Musi Hilir	174.24	Gasing, Telang, Bulan, Padi, Saleh Upang, padang
Jumlah			928.81	

Sumber : The Study on Comprehensive Water Management of Musi River Basin, 2003.

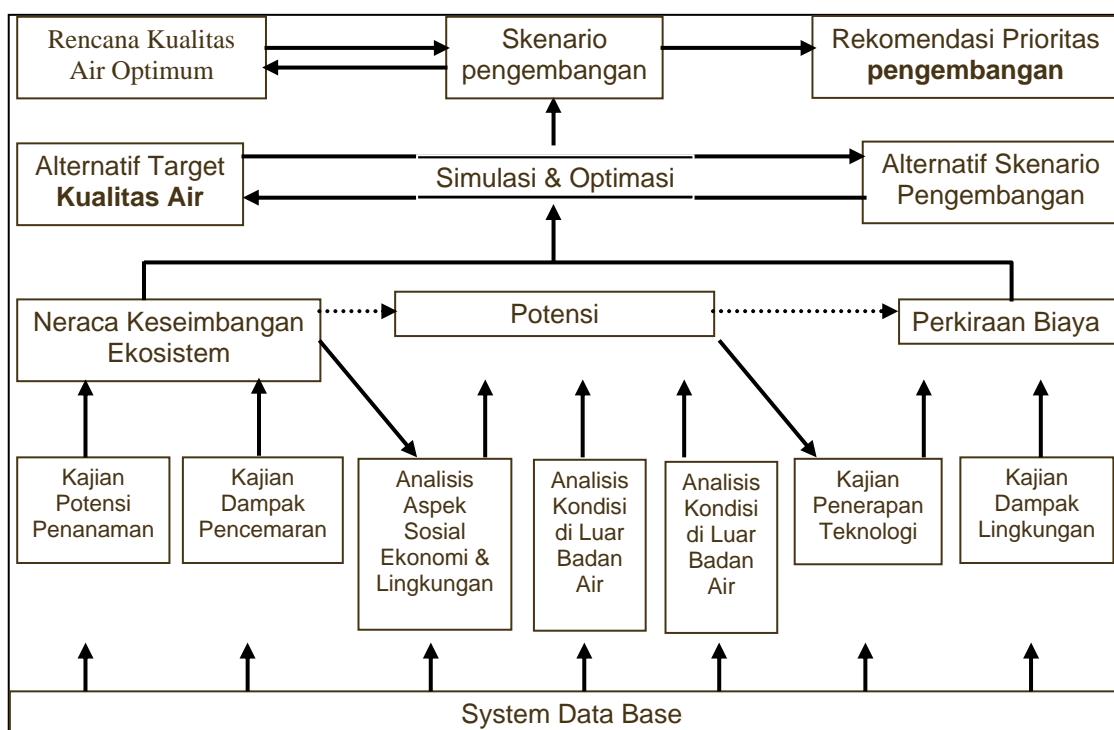
Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 36,9/2 hingga 413,6/24 Mm sepanjang tahun 2004 (Badan Meteorologi dan Geofisika, Kenten Palembang. 2005). Curah hujan setiap bulan cenderung turun, berfluktuasi tanpa bisa diprediksi sementara pada bulan Nopember merupakan bulan dengan curah hujan paling tinggi.

Air laut yang terbentang di sepanjang pantai bagian timur merupakan sumber air utama kegiatan pertanian di daerah pasang surut, terutama untuk budidaya tambak udang

dan ikan. Sifat fisik dan kimia air laut mempunyai karakteristik khas, oleh karena itu pemanfaatannya juga spesifik untuk aktifitas tertentu.

Air tanah dan sungai adalah sumber air minum yang sangat penting bagi penduduk di desa maupun di kota. Air sungai di beberapa daerah dimanfaatkan untuk kegiatan industri diantaranya pabrik pulp, semen, batubara, pupuk pusri dan pertamina. Disamping itu Sumatera Selatan juga mempunyai beberapa sumber air berupa waduk alami maupun buatan yang berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian, industri dan kegiatan lainnya.

Kualitas air sungai umumnya belum memenuhi kualitas air baku, terutama air yang berada di wilayah lahan gambut dan rawa pasang surut. kualitas air yang tidak memenuhi standar perlu perlakuan untuk mencapai kualitas yang diharapkan (Gambar 9.1).



Gambar 9.1. Bagan alir pengembangan kualitas air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah no. 82 Tahun 2001 maka akan semakin banyak air baku yang tidak memenuhi Baku Mutu Sumber Air. Rendahnya kualitas air akan berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut diantaranya menyebabkan penyakit diare, kulit dan infeksi mata.

9.2. Potensi dan Peranan Sumberdaya Air

Di Sumatera Selatan sumber air dimanfaatkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, pembangkit tenaga listrik, industri, sarana transportasi air, rekreasi, pengelontoran. Pengelolaan sumberdaya air ialah sangat penting dalam mempertahankan keberadaan atau kelestariannya. Ada lima misi pengelolaan sumberdaya air yaitu:

- (1) Konservasi atau perlindungan Sumber Daya Air.
- (2) Pendayagunaan sumber daya air, melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Air.
- (3) Pengendalian daya rusak air.
- (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah.
- (5) Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi.

Perkiraan pemanfaatan air di Sumatera Selatan untuk konsumtif pada tahun 2003 sekitar 4.773 juta m³ (Tabel 9.3). Ketersediaan air permukaan sekitar 73.700 juta m³. Oleh karena itu masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk memanfaatkan cadangan air permukaan tersebut.

Tabel 9.3. Penggunaan air konsumtif untuk berbagai keperluan di Sumatera Selatan.

Penggunaan Air Untuk	Jumlah Pemakaian Air (000 m ³ /tahun)	Jumlah Pemakaian Air (%)
Domestik	93.600	2,0
Industri	365.000	7,7
Pertambangan	115.000	2,4
Irigasi	2.760.000	57,8
Lahan Rawa	920.000	19,3
Aquakultur	504.000	10,6
Turisme	150	0
Peternakan	14.900	0,2
Tenaga Listrik	0	0
Total	4.772.650	100

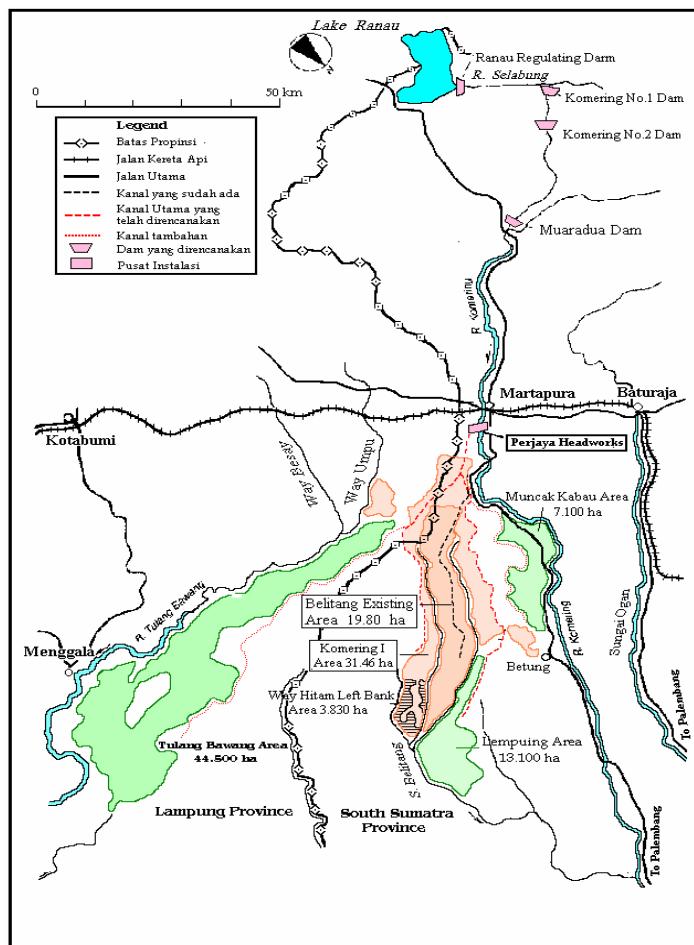
Sumber: The Study on Comprehensive Water Management of Musi River Basin, 2003.

Pengembangan sektor industri di masa mendatang masih mungkin dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan ketersediaan air di wilayah Sumatera Selatan. Prediksi perkembangan industri dan pemakaian air di Palembang tahun 2003 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.4.

Diperkirakan pemakaian air akan meningkat seiring dengan pertambahan kegiatan diberbagai sektor yang memerlukan air. Mahalnya harga bahan bakar minyak dan gas, akan mendorong penggunaan air sebagai sumber energi. Air di beberapa daerah telah

dimanfaatkan untuk: irigasi teknis, irigasi semi teknis, industri, perikanan, perikanan air deras dan tambak serta PDAM. Penggunaan air untuk keperluan air bersih (PDAM) di Provinsi Sumatera Selatan umumnya bersumber dari air sungai (Tabel 9.5).

Irigasi teknis yang dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas (Daerah Irigasi Tugumulyo) dan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Daerah Irigasi Belitang) memanfaatkan sumber air sungai untuk keperluan kegiatan pertanian (Gambar 9.2).



Gambar 9.2. Daerah irigasi Belitang, Ogan Komoring Ulu Timur

Tabel 9.4. Prediksi penggunaan air dari tahun 2003 sampai 2020 (000 m³/th)

Pemakaian Air	Tahun 2003	Tahun 2005	Tahun 2010	Tahun 2020
Domestik	93.000	141.000	190.000	296.000
Industri	365.000	405.000	462.000	602.000
Tambang	115.000	133.000	159.000	226.000
Aquakultur	504.000	652.000	743.000	798.000
Tenaga Air	0	0	898.000	898.000
Turisme& Perternakan	15.050	--	--	--
Total	1.092.650	1.331.000	2.452.000	2.820.000

Sumber : The Study on Comprehensive Water Management of Musi River Basin, 2003

Tabel 9.5. Pengelolaan air bersih PDAM di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kotamadya	Air Bersih (m3)
1	Ogan Komering Ulu	1.424.989
2	Ogan Komering Ilir	944.294
3	Muara Enim	2.360.932
4	Lahat	1.274.039
5	Musi Rawas	1.551.746
6	Musi Banyuasin	949.180
7	Banyuasin	522.856
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-
10	Ogan Ilir	-
11	Palembang	29.750.675
12	Prabumulih	711.894
13	Pagar Alam	396.143
14	Lubuk Linggau	160.198

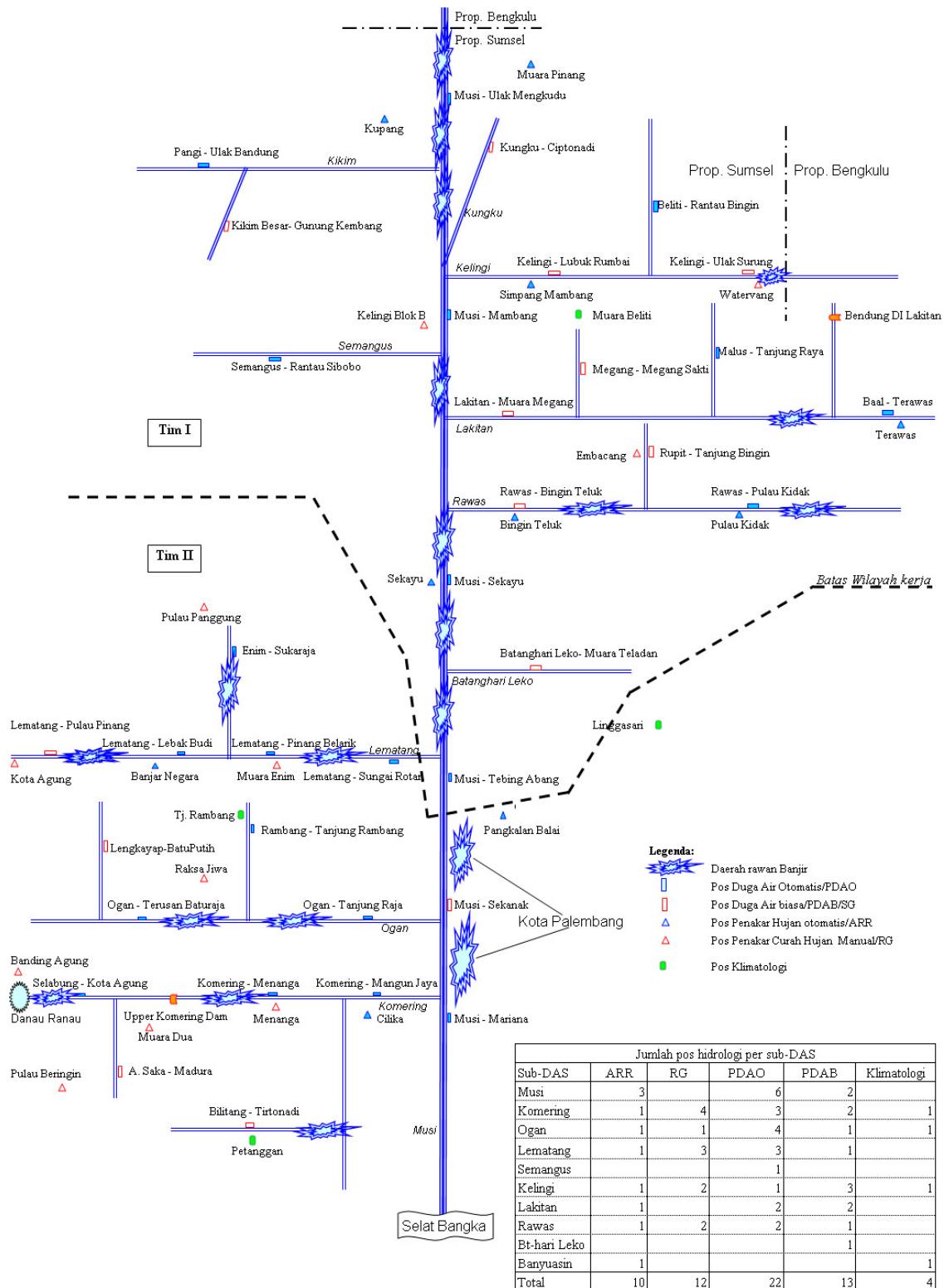
Sumber : The Study on Comprehensive Water Management of Musi River Basin, 2003

9.3. Pokok Bahasan Sumberdaya Air

Pokok bahasan Sumberdaya air berdasarkan ruang dapat dikelompokkan menjadi daerah hulu, tengahan dan hilir (Gambar 9.3). Masing-masing bahasan meliputi lima aspek yaitu perencanaan, penggunaan air, pengendalian banjir, lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Penggunaan air perlu mempertimbangkan tata guna air, sumber air, badan air. Permasalahan dalam penyediaan air, penggunaan air, dampak pengembangan sumberdaya air, budidaya perairan, transportasi air, parawisata, MCK. Sanitasi air menjadi suatu kegiatan yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemanfaatan air. Air juga dapat menyebabkan berbagai masalah jika terjadi banjir, erosi tebing sungai. Oleh karena itu harus ada upaya pengendalian banjir. Selanjutnya juga perlu kegiatan penyuluhan untuk Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan, kualitas dan kuantitas sumberdaya air, dampak pembukaan perkebunan dan pertanian terhadap sumberdaya air, dampak melakukan ladang berpindah. Untuk kelangsungan kelestarian sumberdaya air perlu peraturan pengelolaan air, Kelembagaan pengelola air, penelitian dampak sosial dan budaya oleh adanya proyek irigasi, distribusi air di masyarakat, peran wanita dalam penyediaan air serta jangkauan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan air.

Skematik Jaringan Pos Hidrologi dan Lokasi Daerah Rawan Banjir
Balai PSDA WS Musi



Gambar 9.3. Skematik pos hidrologi dan lokasi daerah rawan banjir (Balai Musi, 2005).

9.4. Pengaruh Perubahan Lingkungan terhadap Ketersediaan Air dan Dampak Lainnya

Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia khususnya yang melakukan kegiatan di hutan dan di sekitar hutan, perubahan iklim dan pembangunan industri akan memberi pengaruh terhadap sistem lingkungan yang mendukung proses daur hidrologi. Perubahan-perubahan itu dapat menyebabkan banjir, longsor, kekeringan dan pencemaran air serta intrusi air laut.

Debit sungai yang berlebihan terutama di musim penghujan akan berdampak pada banjir. Bahan ikutan banjir adalah partikel tanah yang mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah rendah. Banjir dan tanah longsor sering terjadi bersamaan. Tanah longsor biasa terjadi pada lahan yang labil dengan kemiringan yang tajam atau terjal. Pada kondisi tertentu kekeringan atau kekurangan air dapat terjadi akibat pengaruh iklim ekstrim, kelebihan pemakaian air tanah atau air irigasi dan non irigasi, terjadinya kerusakan sarana dan prasarana saluran air serta sedimentasi di sungai.

Daerah Irigasi Tugumulyo dan Belitang berpotensi mengalami kekeringan terutama pada lahan pertanian paling jauh dari saluran air. Oleh karena itu peranan P3A dan IP3A perlu diaktifkan. Disamping itu pencemaran air oleh bahan organik dan an-organik terus terjadi dan apabila tidak dilakukan pengendalian terhadap pencemaran tersebut, maka pencemaran dan kerusakan kualitas air akan menjadi masalah yang penting. Untuk mengatasi pencemaran itu perlu melaksanakan ketentuan-letentuan yang telah ditetapkan ketika membuang limbah cair ke sungai, atau melakukan pengolahan limbah, dan menugaskan aparat untuk memantau atau memeriksa limbah.

Air laut merupakan sumber air untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Natrium dalam air laut yang tinggi kosentrasi berpengaruh terhadap sifat fisik dan kimia air. Intrusi air laut dapat mencapai beberapa kilometer menuju daerah daratan. Intrusi tersebut dapat dihindarkan dengan menanam vegetasi di sepanjang pesisir pantai.

9.5. Kelembagaan Sumberdaya Air

Kelembagaan sumberdaya air yang bersifat kompleks mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu kerangka acuan hukum maupun peraturan yang ada harus diberdayakan.

- (1) Dilaksanakannya peraturan yang mengharuskan pembayaran layanan air irigasi jumlah besar (*bulk irrigation water supply*) dan pembayaran pembuangan air limbah perkotaan dan industri,
- (2) Pemberdayaan institusi sektor sumberdaya air, perencanaan investasi, pengelolaan, pengendalian pencemaran air,

- (3) Koordinasi antara instansi-instansi pemerintah dalam menangani masalah-masalah sumberdaya air harus ditingkatkan,
- (4) Tingkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi,
- (5) Pengalihan sumberdaya manusia dari pemerintah Pusat kepada Provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaiki kinerja kelembagaan.
- (6) Tingkatkan mekanisme konsultasi antara stakeholder dengan perwakilan dalam institusi pengambilan keputusan sektoral.

Pembaharuan kerangka kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan wilayah sungai yang dilakukan meliputi: Pembaharuan Peraturan Pemerintah dan kelembagaan pengelolaan wilayah sungai dan air bawah tanah, bertujuan untuk menghasilkan produk

- (1) PP tentang Peran dan Keterlibatan Stakeholder dalam Pengelolaan SDA
- (2) Revisi Kepmen PU No. 67/1993 tentang PTPA & PPTPA menjadi Dewan Provinsi SDA dan Dewan Daerah Wilayah Sungai
- (3) Pembentukan Dewan Provinsi SDA dan Dewan Daerah Wilayah Sungai
- (4) Pedoman Teknis Alokasi Air
- (5) Pedoman Teknis Pembuangan Limbah Cair
- (6) Pedoman Teknis Manajemen Kekeringan
- (7) Pedoman Teknis Penggunaan Konjungtif Air Permukaan dan Air Tanah
- (8) Pedoman Teknis Pemantauan Kualitas Air
- (9) Pedoman Teknis Pengelolaan DAS Terpadu
- (10) Pembentukan Balai PSDA

Mengembangkan kerangka korporasi pengelolaan wilayah sungai yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk:

- (1) PP tentang Pembentukan Korporasi Wilayah Sungai (BUMN/BUMD)
- (2) PP tentang Pembiayaan OP Prasarana Pengairan (Revisi PP No. 6/1981)
- (3) PP tentang Pembentukan PJT I dan PJT II
- (4) Pedoman Teknis Pembentukan Korporasi Wilayah Sungai
- (5) Pedoman Teknis Iuran Penggunaan Air (IPA)
- (6) Pedoman Teknis Iuran Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian pencemaran meliputi antara lain:

- (1) Menyusun rancangan peraturan dan/atau keputusan berkenaan dengan pengendalian pencemaran air dan pelaksanaan PROKASIH di daerah
- (2) Penatalaksanaan dan pengelolaan PROKASIH di daerah

- (3) Menyusun Program Kerja Daerah PROKASIH 2005
- (4) Pendayagunaan sumberdaya manusia aparatur
- (5) Meningkatkan sarana penunjang kerja pelaksanaan PROKASIH 2005
- (6) Meningkatkan mutu pengelolaan data publikasi dan pelaporan
- (7) Meningkatkan intensitas dan volume kegiatan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

Peningkatan sumberdaya kelembagaan antara lain:

- (1) Tata Laksana. Pada aspek ini yang paling utama ialah terjalin kerjasama, keserasian, dan keselarasan antar instansi dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air. Kerjasama tersebut memberikan hasil yang sinergis dan mutualistik bagi tiap instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian pencemaran air di tingkat daerah yang telah ditetapkan harus diterapkan, seperti peraturan mengenai peruntukan baku mutu air, baku mutu limbah cair, dan laboratorium yang ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan pengendalian pencemaran air. Merumuskan rancangan Peraturan Daerah mengenai ketentuan perizinan pembuangan limbah cair ke dalam sungai dan ketentuan retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sungai.

9. 6. Aspek Legalitas/Peraturan/Kebijakan Sumberdaya Air

Landasan pertama program pengelolaan konservasi sumber daya alam ialah: Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, antara lain tertuang pada Bab II pasal 6 yaitu: Pemerintah membuat rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan secara serbaguna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:

- (1) Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- (2) Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi dan pariwisata.

Secara Nasional telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 1974.

Ketentuan tentang sempadan sungai sudah ditetapkan melalui beberapa aturan yaitu: Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung PP No. 35/1991 tentang Sungai, dan Kepmen PU No. 63/1993 tentang Garis Sempadan Sungai. Walaupun ketentuan-ketentuan itu cocok dengan histori, namun dalam kehidupan sosial masyarakat

tertentu seringkali sulit diterapkan. Oleh karena itu harus dilakukan pendekatan khusus sesuai budaya setempat sehingga program tersebut dapat dilaksanakan.

Keputusan Menteri Pertanian No. 54/Kpts/ Um/2/1972 tentang Pohon-pohon di Kawasan Hutan yang dilindungi, Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/2/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, Keputusan Menteri Kehutanan No. 353/Kpts-II/1986 tentang Penerapan Radisu/jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan/Hutan Cadangan dan Hutan lainnya, Keputusan Menteri Kehutanan No. 261/Kpts/II/1990 tentang Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/1972 tentang pohon-pohon di kawasan Hutan yang dilindungi dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 837/Kpts/II/1990 tentang Larangan Penebangan Pohon di 100 meter kiri kanan Sungai dan radius 200 meter dari Mata Air.

Reformasi kebijakan sumberdaya air untuk menangani permasalahan sumberdaya air dan kelemahan-kelemahan stuktural melalui penyesuaian atas kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dan kelembagaan agar lebih kondusif dalam pencapaian ketahanan pangan, pemanfaatan air dan tanah yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan air sumber air (*aquatic environment*) menjadi prioritas untuk diterapkan.

Tujuan spesifik dari reformasi kebijakan sektor sumberdaya air ialah sebagai berikut:

- (1) Mewadahi aspirasi dan kepentingan semua unsur stakeholders melalui pembentukan forum koordinasi dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya air di tingkat nasional, provinsi dan wilayah sungai,
- (2) Melaksanakan kebijakan yang disepakati oleh semua sektor melalui penetapan Kebijakan Air Nasional (*National Water Policy*) yang mengikat untuk mengarahkan perencanaan, pembuatan program, pendanaan, manajemen dan regulasi sektor,
- (3) Memperbaiki sistem informasi pengelolaan sumberdaya air nasional dan sistem data penunjang keputusan beserta jaringannya,
- (4) Menumbuh-kembangkan manajemen terpadu dan regulasi sumberdaya air wilayah sungai-wilayah sungai,
- (5) Membentuk organisasi-organisasi pengelolaan sumberdaya air yang efektif dalam wilayah sungai-wilayah sungai strategis,
- (6) Menjamin alokasi air yang adil dan efisien melalui pemberlakuan sistem hak guna air,
- (7) Menegakkan hukum dalam pengendalian pencemaran air melalui pembentukan kerangka kerja instusi,

- (8) Memberdayakan organisasi petani yang transparan dengan kewenangan penyelenggaraan dan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang diserahkan kepadanya,
- (9) Menjamin keberlanjutan pendanaan dan efisiensi kegiatan O&P dan rehabilitasi jaringan irigasi,
- (10) Reorganisasi adminitrasi layanan irigasi.

Konservasi dan pelestarian sumberdaya air perlu dukungan kebijakan nasional. Kebijakan Nasional yang diperlukan dalam upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya air, meliputi:

(1) Kebijakan bidang pelestarian sumberdaya air

Dalam rangka untuk mewujudkan upaya pengembangan konservasi dan pelestarian sumberdaya air perlu beberapa kebijakan, antara lain:

- o Peraturan pemerintah tentang konservasi dan pelestarian sumberdaya air
- o Peraturan pemerintah tentang sempadan air, dan
- o Pedoman pelaksanaan konservasi dan pelestarian sumberdaya air

(2) Kebijakan bidang pengelolaan kualitas air

Dalam rangka untuk dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air diperlukan beberapa kebijakan, antara lain:

- o Peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran
- o Standar mutu dari berbagai jenis air dan air limbah
- o Pedoman tentang penarikan beban biaya pencemaran
- o Pedoman penyusunan rencana induk peningkatan dan pengelolaan kualitas air
- o Pedoman pelaksanaan pengelolaan kualitas air
- o Pedoman penyusunan database kualitas air dan statistik kualitas air
- o Pedoman pelaksanaan pemantauan kualitas air
- o Pedoman penetapan indeks kualitas air, indeks kualitas lingkungan, dan
- o Pedoman penetapan indeks pencemaran.

(3) Kebijakan bidang pengamanan prasarana pengairan

(4) Kebijakan bidang keterpaduan lintas sektoral

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan lintas sektor dalam upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya air maka diperlukan beberapa kebijakan, antara lain:

- o Peraturan pemerintah tentang pemanfaatan sumberdaya air, dan
- o Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat dan swasta

(5) Kebijakan bidang monitoring dan evaluasi manfaat

Untuk melaksanakan upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya air perlu dilakukan monitoring dan evaluasi manfaat yang didukung kebijakan, antara lain:

- o Pedoman pemantauan efektivitas pelaksanaan dan evaluasi manfaat konservasi dan pelestarian sumberdaya air, dan
- o Pedoman pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi manfaat konservasi dan pelestarian sumberdaya air.

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya pelestarian kualitas air, harus dilakukan pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah-langkah kegiatan yang perlu dilaksanakan antara lain:

- (1) Pemanatapan tugas, tanggung jawab dan wewenang organisasi pengawasan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pengawasan pelestarian kualitas air.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan
- (4) Mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam kegiatan pengawasan.
- (5) Memberikan kewenangan yang memadai kepada organisasi pengawasan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat kebijakan tentang sumberdaya air dan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut merupakan landasan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya air dan lingkungan hidup. Masing-masing kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.6 dan 9.7.

Tabel 9.6. Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang sumberdaya air

No	Kebijakan/Peraturan	Objek yang ditangani
1	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 4 Tahun 2005	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 5 Tahun 2005	Perubahan atas Perda Provinsi Sumatra Selatan Nomor: 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 9 Tahun 2005	Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 9.7. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan tentang Lingkungan Hidup

No	Kebijakan/Peraturan	Objek yang ditangani
1	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No : 18 Tahun 2005	Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
2	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No : 16 Tahun 2005	Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai
3	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No : 17 Tahun 2005	Baku Mutu Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan
4	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No : 16 Tahun 2005	Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domesuk dan Pertambangan Batubara

9.7. Konservasi Sumberdaya Air

Pokok-pokok pikiran konservasi dan pelestarian sumberdaya air dibagi menjadi dua landasan yaitu landasan hukum dan landasan konsepsional.

A. Landasan Hukum

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan selanjutnya tersirat dalam pasal 10 UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan bahwa air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya mempunyai fungsi yang bermuara pada kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Keppres 134 Tahun 1999 Kantor Menteri Negara Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan fungsi perumus kebijakan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan serta mengkoordinir dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang sumberdaya air.

B. Landasan Konsepsional

Konservasi dan pelestarian sumberdaya air bertujuan mempertahankan lingkungan atau ekosistem yang serasi dan seimbang sehingga memungkinkan terus berlangsungnya interaksi harmonis antar keanekaragaman hayati yang hidup di bumi, termasuk manusia.

Mengingat berbagai karakteristik sumberdaya air maka dalam penyusunan konsep konservasi dan pelestarian sumberdaya air perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dalam suatu wilayah sungai dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis dan dengan

mempertimbangkan semua kondisi yang ada dalam wilayah sungai tersebut, antara lain mencakup:

- (1) Batasan hidrologi tata aliran air
- (2) Batasan administrasi pemerintahan
- (3) Daerah potensi konservasi dan pengembangan sumberdaya air
- (4) Daerah potensi pencemaran dan pemanfaatan air, dan
- (5) Batasan daerah pengelolaan sumberdaya air

Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya air ialah:

- (1) Konservasi dan pelestarian sumberdaya air harus diawali dengan studi penyusunan rencana makro sebagai acuan dasar,
- (2) Pelaksanaan konservasi dan pelestarian sumberdaya air harus dilakukan terkoordinasi antar sistem dan antar wilayah,
- (3) Keberhasilan upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya air sangat tergantung dari dukungan peran serta masyarakat dan swasta

Pengelolaan sumberdaya air diselenggarakan berdasarkan pada prinsip satu sungai, satu rencana induk dari satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan.

- (1) Untuk terselenggaranya pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumberdaya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai.
- (2) Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui perlibatan peran seluas-luasnya semua stakeholders.
- (3) Penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumberdaya air diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan semua stakeholders melalui perwakilan dalam forum koordinasi berdasarkan 7 azaz, yaitu keseimbangan antara fungsi dengan nilai ekonomi, pemanfaatan umum, kelestarian, keadilan, keterpaduan, kemandirian, keterbukaan dan akuntabilitas
- (4) Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang mandiri, profesional dan akuntabel;
- (5) Masyarakat dan semua stakeholders harus dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan sistem dalam meningkatkan konservasi air akan dicapai melalui kegiatan penghijauan, reboisasai, pemetaan lokasi daerah resapan, penyelamatan danau, situ, rawa, pembangunan sumur resapan dan pembangunan waduk resapan.

Pelestarian kualitas sumber air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelestarian sumber air secara keseluruhan yang ditujukan untuk mempertahankan lingkungan air yang serasi dan seimbang. Guna mewujudkan pelestarian kualitas air harus diupayakan agar beban pencemaran tidak melebihi daya tampung sumber air, serta didukung oleh sistem pengelolaan kualitas air yang mampu menjamin terwujudnya pelestarian kualitas air secara berkesinambungan.

Dasar pemikiran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan upaya pelestarian kualitas air ialah:

- (1) Pelestarian kualitas air diawali dengan inventarisasi potensi kualitas air dan potensi daya tampung sumber air sebagai acuan dasar untuk menentukan kemampuan daya tampung sumber air dalam menerima beban pencemaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pelestarian kualitas air harus mendahulukan perencanaan.
- (3) Untuk mencapai tujuan pelestarian kualitas air, harus dilakukan perencanaan pengelolaan kualitas air secara terpadu baik horizontal, konsisten sesuai perencanaan dan terkoordinasi antar wilayah dan daerah di tempat pengaliran sungai yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan yang ditujukan untuk melestarikan kualitas air harus didukung oleh kewenangan dan menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Upaya pelestarian kualitas air harus ditunjang oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang memadai.

Kegiatan konservasi dan pelestarian sumberdaya air, memerlukan suatu strategi yang tepat dalam penanganan, yang berhubungan dengan beberapa komponen berikut ini:

- (1) Konservasi dan pelestarian potensi sumberdaya air permukaan
- (2) Konservasi dan pelestarian potensi air tanah
- (3) Konservasi dan pelestarian daerah sempadan air
- (4) Pengendalian erosi dan sedimentasi
- (5) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
- (6) Pengamanan prasarana dan sarana pengairan
- (7) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta, dan
- (8) Monitoring dan evaluasi konservasi dan pelestarian sumberdaya air.

Setiap komponen tersebut kemudian harus dikaji secara detail untuk dapat menentukan strategi dalam pelaksanaan konservasi dan pelestarian sumberdaya air.

Strategi tersebut harus sinkron dan didukung dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Dalam rangka menunjang upaya pelestarian kualitas air, harus ditingkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang meliputi :

- (1) Pembinaan dan dukungan ilmiah dalam pengelolaan kualitas air, teknologi pengolahan air dan air limbah, pemantauan kualitas air, pengembangan sistem informasi dan penyimpanan data kualitas air.
- (2) Menyiapkan Norma Standar Panduan dan Manual (NSPM) mengenai perhitungan daya tampung, alokasi beban pencemaran, pelaksanaan dan pemantauan kualitas air, penerapan baku mutu sumber air dan air limbah di daerah.
- (3) Meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia dalam bidang sistem pengelolaan kualitas air, teknologi pengolahan air dan limbah, pemantauan kualitas air, pengembangan sistem informasi dan penyimpanan data kualitas air.
- (4) Melakukan penelitian dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan kualitas air untuk menjawab tantangan pelestarian kualitas air di masa yang akan datang.

Pelestarian kualitas air dicapai melalui sistem pengelolaan kualitas air yang direncanakan secara komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten. Strategi penanganan yang diperlukan meliputi:

- (1) Sumber-sumber air yang belum tercemar, dibuatkan perencanaan alokasi beban pencemaran maksimal yang diperbolehkan sesuai daya tampung yang tersedia. Kemampuan daya tampung sumber air perlu dipertahankan dengan melindungi daerah konservasi air seoptimal mungkin.
- (2) Pada sumber-sumber air yang telah tercemar harus dilakukan upaya menurunkan beban pencemaran sampai memenuhi target daya tampung yang tersedia. Upaya penurunan beban pencemaran dilaksanakan dengan cara: pengetatan baku mutu limbah cair, penerapan sistem daur ulang/pemanfaatan kembali, atau relokasi sumber pencemaran. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas daya tampung melalui peningkatan debit sumber air, terutama pada musim kemarau.
- (3) Pelaksanaan pengurangan beban pencemaran dilakukan melalui peningkatan efektifitas program yang telah ada seperti Program Kali Bersih (limbah industri dan limbah komersial lainnya) dan melalui program pengembangan daerah urban (limbah domestik).

9.8. Riset dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Air

Institusi Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air.

Keputusan pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air dan Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air (PTPA dan PPTPA) terdiri dari instansi-instansi pemerintah yang mewakili sektor-sektor yang terkait (seperti pertanian, kehutanan, lingkungan dan sebagainya) dalam perumusan kebijakan operasional sampai saat ini masih berlaku. Sejalan dengan reformasi pemerintah, diusulkan agar keputusan tersebut dirubah, atau diganti dengan landasan hukum yang memadai agar secara eksplisit mendudukan wakil semua unsur stakeholder dalam panitia-panitia dimaksud. Tujuannya untuk meningkatkan manajemen partisipatif dalam melaksanakan program.

Jaringan Data dan Manajemen Sistem Informasi (MSI). Jaringan basis data dan Manajemen Sistem Informasi (MSI) yang ada sekarang kurang berkelanjutan dan dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek tertentu dan lebih banyak bersifat sementara oleh berbagai instansi sektoral. Akibatnya dalam perencanaan sering mengalami kesulitan karena ada tiga set data yang berbeda dalam luas daerah irigasi antara Ditjen Sumberdaya Air, Departemen Pertanian, dan Biro Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu kedepan dibuat sistem basis data dan MSI di masing-masing organisasi pada berbagai tingkatan diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian dirangkum menjadi suatu sistem jaringan MIS dan *Decision Support System* (DSS) yang saling berhubungan melalui jaringan data berbasis komputer.

Perkuatan Institusi Hidrologi. Institusi hidrologi dan basis data yang kita miliki merupakan kebutuhan dasar untuk perencanaan, pembangunan dan pengelolaan atas dasar “*real time*” dirasakan masih banyak kekurangannya dan sangat cepat menurun kualitas, kontinuitas, maupun keakuratannya. Beberapa waduk baru, terpaksa harus didesain dengan data yang tersedia sejak periode kolonial meskipun karakteristik hidrologinya sudah tersedia jauh berbeda akibat cepatnya perubahan pola penggunaan lahan, sementara itu data tentang kejadian banjir yang terjadi tidak tersedia dengan akurat.

Masalah yang paling pokok adalah kita tidak punya sistem pengukuran volumetrik yang handal untuk dapat mengalokasikan air berdasarkan data aliran sungai yang dengan cepat dan akurat untuk menunjang operasi pelayanan bagi pengguna di bagian hulu dan hilir serta didalam daerah layanan.

Pemerintah telah mendesentralisasikan pengumpulan data hidrologi ke unit hidrologi Provinsi yang sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik, karena masih mengalami kekurangan staf yang terlatih, kekurangan biaya dan tanpa dukungan logistik yang memadai dalam melaksanakan misinya.

Pada tingkat nasional belum ada kesepakatan untuk melaksanakan rasionalisasi atau keserasian operasional antara data hidrologi yang dikumpulkan oleh BMG, PLN dan yang dikumpulkan oleh Unit Hidrologi Provinsi dan beberapa Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (BPSDA).

Untuk mendukung kegiatan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan perlu kesepakatan. Masing-masing instansi terkait dengan pengelolaan sumberdaya air saling berkoordinasi dan mendukung program yang dicanangkan, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

X. INSTRUMEN KEBIJAKAN

10.1. Insentif Fiskal

Dengan dalih penerapan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan untuk memperoleh pendapatan asli daerah dari berbagai sumber memungkinkan, ada beberapa pemerintah daerah yang kurang memperhatikan dampaknya terhadap minat dan perkembangan investasi yang diharapkan meningkat pada masa mendatang. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ingin mengajak pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayahnya untuk mempertimbangkan hal tersebut. Kebijakan pemerintah, mulai dari pusat, propinsi dan kabupaten seyogyanya terintegrasi, harmonis dan sinergis, di antaranya yang terkait dengan kebijakan fiskal, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha di bidang agribisnis. Pemerintah daerah akan memikirkan secara serius dampak jangka panjang dalam penetapan retribusi ataupun pungutan-pungutan lainnya terhadap usaha pertanian ataupun usaha agribisnis pada umumnya.

Beberapa langkah yang akan dilakukan ialah:

- a. Mempermudah dan mempercepat birokrasi perizinan investasi dan pengembangan usaha.
- b. Sosialisasi sistem perpajakan bagi pekebun baik skala besar maupun skala kecil
- c. Kebijakan fiskal yang menarik tumbuhnya investor baru, misal pengupayaan kredit pembiayaan ekspor ke pemerintah pusat dan *tax holiday*, yaitu pembebasan pajak daerah sementara selama masa awal investasi dan kemudian dikenakan pajak yang pantas dan tidak memberatkan.
- d. Saat ini penerapan PPn masih dilakukan secara *double counting*, dimana bahan baku dikenakan PPn dan produk jadi pun dikenakan PPn, sehingga meningkatkan harga pokok produk barang jadi. Oleh karena itu akan diterapkan kemudahan untuk pengurusan Restitusi PPn sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- e. Mengkoordinasi dan mengatur pungutan sumbangan pihak ketiga yang diterapkan di masing-masing kabupaten/kota sangat beragam, agar tidak memberatkan investor/perusahaan.
- f. Produk sampingan atau produk ikutan seperti kayu tanaman perkebunan atau produk agribisnis lainnya diharapkan akan merupakan modal petani untuk melaksanakan siklus usaha berikutnya seperti peremajaan, oleh karena itu akan diupayakan sistem pemasarannya tidak dikenakan aturan seperti kayu hutan atau produk yang dilindungi menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Konvensi

Internasional mengenai lingkungan hidup. Perlu diterapkan program sertifikasi massal dengan biaya minimal bagi petani, sehingga lahan dapat lebih tertata dan konflik lahan dapat dikurangi.

Beberapa komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan mempunyai peluang ekonomi cukup besar, karena memiliki kondisi permintaan pasar nasional dan dunia yang tinggi. Dengan memperhatikan peluang ini, maka Sumatera Selatan akan mencanangkan kebijakan pengembangan industri hilir/barang jadi berbahan baku komoditi-komoditi tersebut, dengan memberikan berbagai kemudahan dan iklim investasi yang kondusif.

Kebijaksanaan pemerintah dalam menunjang industri pengolahan komoditi agribisnis masih akan ditingkatkan, misalnya diupayakan kebijakan fiskal yang menarik tumbuhnya investasi baru bidang pengolahan barang jadi. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong industri produk pertanian/agribisnis di daerah ini untuk bisa berkembang dengan sehat dan pasti. Harapannya ialah bila industri hilir berkembang diharapkan konsumsi bahan baku untuk proses berbagai produk hilir juga meningkat.

Kepada Pemerintah Pusat akan diusulkan untuk menetapkan beberapa kebijakan deregulasi dan regulasi berikut ini:

- a. Penurunan pajak (pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan) yang menjadi beban pelaku usaha di bidang agribisnis.
- b. Pembebasan pajak pertambahan nilai (PPn) untuk mendorong tubuhnya industri pengolahan dalam negeri.
- c. Harmonisasi tarif, yaitu menerapkan tarif impor lebih tinggi untuk produk-produk olahan pertanian dan substitusinya. Dukungan ini diharapkan dari Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan.
- d. Insentif investasi terutama pada industri hilir pertanian berupa keringanan pajak, kemudahan investasi terutama dalam hal perizinan, penghapusan retribusi. Dukungan ini diharapkan dari Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dan pemerintah daerah).
- e. Perlindungan terhadap industri pengolahan kelapa melalui penetapan tarif impor untuk mesin, produk-produk sejenis dari luar negeri (kompetitor).
- f. Dukungan dan fasilitasi pendanaan dari pemerintah melalui skim kredit khusus terutama bagi petani. Dukungan ini diharapkan dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan kantor Menteri Negara UKMK.

- g. Stabilisasi nilai tukar pada tingkat yang wajar guna meredam gejolak pasar produk domestik dari pengaruh fluktuasi pasar input dan output industri produk turunan kelapa di tingkat regional dan global.

10.2. Kebijakan Pemasaran

Pembangunan pertanian pada dasarnya mempunyai sasaran untuk memberikan manfaat kepada pelaku usaha pertanian dan agribisnis secara keseluruhan. Khusus bagi petani hal tersebut akan memberikan manfaat yang besar dalam setiap kegiatan produktif yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa petani dihadapkan pada berbagai hambatan, antara lain menurunnya harga riil produk primer pertanian, posisi petani yang lemah dan selalu sebagai *price taker*, sehingga petani tetap tergolong pada level masyarakat miskin. Situasi ini tidak dapat diatasi dengan kebijakan sporadis yang berlaku sesaat, misalnya dengan penentuan harga dasar ataupun rumusan penetapan harga yang diterima petani. Posisi petani sebagai *price taker* haruslah diakhiri. Tidak dapat lagi dibiarkan para petani tidak berdaya dihadapan para pedagang, pemilik pabrik ataupun eksportir. Malah mereka selayaknya dibina untuk dapat bekerjasama dengan para pelaku usaha lainnya tersebut dengan posisi yang sejajar. Prinsipnya pemerintah daerah akan mencari jalan agar petani mampu meningkatkan posisi tawar dengan para pelaku bisnis lainnya. Peningkatan posisi tawar sangat diperlukan terutama agar petani mampu mengatasi ketidakstabilan harga. Para petani akan diberikan sistem pemasaran yang dapat menjamin mereka dapat memperoleh harga dan pendapatan yang memadai, salah satunya dengan mendirikan *trading house*. Lembaga ini bertindak sebagai lembaga pemasaran bersama yang mengatur perdagangan komoditas pertanian. Lembaga ini merupakan komplemen dari lembaga perbankan pertanian dan organisasi petani dalam mengembangkan pertanian secara bersama. Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi masalah kelangkaan kapital, menurunnya harga produk primer serta menaikkan kelas petani dari *non-bankable* menjadi *bankable*.

Promosi produk olahan pertanian untuk memperluas pangsa pasar dan mempertahankan pasar yang ada (khususnya pasar ekspor) akan dilakukan oleh semua pihak dan semua lapisan, yaitu mahasiswa, para eksekutif dan legislatif yang berkunjung ke luar negeri, staf kedutaan dan para pengusaha. Partisipasi semua pihak ini akan dikemas dalam suatu sistem dan mekanisme promosi yang dikoordinasi oleh pemerintah provinsi melalui dinas terkait.

Selain itu akan ditempuh kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor komoditi agribisnis yang sesuai dan mengikuti perkembangan permintaan dunia saat ini, yaitu

memfasilitasi pengembangan produk hortikultura seperti sayuran organik, buah duku dan durian, produk perikanan seperti udang dan ikan laut lainnya, serta produk perkebunan karet seperti SIR Deorub, ban kendaraan umum dan produk karet lainnya, produk kelapa sawit berupa biodiesel dan turunan lainnya, produk kopi khas (Kopi Semendo, Kopi Gunung Dempo, Kopi Ranau), kopi instan dan permen kopi, serta produk kelapa berupa *virgin coconut oil* (VCO), jok sabut dan lainnya. Aspek ramah lingkungan akan menjadi prioritas dalam setiap produksi komoditi pertanian yang akan dieksport.

Akan dikembangkan pula Pusat Informasi Pasar Komoditas di Tingkat Provinsi yang akan memberikan informasi mengenai produk, grade, harga, spesifikasi dan jumlah produk yang diminta konsumen, kondisi *supply/demand* serta kecenderungan perubahan jenis dan selera konsumen, lokasi produksi dan pasar, yang menyebarkan melalui beberapa media seperti radio, liflet, buletin, internet dan terbitan Buletin Komoditas secara berkala. Informasi harga komoditas secara berkala juga direncanakan untuk diterapkan di media seperti Sumatera Ekspres dan Sriwijaya Post, dan dalam jangka panjang melalui bursa komoditi berjangka.

Kebijakan pemasaran tidak hanya ditujukan untuk memperlancar pemasaran produk, melainkan pula untuk menggaet investor agar menanamkan modalnya dalam budidaya dan pengembangan industri pertanian di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membangun sistem pelayanan satu atap sekali berhenti (*one stop service system*) bagi para investor yang kegiatan operasionalnya dilaksanakan secara proaktif, efektif dan efisien.

10.3. Sistem dan Sumber Pendanaan

Pembiayaan usaha pertanian dan agribisnis pada umumnya bersumber dari pelaku usahanya sendiri, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan bagi petani dan diberikan dengan kemudahan prosedur dan tingkat bunga yang layak.

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha akan menghimpun dana untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan serta promosi. Dana dari pelaku usaha agribisnis berupa iuran pelaku usaha yang dihimpun dalam suatu badan yang dibentuk oleh pelaku usaha itu sendiri.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penunjang di bidang ekonomi, namun sistem perbankan di Indonesia tidak memberikan iklim yang kondusif bagi agribisnis, kalau tidak dapat dikatakan perbankan tidak berpihak kepada petani pertanian rakyat. Perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh agribisnis dan telah memberikan manfaat

ekonomi kepada lembaga perbankan di Indonesia tidaklah kecil. Namun sebagian besar manfaatnya tidaklah kembali kepada para petani tersebut.

Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pinjaman luar negeri melalui Kepmen 3/2003 yang memuat kerangka baru mengenai pinjaman dan hibah yang berasal dari pinjaman dan bantuan luar negeri kepada daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, daerah dapat melakukan pinjaman dan bantuan dari luar negeri melalui pemerintah pusat. KepMen ini mengharuskan inisiatif dan kewenangan meminjam harus berasal dari daerah sendiri berdasarkan kepentingan daerah, sehingga daerah diwajibkan untuk membuat proposal usulan pinjaman masing-masing sesuai dengan dana yang diperlukan.

Karena daerah belum diperbolehkan untuk meminjam langsung kepada donor, maka pemerintah pusat akan bertindak sebagai fasilitator dan koordinator dalam hubungan dengan pihak donor. Sumberdana pinjaman pemerintah berasal dari:

1. Lembaga multilateral
2. Negara lain secara bilateral, atau
3. Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasional lainnya.

Dana pinjaman pemerintah akan diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah. Daerah yang akan mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, misalnya; daerah menyediakan dana pendamping, tidak mempunyai tunggakan pinjaman, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya setelah dikurangi DAK, dana darurat dan lain-lain.

Kriteria usulan proyek daerah yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah ialah sebagai berikut:

- a. Merupakan inisiatif dan kewenangan daerah
- b. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat daerah setempat
- c. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di daerah yang bersangkutan serta sejalan dengan program pembangunan nasional (Propenas).
- d. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman, dan
- e. Telah mendapat persetujuan dari DPRD yang bersangkutan.

Dengan demikian terdapat dua jenis pinjaman pemerintah yang dapat diusulkan oleh daerah yaitu: pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah **sebagai pinjaman**, dan pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam **bentuk hibah**.

Sumber dana lainnya adalah berupa pendanaan partisipatif yaitu Cess, yang merupakan sumbangan wajib yang dipungut pemerintah atas hasil bumi tertentu untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan mutu, memperluas pasar serta kegiatan penelitian terkait. Karena penerapannya masih memerlukan undang-undang, maka sebagai alternatifnya ialah pengembangan sumber pendanaan bersama se Sumatera yang saat ini tengah dirintis pada tahap awal melalui pembentukan *Andalas Estate Incorporated* (AEI). Lembaga ini juga akan menangani dan mengkoordinasikan aspek kegiatan lain untuk memperlancar seluruh aktivitas agribisnis se Sumatera termasuk promosi investasi dan pemasarannya di luar negeri. Nantinya diharapkan akan berkembang lembaga yang dinamakan *Andalas Agro Incorporated* (AAI) yang menangani seluruh komoditi agribisnis yang mempunyai nilai dan prospektif ekonomi tinggi di masa mendatang.

Dalam tahap awal jangka pendek masalah permodalan atau pendanaan dalam pengembangan perkebunan Sumatera Selatan akan dilakukan dengan upaya berikut:

a. Pada Pertanian Rakyat:

1. Untuk perluasan areal:

Pendanaan dapat disediakan oleh petani secara mandiri yaitu berupa dana pribadi atau pinjaman lembaga keuangan, oleh investor swasta berupa dana mandiri atau modal pinjaman dan dana kemitraan berupa pinjaman lunak investor pabrik ke petani binaan.

2. Untuk diversifikasi dan intensifikasi:

Dana disediakan oleh pemerintah secara terbatas untuk percontohan, pinjaman lembaga keuangan yang difasilitasi pemerintah dan dana mandiri oleh petani.

3. Untuk Perluasan/Peremajaan/Rehabilitasi:

Dana disediakan oleh asosiasi pengusaha/eksportir produk agribisnis dalam bentuk subsidi bunga pinjaman petani ke Bank, oleh pemerintah dan lembaga keuangan dengan pola partisipatif. Polanya adalah sebagian pinjaman, sebagian lagi “dana mandiri” dalam bentuk TK keluarga.

b. Industri pengolahan:

Pengembangan industri industri pengolahan produk perkebunan berskala besar diupayakan untuk melibatkan perusahaan nasional/internasional

c. Penelitian dan Pengembangan:

Pendanaan untuk kegiatan ini akan diupayakan bersumber dari asosiasi industri pengolahan/eksportir, individu perusahaan besar industri pengolahan, pemerintah dan bantuan luar negeri. Aplikasi penyalurannya akan dilakukan secara terpadu untuk efisiensi dan kemudahan mengatur kegiatan.

d. Pengembangan Kelembagaan:

Dana untuk pengembangan kelembagaan bersumber dari pemerintah dan wasta antara lain dari industri pengolahan dan asosiasi industri pengolahan/ eksportir.

e. Pengembangan sistem pendanaan/permodalan:

Sudah saatnya pula untuk dirintis pengembangan sistem permadalan dengan model sistem giro beku dari pemerintah maupun asosiasi industri pengolahan/eksportir dan pengembangan skema sistem kelembagaan keuangan daerah (BPR) yang dikelola oleh Pemda.

10.4. Riset dan Pengembangan

Riset dan pengembangan komoditas agribisnis dapat dilaksanakan oleh lembaga riset, perguruan tinggi maupun lembaga lain yang kompeten. Ada beberapa lembaga riset dan pengembangan yang menangani komoditas agribisnis yang akan dimanfaatkan perannnya yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Penelitian Ikan Air Tawar Mariana, Pusat Penelitian Karet Sembawa, Balai Penelitian Ternak di Sembawa, dan lain-lain.

Kepada lembaga-lembaga riset dan pengembangan diberikan mandat dan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan teknologi pertanian meliputi: prapanen, pasca panen dan sosial ekonomi.
2. Melaksanakan kegiatan alih teknologi pertanian kepada petani.
3. Melaksanakan pelayanan/jasa bagi para petani, penyuluh dan pengguna lainnya.

Secara garis besar informasi mengenai pelayanan jasa dan produk penelitian yang diharapkan tersedia di lembaga-lembaga riset dan pengembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.1.

Salah satu arah kebijakan pertanian nasional adalah meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, sehingga kita akan berubah posisi dari yang hanya sebagai pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi. Hal ini memerlukan dukungan teknologi yang lengkap, yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas pertanian, akan secara serius dikembangkan areal atau lokasi, sistem dan teknologi pemberian/pembibitan ditambah pengembangan penangkar yang disertifikasi. Selain itu juga akan dikembangkan paket-paket teknologi eksploitasi, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas agribisnisnya.

Tabel 10.1. Informasi pelayanan jasa dan produk oleh Balai Riset dan Pengembangan Komoditas

Program	Jasa/Produk	Uraian
Pelayanan Jasa	Jasa Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultasi, <i>inspection service</i>, bantuan teknis, pelatihan/studi banding/magang. - Studi kesesuaian lahan - Studi kelayakan - Rekomendasi pemupukan - Uji efikasi
	Analisis dan Pengujian Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis tanah - Analisis jaringan tanaman - Analisis hasil produksi - Analisis rendemen - Jasa kalibrasi alat
	Bahan tanam	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan kualitas benih/bibit - Benih/bibit dalam kemasan siap tanam/tebar
Penjualan Produk	Bahan-bahan pembantu produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan untuk meningkatkan nilai tambah produk - Bahan penghilang cemaran produk
	Publikasi hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perpustakaan dengan berbagai publikasi yang terkait dengan komoditas agribisnis yang relevan

Di bidang pasca panen juga akan disediakan berbagai teknologi/inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan mengembangkan produk industri hilir pertanian. Dengan semakin berkembangnya teknologi pembuatan barang jadi di negara-negara konsumen produk pertanian, maka tuntutan ke arah mutu produk yang spesifik dan prima semakin besar. Oleh karenanya produk pertanian kita sebagai bahan baku utama akan secara konsisten diupayakan selalu bermutu baik. Pasokan bahan baku tersebut juga akan diupayakan kontinyu untuk memelihara kepercayaan importir pelanggan.

Penelitian dan pengembangan pertanian/agribisnis dilakukan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha agribisnis agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. Penelitian dan pengembangan ini akan diupayakan untuk dapat dilakukan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

Pengembangan SDM agribisnis akan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan meningkatkan dedikasi. Riset dan pengembangan berperan sangat strategis dalam mendukung implementasi kebijakan dan program pengembangan demi keberlanjutan industri agribisnis. Lembaga ini

melaksanakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yaitu pusat-pusat penelitian komoditas, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian dan Perguruan Tinggi.

Isu-isu dan tantangan strategis memerlukan solusi untuk menjamin produktivitas, daya saing dan keberlanjutan usaha-usaha agribisnis. Beberapa solusi memerlukan perbaikan dalam hal teknologi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Perbaikan teknologi yang memerlukan kebijakan riset dan pengembangan yang mendukung guna memenuhi perubahan kebutuhan industri dan konsumen akan dilaksanakan melalui:

- a. Perbaikan benih dan bibit unggul
- b. Perbaikan efisiensi produksi agribisnis
- c. Peningkatan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan
- d. Perbaikan mutu minyak dan produk turunannya
- e. Perluasan area aplikasi
- f. Peningkatan efisiensi dari beberapa proses
- g. Perbaikan efisiensi ekonomi produksi, proses hilir, pemasaran dan teknologi baru
- h. Perluasan dan peningkatan penggunaan produk pada konsumen dan negara konsumen potensial
- i. Menjaga pasar yang sudah ada dan memperluas pangsa pasar baru
- j. Transfer teknologi
- k. Komersialisasi hasil riset pengembangan dan teknologi

Isu-isu dan tantangan strategis tersebut di atas membantu dalam memprioritaskan area penelitian guna menjamin keberlanjutan dan kelangsungan hidup industri. Beberapa prioritas studi dapat dikelompokkan seperti berikut ini.

1. Peningkatan Produksi Pertanian

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa peningkatan hasil produksi dapat berasal dari pemuliaan benih, pemupukan, perbaikan aspek agronomi lainnya dan meningkatkan efisiensi pabrik.

2. Produktivitas Tenaga Kerja

Studi ditujukan guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada beberapa tahapan, yaitu panen dan pengumpulan hasil, pemeliharaan areal budidaya dan pengolahan secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan efisiensi yang akan mengurangi unit biaya. Perbaikan manajemen tenaga kerja bersamaan dengan mekanisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Mekanisasi

Praktek mekanisasi meringankan beban kerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang selanjutnya mengurangi tenaga kerja dan unit biaya. Namun demikian penerapan mekanisasi ini akan memperhatikan kondisi riil di lapangan agar jangan terjadi benturan masalah antara kelebihan tenaga kerja dengan pemanfaatan mekanisasi tersebut.

4. Pabrik dan Pengolahan Limbah

Perbaikan sejumlah proses pada pabrik pengolahan akan meningkatkan efisiensi terutama pada *loading ramp*, *sterilisasi*, ketel, *boilers* dan *screw press*. Pengolahan limbah menjadikan produksi bersih (*zero waste emission*) dan memanfaatkan limbah sehingga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.

5. Bioteknologi

Studi pada bioteknologi difokuskan pada rekayasa genetik guna memodifikasi komposisi asam lemak bebas, perbanyak bahan dengan kultur jaringan dan tahan penyakit.

6. Zero waste

Idealnya industri adalah *zero waste*, jika ini dapat dicapai polusi akan berkurang. Sebagai contoh, kelapa sawit memproduksi sekitar 55 ton/ha/tahun biomasa, suatu jumlah yang potensial. Bisa digunakan untuk partikel *board*, *pulp and paper*, karbon aktif, dikembalikan lagi ke lahan untuk mulsa, pupuk dan konservasi.

Pengembangan produk hilir atau turunan produk pertanian penting untuk dilakukan, mengingat peningkatan nilai tambah yang dapat diperoleh. Produk hilir sawit lanjutan yang dapat dihasilkan melalui penerapan proses lanjutan tehadap produk-produk oleokimia yang telah berkembang di Indonesia akan memberikan tambahan nilai tambah yang cukup besar. Misalnya, nilai tambah produk hilir sawit tersebut akan lebih besar dibandingkan nilai tambah produk-produk oleokimia. Nilai tambah produk hilir berupa oleokimia dasar maksimal 300%, namun apabila oleokimia dasar tersebut diproses lebih lanjut menjadi turunan oleokimia, misalnya surfaktan, maka nilai tambah yang diperoleh dapat mencapai 800%.

Kebijakan yang perlu ditempuh dalam aspek riset dan pengembangan kopi dan kelapa ialah:

1. Penelitian dan pengembangan bibit kopi dan kelapa unggul di kawasan sentra produksi,
2. Penelitian sistem diversifikasi/usahatani yang optimum
3. Penelitian efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk majemuk di lahan petani

4. Pengembangan teknologi tepat guna atau terobosan teknik budidaya, panen dan penanganan pasca panen serta pengolahan produk pertanian
5. Pengembangan pembibitan dan budidaya kopi komoditas baru yang potensial dan produk pertanian organik dan pertanian unggul
6. Pengembangan industri produk agribisnis kelapa khas kawasan (*specialty*)
7. Pengembangan sistem kemitraan usaha yang cocok bagi masing-masing kawasan sentra produksi

10.5. Kebijakan Produksi Bersih dan Kelestarian Lingkungan

Kegiatan pertanian dimulai dari tahap pembebasan lahan, pembersihan lahan, persiapan infrastruktur, penanaman, pemeliharaan, pembuatan pabrik dan operasi kebun dan pabrik. Komponen pelestarian lingkungan untuk perusahaan besar dimulai dari penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Pada tiap proses kegiatan dilakukan pemantauan kualitas lingkungan agar kondisi lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Dalam upaya menjamin kondisi kualitas lingkungan untuk kegiatan yang mempunyai potensi menyebabkan kerusakan lingkungan perlu di kelola dengan baik.

Pada tahap prakonstruksi kegiatan yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial terutama sikap dan tanggapan masyarakat untuk pembukaan areal pertanian terutama kepemilikan lahan. Tahap konstruksi lebih banyak menyumbang kearah kondisi fisik lingkungan seperti penyiapan jalan akses dan jalan usahatani serta pembersihan lahan. Pada pembersihan lahan dilakukan pembukaan lahan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air. Lahan dibuka tidak membalik top soil tanah atau mengikis lapisan permukaan tanah agar tidak terjadi erosi yang melebihi ambang batas toleransi.

Upaya untuk membuka lahan tanpa pembakaran sangat penting dilakukan agar kondisi lingkungan terutama udara tidak mengalami pencemaran. Disamping itu pembakaran mempunyai dampak terhadap kehidupan mikro organisme tanah, serta terjadi rambatan api ke areal lain. Kondisi api dapat menjalar ke areal kebun atau lahan di sekitarnya karena kondisi lahan di Sumatera Selatan kaya bahan organik atau gambut sehingga pada musim kemarau bahan organik itu mudah terbakar.

Setelah lahan dibuka mesti dilakukan penanaman penutup tanah agar tanah dapat terlindungi dari pemecahan partikel tanah dan terangkat sebagai erosi. Penanaman tanaman penutup tanah selain mempunyai fungsi menahan erosi juga bermanfaat menambat Nitrogen bebas dan menyuplai bahan organik tanah. Pada saat

pembukaan lahan untuk kebutuhan jalan perlu dipertahankan kondisi saluran drainase alami agar tidak mengganggu pola aliran air dan penambahan genangan di tempat lain.

Perhatian atau ramah lingkungan juga akan menjadi perhatian oleh pemerintah daerah ketika memberikan peluang bagi pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan agar kemanfaatannya tidak hanya dalam hal eksistensi Sumatera Selatan di mata negara dan dunia, melainkan yang lebih penting ialah bagi keselamatan dan ketenangan hidup masyarakat itu sendiri dari generasi sekarang hingga generasi berikutnya di masa mendatang. Pencemaran air sumur, sungai dan laut serta hutan mangrove akan diminimalkan.

Pemerintah daerah juga akan dengan serius menerapkan kebijakan untuk pencegahan kerusakan hutan dan rehabilitasi hutan/lahan kritis yang ada serta melakukan konservasi sumberdaya air.

Proses pengolahan hasil di pabrik perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dengan menerapkan produksi bersih dan proses pemanfaatan kembali hasil produk dari pabrik tersebut. Hasil sisa pengolahan pabrik yang berupa bahan organik akan dapat dimanfaatkan sebagai kompos untuk memupuk tanaman. Hasil sampingan lain yang berupa limbah cair juga akan dapat dimanfaatkan untuk bahan pupuk dan berfungsi sebagai amelioran agregat tanah. Untuk beberapa produk tanaman/peternakan/perikanan selain pemanfaatan daging juga bagian lain akan dimanfaatkan sebagai arang aktif dan sabut kelapa dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan.

Beberapa komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat, misalnya karet, selain belum memanfaatkan bahan tanaman unggul juga kondisinya sudah relatif tua. Kayu karet yang dihasilkan untuk peremajaan dapat dimanfaatkan untuk industri kayu. Pemanfaatan kayu karet ini sangat berguna dan merupakan komoditas eksport non migas.

Pabrik yang berjalan perlu dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar air terproduksi yang dilepas tetap berada dalam ambang batas baku mutu lingkungan. Untuk mendukung kondisi lingkungan agar tetap terjaga maka perlu pemantauan lingkungan untuk perusahaan besar dan upaya pengelolaan untuk kondisi yang berpotensi menyebabkan dampak.

10.6. Kebijakan Keseimbangan Areal Antar Komoditas Agribisnis

Komitmen untuk menjaga keseimbangan luas areal beberapa komoditas agribisnis akan dimantapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan koordinasi lintas pemerintah daerah tersebut mengenai luas maksimum areal setiap komoditas agribisnis di Sumatera Selatan dan di masing-masing kabupaten/kota. Peraturan

dan koordinasi tersebut akan dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Prinsip yang dipegang adalah meminimumkan resiko kegagalan dan kerugian akibat gejolak pasar, menjaga kestabilan penerimaan pelaku usaha agribisnis dan maksimalisasi keuntungan dari ragam komoditi yang diusahakan.

LAMPIRAN

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya pelayanan irigasi teknis dan setengah teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lahan kering, lebak Tersedianya sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan areal tanam Peningkatan pola dan intensitas tanam Penyediaan tenaga pendamping Pemakaian benih unggul dan Alsintan Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> Percetakan sawah baru Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200 Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan Penyediaan tenaga penyuluh Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan dan input pertanian Peningkatan jaringan irigasi desa Penyediaan anggaran untuk OP jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> Percetakan sawah 199 Ha Luas areal untuk IP 100 luas 2080 Ha Luas areal untuk IP 200 luas 2706 Ha Luas tanam jagung 418 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> Sosoh Buay Rayap • Ulu Ogan • Semidang Aji • Peninjauan • Lubuk Batang • Baturaja Timur • Baturaja Barat • Pengandonan

KABUPATEN OKU TIMUR

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya anggaran operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis ▪ Belum optimal pemanfaatan rawa lebak ▪ Terbatasnya jalan usaha tani di rawa lebak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya jaringan irigasi teknis ▪ Tersedianya lahan basah dan kering ▪ Tersedianya sumber daya air ▪ Tersedianya moda angkutan kereta api ▪ Tersedia rawa lebak yang luas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung serta sayuran rawa lebak ▪ Meningkatkan mutu beras dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan alsintan ▪ Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi ▪ Pembangunan jalan usaha tani di rawa lebak ▪ Peningkatan mutu produk tanaman pangan dan palawija 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi dan jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan dan input pertanian ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa dan jalan usaha tani mendukung panen ▪ Penyediaan anggaran untuk OP jaringan dan irigasi ▪ Pembangunan pergudangan modern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah lahan kering dan rawa lebak 38.096 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 17.436 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 36.560 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 120 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 2.166 Ha ▪ Transportasi di lahan rawa lebak optimal ▪ Ada pergudangan modern 	<ul style="list-style-type: none"> • Martapura • Buay Pemuka Peliung • Madang Suku I • Madang Suku II • Belitang • Belitang II • Belitang III • Cempaka • Semendawai Suku III • Buay Madang

KABUPATEN OKU SELATAN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya lahan untuk pembukaan sawah baru ▪ Topografi wilayah perbukitan ▪ Terbatasnya saprodi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian dataran tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung serta hortikultura dataran tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa ▪ Pembangunan jalan tani ▪ Demplot sayuran dataran tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas areal pada IP 100 = 307 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 9.288 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 977 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 461 Ha ▪ Ada beberapa yang modern 	<ul style="list-style-type: none"> • Banding Agung • Makakau Ilir • Pulau beringin • Muara Dua Kisam • Muara Dua • Buay Sandang Aji • Buay Rujung • Simpang • Buay Pemaca

KABUPATEN OKI

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi jalan negara kurang baik ▪ Terbatasnya jaringan irigasi ▪ Terbatasnya daya dukung lahan ▪ Prasarana jaringan angkutan air belum optimal ▪ Fungsi Jaringan Tata Air Mikro tidak optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Jalan Lintas Timur ▪ Wilayah luas ▪ Tersedianya lahan rawa lebak dan pasang surut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung serta sayuran buahan dataran rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi ▪ Pembangunan jalan usaha tani ▪ Peningkatan mutu beras dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan anggaran untuk OP jaringan dan irigasi ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa ▪ Perbaikan jaringan Tata Air Mikro ▪ Pembangunan jalan usaha tani ▪ Penyediaan peralatan panen dan pasca panen ▪ Pergudangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 39.069 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 101.933 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 16.855 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 9.361 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 3.682 Ha ▪ Jalan pendukung di rawa lebak semakin panjang ▪ Gudang yang berfungsi sebagai tempat processing beras 	<ul style="list-style-type: none"> • Lempuing • Mesuji • Pematang Panggang • Tulung Selapan • Cengal • Pedamaran • Tanjung Lubuk • Kota Kayu Agung • Sirah Pulau Padang • Jejawi • Pampangan • Air Sugihan

KABUPATEN OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak berfungsi pintu air pada lahan rawa ■ Terbatasnya daya dukung lahan ■ Kepemilikan lahan yang kompleks ■ Masyarakat lebih memilih tanaman tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kegiatan agribisnis petani cukup baik ■ Infrastruktur jalan mendukung ■ Jaringan Jalan Lintas Timur dan Tengah ■ Luas wilayah ■ Tersedianya lahan rawa lebak cukup luas ■ Tersedianya pabrik pakan ternak dan peternakan ayam 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung serta hortikultura ■ Meningkatkan agribisnis produk hilir 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perluasan areal tanam padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ■ Penyediaan tenaga pendamping ■ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ■ Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi ■ Penyediaan processing padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Percetakan sawah baru ■ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200 ■ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ■ Sertifikasi lahan petani ■ Penyediaan tenaga penyuluh ■ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ■ Peningkatan jaringan irigasi desa ■ Peningkatan jaringan Tata Air Mikro ■ Pembangunan pergudangan dan pabrik untuk palawija 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Percetakan sawah 26.249 Ha ■ Luas areal pada IP 100 = 40.334 Ha ■ Luas areal pada IP 200 = 1.508 Ha ■ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 120 Ha ■ Luas areal tanam jagung 998 Ha ■ Adanya gudang dan pabrik processing padi dan palawija 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Raja • Rantau Alai • Muara Kuang • Tanjung Batu • Indralaya • Pemulutan

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat lebih memilih perkebunan ▪ Irigasi teknis teknis terbatas ▪ Kondisi jalan kabupaten di beberapa kecamatan kurang baik ▪ Sertifikasi lahan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya dukung lahan baik ▪ Menpunyai elevasi dataran rendah, medium, dan tinggi ▪ Petani di beberapa kecamatan terbiasa budidaya jagung dan hortikultura ▪ Tersedianya sumber daya air ▪ Tersedianya moda angkutan kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung ▪ Pembangunan irigasi teknis ▪ Pembangunan tempat processing jagung dan padi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan serta processing ▪ Pengoptimalisasi dataran tinggi ▪ Perluasan jaringan irigasi dan drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; ▪ Luas areal pada IP 100 = 22.119 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 2.803 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 3.674 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 1.794 Ha ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Pembangunan irigasi teknis ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa ▪ Pembangunan processing jagung yang modern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 10.089 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 22.119 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 2.803 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 3.674 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 1.794 Ha ▪ Produksi jagung berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Semendo • Aremantai • Tanjung Raya • Lawang Kidul • Rambang • Lubai • Muara Enim • Ujan Mas • Gunung Megang • Talang Ubi • Penukal Abab • Tanah Abang • Gelumbang • Lembak • Sungai Rotan • Rambang Dangku • Penukal Otam Benakat

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi jalan negara kurang baik ▪ Topografi bergelombang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya dukung lahan baik ▪ Tersedianya lahan kering dan lahan tada hujan; ▪ Topografi lahan datar, bergelombang dan berbukit ▪ Berada pada berbagai ketinggian tempat dari muka laut ▪ Tersedianya sumber daya air ▪ Tersedianya angkutan kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung ▪ Pembangunan irigasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Penyediaan gudang dan processing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Perencanaan pembangunan irigasi teknis ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 1.300 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 2.264 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 20.143 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 4.156 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 1.612 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Sakti • Kota Agung • Mulak Ulu • Pulau Pinang • Jarai • Muara Pinang • Pendopo • Ulu Musi • Tebing Tinggi • Kikim Barat • Kikim Timur • Kikim Selatan • Kikim Tengah • Lahat Merapi • Fajar Bulan • Lintang Kanan • Pasemah • Talang Padang

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya anggaran operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis ▪ Kondisi jalan provinsi kurang baik ▪ Terbatasnya wilayah yang dijangkau irigasi dan saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya jaringan irigasi teknis ▪ Tersedianya lahan basah dan kering ▪ Tersedianya sumber daya air ▪ Berada pada lokasi jalan Lintas Sumatera ▪ Lumbung beras Sumsel ▪ Tersedianya angkutan darat, kereta api, pesawat udara ▪ Berada dekat pasar Kota Lubuk Linggau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi ▪ Penyediaan pergudangan dan processing padi dan palawija 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Penyediaan anggaran untuk OP jaringan dan irigasi ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa dan jalan usaha tani ▪ Pembangunan gudang dan pabrik processing padi dan palawija 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 10.406 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 12.097 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 15.115 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 639 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 1.714 Ha ▪ Produksi padi dan palawija berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Rawas Ulu • Rupit • Batu Kuning/ Lakitan Ulu • Selangit • Tugu Mulyo • Muara Beliti • Jaya Loka • Muara Kelingi • Cecar • Muara Lakitan • Megang Sakti • Rawas Ilir • Nibung • Purwodadi • Karang Dapo • Karang Jaya

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi jalan negara kurang baik ▪ Tidak didukung jaringan irigasi teknis ▪ Terbatasnya daya dukung lahan ▪ Prasarana jaringan angkutan air belum optimal ▪ Fungsi Jaringan Tata Air Mikro tidak optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Jalan Lintas Timur ▪ Tersedianya lahan rawa lebak dan pasang surut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Pemeliharaan dan operasional jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Peningkatan jaringan Tata Air Mikro ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan anggaran untuk OP jaringan dan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 10.491 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 17.432 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 850 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 23.404 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 13.204 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanga Desa • Babat Toman • Batang Hari Leko • Sungai Keruh • Sekayu • Lais • Sungai Lilin • Keluang • Bayung Lencir

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi jalan negara kurang baik ▪ Tidak didukung jaringan irigasi teknis ▪ Terbatasnya daya dukung lahan ▪ Prasarana jaringan angkutan air belum optimal ▪ Fungsi Jaringan Tata Air Mikro tidak optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan Jalan Lintas Timur ▪ Tersedianya lahan rawa lebak dan pasang surut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan areal tanam ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsinton ▪ Penyediaan pergudangan dan pabrik padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah baru ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 100 dan IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Perluasan areal tanam dan intensifikasi padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsinton ▪ Peningkatan jaringan Tata Air Mikro ▪ Pembangunan pergudangan dan processing padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 95.509 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 99.167 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 29.233 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 112.333 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 13.204 Ha ▪ Produksi beras dan jagung berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Rantau bayur • Betung • Pulau Rimau • Banyuasin III • Talang Kelapa • Banyuasin I • Rambutan • Muara Padang • Makarti Jaya • Banyuasin II • Muara Telang

KOTA PALEMBANG

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan terbatas ▪ Jumlah petani sedikit ▪ Daya dukung lahan terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Out let pemasaran ▪ Pergudangan ▪ Tersedianya berbagai angkutan: darat, kereta api, sungai dan laut, pesawat udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan alur pemasaran dan daya saing padi dan jagung serta produk hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan harga ▪ Peningkatan produksi dan produktivitas padi ▪ Peningkatan pengolahan produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan pengawasan harga di pasar tradisional ▪ Intensifikasi padi pada IP 100 dan 200 ▪ Pembangunan industri pengolahan produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 0.0 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 2.745 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 100 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 100 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 0.0 Ha ▪ Produksi produk olahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilir Barat II • Sako • Seberang Ulu I • Seberang Ulu II • Kertapati • Plaju • Ilir Barat I • Sukarami

KOTA PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan terbatas ▪ Jumlah petani sedikit ▪ Daya dukung lahan terbatas ▪ Petani lebih banyak menanam karet ▪ Sumber daya air terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Outlet pemasaran saprodi dan pengolahan hasil serta industri ▪ Pergudangan ▪ Tersedianya angkutan kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan alur pemasaran dan daya saing produk ▪ Meningkatkan suplai air pada lahan kering 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan stabilitas harga ▪ Pengolahan hasil untuk peningkatan mutu ▪ Perluasan jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan pengawasan harga di pasar tradisional ▪ Intensifikasi padi pada IP 100 dan 200 dan jagung pada lahan kering ▪ Pembangunan waduk pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 0.0 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 965 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 0.0 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 0.0 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 122 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Rambang Kapak Tengah • Prabumulih Timur • Prabumulih Barat • Cambai

KOTA PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan terbatas ▪ Tidak didukung jaringan irigasi teknis ▪ Petani lebih banyak mengusahakan kopi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya dukung lahan baik ▪ Kualitas dan jumlah air cukup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Penyediaan gudang dan pabrik processing produk hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi dan jagung, serta Alsintan dan input pertanian ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa ▪ Sertifikasi lahan petani ▪ Pembangunan gudang dan pabrik pengolahan produk hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 0.0 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 0.0 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 2.678 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 537 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 3.40 Ha ▪ Produksi produk olahan hortikultura yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dempo Tengah • Dempo Selatan • Dempo Utara • Pagar Alam Selatan • Pagar Alam • Utara

KOTA LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas lahan terbatas ▪ Dukungan jaringan irigasi teknis terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya dukung lahan baik ▪ Kualitas dan jumlah air cukup ▪ Out let pemasaran ▪ Tersedianya angkutan darat, Kereta api, dan pesawat udara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil padi dan jagung ▪ Meningkatkan alur pemasaran dan daya saing padi dan jagung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pola dan intensitas tanam ▪ Penyediaan tenaga pendamping ▪ Pemakaian benih unggul dan Alsintan ▪ Pengawasan harga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktifitas padi pada IP 200; dari IP 100 menjadi IP 200 ▪ Pengadaan benih unggul padi, jagung, palawija, sayuran dan buah-buahan serta Alsintan ▪ Penyediaan tenaga penyuluh ▪ Pengadaan benih unggul padi dan jagung, serta Alsintan dan input pertanian ▪ Peningkatan jaringan irigasi desa ▪ Monitoring dan pengawasan harga di pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percetakan sawah 0.0 Ha ▪ Luas areal pada IP 100 = 300 Ha ▪ Luas areal pada IP 200 = 1.484 Ha ▪ Luas areal IP 100 menjadi IP 200 = 121 Ha ▪ Luas areal tanam jagung 9 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Lubuk Linggau Barat • Lubuk Linggau Timur • Lubuk Linggau Utara • Lubuk Linggau Selatan

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Pengembangan Areal dan Peremajaan Karet tua dan rusak terbatas akibat dan lemahnya modal	Luasnya areal tanaman tua, rusak dan lahan yang tersedia masih cukup luas dan tingginya harga karet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan dengan menggunakan klon unggul secara partisipatif ▪ Pengembangan karet rakyat dengan model partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 1.000 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif ▪ Peremajaan kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pemberian bantuan bibit kepada para petani ▪ Pemberdayaan/penguatan kapabilitas petani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 5000 ha ▪ Pengembangan areal kebun karet 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lubukbatang ▪ Pengandonan ▪ Baturajabarat ▪ Baturaja timur
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan dan mengembangkan kelapa sawit yang tua dan rusak	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada potensi lahan yang tersedia masih cukup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif ▪ Pengembangan kelapa sawit dengan model kemitraan dan model partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun ▪ Pengembangan kebun kelapa sawit seluas 30.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif ▪ Pemberian bantuan bibit kepada para petani ▪ Pembentukan Pemberdayaan dan pembangunan kebun ▪ Manajemen Partisipatif. ▪ Pembangunan kebun dengan kemitraan inti-plasma 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha ▪ Pengembangan areal kebun kelapa sawit 30.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lubukbatang ▪ Pengandonan ▪ Baturajabarat ▪ Baturaja timur
3. Pengembangan Industri Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk CPO dengan nilai tambah relatif kecil	Ketersediaan bahan baku, permintaan dunia meningkat, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	incentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	Pembangunan pabrik Biodiesel, pabrik minyak goreng dan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendirian PKS terpadu dengan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala 5 sampai 10 ton TBS/jam Pembangunan industri biodiesel di sentra-sentra produksi kelapa sawit. ▪ Mengkaji kelayakan teknis lokasi yang tepat sesuai dg ketersediaan bahan baku 	Berkembangnya industri hilir produk kelapa sawit, biodiesel, oleofood dan oleokimia	Lubukbatang
4. Areal kebun Kopi tua dan rusak relatif luas dan kemampuan petani untuk peremajaan relatif lemah	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada	Peremajaan dengan menggunakan klon unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat dan sistem rejuvinasi	Intensifikasi, diversifikasi, dan sedikit perluasan areal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif Pola swadaya murni ▪ pemberian bantuan bibit kepada para petani belum maju/marginal. ▪ Membuat kebun percontohan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai dengan tahun 2009 luas peremajaan kebun kopi 500 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosoh buay rayap Ulu ogan
5. Lemahnya kemampuan modal, dan pascapanen serta manajemen mutu	Produksi kopi banyak dengan harga kopi yang fluktuatif	Peningkatan mutu dan diversifikasi produk	Peningkatan mutu kopi, pembinaan dan pendampingan cara panen, pascapanen yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kopi arabika dan kopi organik ▪ Dorongan dan pengawalan teknik penanganan panen dan pasca panen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktivitas dan mutu kopi meningkat menjadi grade I ▪ Adanya diversifikasi usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosoh buay rayap Ulu ogan

KABUPATEN OKU TIMUR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 25000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cempaka ▪ Belitang ▪ Buaymadang
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun Kelapa sawit 1000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cempaka ▪ Belitang ▪ Buaymadang
3. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun Kelapa 500 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun 500 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belitang ▪ Buaymadang ▪ Martapura

KABUPATEN OKU SELATAN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kopinya yang tua maupun yang rusak	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada dan lahan yang tersedia masih cukup luas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan dengan klon unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat dan sistem rejuvinasi ▪ Peningkatan produksi dengan sistem intensifikasi, diversifikasi dan peremajaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan peremajaan ▪ Intensifikasi, diversifikasi, dan sedikit perluasan areal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, swadaya petani ▪ Pola swadaya murni masyarakat yang usaha tani kopi ▪ Pemberian bantuan bibit kepada para petani belum maju/marginal. ▪ Membuat kebun percontohan ▪ Dorongan dan pengawalan penggunaan sarana produksi sesuai rekomendasi ▪ Rehabilitasi/peremajaan tanaman kopi ▪ Diversifikasi kopi rakyat ▪ Penerapan teknik budidaya yang baik ▪ Peremajaan partisipatif dengan varietas unggul ▪ Pengembangan kopi arabika dan kopi organik ▪ Dorongan dan pengawalan teknik penanganan panen dan pasca panen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai dengan tahun 2009 luas peremajaan kebun kopi 500 ha ▪ Produktivitas kopi meningkat ▪ Mutu kopi meningkat menjadi minimal grade III ▪ Adanya disertifikasi usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulau beringin ▪ Muara dua ▪ Kisam ▪ Muara dua ▪ Buay sandang aji ▪ Simpang
2. Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk kopi dengan nilai tambah relatif kecil dan mutu produk dan kemasan yang masih rendah	Ketersediaan bahan baku, konsumsi per kapita masih rendah, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	Memberi insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan SDM, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitasi kawasan industri ▪ Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, termasuk regulasi/kepastian hukum dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha penangkaran benih unggul ▪ Fasilitasi ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik ▪ Pengembangan sistem pengendalian hpt scr terpadu dan minim penggunaan zat kimia ▪ Pengembangan, bantuan dan pinjaman alat mesin. ▪ Penyediaan pinjaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan mutu dan jumlah ketersediaan bibit kopi ▪ Mudahnya petani mendapatkan sarana produksi ▪ Sistem budidaya kopi lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muara dua ▪ Simpang

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 25000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cengal ▪ Mesuji ▪ Pematang ▪ Lempuing
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun Kelapa sawit 5000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesuji ▪ Pematang ▪ Air sugihan ▪ Lempuing
3. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun Kelapa 1000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun 500 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air sugihan ▪ Lempuing ▪ Mesuji

KABUPATEN OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisifatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 10.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanjung raja ▪ Tanjung batu ▪ Rantau alai ▪ Muara kuang
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 1.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun kelapa sawit 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inderalaya ▪ Tanjung raja ▪ Tanjung batu ▪ Rantau alai ▪ Muara kuang

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan peremajaan kebun karet 20.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambang ▪ Lubai ▪ Muara Enim ▪ Gunung Megang ▪ Talang Ubi ▪ Penukal Abab ▪ Tanah Abang ▪ Gelumbang ▪ Lembak
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun kelapa sawit 30.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gunung Megang ▪ Talang Ubi ▪ Penukal Abab ▪ Tanah Abang ▪ Gelumbang ▪ Lembak ▪ Sungai Rotan ▪ Rambang Dangku ▪ Penukal Otam Benakat
3. Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk kopi dengan nilai tambah relatif kecil dan mutu produk dan kemasan yang masih rendah	Ketersediaan bahan baku, konsumsi per kapita masih rendah, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	Memberi insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan SDM, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitasi kawasan industri ▪ Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, termasuk regulasi/kepastian hukum dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha penangkaran benih unggul ▪ Fasilitasi ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik ▪ Pengembangan sistem pengendalian hpt scri terpadu dan minim penggunaan zat kimia ▪ Pengembangan, bantuan dan pinjaman alat mesin. ▪ Penyediaan pinjaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kopi 1000 ha ▪ Peningkatan mutu dan jumlah ketersediaan bibit kopi ▪ Mudahnya petani mendapatkan sarana produksi ▪ Sistem budidaya kopi lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semendo ▪ Aremantai

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 5.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 5.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ulu Musi ▪ Tebing Tinggi ▪ Kikim
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun kelapa sawit 10.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kikim ▪ Lahat Merapi
3. Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk kopi dengan nilai tambah relatif kecil dan mutu produk dan kemasan yang masih rendah	Ketersediaan bahan baku, konsumsi per kapita masih rendah, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	Memberi insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan SDM, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitasi kawasan industri ▪ Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, termasuk regulasi/kepastian hukum dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha penangkaran benih unggul ▪ Fasilitasi ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik ▪ Pengembangan sistem pengendalian hpt scr terpadu dan minim penggunaan zat kimia ▪ Pengembangan, bantuan dan pinjaman alat mesin. ▪ Penyediaan pinjaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kop 1000 ha ▪ Peningkatan mutu dan jumlah ketersediaan bibit kopi ▪ Mudahnya petani mendapatkan sarana produksi ▪ Sistem budidaya kopi lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanjung Sakti ▪ Jarai ▪ Lintang kanan ▪ Pasemah ▪ Talang padang

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 18.500 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 15.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawas Ulu ▪ Rupit ▪ Batu Kuning/Lakitan Ulu ▪ Muara Beliti ▪ Jaya Loka ▪ Muara Kelangi Cecar ▪ Muara lakan ▪ Megang Sakti ▪ Rawas Ilir ▪ Karang Dapo ▪ Karang Anyar
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola swadaya murni ▪ Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun kelapa sawit 40.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawas Ulu ▪ Rupit ▪ Rawas Ilir ▪ Nibung ▪ Karang Dapo
3. Pengembangan Industri Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk CPO dengan nilai tambah relatif kecil	Ketersediaan bahan baku, permintaan dunia meningkat, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	Pembangunan pabrik Biodiesel, pabrik minyak goreng dan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendirian PKS terpadu dengan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala 5 sampai 10 ton TBS/jam ▪ Pembangunan industri biodiesel di sentra-sentra produksi kelapa sawit. • Mengkaji kelayakan teknis lokasi yang tepat sesuai dengan ketersediaan bahan baku 	Berkembangnya industri hilir produk kelapa sawit, biodiesel, oleofood dan oleokimia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawas Ilir ▪ Nibung

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan peremajaan model partisipatif, Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> Luas peremajaan kebun karet 15.000 ha Luas pengembangan areal kebun karet 5.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Sanga Desa Babat Toman Batang hari Leko Sekayu Lais Keluang
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan peremajaan model partisipatif, Pola swadaya murni Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Luas peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha Luas pengembangan areal kebun kelapa sawit 60.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Keruh Sungai Lilin Bayung Lencir
3. Pengembangan Industri Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk CPO dengan nilai tambah relatif kecil	Ketersediaan bahan baku, permintaan dunia meningkat, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	Pembangunan pabrik Biodiesel, pabrik minyak goreng dan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> Pendirian PKS terpadu dengan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala 5 sampai 10 ton TBS/jam Pembangunan industri biodiesel di sentra-sentra produksi kelapa sawit. Mengkaji kelayakan teknis lokasi yang tepat sesuai dengan ketersediaan bahan baku 	Berkembangnya industri hilir produk kelapa sawit, biodiesel, oleofood dan oleokimia	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Lilin Bayung Lencir

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan peremajaan model partisipatif, Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> Luas peremajaan kebun karet 7.500 ha Luas pengembangan areal kebun karet 5.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> Betung Banyuasin III Banyuasin I
2. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa sawit yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa sawit secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan peremajaan model partisipatif, Pola swadaya murni Pola swadaya berbantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Luas peremajaan kebun kelapa sawit 1.000 ha Luas pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Rimau Banyuasin III Rambutan Muara Padang Makarti Jaya Banyuasin II
3. Pengembangan Industri Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk CPO dengan nilai tambah relatif kecil	Ketersediaan bahan baku, permintaan dunia meningkat, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	Pembangunan pabrik Biodiesel, pabrik minyak goreng dan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> Pendirian PKS terpadu dengan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala 5 sampai 10 ton TBS/jam Pembangunan industri biodiesel di sentra-sentra produksi kelapa sawit. Mengkaji kalayakan teknis lokasi yang tepat sesuai dengan ketersediaan bahan baku 	Berkembangnya industri hilir produk kelapa sawit, biodiesel, oleofood dan oleokimia	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Rimau Rambutan
4. Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun kelapa yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dengan menggunakan bibit unggul secara partisipatif dengan swadaya masyarakat	Peremajaan kelapa secara bertahap setiap tahun sekitar 200 ha sampai th 2009	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan peremajaan model partisipatif, Pola swadaya murni Pola swadaya berbantuan 	Perluasan areal kebun 1500 ha, untuk peremajaan seluas 4000 ha	<ul style="list-style-type: none"> Muara Padang Pulau Rimau Muara Telang

KOTA PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisifatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun karet 5.000 ha ▪ Luas pengembangan areal kebun karet 5.000 ha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rambah kapak Tengah Prabumulih Timur ▪ Prabumulih Barat ▪ Cambai

KOTA PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Sampai saat industri pengolahan masih mendominasi produk kopi dengan nilai tambah relatif kecil dan mutu produk dan kemasan yang masih rendah	Ketersediaan bahan baku, konsumsi per kapita masih rendah, kemajuan teknologi, dan adanya nilai tambah	Memberi insentif dan kemudahan serta pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industri hilir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan peningkatan SDM, pembangunan sarana/prasarana dan fasilitasi kawasan industri ▪ Kemudahan perizinan dan jaminan keamanan, termasuk regulasi/kepastian hukum dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha penangkaran benih unggul ▪ Fasilitasi ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik ▪ Pengembangan sistem pengendalian hpt scr terpadu dan minim penggunaan zat kimia ▪ Pengembangan, bantuan dan pinjaman alat mesin. ▪ Penyediaan pinjaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas peremajaan kebun kopi 1000 ha ▪ Peningkatan mutu dan jumlah ketersediaan bibit kopi ▪ Mudahnya petani mendapatkan sarana produksi Sistem budidaya kopi lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dempo Tengah ▪ Dempo selatan ▪ Demp Utara ▪ Pagar Alam selatan ▪ Pagar Alam Utara

KOTA LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Lemahnya kemampuan petani untuk meremajakan kebun karet yang tua maupun yang rusak atau pengembangan lahan baru	Luasnya areal tanaman tua dan tanaman rusak yang ada Potensi lahan yang tersedia masih cukup luas	Peremajaan dan pengembangan menggunakan klon unggul secara partisifatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peremajaan karet secara bertahap setiap tahun 500 ha ▪ Pengembangan kebun karet rakyat seluas 10.000 ha sampai tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan peremajaan model partisipatif, ▪ Pola pengembangan melalui pemberian kredit lunak jangka panjang (10-12 tahun) ▪ Pola swadaya berbantuan dengan pemberian bantuan bibit 	Luas peremajaan kebun karet 1.500 ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lubuk Linggau Timur ▪ Lubuk Linggau Selatan

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PENGEMBANGAN PETERNAKAN RAKYAT

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan • Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang • Tingkat kepemilikan modal sangat rendah • Prasarana perhubungan belum begitu baik • Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan • Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya • Tingkat keamanan beternak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu bibit • Meningkatkan Teknologi budidaya yang tepat guna • Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu bibit • Peningkatan penggunaan teknologi budidaya • Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan inseminasi Buatan • Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna • Melakukan pelatihan pasca panen • Pengadaan tempat pemotongan hewan • Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak • Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi • Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<p>Tersedianya sarana dan prasarana bagi petugas lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketersediaan mutu bibit ▪ Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna ▪ Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan • Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bny penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan beternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi sarana dan prasarana petugas Meningkatkan mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan ternak Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak Membuka akses jalan produksi Meningkatkan partisipasi pihak swasta Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan Peningkatan mutu hijauan pakan ternak Peningkatan mutu jalan produksi Peningkatan partisipasi pihak swasta Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tpea tguna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepatguna Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata Perbaikan jalan Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat Melakukan siskamling Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan mutu bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH Meningkatnya usaha Peternakan Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten Tersedianya jalan akses yang baik Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan Meningkatnya populasi ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan beternak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan mutu bibit Meningkatkan Teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepatguna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan mutu bibit Meningkatnya penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan bternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan mutu bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Tingkat keamanan bternak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<p>- Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan</p> <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan beternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan mutu bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan • Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang • Tingkat kepemilikan modal sangat rendah • Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten • Prasarana perhubungan belum begitu baik • Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan • Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya • Tingkat keamanan bternak masih kurang • Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Mutu bibit • Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna • Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu bibit/genetik ternak • Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya • Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Inseminasi Buatan • Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna • Melakukan pelatihan pasca panen • Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan • Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak • Pembinaan teknologi budidaya tepat guna • Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi • Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan - Meningkatnya ketersediaan Mutu Bibit - Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna - Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan • Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan bternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan mutu bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan baternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan Mutu Bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan • Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang • Tingkat kepemilikan modal sangat rendah • Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten • Prasarana perhubungan belum begitu baik • Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan • Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya • Tingkat keamanan baternak masih kurang • Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Mutu bibit • Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna • Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu bibit/genetik ternak • Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya • Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Inseminasi Buatan • Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna • Melakukan pelatihan pasca panen • Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan • Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak • Pembinaan teknologi budidaya tepat guna • Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi • Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan - Meningkatnya ketersediaan Mutu Bibit - Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna - Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan • Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN PALEMBANG

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan beternak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya usaha peternakan Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan beternak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya usaha peternakan Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan bетernak masih kurang 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang tepat guna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan Mutu Bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

KABUPATEN LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dilapangan Penerapan teknologi mulai dari praproduksi budidaya dan pasca panen masih kurang Tingkat kepemilikan modal sangat rendah Belum tertatanya lahan serta sumber pakan hijauan secara konsisten Prasarana perhubungan belum begitu baik Kurangnya partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan Masih kurangnya kesadaran peternak akan bahaya penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya Tingkat keamanan bternak masih kurang Banyaknya hewan-hewan betina produktif yang dipotong 	Jumlah dan keragaman jenis ternak relatif banyak	<p>Melengkapi sarana dan prasarana petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Mutu bibit Meningkatkan teknologi budidaya yang tepat guna Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil ternak <p>Membuka peluang dan kemudahan bagi pihak swasta dalam melakukan investasi</p> <p>Meningkatkan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Membuka akses jalan produksi</p> <p>Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam menumbuhkembangkan usaha peternakan</p> <p>Meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Meningkatkan situasi keamanan dalam berusaha ternak</p> <p>Mencegah terjadinya pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pengadaan peralatan pendukung petugas di lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu bibit/genetik ternak Peningkatan Penggunaan teknologi budidaya Peningkatan hasil olahan ternak <p>Pengembangan usaha peternakan rakyat dengan kerjasama pihak swasta dan perbankan</p> <p>Peningkatan mutu hijauan pakan ternak</p> <p>Peningkatan mutu jalan produksi</p> <p>Peningkatan partisipasi pihak swasta</p> <p>Peningkatan kesadaran peternak akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Peningkatan keamanan lingkungan usaha peternakan</p> <p>Pencegahan terhadap pemotongan hewan betina produktif</p>	<p>Pembelian alat-alat yang mendukung kegiatan petugas dilapangan (kendaraan roda dua, ATK, Komputer dan Buku-buku referensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Inseminasi Buatan Penyuluhan teknologi budidaya ternak yang teps tguna Melakukan pelatihan pasca panen Pengadaan Tempat Pemotongan Hewan Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil ternak Pembinaan teknologi budidaya tepat guna Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan modal dan investasi Memfasilitasi temu usaha antara pihak swasta dengan peternak <p>Menanam pakan hijauan bermutu secara tertata</p> <p>Perbaikan jalan</p> <p>Melakukan temu usaha pihak swasta dengan peternak rakyat</p> <p>Penyuluhan tentang bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Melakukan kerjasama dengan pihak keamanan setempat</p> <p>Melakukan siskamling</p> <p>Melakukan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dengan pemotongan hewan betina produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana bagi Petugas lapangan Meningkatnya ketersediaan Mutu Bibit Meningkatnya Penerapan teknologi budidaya ternak tepat guna Tersedianya TPH <p>Meningkatnya usaha peternakan</p> <p>Tertatanya lahan serta sumber hijauan pakan ternak secara konsisten</p> <p>Tersedianya jalan akses yang baik</p> <p>Meningkatnya investasi pihak swasta dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya pengetahuan peternak dan masyarakat akan bahaya penyakit hewan menular</p> <p>Terciptanya suasana aman berusaha dibidang peternakan</p> <p>Meningkatnya populasi ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ayam Buras di Kec.Batu Raja Timur dan Kec. Pengandonan Ternak Kambing di Kec. Pengandonan dan Kec. Batu Raja Timur

MATRIK MASTER PLANT SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PENGEMBANGAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Induk dan benih masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petani ikan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - Masih dilakukan penagkapan dgn bahan peledak, stroom di wil perairan. - Sarana spt Balai Benihikan, TPI belum ada. 	<p>3.816,9 ton perikanan kolam (Mas dan Mujair)</p> <p>2.023,5 ton budidaya sawah</p> <p>Total Produksi 13.248,5 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta eksport.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor huludan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya udang galah, ikan Mas dan gurami</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosoh Buay Rayap • Ulu Ogan • Baturaja Timur • Baturaja Barat • Pengandonan

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan belum merata sampai ke desa-2 - Induk dan benih ikan/udang masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petambak/nelayan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - Masih dilakukan penangkapan dgn bahan peledak, stroom. - Prasarana yang belum memadai (spt jalan darat). - Sarana spt Pangkalan Pelabuhan ikan, Balai Benih Ikan belum berfungsi dgn baik. 	<p>1. Perikanan Laut 9.237,7 ton 2. Perik. perairan 15.447 ton 3. Budidaya Kolam (Mas, Mujair) 132,3 ton 4. Budidaya Sawah 53,6 ton 5. Keramba (Patin) 6.147,7 ton 6. Tambak udang windu 59.622,9 ton</p> <p>Total Produksi 90.641,6 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta eksport.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor huludan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pelestarian SDA</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>(PEMP) Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya udang galah, pu bandeng, karapu dll</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan dan rehab saluran tambak.</p> <p>Penanaman Bakau</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih.</p>	<p>200 jt/kec perikanan/tahun sd tahun 2009</p> <p>1 Kawasan di Pantai Timur (Kec.Cengal)</p> <p>1 kawasan</p> <p>5 paket/desa pesisir/tahun</p> <p>1 paket</p> <p>LS</p> <p>1000 ha/tahun</p> <p>LS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lempuing • Mesuji • Pematang Panggang • Tulung Selapan • Cengal • Pedamaran • Tanjung Lubuk • Kota Kayu Agung • Sirah Pulau Padang • Jejawi • Pampangan • Air Sugihan

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan belum merata sampai ke desa-2 - Induk dan benih ikan masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petani ikan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - Sarana spt TPI, BBI. 	<p>1. Perairan umum 4.008,9 ton 2. Budidaya Kolam (Mas, Mujair) 1.204,4 ton 3. Bud.Sawah 241,1 ton 4. Keramba (Patin) 590,5 ton</p> <p>Total Produksi 6.044,9 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta eksport.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor huludan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya udang galah.</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semendo • Aremantai • Tanjung Raya • Lawang Kidul • Rambah • Lubai • Muara Enim • Ujan Mas • Gunung Megang • Talang Ubi • Penukal Abab • Tanah Abang • Gelumbang • Lembak • Sungai Rotan • Rambah Dangku • Penukal Abab • Benakat

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Induk dan benih ikan/udang masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petani ikan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - TPI belum ada 	<p>1. Budidaya Kolam (Mas, Mujair) : 4.802,0 ton</p> <p>2. Budidaya Sawah : 851,6 ton</p> <p>Total Produksi 5 653,6 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta ekspor.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor hulu dan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya ikan mas dan gurami</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Sakti • Kota Agung • Pulau Pinang • Jarai • Muara Pinang • Kikim • Lahat Merapi • Fajar Bulan • Pasemah

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Induk dan benih ikan masih didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petani ikan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal. 	<p>1. Perik. Perairan: 1.049,2 ton</p> <p>2. Budidaya Kolam (Mas, Mujair): 4.511,4 ton</p> <p>3. Budidaya.Sawah: 1.883,9 ton</p> <p>Total Produksi 7.444,5 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta ekspor.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor hulu dan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya ikan mas</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan dan rehab saluran tambak ikan mas</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selangit • Tugu Mulyo • Muara Beliti • Jaya Loka • Muara Lakitan • Megang Sakti • Rawas Ilir • Purwodadi • Karang Dapo • Karang Jaya

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan belum merata sampai ke desa-2 - Induk dan benih ikan/udang masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petambak/nelayan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - Masih dilakukan penagkapan dgn bahan peledak, stroom. - Prasarana yang belum memadai (spt jalan darat). - Sarana spt Pangkalan Pelabuhan ikan, Balai Benih Ikan belum berfungsi dgn baik. 	<p>1. Perik.Laut 44.066,7 ton 2 . Perairan umum 13.866,5 ton 3 . Budidaya Kolam (Mas, Mujair) 1.103,5 ton 4. Keramba (Patin) 180,7 ton 5. Tambak Udang 541,5 ton</p> <p>Total Produksi 59.778,9 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta ekspor.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor huludan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya udang galah, pu bandeng, karapu dll</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan dan rehab saluran tambak.</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanga Desa • Babat Toman • Batang Hari Leko • Sungai Keruh • Sekayu • Lais • Sungai Lilin • Keluang • Bayung Lencir

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan belum merata sampai ke desa-2 - Induk dan benih ikan/udang masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petambak/nelayan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal - Masih dilakukan penagkapan dgn bahan peledak, stroom. - Prasarana yang belum memadai (spt jalan darat). - Sarana spt Pangkalan Pelabuhan ikan, Balai Benih Ikan belum berfungsi dgn baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perik.Laut 2 . Perairan umum 3 . Budidaya Kolam (Mas, Mujair) 4. Keramba (Patin) 5. Tambak Udang 	<p>Peningkatan investasi, produktivitas perikanan, kesempatan kerja, serta ekspor.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor huludan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya udang galah, pu bandeng, karapu dll</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan dan rehab saluran tambak.</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rantau bayur • Betung • Pulau Rimau • Banyuasin III • Talang Kelapa • Banyuasin I • Rambutan • Muara Padang • Makarti Jaya • Banyuasin II • Muara Telang

KOTA PALEMBANG

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> - Induk dan benih ikan masih di didatangkan dari luar. - Kualitas SDM petani ikan masih rendah dalam kemampuan teknis dan manajerial. - Keterbatasan modal 	<p>1. Prikanan Perairan 848,7 ton</p> <p>2. Budidaya Kolam 1.834,4 ton</p> <p>3. Keramba (patin) 1.409 ton</p> <p>Total Produksi 4.092,2 ton</p>	<p>Peningkatan investasi, produktivitas prikanan, kesempatan kerja, serta ekspor.</p> <p>Peningkatan produksi perikanan serta peningkatan modal usaha di sektor hulu dan hilir.</p> <p>Menciptakan agribisnis perikanan yang efisien dan berdaya saing tinggi</p>	<p>Pewilayahan atau pembentukan kawasan sentra produksi perikanan.</p> <p>Penyediaan modal usaha perikanan bagi petambak, nelayan, petani ikan.</p> <p>Pembinaan bagi Rumah Tangga Perikanan.</p> <p>Pengembangan lembaga Keuangan bagi RTP.</p> <p>Program pemberdayaan ekonomi RTP</p> <p>Pengembangan dan Pelestarian Budidaya Ikan Lokal.</p> <p>Pembinaan RTP</p>	<p>Bantuan dana ekonomi produktif</p> <p>Pengembangan kawasan purchasing order (saprodi dll)</p> <p>Pengembangan wilayah pertanian terpadu.</p> <p>Bantuan sarana perikanan.</p> <p>Kaji terap budidaya patin, gurami, lele</p> <p>Operasional pengawasan terpadu</p> <p>Pembangunan dan rehab saluran sungai</p> <p>Pembangunan TPI, BBI, PPI BBIP.</p> <p>Bantuan benih</p>	<p>Terwujudnya RT perikanan yg mandiri dan mapan dgn kualitas SDM yg tinggi serta mampu memanfaatkan teknologi perikanan secara efisien dan tepat guna.</p> <p>Meningkatnya produksi dan diversifikasi produksi perikanan.</p> <p>Terwujudnya pelestarian lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ilir Barat II • Sako • Seberang Ulu I • Seberang Ulu II • Kertapati • Plaju • Ilir Barat I • Sukarami

Keterangan : Kab Banyuasin, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kota Lubuk Linggau datanya masih tergabung dengan Kabupaten Induk

MATRIK MASTER PLANT SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN/KOTA: OGAN KOMERING ULU, OKU TIMUR, dan OKU SELATAN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Cagar Alam Gunung Raya perlu ditata ulang • Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 313.584 ha • Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 291.574 ha • Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai • HTI • Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun • Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan cadangan pangan ▪ Hutan Tanaman Industri ▪ Perkebunan ▪ Cagar Alam ▪ Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Penebangan Liar • Penanggulangan Kebakaran Hutan • Restrukturisasi Sektor Kehutanan • Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan • Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan social forestry • Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan • Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan • Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH • Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari • Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar ▪ Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya ▪ Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan ▪ Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan ▪ Pengembangan hutan kota ▪ Pengembangan kebun bibit tanaman hutan ▪ Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselesaikannya penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten OKU, OKUT dan OKUS • Terselesaikannya permasalahan perubahan peruntukan hutan • Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan • Terkendalikannya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan ulang Cagar Alam Gunung Raya ▪ Pemantapan kawasan hutan ▪ Pembangunan HTI dalam Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kab. Muara Enim, Lahat, OKU, OKUT, dan Musi Rawas ▪ Rehabilitasi lahan kritis menyebar ▪ Penanggulangan kebakaran menyebar ▪ Pengembangan hutan kota diprioritaskan di ibukota masing-masing kabupaten ▪ Pengembangan kebun bibit di zona Zona Subanjeriji-Banakat (Prabumulih, Pendopo, Martapura, dan Muara Lakitan) ▪ Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KABUPATEN/KOTA: OGAN KOMERING ILIR dan OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 953.886ha Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 614.234 ha Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai HTI Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Hutan cadangan pangan Hutan Tanaman Industri Perkebunan Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberantasan Penebangan Liar Penanggulangan Kebakaran Hutan Restrukturisasi Sektor Kehutanan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan social forestry Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan hutan Perlindungan dan pengamanan hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan Pengembangan hutan kota Pengembangan kebun bibit tanaman hutan Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten OKI dan OI Terselesaikannya permasalahan perubahan peruntukan hutan Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan Terkendalikannya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan HTI masuk dalam Zona Simpang Heran-Beyuku seluas 585.425 ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir Rehabilitasi lahan kritis menyebar Penanggulangan kebakaran menyebar Pengembangan social forestry menyebar Pengembangan hutan kota Kota kayu Agung dan Inderalaya Pengembangan kebun bibit di zona Zona Simpang Heran-Beyuku Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KABUPATEN/KOTA: MUARA ENIM dan PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 368.729 ha Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 176.813 ha Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai HTI Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Hutan cadangan pangan Hutan Tanaman Industri Perkebunan Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberantasan Penebangan Liar Penanggulangan Kebakaran Hutan Restrukturisasi Sektor Kehutanan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan social forestry Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan hutan Perlindungan dan pengamanan hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan Pengembangan hutan kota Pengembangan kebun bibit tanaman hutan Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih Terselesaikannya permasalahan perubahan peruntukan hutan Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan Terkendalikannya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan HTI dalam Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kab. Muara Enim, Lahat, OKU, OKUT, dan Musi Rawas Rehabilitasi lahan kritis menyebar Penanggulangan kebakaran menyebar Pengembangan hutan kota diprioritaskan di Kota Muara Enim dan Kota Prabumulih Pengembangan kebun bibit di Prabumulih, Pendopo, Muara Enim Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KABUPATEN/KOTA: LAHAT dan PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Cagar Alam Bunga Mas Kikim, Gumai Pasemah, dan Isau-Isau Pasemah perlu ditata ulang Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 247.557 ha Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 150.542 ha Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai HTI Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Hutan cadangan pangan Hutan Tanaman Industri Perkebunan Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberantasan Penebangan Liar Penanggulangan Kebakaran Hutan Restrukturisasi Sektor Kehutanan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan social forestry Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan hutan Perlindungan dan pengamanan hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan Pengembangan hutan kota Pengembangan kebun bibit tanaman hutan Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam Terselesaikannya permasalahan perubahan peruntukan hutan Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan Terkendalikannya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan cagar alam Alam Bunga Mas Kikim, Gumai Pasemah, dan Isau-Isau Pasemah Pembangunan HTI dalam Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kab. Muara Enim, Lahat, OKU, OKUT, dan Musi Rawas Rehabilitasi lahan kritis menyebar Penanggulangan kebakaran menyebar Pengembangan hutan kota diprioritaskan di Kota Lahat Pengembangan kebun bibit di Lahat Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KABUPATEN/KOTA: MUSI RAWAS dan LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Cagar Alam Kerinci Sebelat perlu ditata ulang Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 631.104 ha Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 1.260.079 ha Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai HTI Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> Hutan cadangan pangan Hutan Tanaman Industri Perkebunan Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberantasan Penebangan Liar Penanggulangan Kebakaran Hutan Restrukturisasi Sektor Kehutanan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan social forestry Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan hutan Perlindungan dan pengamanan hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan Pengembangan hutan kota Pengembangan kebun bibit tanaman hutan Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terselesaikannya penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau Terselesaikannya permasalahan perubahan peruntukan hutan Terselesaikannya permasalahan proses penggunaan kawasan hutan Terkendalikannya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kawasan cagar alam Kerinci Sebelat Pembangunan HTI dalam Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kab. Muara Enim, Lahat, OKU, OKUT, dan Musi Rawas Rehabilitasi lahan kritis menyebar Penanggulangan kebakaran menyebar Pengembangan hutan kota diprioritaskan di Kota Lubuk Linggau Pengembangan kebun bibit di Muara Lakitan, Lubuk Linggau Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KABUPATEN/KOTA: MUSI BANYUASIN dan BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Cagar Alam Bentayan, Dangku, Padang SguhanTerusan Dalam, Sembilang perlu ditata ulang • Kawasan Hutan Belum Mantap seluas ± 247.557 ha • Sebagian Lahan tergolong Kritis seluas ± 371.722 ha • Kebun Bibit Kehutanan belum Memadai • HTI • Kebakaran Hutan terjadi setiap tahun • Belum tersedianya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan cadangan pangan ▪ Hutan Tanaman Industri ▪ Perkebunan ▪ Cagar Alam ▪ Perhatian dan bantuan internasional 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Penebangan Liar • Penanggulangan Kebakaran Hutan • Restrukturisasi Sektor Kehutanan • Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan • Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan social forestry • Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan • Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan • Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Konservasi SDH • Program Pengembangan Pengelolaan Hutan Lestari • Program Pengembangan Kelembagaan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan prinsip <i>social forestry</i> pada wilayah rawan penebangan liar ▪ Tegaknya <i>law enforcement</i> bidang kehutanan serta peningkatan upaya penegakan hukumnya ▪ Pengembangan kelembagaan pengamanan hutan ▪ Penerapan prinsip "social forestry" pada wilayah rawan kebakaran hutan ▪ Pengembangan hutan kota ▪ Pengembangan kebun bibit tanaman hutan ▪ Pengembangan hutan cadangan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselesaikannya a penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin • Terselesaikannya a permasalahan perubahan peruntukan hutan • Terselesaikannya a permasalahan proses penggunaan kawasan hutan • Terkendalikannya a proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan kawasan cagar alam Bentayan, Dangku, Padang SguhanTerusan Dalam, Sembilang ▪ Pembangunan HTI dalam Zona Subanjeriji-Banakat seluas 296.400 ha yang meliputi Kab. Muara Enim, Lahat, OKU, OKUT, dan Musi Rawas ▪ Rehabilitasi lahan kritis menyebar ▪ Penanggulangan kebakaran menyebar ▪ Pengembangan hutan kota diprioritaskan di Kota Sekayu dan Pangkalan Balai ▪ Pengembangan kebun bibit di Kemampo, Pangkalan Balai, Musi Ilim ▪ Pengembangan hutan cadangan pangan di lokasi pembangunan HTI

KOTA PALEMBANG

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Cagar Alam Punti Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cagar Alam 	<p>Kebijakan Utama sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7501/Kpts-II/2002 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Penebangan Liar • Penanggulangan Kebakaran Hutan • Restrukturisasi Sektor Kehutanan • Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya hutan • Desentralisasi Sektor Kehutanan. <p>Kebijakan Pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan social forestry • Penyiapan prakondisi pengelolaan hutan • Pemanfaatan hutan harus memperhatikan fungsi dan daya dukungnya • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan • Penguatan kelembagaan kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya hutan kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantapan kawasan cagar alam Punti Kayu ▪ Pengembangan hutan kota

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)

Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengelolaan Sumberdaya alam dan Air: a. Hutan b. Sumber air c. Badan Air (Kualitas Air Baku)	Sumber daya air tawar yang terdapat di sungai, rawa dan badan sungai lainnya cukup luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - PP No.18/1994 - Kepres No.32/1990 - Kepmen Pert No.54/Kpts/Um/2/ 1972 - Kepmenhut No.446/Kptsll/1996 - Konservasi hutan - Pengelolaan sumber air, sungai, danau, dam, waduk - Pengelolaan air baku - Penyediaan air irigasi - Konservasi air - PP No.20/1990 - PP No.82/2001 - Perda No.16/2005 - Perda No.18/2004 	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan hutan/vegetasi alami - Pencegahan degradasi lahan - Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu - Melestarikan fungsi lingkungan sumber air - Pencegahan Pencemaran sumber air - Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas sumberdaya air, dll. - Pelestarian dan perlindungan kualitas air - Pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - Penelitian dan pengembangan hutan - Pemetaan lokasi daerah resapan - Penyelamatan danau - Pembangunan waduk resapan - Penelitian dan pengembangan SDA - Pemulihian fungsi sungai - Meningkatkan prodiktivitas sumber air melalui inovasi teknologi, dll. - Inventarisasi potensi kualitas air dan potensi daya tampung sumber air - Pengawasan proses daur limbah dan potensi bahan pencemar - Pengamatan kualitas air secara berkelanjutan 	Tetap berfungsi sumber daya air sebagai pendukung pertanian dan sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Peg Bukit Barisan - Danau Ranau - OKU Selatan - Pagar Alam - Lahat - Peg Bukit Barisan - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)

Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Dampak Negatif Pengelolaan Lingkungan: a. Banjir b. Kekeringan c. Tanah longsor d. Erosi e. Sedimentasi	Rawa, DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah hulu relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian banjir - Menanggulangi dampak banjir - Minimasi daerah potensi kekeringan - Minimalisasi dampak kekeringan thd masyarakat dan lingkungan - Pencegahan tanah longsor - Pencegahan erosi tebing sungai - Pengelolaan hutan - Mengurangi sedimentasi di sumber air dan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan banjir - Mengatasi banjir - dll - Membangun sistem peringatan dini - Menyiapkan kebijakan thd kekeringan dan dampaknya - Pemetaan daerah rawan kekeringan - Peringatan dini pada daerah pertanian thd pola tanam - Pembuatan saluran air untuk penduduk dan pertanian - dll - Penghijauan - Terrasering - Pembuatan saluran pembuang - Penguatan tebing - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - dll. - Pemetaan daerah potensi sedimentasi - Normalisasi sungai - Pengerukan tanah pd daerah endapan/rendah, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan saluran pembuang - Pembuatan waduk penampung, dll - Pemetaan daerah rawan kekeringan - Peringatan dini pada daerah pertanian thd pola tanam - Pembuatan saluran air untuk penduduk dan pertanian - dll - Penghijauan - Terrasering - Pembuatan saluran pembuang - Penguatan tebing - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - dll. - Pemetaan daerah potensi sedimentasi - Normalisasi sungai - Pengerukan tanah pd daerah endapan/rendah, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Rawa, DAS, sungai dan anak sungai tetap terjaga fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)

Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan: a. Limbah domestik rumah tangga	DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah hulu relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 - Minimasi lalu mengbuang limbah cair domestik di sumber air - Menanggulangi dampak limbah domestik, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan lokasi pembuangan limbah cair domestik - Mengatasi dampak limbah domestik thd penyakit, dll - Sistem pertanian organic 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan MCK di sekitar rumah penduduk - Mengurangi MCK di sumber air dan sungai, dll. 	Limbah pencemar daerah hulu sungai perlu diminimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat
b. Limbah Pertanian		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan tanah dan tanaman berbasis pertanian organik - Mengurangi dampak limbah pertanian thd sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pertanian organik - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami 		<ul style="list-style-type: none"> - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat
c. Limbah industri, rumah sakit		<ul style="list-style-type: none"> - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 tentang baku mutu limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan limbah secara baik - Pencegahan pencemaran sumber air dari limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah 		<ul style="list-style-type: none"> - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)
Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pemanfaatan Hutan/Lahan: a. Perkebunan b. Ladang berpindah c. Industri	Lahan dan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan tanaman pangan, peternakan relatif luas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakterisasi lahan sesuai peruntukan - Pemilihan jenis tanaman - Mengurangi kegiatan penduduk berladang - Memperkenalkan sistem pertanian menetap dan terpadu - Mengurangi dampak limbah dan polusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi kemampuan tanah - Pemilihan jenis tanaman - Kegiatan konservatif - Sistem perkebunan inti dan plasma - Pelatihan dan Percontohan pertanian menetap dan terpadu - Pengawasan dan pembinaan thd masyarakat peladang - Pemanfaatan Teknologi pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah 	Terciptanya kawasan yang berbasis agroekosistem	<ul style="list-style-type: none"> - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)
Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Upaya Pengelolaan dan perbaikan Lingkungan: a. Tata guna lahan b. Konservasi Tanah c. Bangunan konservasi d. Penghijauan dan reboisasi	Lahan daerah hulu pegunungan bukit barisan merupakan kawasan alami tangkapan air	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya - Melestarikan tanaman asli - Konservasi tanah - Pengelolaan tanah - Mengurangi dampak erosi dan banjir, dll - Meminimalisasi bahaya banjir thd pemukiman - Pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kelas kemampuan tanah - Pemetaan lahan kritis - Sistem pengolahan tanah - Pencegahan erosi tanah - Meningkatkan kesuburan tanah - Membangun bangunan penahan erosi dan banjir - Mengurangi dampak banjir - Penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis/daerah rawan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi tanah - Karakterisasi lahan - Tanam sistem kontur - Penanggulangan lahan kritis - Penanaman tanaman produktif - Konservasi tanah - Penghijauan - Reboisasi - Pengolahan tanah - Terasering - Dam dan waduk penampung banjir - Terasering - Pembuatan saluran pembuangan - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan 	Hidrologi Kawasan bukit barisan tetap dapat berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat - Danau Ranau - Pagar Alam - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Hulu (Pegunungan Bukit Barisan)

Kabupaten/Kota: OKU Selatan, Pagar Alam, Lahat

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Lingkungan Sosial: a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Kelembagaan Pengelolaan air c. Peran serta masyarakat d. Sosialisasi Peraturan	Masyarakat tani yang berdomisili di pegunungan bukit barisan berjumlah banyak dan tersebar di berbagai tempat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan atas hak tanah - Penguatan kelembagaan pengelola air - Peningkatan kesadaran masyarakat - Koordinasi antar sektor - Koordinasi antar wilayah - Partisipasi masyarakat dalam konservasi tanah, air dan hutan - Pengusaha dan masyarakat melindungi dan meningkatkan integritas ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan lahan secara tepat - Peningkatan produktivitas tanah rakyat - Pembuatan kelompok tani - Meingkatkan komunikasi antar kelompok, dan pemerintah - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelembagaan lingkungan - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan sumber daya alam dan air - Meningkatkan sumberdaya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan - Peraturan dan kebijakan dilaksanakan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi kemampuan lahan masyarakat - Peningkatan kemampuan petani untuk mengelola tanahnya - Pemilihan tanaman - Mengaktifkan Kelompok tanah - Mengaktifkan hukum adat - dll - Pelatihan sumberdaya air - Pelatihan sistem penanggulangan banjir dan tanah longsor - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - Pelatihan sistem pertanian menetap - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - Partisipasi masyarakat dalam Penegakan peraturan - Sosialisasi peraturan dan kebijakan - Peran serta swasta dan masyarakat dalam pegekan peraturan 	Masyarakat dapat bertani berbasis konservasi lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat - Pagar Alam - Danau Ranau - OKU Selatan - Lahat

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota: OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengelolaan Sumberdaya alam dan Air: a. Hutan b. Sumber air c. Badan Air (Kualitas Air Baku)	Sumber daya air tawar yang terdapat di sungai, rawa dan badan sungai lainnya cukup luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - PP No.18/1994 - Kepres No.32/1990 - Kepmen Pert No.54/Kpts/Um/2/ 1972 - Kepmehut No.446/Kpts-II/1996 - Konservasi hutan - Pengelolaan sumber air, sungai, danau, dam, waduk - Pengelolaan air baku - Penyediaan air irigasi - Konservasi air - PP No.20/1990 - PP No.82/2001 - Perda No.16/2005 - Perda No.18/2004 	<ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan hutan/vegetasi alami - Pencegahan degradasi lahan - Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu - Melestarikan fungsi lingkungan sumber air - Pencegahan Pencemaran sumber air - Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas sumberdaya air, dll. - Pelestarian dan perlindungan kualitas air - Pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - Penelitian dan pengembangan hutan - Pemetaan lokasi daerah resapan - Penyelamatan danau - Pembangunan waduk resapan - Penelitian dan pengembangan SDA - Pemulihian fungsi sungai - Meningkatkan produktivitas sumber air melalui inovasi teknologi, dll. - Inventarisasi potensi kualitas air dan potensi daya tampung sumber air - Pengawasan proses daur limbah dan potensi bahan pencemar - Pengamatan kualitas air secara berkelanjutan 	Tetap berfungsinya sumber daya air sebagai pendukung pertanian dan sektor lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota: OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Dampak Negatif Pengelolaan Lingkungan:						
a. Banjir	Rawa, DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah tengah relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian banjir - Menanggulangi dampak banjir - Minimasi daerah potensi kekeringan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan banjir - Mengatasi banjir - dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan saluran pembuangan - Pembuatan waduk penampung, dll 	Rawa, DAS, sungai dan anak sungai tetap terjaga fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
b. Kekeringan		<ul style="list-style-type: none"> - Minimalisasi dampak kekeringan thd masyarakat dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem peringatan dini - Menyiapkan kebijakan thd kekeringan dan dampaknya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan kekeringan - Peringatan dini pada daerah pertanian thd pola tanam - Pembuatan saluran air untuk penduduk dan pertanian - dll 		<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
c. Tanah longsor		<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan tanah longsor - Pencegahan erosi tebing sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan longsor 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan - Terrasering - Pembuatan saluran pembuangan 		<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI
d. Erosi		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis/daerah rawan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkuatan tebing - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - dll. 		<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
e. Sedimentasi		<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi sedimentasi di sumber air dan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimalisasi kejadian banjir, erosi dan tanah longsor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah potensi sedimentasi - Normalisasi sungai - Pengerukan tanah pd daerah endapan/rendah, dll 		<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota: OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan: a. Limbah domestic rumah tangga	DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah tengah relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 - Minimasi lalu mengembangkan limbah cair domestik di sumber air - Menanggulangi dampak limbah domestik, dll - Pengelolaan tanah dan tanaman berbasis pertanian organik - Mengurangi dampak limbah pertanian thd sumber air - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 tentang baku mutu limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan lokasi pembuangan limbah cair domestik - Mengatasi dampak limbah domestik thd penyakit, dll - Sistem pertanian organik - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami - Pengelolaan limbah secara baik - Pencegahan pencemaran sumber air dari limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan MCK di sekitar rumah penduduk - Mengurangi MCK di sumber air dan sungai, dll. - Sistem pertanian organik - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami - Pembuatan pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah 	Limbah pencemar daerah hulu sungai perlu diminimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
b. Limbah Pertanian						
c. Limbah industri, rumah sakit						

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota: OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pemanfaatan Hutan/Lahan: a. Perkebunan b. Ladang berpindah c. Industri	Lahan dan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan tanaman pangan, peternakan relatif luas	- Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan industri	- Karakterisasi lahan sesuai peruntukan - Pemilihan jenis tanaman - Mengurangi kegiatan penduduk berladang - Memperkenalkan sistem pertanian menetap dan terpadu - Mengurangi dampak limbah dan polusi	- Klasifikasi kemampuan tanah - Pemilihan jenis tanaman - Kegiatan konservatif - Sistem perkebunan inti dan plasma - Pelatihan dan Percontohan pertanian menetap dan terpadu - Pengawasan dan pembinaan thd masyarakat peladang - Pemanfaatan Teknologi pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah	Terciptanya kawasan yang berbasis agroekosistem	- OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota: OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Upaya Pengelolaan dan perbaikan Lingkungan: a. Tata guna lahan	Lingkungan DAS dan sungai yang rusak relatif luas	- Memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya - Melestarikan tanaman asli	- Pemetaan kelas kemampuan tanah - Pemetaan lahan kritis	- Konservasi tanah - Karakterisasi lahan - Tanam sistem kontur - Penanggulangan lahan kritis - Penanaman tanaman produktif	Terciptanya lingkungan DAS yang lestari	- OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
b. Konservasi Tanah		- Konservasi tanah - Pengelolaan tanah	- Sistem pengolahan tanah - Pencegahan erosi tanah - Meningkatkan kesuburan tanah	- Konservasi tanah - Penghijauan - Reboisasi - Pengolahan tanah - Terasering		- OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
c. Bangunan konservasi		- Mengurangi dampak erosi dan banjir, dll - Meminimalisasi bahaya banjir thd pemukiman	- Membangun bangunan penahan erosi dan banjir - Mengurangi dampak banjir	- Dam dan waduk penampung banjir - Terrasering - Pembuatan saluran pembuang		- OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir
d. Penghijauan dan reboisasi		- Pengelolaan hutan	- Penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis/daerah rawan banjir	- Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan		- OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir

Pokok Bahasan Daerah Tengah
Kabupaten/ Kota : OKU, OKU Timur, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Lingkungan Sosial: a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Kelembagaan Pengelolaan air c. Peran serta masyarakat d. Sosialisasi Peraturan	Banyak masyarakat yang berdomisili di tepi sungai dan rawa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan atas hak tanah - Penguanan kelembagaan pengelola air - Peningkatan kesadaran masyarakat - Koordinasi antar sektor - Koordinasi antar wilayah - Partisipasi masyarakat dalam konservasi tanah, air dan hutan - Pengusaha dan masyarakat melindungi dan meningkatkan integritas ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan lahan secara tepat - Peningkatan produktivitas tanah rakyat - Pembuatan kelompok tani - Menguatkan komunikasi antar kelompok, dan pemerintah - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelembagaan lingkungan - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan sumber daya alam dan air - Meningkatkan sumberdaya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan - Peraturan dan kebijakan dilaksanakan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi kemampuan lahan masyarakat - Peningkatan kemampuan petani untuk mengelola tanahnya - Pemilihan tanaman - Mengaktifkan Kelompok tanah - Mengaktifkan hukum adapt - Pelatihan sumberdaya air - Pelatihan sistem penanggulangan banjir dan tanah longsor - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - Pelatihan sistem pertanian menetap - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - Partisipasi masyarakat dalam Penegakan peraturan - Sosialisasi peraturan dan kebijakan - Peran serta swasta dan masyarakat dalam pegekan peraturan 	Masyarakat memahami manfaat dan fungsi sungai dan rawa untuk kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir - OKU - OKU Timur - OKI - Ogan Ilir

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengelolaan Sumberdaya alam dan Air: a. Hutan	Sumber daya air tawar yang terdapat di sungai, rawa dan badan sungai lainnya cukup luas dan banyak	- PP No.18/1994 - Kepres No.32/1990 - Kepmen Pert No.54/Kpts/Um/2/ 1972 - Kepmenhut No.446/Kpts-II/1996	- Melestarikan hutan/vegetasi alami - Pencegahan degradasi lahan	- Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - Penelitian dan pengembangan hutan	Tetap berfungsi sumber daya air sebagai pendukung pertanian dan sektor lainnya	- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin
b. Sumber air		- Konservasi hutan - Pengelolaan sumber air, sungai, danau, dam, waduk - Pengelolaan air baku - Penyediaan air irigasi	- Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu - Melestarikan fungsi lingkungan sumber air - Pencegahan Pencemaran sumber air - Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas sumberdaya air, dll.	- Pemetaan lokasi daerah resapan - Penyelamatan danau - Pembangunan waduk resapan - Penelitian dan pengembangan SDA - Pemulihan fungsi sungai - Meningkatkan prodiktivitas sumber air melalui inovasi teknologi, dll.		- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin
c. Badan Air (Kualitas Air Baku)		- Konservasi air - PP No.20/1990 - PP No.82/2001 - Perda No.16/2005 - Perda No.18/2004	- Pelestarian dan perlindungan kualitas air - Pengelolaan limbah	- Inventarisasi potensi kualitas air dan potensi daya tampung sumber air - Pengawasan proses daur limbah dan potensi bahan pencemar - Pengamatan kualitas air secara berkelanjutan		- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Dampak Negatif Pengelolaan Lingkungan: a. Banjir b. Kekeringan c. Tanah longsor d. Erosi e. Sedimentasi	Rawa, DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah hulu relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian banjir - Menanggulangi dampak banjir - Minimalkan potensi kekeringan - Minimalisasi dampak kekeringan thd masyarakat dan lingkungan - Pencegahan tanah longsor - Pencegahan erosi tebing sungai - Pengelolaan hutan - Mengurangi sedimentasi di sumber air dan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan banjir - Mengatasi banjir - dll - Membangun sistem peringatan dini - Menyiapkan kebijakan thd kekeringan dan dampaknya - Pemetaan daerah rawan kekeringan - Peringatan dini pada daerah pertanian thd pola tanam - Pembuatan saluran air untuk penduduk dan pertanian - dll - Penghijauan - Terrasering - Pembuatan saluran pembuangan - Penguatan tebing - Penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis/daerah rawan banjir - Minimalisasi kejadian banjir, erosi dan tanah longsor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan saluran pembuangan - Pembuatan waduk penampung, dll - Pemetaan daerah rawan banjir - Peringatan dini pada daerah pertanian thd pola tanam - Pembuatan saluran air untuk penduduk dan pertanian - dll - Penghijauan - Terrasering - Pembuatan saluran pembuangan - Penguatan tebing - Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan - dll - Pemetaan daerah potensi sedimentasi - Normalisasi sungai - Pengurukan tanah pd daerah endapan/rendah, dll 	<ul style="list-style-type: none"> Rawa, DAS, sungai dan anak sungai tetap terjaga fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan: a. Limbah domestik rumah tangga b. Limbah Pertanian c. Limbah industri, rumah sakit	DAS, sungai dan anak sungai yang terdapat di daerah hulu relatif luas dan banyak	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 - Minimasi limbah cair domestik di sumber air - Menanggulangi dampak limbah domestik, dll - Pengelolaan tanah dan tanaman berbasis pertanian organik - Mengurangi dampak limbah pertanian thd sumber air - Perda Sumsel No.18 Tahun 2005 tentang baku mutu limbah cair 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan lokasi pembuangan limbah cair domestik - Mengatasi dampak limbah domestik thd penyakit, dll - Sistem pertanian organik - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami - Pengelolaan limbah secara baik - Pencegahan pencemaran sumber air dari limbah industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan MCK di sekitar rumah penduduk - Mengurangi MCK di sumber air dan sungai, dll. - Sistem pertanian organik - Pencegahan pemakaian pestisida dan pupuk berlebihan - Meningkatkan kesuburan tanah alami - Pembuatan pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah 	Limbah pencemar daerah hulu sungai perlu diminimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Pemanfaatan Hutan/Lahan: a. Perkebunan b. Ladang berpindah c. Industri	Lahan dan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan tanaman pangan, peternakan relatif luas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan agroekosistem - Pengembangan kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakterisasi lahan sesuai peruntukan - Pemilihan jenis tanaman - Mengurangi kegiatan penduduk berladang - Memperkenalkan sistem pertanian menetap dan terpadu - Mengurangi dampak limbah dan polusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi kemampuan tanah - Pemilihan jenis tanaman - Kegiatan konservatif - Sistem perkebunan inti dan plasma - Pelatihan dan Percontohan pertanian menetap dan terpadu - Pengawasan dan pembinaan thd masyarakat peladang - Pemanfaatan Teknologi pengolahan limbah - Pembuatan rawa buatan - Pengawasan BMLC secara berkelanjutan - Penelitian tentang potensi pemanfaatan limbah 	Terciptanya kawasan yang berbasis agroekosistem	<ul style="list-style-type: none"> - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota: Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Upaya Pengelolaan dan perbaikan Lingkungan: a. Tata guna lahan	Lingkungan DAS dan sungai yang rusak relatif luas	- Memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya - Melestarikan tanaman asli	- Pemetaan kelas kemampuan tanah - Pemetaan lahan kritis	- Konservasi tanah - Karakterisasi lahan - Tanam sistem kontur - Penanggulangan lahan kritis - Penanaman tanaman produktif	Terciptanya lingkungan DAS yang lestari	- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin
b. Konservasi Tanah		- Konservasi tanah - Pengelolaan tanah	- Sistem pengolahan tanah - Pencegahan erosi tanah - Meningkatkan kesuburan tanah	- Konservasi tanah - Penghijauan - Reboisasi - Pengolahan tanah - Terasering		- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin
c. Bangunan konservasi		- Mengurangi dampak erosi dan banjir, dll - Meminimalisasi bahaya banjir thd pemukiman	- Membangun bangunan penahan erosi dan banjir - Mengurangi dampak banjir	- Dam dan waduk penampung banjir - Terrasering - Pembuatan saluran pembuang		- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin
d. Penghijauan dan reboisasi		- Pengelolaan hutan	- Penghijauan dan reboisasi pada lahan kritis/daerah rawan banjir	- Konservasi hutan - Reboisasi - Penghijauan		- Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

Pokok Bahasan Daerah Hilir
Kabupaten/ Kota : Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
Lingkungan Sosial: a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Kelembagaan Pengelolaan air c. Peran serta masyarakat d. Sosialisasi Peraturan	Banyak masyarakat yang berdomisili di tepi sungai dan rawa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan atas hak tanah - Penguatan kelembagaan pengelola air - Peningkatan kesadaran masyarakat - Koordinasi antar sektor - Koordinasi antar wilayah - Partisipasi masyarakat dalam konservasi tanah, air dan hutan - Pengusaha dan masyarakat melindungi dan meningkatkan integritas ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan lahan secara tepat - Peningkatan produktivitas tanah rakyat - Pembuatan kelompok tani - Meingkatkan komunikasi antar kelompok, dan pemerintah - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelembagaan lingkungan - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan sumber daya alam dan air - Meningkatkan sumberdaya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan - Peraturan dan kebijakan dilaksanakan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi kemampuan lahan masyarakat - Peningkatan kemampuan petani untuk mengelola tanahnya - Pemilihan tanaman - Mengaktifkan Kelompok tanah - Mengaktifkan hukum adat - Pelatihan sumberdaya air - Pelatihan sistem penanggulangan banjir dan tanah longsor - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - Pelatihan sistem pertanian menetap - Pemberdayaan masyarakat thd kelestarian hutan, tanah dan air - partisipasi masyarakat dalam Penegakan peraturan - Sosialisasi peraturan dan kebijakan - Peran serta swasta dan masyarakat dalam pegekan peraturan 	Masyarakat memahami manfaat dan fungsi sungai dan rawa untuk kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> - Palembang - Banyuasin - Musi Banyuasin

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN

RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung Irigasi lahan pertanian 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses (jalan poros desa) daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan kawasan agropolitan Pembangunan pabrik CPO & crumb rubber Pembangunan & rehabilitas jaringan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan pelayanan Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Baturaja & Batumarta Agropolitan di Batumarta

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Beberapa ruas jalan rusak Kekurangan sumberdaya listrik Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitas jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Martapura Pasar tradisional di tiap kecamatan Agropolitan di Martapura Jalan Martapura – Muara Dua

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Muara Dua & Pulo Beringin Pasar tradisional di tiap kecamatan Agropolitan di Pulo Beringin Jalan Muara Dua – Banding Agung

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Di kawasan timur masih banyak desa yang sulit dicapai Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan karet, sawit, hortikultura, perikanan laut, tambak, perairan umum, pertanian tanaman pangan, peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan penanggulangan kebakaran hutan Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan dermaga sungai Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi desa Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agropolitan Pembangunan TPI 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pasar tradisional di tiap kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Tugu Mulyo, Lempuing Agropolitan di Tugu Mulyo, Lempuing Jalan Lintas Timur Burnai – Pematang Panggang Dermaga sungai di tiap kecamatan

KABUPATEN OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah 	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan penanggulangan kebakaran hutan Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan dermaga sungai Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agro teknopark Pembangunan workshop & bengkel alat pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pasar tradisional di tiap kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Inderalaya Agro Tekno Park di Payakabung Workshop & Bengkel di kecamatan Tanjung Batu Dermaga sungai di tiap kecamatan

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan pembangkit listrik Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Muara Enim Pasar tradisional di tiap kecamatan Pembangkit listrik di Tanjung Enim Jalan Tanjung Enim – Pengandonan

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Lahat Pasar tradisional di tiap kecamatan Jalan Lintas Sumatera Lahat – Tebing Tinggi

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Banyak desa belum dilistriki Penyediaan air bersih terutama perdesaan masih kurang, banyak penduduk masih menggunakan air sungai langsung 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan dermaga sungai Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agropolitan Pembangunan pabrik CPO & crumb rubbe 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jalan Surulangun-Napal Licin Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Tugu Mulyo & Muara Beliti Pasar tradisional di tiap kecamatan Agropolitan di Tugu Mulyo Dermaga sungai di kecamatan Rawas Ulu & Ulu Rawas

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Masih ada beberapa wilayah yang aksesibilitasnya rendah Masih banyak desa yang belum dilistriki Penyediaan air bersih untuk perkotaan dan perdesaan belum memadai 	Perkebunan karet, sawit, pertanian tanaman pangan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan penanggulangan kebakaran hutan Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan dermaga sungai Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Sekayu Pasar tradisional di tiap kecamatan Dermaga sungai di tiap kecamatan Jalan Betung – Sekayu – Muara Lakitan

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumber daya listrik Irigasi masih bersifat tada hujan Banyak desa yang sulit dijangkau Penyediaan air bersih belum memenuhi kebutuhan 	Pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. Meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Peningkatan akses daerah terpencil Peningkatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan Peningkatan listrik perdesaan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan penanggulangan kebakaran hutan Pembangunan terminal barang dan penumpang Pembukaan jalan baru Peningkatan jalan yang sudah ada Pembangunan dermaga sungai Pembangunan listrik perdesaan Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih di perdesaan Pembangunan & rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan Agropolitan Pembangunan TPI 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan produksi pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan poros desa seluruh kecamatan Jaringan irigasi seluruh kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan di Pangkalan Balai & Betung Pasar tradisional di tiap kecamatan Dermaga sungai di tiap kecamatan Jalan Lintas Timur Pangkalan Balai – Betung – S. Lilin – Bayung Lincir Jalan Gasing-Tj. Api api Pelabuhan Tj. Api api

KOTA PALEMBANG

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan transportasi belum terpadu Kekurangan sumberdaya listrik Pelayanan air bersih belum merata 	Pertanian tanaman pangan, peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Meningkatkan pelayanan air bersih Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Penanganan drainase kota Peningkatan kapasitas dan jaringan distribusi air bersih Peningkatan infra struktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan <i>masterplan</i> transportasi, <i>masterplan</i> drainase, <i>masterplan</i> penanggulangan kebakaran Penataan titik persimpangan Pembangunan <i>fly over</i> Pembangunan jembatan Musi III & Musi IV Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan pipa distribusi air bersih Pembangunan saluran drainase dan pintu air Pembangunan pabrik CPO dan <i>crumb rubber</i> Pembangunan pasar tradisional Pembangunan kawasan agropolitan Pembangunan kebun bibit (unggul) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelayanan Transportasi Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Peningkatan pengolahan produk pertanian Peningkatan pemasaran produk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana perdagangan di Seberang Ulu <i>Flyover</i> di Simp. Charitas & Simp. Polda Musi III di sekitar Pasar Kuto & Musi IV sekitar Tangga Buntung CPO dan <i>Crumb Rubber</i> di kaw. Pulo Kerto Pasar tradisional di tiap kecamatan Agropolitan di Pulo Kerto Kebun Bibit di Pulo Kerto

KOTA PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Prasarana sektor perkotaan berupa fasilitas perdagangan dan jasa belum bisa memenuhi kebutuhan wilayah hinterland 	Hortikultura, perkebunan karet, pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Meningkatkan pelayanan air bersih Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Penanganan drainase kota Peningkatan kapasitas dan jaringan distribusi air bersih Peningkatan infra struktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi, masterplan drainase Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan pipa distribusi air bersih Pembangunan saluran drainase Pembangunan pasar tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana perdagangan di Cambai Pasar tradisional di tiap kecamatan Jalan poros desa di Rambah Kapak Tengah & Cambai Jalan Lingkar Prabumulih

KABUPATEN PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Nilai indeks aksesibilitas rendah Kekurangan sumberdaya listrik Prasarana sektor perkotaan berupa fasilitas perdagangan dan jasa belum bisa memadai 	Perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Meningkatkan pelayanan air bersih Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Penanganan drainase kota Peningkatan kapasitas dan jaringan distribusi air bersih Peningkatan infra struktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan drainase Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan pipa distribusi air bersih Pembangunan saluran drainase Pembangunan jaringan irigasi Pembangunan kawasan agropolitan dan agrowisata Pembangunan BBI ikan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana perdagangan di Benua Keling Pasar tradisional di tiap kecamatan Jalan poros desa & jembatan di tiap kecamatan Irigasi di tiap kecamatan Agropolitan di Atung Bungsu BBI di Dempo Selatan

KABUPATEN LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan transportasi dan angkutan umum masih terbatas Kekurangan sumberdaya listrik Pelayanan air bersih kurang Prasarana sektor perkotaan berupa fasilitas perdagangan dan jasa belum bisa memenuhi kebutuhan wilayah <i>hinterland</i> 	Perkebunan karet, kehutanan, pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan kawasan Meningkatkan pelayanan air bersih Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi. Meningkatkan infrastruktur permukiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan sistem transportasi Penanganan drainase kota Peningkatan kapasitas dan jaringan distribusi air bersih Peningkatan infra struktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan masterplan transportasi & masterplan drainase Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan pipa distribusi air bersih Pembangunan saluran drainase Pembangunan terminal peti kemas 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan transportasi Peningkatan dan pemerataan penyediaan air bersih Peningkatan pelayanan listrik Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar tradisional di tiap kecamatan Pembangunan prasarana perdagangan Lubuk Linggau Timur terminal peti kemas di Lubuk Linggau Barat

MATRIK MASTERPLAN SUMATERA SELATAN LUMBUNG PANGAN RENCANA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Permasalahan	Potensi Pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi Lahan • Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 2.458 ha; kaw. hutan dgn perkebunan 2.459,42 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 2.604,09 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan • Status Kepemilikan • Pembangunan Sektoral • Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan • Perikanan • Peternakan • Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan potensi sumberdaya • Berkelanjutan • Berwawasan lingkungan • Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya • Meningkatkan kemandirian • Memacu pengembangan wisata alam • Mempercepat agroindustri dan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung • Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan • Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan • Mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis yang produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung • Pengembangan wanafarma, ekowisata, & <i>agroforestry</i> • Pengembangan Daerah Aliran Sungai • Pembangunan terminal/sub terminal agribisnis • Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penggunaan lahan • Proteksi lahan tanaman pangan • Kepemilikan lahan jelas • Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung G. Raya & kaw. Lainnya • Proteksi lahan tanaman pangan di seluruh • Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan • Kawasan agropolitan di Batumarta • Agroindustri di Baturaja • Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan.

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 2.004,84 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 876,56 ha Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan Mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis yang produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan terminal/sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Sub Terminal Agribisnis di Martapura Agropolitan di Martapura RTRK & RDTR di seluruh wilayah kecamatan Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan Pemantapan kaw. Lindung & budidaya di seluruh kab.

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan perkebunan 1.436,29 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 2.298,07 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan pemanfaatan potensi hutan produksi Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> RTRK & RDTR di seluruh wilayah kecamatan. Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan Agropolitan di Pulo Beringin Pemantapan kaw. lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Rehabilitasi lahan di seluruh kecamatan

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan perkebunan 7.027,79 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan pemanfaatan potensi hutan produksi Penetapan sentra hutan dengan basis industri PULP Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan Mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis yang produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan fas. Perdagangan di Lempuing Agropolitan di Lempuing

KABUPATEN OGAN ILIR

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi Lahan • Status Kepemilikan • Pembangunan Sektoral • Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saling d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan • Perikanan • Peternakan • Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan potensi sumberdaya • Berkelanjutan • Berwawasan lingkungan • Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya • Pengembangan Bidang unggulan • Meningkatkan kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan • Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Daerah Aliran Sungai • Pembangunan sub terminal agribisnis • Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan • Agro Tekno Park 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penggunaan lahan • Proteksi lahan tanaman pangan • Kepemilikan lahan jelas • Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. • Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan • Pembangunan fas. Perdagangan di Indralaya • Agro Tekno Park di Payakabung

KABUPATEN MUARA ENIM

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kaw. perkebunan dgn pertambangan 12.457,59 ha; kawasan hutan dengan perkebunan 9.750,36 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 12.409,55 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri Mengangkat potensi energi kelistrikan dan bahan bakar 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan pemanfaatan potensi hutan produksi Penetapan sentra hutan dengan basis industri PULP Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan fas. Perdagangan di Muaraenim Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan

KABUPATEN LAHAT

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kaw. perkebunan dgn pertambangan 2.025 ha; kawasan hutan dengan perkebunan 5.206,10 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 144,61 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi Kawasan Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri Mengangkat potensi energi kelistrikan dan bahan bakar 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan fas. Perdagangan di Lahat Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan

KABUPATEN MUSI RAWAS

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 1.656,91 ha; kawasan hutan dengan perkebunan 4.298,71 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 1.525,35 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan pemanfaatan potensi hutan produksi Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan Mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis yang produktif 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan wanafarmasi, ekowisata, & agroforestry Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pembangunan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan Kota baru di Muara Keligi Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan Agropolitan di Tugu Mulyo Pembangunan wisata alam di TNKS / Napal Licin

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 22.743,90 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 15.947,56 ha Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan pemanfaatan potensi hutan produksi Penetapan sentra hutan dengan basis industri PULP Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan terminal/sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan fas. Perdagangan di Sekayu Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan

KABUPATEN BANYUASIN

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 562,27 ha; kawasan hutan dengan perkebunan 1.636,02 ha; kawasan hutan dgn pertambangan 446,19 ha; kawasan Lindung dgn perkebunan Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) & kehutanan Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pembangunan kawasan agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Pembangunan fas. Perdagangan di Betung dan Pangkalan Balai Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan

KOTA PALEMBANG

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi Lahan • Status Kepemilikan • Pembangunan Sektoral • Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Pangan • Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan potensi sumberdaya • Berkelanjutan • Berwawasan lingkungan • Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya • Pengembangan Bidang unggulan • Meningkatkan kemandirian • Memacu wisata sungai • Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung • Pengembangan agropolitan • Pembangunan Kebun Bibit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung • Pengembangan Daerah Aliran Sungai • Pembangunan terminal agribisnis • Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Pemasaran Produk Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penggunaan lahan • Proteksi lahan tanaman pangan • Kepemilikan lahan jelas • Terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> • Agropolitan di Pulo Kerto

KOTA PRABUMULIH

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perkebunan dgn pertambangan 999,52 ha; kaw hutan dengan perkebunan 146,51 ha Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Perkebunan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Daerah Aliran Sungai Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan

KOTA PAGAR ALAM

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan perkebunan 144,90 ha Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian Memacu wisata alam Mempercepat agroindustri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) Ekstensifikasi, Intensifikasi & diversifikasi tanaman & Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan wanafarmasi, ekowisata, & agroforestry Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan sub terminal agribisnis Penyusunan RTR Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan Agropolitan di Atung Bungsu Pembangunan wisata alam di Gunung Dempo

KOTA LUBUK LINGGAU

Permasalahan	Potensi pengembangan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> Alih Fungsi Lahan Konflik pemanfaatan lahan antara kawasan hutan dengan perkebunan 732,13 ha Status Kepemilikan Pembangunan Sektoral Struktur Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarkhi Pelayanan b. Zonasi K. Budidaya c. Daya Saing d. Aksesibilitas e. Prasarana lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan potensi sumberdaya Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Memperluas kawasan yang berfungsi lindung & menjaga kualitasnya Pengembangan Bidang unggulan Meningkatkan kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuhan, rehabilitasi & konservasi kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan, penataan batas & pemetaan kawasan lindung Pengembangan Daerah Aliran Sungai Pembangunan terminal agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penggunaan lahan Proteksi lahan tanaman pangan Kepemilikan lahan jelas Program pembangunan terpadu dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kaw lindung & budidaya di seluruh kecamatan. Penyusunan RTRK & RDTR di seluruh kecamatan Sertifikasi lahan di seluruh kecamatan Pembangunan wisata alam di Bukit Sulap